



UNIVERSITAS INDONESIA

**FENOMENA “ORANG KUAT LOKAL” DI INDONESIA ERA
DESENTRALISASI**

**STUDI KASUS TENTANG DINAMIKA KEKUASAAN
ZULKIFLI NURDIN DI JAMBI**

TESIS

**MELVIN PERJUANGAN HUTABARAT
0906501831**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK
JAKARTA
2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Melvin Perjuangan Hutabarat
NPM : 0906501831
Tanda Tangan : 
Tanggal : Senin, 9 April 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Melvin Perjuangan Hutabarat
NPM : 0906501831
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Tesis : Fenomena "Orang Kuat Lokal" di
Indonesia Era Desentralisasi : Studi Kasus
tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli
Nurdin di Jambi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Politik (M.IP) pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Dewan Penguji

Pembimbing : Irwansyah, S.IP. M.A ()

Penguji : Dr. Valina Singka, M.Si ()

Penguji : Dr. Lili Romli, M.Si ()

Penguji : Syaiful Bahri, S.Sos, M.Si ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Senin, 9 April 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat, kasih dan kemurahan hati-Nya, penulisan Tesis yang berjudul Fenomena "Orang Kuat Lokal" di Indonesia Era Desentralisasi : Studi Kasus Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin di Jambi akhirnya selesai ditulis dan dipertahankan untuk meraih gelar Magister Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2012.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini tentu banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik tetap terbuka kepada penulis untuk perbaikan. Semoga penulis lain yang hendak menulis tentang kekuasaan Zulkifli Nurdin di Jambi dapat menulis dengan lebih baik.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Irwansyah, S.IP, M.A selaku pembimbing yang telah mengalokasikan waktunya untuk memberikan panduan dan pencerahan serta kritik yang konstruktif untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Terimakasih juga diucapkan kepada Ibu Dr. Valina Singka, M.Si, Ibu dan Syaiful Bahri, S.Sos. M.Si selaku Ketua Program dan Sekretaris Program pada Program Pascasarjana Ilmu Politik yang memberikan informasi dan motivasi selama mengikuti pendidikan. Tidak lupa Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Lili Romli, M.Si yang bersedia menjadi penguji ahli.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada staf pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan kepada staf administrasi yang memberikan bantuan informasi kepada penulis. Terimakasih juga diucapkan kepada sahabat-sahabat terbaik penulis di kampus salemba, Sulaisi Abdurrazaq, Ujang, Evi Kurniaty, Magdalena Sihite, Kakak Agusmawanda, Mas Joko Parwoto, Yana Syafriyana, Idil Akbar, Rico Valentino, Mas Ganjar Pranowo, Habibie Kurniawan, Abang Supriyadi, Abang Mayor Andi Darlis, Yudhanty, Ana Sabhana Azmy, Kris Priatmoko, Heri Purwanto, Mas Arifin, Adistiana Prahara dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Fauzi Anshori, Kepala

Bappeda Provinsi Jambi yang telah membantu keluarnya beasiswa dan surat tugas belajar dari Pemerintah Provinsi Jambi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudara, sahabat dan mentor yang telah membantu penulis selama tugas belajar hingga penyelesaian tesis ini. Terimakasih kepada *Naboru* Driani Panjaitan, Abang Ikhsan, Mardoni Setiawan, Jogi Sirait, Gordon Tobing, *Bapak Uda* Hotman Sitanggang, Ikhsan Darmawan, Abdul Hamid, Made Tony Supriatma, Andi Rahman, Aditya Muharram, Jakfar Sidiq, Daniel Hutagalung dan Samuel Gultom.

Terakhir, secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga tercinta di Jambi terutama ibunda tercinta Stella Havelina Nainggolan Lumbanraja dan ayahanda Ir. Pahantus Maruli Hutabarat, M,Si atas cinta kasihnya kepada penulis. Ucapan terimakasih juga diberikan secara istimewa kepada *amang* Osman Sibarani dan *inang* Syamsinar Simanjuntak atas pengertian, dukungan dan doa selama penulis menjalani pendidikan. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang luar biasa kepada istri tercinta Oni Frida Sibarani, yang sedang mengandung calon *boru* kami, yang telah mengirimkan cinta dan doa yang tak henti kepada penulis.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan hal yang baik dan terbaik atas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis. Amin. Tuhan memberkati.

Salemba, 9 April 2012



(Melvin Perjuangan Hutabarat)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPERLUAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Melvin Perjuangan Hutabarat
NPM : 0906501831
Program Studi : Ilmu Politik
Departemen : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusivity Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Fenomena "Orang Kuat Lokal" di Indonesia Era Desentralisasi : Studi Kasus Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin di Jambi

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : Jakarta

Pada tanggal : 9 April 2012

Yang menyatakan,



(Melvin Perjuangan Hutabarat)

ABSTRAK

Nama : Melvin Perjuangan Hutabarat
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Fenomena "Orang Kuat Lokal" di Indonesia Era Desentralisasi : Studi Kasus Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin di Jambi, xvi + 163 halaman, 75 buku dan 28 wawancara narasumber.

Penelitian ini hendak mengetahui fenomena Zulkifli Nurdin sebagai "orang kuat lokal" di Jambi era desentralisasi. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori mengenai "orang kuat lokal", teori mengenai "bossisme lokal" dan teori mengenai "orang kuat lokal" yang predator.

Hasil wawancara mendalam dan studi dokumen memperlihatkan Zulkifli Nurdin berhasil muncul sebagai "orang kuat lokal" di Jambi era desentralisasi. Keberhasilan Zulkifli Nurdin tersebut disebabkan karena dia berasal dari keluarga pengusaha pribumi melayu terkaya di Jambi, Nurdin Hamzah dan menguasai organisasi pengusaha seperti Kadin dan Gapensi di Jambi. Zulkifli Nurdin juga tepat memilih partai PAN yang dipersepsi sebagai partai reformis. Selain itu, Zulkifli Nurdin juga terbantu dengan kondisi gerakan sosial di Jambi cenderung mengecil dan tidak bisa masuk ke dalam pertarungan politik era desentralisasi.

Zulkifli Nurdin berhasil memanfaatkan jabatannya sebagai Gubernur Jambi dalam membangun kekuatan ekonomi dan politik yang besar di Jambi. Zulkifli Nurdin berhasil membesarkan Partai Amanat Nasional menjadi partai besar di Jambi dan didukung oleh DPRD Provinsi Jambi dalam mengeluarkan kebijakan. Zulkifli Nurdin juga berhasil memanfaatkan birokrasi untuk menggalang suara, mendapatkan dana dari proyek pemerintah dan mengatur pejabat-pejabat yang setia kepadanya serta menjalin kedekatan dengan penyelenggara pemilu di Jambi. Model pembangunannya membuat dirinya memperoleh keuntungan dari bisnis perizinan pengelolaan sumber daya alam di Jambi.

Pengaruh Zulkifli Nurdin juga besar dalam politik lokal di Jambi. Zulkifli Nurdin berhasil melakukan kontrol sosial atas masyarakat Jambi. Zulkifli Nurdin berhasil melemahkan gerakan sosial di Jambi dan mengontrol organisasi kekerasan di Jambi. Zulkifli Nurdin juga berhasil memengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Walikota di Jambi dan mendominasi Partai Amanat Nasional di Jambi.

Implikasi teoritis memperlihatkan bahwa Zulkifli Nurdin tidak sepenuhnya menjadi "orang kuat lokal" karena Zulkifli Nurdin juga memenuhi beberapa kriteria "bossisme lokal" dan beberapa kriteria "orang kuat lokal yang predator". Fenomena Zulkifli Nurdin lebih tepat dikatakan sebagai "Kuasi-Orang Kuat Lokal". Temuan dalam penelitian ini secara umum juga ditemukan dalam penelitian mengenai "orang kuat lokal" di daerah lain atau di negara lain seperti Filipina dan Thailand.

Kata Kunci :

"Orang Kuat Lokal", Kekuasaan, Desentralisasi, Jambi

ABSTRACT

Name : Melvin Perjuangan Hutabarat
Department : Political Science
Judul : "Local Strongmen" Phenomena in Indonesia's Era of Decentralization : Case Study of Zulkifli Nurdin's Dynamic of Power in Jambi, xvi + 163 pages, 75 books and 28 interviews with resource persons.

This research aims to explore the phenomena of Zulkifli Nurdin as a "Local Strongmen" in Jambi within the era of decentralization. The researcher deploys a qualitative method using in deep interview and document study approaches. Theories used in this research are "local strongmen", "local bossism" and theory on predatory "local strongmen".

In deep interviews and document study results showed Zulkifli Nurdin succeeds in emerging as a "local strongmen" in Jambi during the era of decentralization. Zulkifli Nurdin's success attributed to the his origin from a wealthies local malay entrepreneur in Jambi, Nurdin Hamzah and controls entrepreneurs organization such as the Chamber of Commerce (Kamar Dagang dan Industri Indonesia-Kadin) and the Association of Indonesia's Entrepreneurs (Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia-Gapensi) in Jambi. Zulkifli Nurdin also choose the suitable party, The National Mandate Party (Partai Amanat Nasional), as it is perceived as a reformist party. Zulkifli Nurdin was favored by the social movement condition in Jambi that has shrunken and could not enter to the political contestation arena during the decentralization era.

Furthermore, Zulkifli Nurdin succeeds in using his position as the Governor of Jambi in building a strong political and economical power. He managed to raise the National Awakening Party into a strong party in Jambi and his policies are strongly supported by the Regional Parliament of Jambi Provinces. He also succeeds in using the bureaucracy to mobilize votes, acquire funds from the government's project, control bureaucrats that loyal to him and established close relationship with the election body in Jambi. His development programme is in his favor by granting him profits from natural resource exploration permit in Jambi.

Zulkifli Nurdin's influence is also strong in Jambi's local politics. He manages to carries out social control over the Jambi populations. He succeeds in making the social movements weaker and controls the vigilante organization. He also succeeds in influencing the result of Head of Regents and Mayors in Jambi and become a dominant figure in The Jambi National Mandate Party.

Theoretical implications of this research show that Zulkifli Nurdin not entirely become as a "local strongmen" because the phenomena of Zulkifli Nurdin also meet the certain criteria of "local bossism" and predatory "local strongmen". His phenomena is more correct to say as a "Quasi-Local Strongmen". Findings of this research can also be found in other researches on "local strongmen" in other region or state such as the Philippines and Thailand.

Keyword :

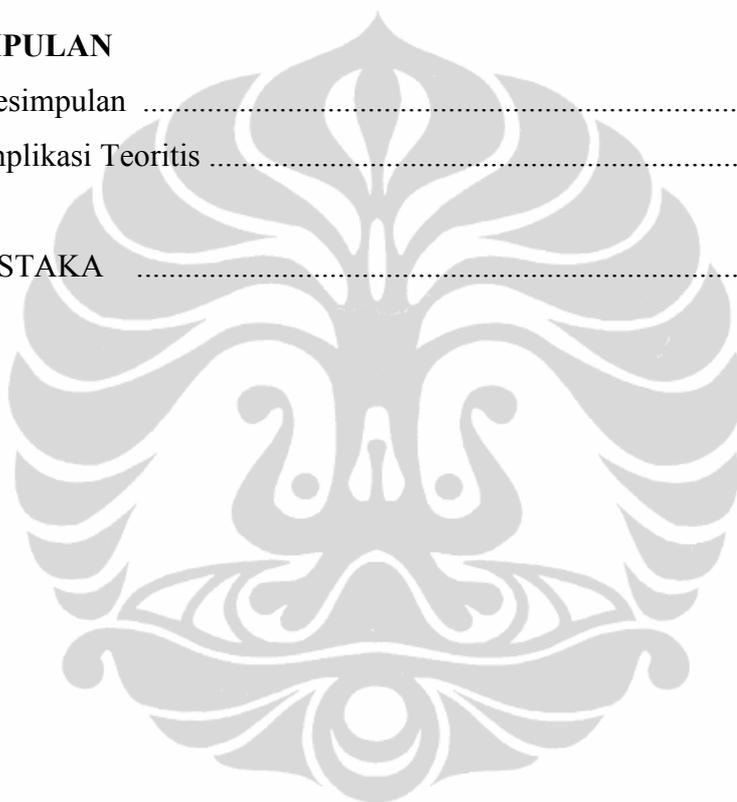
"Local Strongmen", Power, Decentralization, Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vx
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.4 Kajian Literatur	13
1.5 Kerangka Teori	17
1.6 Metode Penelitian	33
1.7 Sistematika Penulisan	35
2. KEMUNCULAN ZULKIFLI NURDIN SEBAGAI “ORANG KUAT LOKAL” DI JAMBI	
2.1 Sejarah Singkat Provinsi Jambi	37
2.2 Kebangkitan “Orang Kuat Lokal” di Jambi	46
2.3 Kompromi dan Kompetisi “Orang Kuat Lokal” di Jambi	55
2.4 “Orang Kuat Lokal” dari Keluarga Nurdin Hamzah	59
2.5 Peta Jaringan Kekuasaan Zulkifli Nurdin	64
3. ZULKIFLI NURDIN DAN PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 1999 DAN 2005	
3.1 Strategi dalam Pemilihan Gubernur	67

3.1.1	Pemilihan Gubernur tahun 1999	67
3.1.2	Pemilihan Gubernur tahun 2005	71
3.2	Membangun Kekuasaan Politik	75
3.2.1	Membesarkan Partai Amanat Nasional	75
3.2.2	Mendapatkan Dukungan dari DPRD Provinsi Jambi	78
3.2.3	Memanfaatkan Birokrasi Pemerintah Daerah	80
3.2.4	Menjadi Patron dan Broker Kekuasaan bagi Bupati dan Walikota ..	82
3.2.5	Menjalinkan Kedekatan dengan Penyelenggara Pemilu	84
3.3	Politik Uang dan Pengumpulan Dana yang Menyimpang	85
3.3.1	Politik Uang	85
3.3.2	Pengumpulan Dana yang Menyimpang	90
3.4	Model Pembangunan Zulkifli Nurdin	93
3.4.1	Berpihak ke Korporasi Besar	93
3.4.2	Proyek Besar yang Bermasalah	105
3.4.3	Kasus Waterboom dan Kasus Mess Pemda Jambi	107
3.4.4	Menyulut Konflik dengan Masyarakat	108
4	PENGARUH ZULKIFLI NURDIN DALAM POLITIK LOKAL DI JAMBI	
4.1	Menjalankan Kontrol Atas Masyarakat Jambi	113
4.1.1	Citra Keluarga Dermawan	113
4.1.2	Kontrol terhadap LSM lokal di Jambi	115
4.1.3	Meredam Jurnalis dengan Iklan	117
4.1.4	Memobilisasi Dukungan Paguyuban Etnis	119
4.1.5	Memanipulasi Legitimasi Relijius	121
4.1.6	Merekrut Aktivis Gerakan Reformasi 98	122
4.2	Melemahkan Gerakan Sosial di Jambi	124
4.2.1	Persatuan Petani Jambi (PPJ) dan Gerakan Petani di Jambi	124
4.2.2	Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Gerakan Buruh di Jambi	131
4.3	Dukungan dari Kelompok Kekerasan di Jambi	134
4.4	Penguasa Tanjung Jabung Timur	138

4.5	Pengaruh Zulkifli Nurdin dalam Pilkada	141
4.5.1	Pemilihan Walikota Kota Jambi Tahun 2008	141
4.5.2	Pemilihan Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2011	142
4.6	Dominasi Keluarga Nurdin Hamzah di Partai Amanat Nasional	144
4.6.1	Hazrin Nurdin menjadi Ketua DPW PAN Provinsi Jambi	144
4.6.2	Ratu Munawaroh terpilih menjadi Anggota DPR RI Dapil Jambi ..	145
4.6.3	Zumi Zola Calon Gubernur Jambi Tahun 2015	146
5	KESIMPULAN	
5.1	Kesimpulan	152
5.2	Implikasi Teoritis	154
	DAFTAR PUSTAKA	156



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	"Orang Kuat Lokal" di Thailand	3
Tabel 1.2	"Orang Kuat Lokal" di Filipina	4
Tabel 1.3	Silsilah Keluarga Yasin Limpo	7
Tabel 1.4	Silsilah Keluarga Tubagus Chasan Chosib	7
Tabel 1.5	Perbandingan "Orang Kuat Lokal", "Bossisme Lokal" dan "Orang Kuat Lokal" yang Predator	31
Tabel 2.1	Nama 11 Orang Staf Acting Gubernur Provinsi Jambi	41
Tabel 2.2	Perolehan Kursi DPRD Provinsi Jambi Pemilu 1955	42
Tabel 2.3	Gubernur-Gubernur Provinsi Jambi	43
Tabel 2.4	Ketua-Ketua DPRD Provinsi	45
Tabel 2.5	Hasil Perolehan Suara untuk DPR RI pada Pemilu Tahun 1977-1997	45
Tabel 2.6	Hasil Perolehan Suara untuk DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu 1977-1997	46
Tabel 2.7	Hasil Perolehan Suara untuk DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu 1999	47
Tabel 2.8	Silsilah Keluarga Haji Abdul Manap	50
Tabel 2.9	Silsilah Keluarga Nurdin Hamzah	51
Tabel 2.10	Simbol-Simbol Kebesaran Keluarga Nurdin Hamzah	52
Tabel 2.11	Perusahaan Keluarga Nurdin Hamzah	60
Tabel 2.12	Peta Jaringan Kekuasaan Zulkifli Nurdin	66
Tabel 3.1	Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi tahun 1999	68
Tabel 3.2	Lima Besar Perolehan Suara Partai Politik di Jambi Hasil Pemilu 1999	69
Tabel 3.3	Distribusi Suara untuk Zulkifli Nurdin dalam Pemilihan Gubernur Jambi tahun 1999	70

Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Bekerja, Pengangguran dan Bukan Angkatan Kerja tahun 2005	72
Tabel 3.5	Estimasi Jumlah Penduduk Miskin Pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005	72
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk dan Golongan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Tahun 2005	73
Tabel 3.7	Lima Besar Perolehan Suara Partai Politik di Jambi Hasil Pemilu 2004	74
Tabel 3.8	Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Jambi tahun 2005	74
Tabel 3.9	Perolehan Kursi PAN di DPRD Provinsi Jambi Pada Pemilu Tahun 1999 hingga Pemilu Tahun 2009	76
Tabel 3.10	Perolehan Kursi PAN di DPRD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Pada Pemilu Tahun 1999 hingga Pemilu Tahun 2009	76
Tabel 3.11	Jumlah Perda dan Keputusan Daerah tahun 2004-2009	79
Tabel 3.12	Struktur APBD 2001-2004 (dalam juta)	79
Tabel 3.13	Struktur APBD 2005-2009 (dalam juta)	80
Tabel 3.14	Pemilihan Bupati dan Walikota di Provinsi Jambi tahun 2006-2008	84
Tabel 3.15	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2001-2010	94
Tabel 3.16	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005, 2007 dan 2008	95
Tabel 3.17	Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Jambi Tahun 2009	96
Tabel 3.18	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2004-2005 (dalam juta rupiah)	97
Tabel 3.19	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006-2007 (dalam juta rupiah)	98
Tabel 3.20	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2009	

(dalam juta rupiah)	99
Tabel 3.21 Izin Pengelolaan HTI di Provinsi Jambi tahun 1995-2010	101
Tabel 3.22 Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi	102
Tabel 3.23 Jumlah Investasi Perusahaan PMDN di Provinsi Jambi 1998-2008	104
Tabel 3.24 Jumlah Investasi Perusahaan PMA di Provinsi Jambi 1998-2008	105
Tabel 3.25 Konflik Lahan Antara Masyarakat dengan Perusahaan tahun 2000-2010	111
Tabel 4.1 Gelar Adat Zulkifli Nurdin	120
Tabel 4.2 Luas dan Produksi Komoditi Pertanian tahun 2009 dan tahun 2010	129
Tabel 4.3 Kebutuhan Fisik Minimum Provinsi Jambi 2001-2005	131
Tabel 4.4 Kebutuhan Fisik Minimum Provinsi Jambi tahun 2005-2009	132
Tabel 4.5 Upah Minimum Provinsi Jambi tahun 2009 dan 2010	133
Tabel 4.6 Rekapitulasi Daftar Calon Terpilih DPR RI Dapil Provinsi Jambi Pemilu tahun 2009	145

DAFTAR LAMPIRAN

1. Transkrip Wawancara dengan Aldrin Ali (Panwaslu Provinsi Jambi), Jambi, 1 Maret 2012
2. Transkrip Wawancara dengan AK (Dosen Universitas Jambi), Jambi 21 November 2011
3. Transkrip Wawancara dengan Aidil (Ketua Persatuan Petani Jambi), Jambi, 3 Desember 2011
4. Transkrip Wawancara dengan Arifien Manap (Ketua DPD Golkar Kota Jambi), Jambi, 3 Desember 2011
5. Transkrip Wawancara dengan Bambang Bayu Suseno (Ketua DPD PAN Kabupaten Muaro Jambi), Jambi, 2 Desember 2011
6. Transkrip Wawancara dengan Cornelis Buston, (Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi), Jambi, 23 November, 2011
7. Transkrip Wawancara dengan D (Pejabat Eselon III Pemprov Jambi), Jambi, 2 Desember 2011
8. Transkrip Wawancara Edi Purwanto (Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi), Jambi, 22 November 2011
9. Transkrip Wawancara GT (Aktivis Mahasiswa), Jambi 25 November 2011
10. Transkrip Wawancara dengan H (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 1 Desember 2011
11. Transkrip Wawancara dengan Heriyandi Roni (Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi), Jambi, 24 November 2011
12. Transkrip Wawancara dengan IA (Pengurus Paguyuban Masyarakat Sunda Provinsi Jambi), Jambi, 22 November, 2011
13. Transkrip Wawancara dengan JS (Wartawan Majalah Gatra), Jambi, 21 November 2011
14. Transkrip Wawancara dengan Kasmadi Kasyim (Advokat/Ketua LBH Lingkungan), Jambi, 6 Februari 2012
15. Transkrip Wawancara dengan MN (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 3 Desember 2011
16. Transkrip Wawancara dengan NK (Dosen STISIP Nurdin Hamzah Jambi), Jambi, 25 November 2011

17. Transkrip Wawancara dengan Nuzul Prakasa, (Wakil Ketua DPD Golkar Kota Jambi), Jambi, 25 November 2011
18. Transkrip Wawancara dengan Paisal Kumar (Pemimpin Redaksi Jambi Independen), Jambi, 6 Februari 2012
19. Transkrip Wawancara dengan PM (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 1 Desember 2011
20. Transkrip Wawancara dengan Rivani (Aktivis LSM Cappa Jambi), Jambi, 22 November 2011
21. Transkrip Wawancara dengan Roida Pane, (Ketua Wilayah SBSI Provinsi Jambi), Jambi, 25 November, 2011
22. Transkrip Wawancara dengan Saiful Azwar (Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi), Jambi, 2 Desember 2011
23. Transkrip Wawancara dengan SS (Wartawan Tribun Jambi), Jambi, 21 November 2011
24. Transkrip Wawancara dengan S (Mantan Kepala Biro Setda Provinsi Jambi), 2 Desember 2011
25. Transkrip Wawancara dengan Sufardi Nurzain (Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi), Jambi, 23 November, 2011
26. Transkrip Wawancara dengan Syahidan, Ketua DPRD Muaro Jambi Periode 2009-2014, Jambi, 24 November 2011
27. Transkrip Wawancara dengan Willy (Aktivis Petani), Jambi, 25 November 2011
28. Transkrip Wawancara dengan Yasir Arafat (Ketua KPU Provinsi Jambi), Jambi, 24 November 2011

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desentralisasi tidak otomatis meningkatkan politik ke arah yang lebih demokratis. Seringkali desentralisasi menjadi kontraproduktif bagi demokrasi. Dibutuhkan banyak usaha agar sistem politik yang telah terdesentralisasi benar-benar mendedikasikan diri untuk kepentingan rakyat dan mencegah kekuatan kelompok dominan dengan kemampuan fisiknya memanipulasi proses pemilihan umum di tingkat lokal. Tidak mengherankan apabila muncul fenomena “mafia-mafia” dalam pemerintahan lokal yang semakin menjauhkan rakyat dari proses politik.¹

Desentralisasi di negara berkembang dalam prakteknya terkadang dipenuhi dengan konflik ekonomi, problem kinerja dan masalah korupsi. Elit di tingkat lokal lebih berhasil memanfaatkan desentralisasi dengan menguasai berbagai kelompok kepentingan ketimbang aktor-aktor lainnya. Arena elektoral yang kecil di tingkat lokal dijadikan ajang konsolidasi dan bertahannya kelompok otoritarian.²

Proses desentralisasi di negara berkembang seperti yang terjadi di Indonesia kerap kali disamakan dengan proses demokratisasi dan tumbuhnya *civil society*. Padahal ketiga proses tersebut merupakan proses yang berbeda. Pergeseran dari pemerintahan yang menerapkan sentralisasi kekuasaan ke pemerintahan yang menerapkan desentralisasi kekuasaan tidaklah sama artinya dengan peralihan dari pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan yang demokratis. Pergeseran dari pemerintahan yang menerapkan sentralisasi kekuasaan ke pemerintahan yang menerapkan desentralisasi kekuasaan juga tidak secara otomatis menyiratkan terjadinya pergeseran dari negara yang kuat beralih menjadi *civil society* yang kuat. Melemahnya negara di tingkat pusat tidak secara

¹ Rajni Kothari, “Issues in Decentralized Governance”, dalam S.N. Jha dan P.C. Mathur (eds), *Decentralization and Local Politics*, (New Delhi : Sage Publications, 1999), hal 50-51.

² Merilee S. Grindle, *Going Local : Decentralization, Democratization and the Promise of Good Governance*, (Princeton : Princeton University Press, 2007), hal 7-9.

otomatis menghasilkan demokrasi yang bertambah di tingkat lokal. Desentralisasi dalam kondisi tertentu justru bisa diikuti oleh pemerintahan yang otoriter.³

Joel S. Migdal (2004) melihat fenomena diatas sebagai akibat bertahannya pengaruh “orang kuat lokal” di arena politik lokal. Kekuatan pengaruh dari “orang kuat lokal” bersumber dari terbentuknya segitiga akomodasi yang dibangun oleh aliansi “orang kuat lokal” bersama aparat birokrasi negara di tingkat lokal dan politisi di tingkat lokal. “Orang kuat lokal” berhasil menempatkan diri berada diantara rakyat dengan sumber daya yang vital seperti tanah, kredit dan pekerjaan. “Orang kuat lokal” memiliki kemampuan memberikan jaminan kestabilan politik di tingkat lokal dan melakukan kontrol sosial atas rakyat setempat. “Orang kuat lokal” juga memiliki kemampuan dalam memobilisasi rakyat.⁴

Vedi R. Hadiz (2010) juga melakukan analisa mengenai fenomena “orang kuat lokal”, mesin politik lokal yang korup dan daya tahan beberapa kelompok otoritarian di kawasan Asia Tenggara yang sedang mengalami reformasi politik seperti Filipina, Thailand dan Indonesia. Justru melalui slogan tata pemerintahan yang baik, desentralisasi memberikan jalan bagi kebangkitan dan konsolidasi “orang kuat lokal”. Secara nyata desentralisasi telah dibajak oleh kepentingan predatoris atau penghisap lokal.⁵

Fenomena dominasi “orang kuat lokal” berlangsung di Thailand era desentralisasi. “Orang kuat lokal” di Thailand berbentuk para “bapak pelindung” (*godfathers*). Para *godfathers* atau dalam bahasa Thai disebut sebagai *chao pho* dikenal sebagai sosok yang kejam dan bengis terhadap musuhnya dan penyayang dan dermawan bagi pengikutnya. Di setiap provinsi di Thailand memiliki masing-masing *chao pho* (**Lihat Tabel 1.1**). Salah satu *chao pho* yang terkenal adalah Banharm Silpaarcha, penguasa Provinsi Suphanburi. Banharm Silpaarcha menjadi anggota parlemen berkali-kali sejak tahun 1967 dengan perolehan suara 60-90 % suara pemilih. Banharm Silpaarcha juga pernah tiga kali menjadi menteri dan sekali menjadi Perdana Menteri di Thailand. Berasal dari keluarga pedagang kecil,

³ Henk Schulte Nordholt, “Decentralization in Indonesia : Less State, More Democracy?”, dalam John Harriss, Kristian Stokke and Olle Tornquist (eds), *Politicising Democracy : The New Local Politics of Democratization*, (London : PalgraveMacmillan, 2004), hal 29-30.

⁴ Joel S. Migdal, *State in Society*, (Cambridge : Cambridge University Press, 2004), hal 88-93.

⁵ Vedi R. Hadiz, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia : A Southeast Asia Perspective*, (Stanford : Stanford University Press, 2010), hal 3-4.

Banharm Silpaarcha berhasil membangun jejaring politik dan jejaring ekonominya di Provinsi Suphanburi. Keberhasilannya terutama ditopang oleh aktivitasnya dalam mengatur dan mendapat komisi dari berbagai macam proyek pemerintah. Banharm Silpaarcha kerap melakukan mobilisasi Pegawai Negeri Sipil dan melakukan politik uang dalam pemilihan umum. Bahkan *chao pho* lainnya menggabungkan strategi penguasaan melalui politik uang dengan penggunaan kekerasan dan bisnis yang ilegal.⁶

Tabel 1.1
“Orang Kuat Lokal” di Thailand

No.	Nama	Wilayah Kekuasaan
1.	Newin Chitchob	Provinsi Buriram
2.	Sanoh Thienthong	Provinsi Sakaew
3.	Sanan Kachonprasert	Provinsi Phicit
4.	Montri Pongpanit	Provinsi Ayutthaya
5.	Banharm Silpaarcha	Provinsi Suphanburi
6.	Pramarn Adireksarn	Provinsi Saraburi

Sumber : Yoshinori Nishizaki, “The Domination of a Fussy Strongman in Provincial Thailand : The Case of Banharm Silpaarcha in Suphanburi”, dalam *Journal of Southeast Asian Studies* Volume 37 Nomor 2 Juni 2006

Fenomena “orang kuat lokal” juga menguat di arena politik lokal di Filipina, meski terjadi perubahan dari sentralisasi rezim yang otoriter ke desentralisasi rezim yang demokratis. Secara formal jatuhnya rezim Ferdinan Marcos membawa negara Filipina sejak tahun 1986 kembali menggunakan demokrasi sebagai satu-satunya aturan main. Demokratisasi dan desentralisasi yang dilakukan pemerintahan Corazon Aquino dan Fidel Ramos sebagai pengganti Ferdinan Marcos ternyata tidak mengganggu dominasi para “bos lokal” dan keluarganya dalam penguasaan politik di tingkat lokal. Mereka tetap berkuasa dalam sistem yang lebih demokratis. Indikasinya diperlihatkan melalui kemenangan kembali keluarga politik Durano di Provinsi Cebu dan keluarga politik Ali Dimaporo di Provinsi Lanao (**Lihat Tabel 1.2**). Konfigurasi politik nasional Filipina pasca Ferdinan Marcos tetap dibangun dari jejaring “orang kuat

⁶ Yoshinori Nishizaki, “The Domination of a Fussy Strongman in Provincial Thailand : The Case of Banharm Silpaarcha in Suphanburi”, dalam *Journal of Southeast Asian Studies* Volume 37 Nomor 2 Juni 2006.

lokal” yakni para “bos lokal”. Demikianpula para aktor politik utama di pentas nasional merupakan aliansi para “bos lokal”. Mayoritas aktor politik nasional merupakan mantan penguasa lokal. Keluarga Macapagal, Keluarga Aquino (Conjuanco) dan keluarga mantan Presiden Filipina lain merupakan nama-nama keluarga yang sebelumnya menjadi “bos lokal” di Filipina.⁷

Tabel 1.2
“Orang Kuat Lokal” di Filipina

No.	Nama	Wilayah Kekuasaan
1.	Ramon Durano	Provinsi Cebu
2.	Ali Dimaporo	Provinsi Lanao
3.	Melecio Cojuanco	Provinsi Tarlac
4.	Fernando Lopez	Provinsi Iloilo
5.	Rafael Lacson	Provinsi Negros
6.	Luis Singson	Provinsi Ilocos Sur
7.	Justiniano Montano	Provinsi Cavite

Sumber : Steven Rood, “Decentralization, Democracy and Development”, dalam David G. Timberman (ed), *The Philippines New Direction in Domestic Policy and Foreign Relations*, (New York : Asia Society. 1998) dan Benedict Anderson, “Cacique Democracy in the Philippines : Origins and Dreams”. dalam *New Left Review* No. 169 Bulan Mei-Juni Tahun 1988

Beberapa peneliti *Institute of Asian Studies* yang berbasis di Hamburg, Jerman melakukan penelitian mengenai demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia pasca Orde Baru. Hasilnya menurut mereka ada beberapa kecenderungan yang terjadi di dalam desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi memberikan efek samping meningkatnya korupsi di daerah, meningkatnya politik uang, meningkatnya konsolidasi oligarki lokal, meningkatnya penggunaan sektarianisme dan kebangkitan primordialisme. Melalui intimidasi, diskriminasi dan kekerasan politik, desentralisasi berhasil dimanfaatkan oleh oligarki elit lokal. Oligarki elit lokal tersusun dari birokrat karir, pengusaha kaya, politisi partai dan anggota DPRD.⁸

⁷ Steven Rood, “Decentralization, Democracy and Development”, dalam David G. Timberman (ed), *The Philippines New Direction in Domestic Policy and Foreign Relations*, (New York : Asia Society. 1998), hal 112-114.

⁸ Marco Bunte dan Andreas Ufen (eds), *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, (London : Routledge, 2009), hal 18-21.

Fenomena kemunculan “orang kuat lokal” di era desentralisasi juga berlangsung di Indonesia. Hampir semua pengamat dan pemerhati Indonesia sepakat bahwa desentralisasi telah melahirkan “orang kuat lokal” yang memiliki akar di daerah. Politik uang dan kekerasan kian mewarnai pertarungan politik lokal. “Orang kuat lokal” mengandalkan agen-agen kekerasan yang secara kultural sudah ada sebelumnya seperti jawara di Banten atau dengan membentuk milisi-milisi baru. Selain memeralat partai politik, “orang kuat lokal” di beberapa daerah juga melakukan mobilisasi dengan mengeksploitasi politik etnis dan agama. Kekuatan politik etnis jauh lebih relevan di tingkat daerah ketimbang di tingkat nasional. Demikian juga hubungan darah, klan dan keluarga.⁹

Politik lokal di Indonesia era desentralisasi menjadi ajang elit lokal memanfaatkan demokrasi elektoral untuk mengamankan jabatan eksekutif dan legislatif tingkat lokal kepada keluarga, kroni dan loyalis mereka. Beberapa “klan politik” berhasil menjadikan Provinsi ataupun Kabupaten/Kota sebagai daerah kekuasaannya dan menjauhkan desentralisasi dari demokrasi “akar rumput”. Kemampuan elit lokal tersebut ditunjang oleh kekayaan dan kemampuan politiknya untuk melakukan pembelian suara ataupun memanipulasi kesetiaan religius dan etnik masyarakat setempat.¹⁰

Penelitian Andi Rahman Alamsyah (2009) di Banten menjelaskan kemunculan “orang kuat lokal” dari kelompok jawara sebagai penguasa Banten Pasca Orde Baru. Para jawara yang dipimpin seorang “orang kuat lokal” menggunakan Partai Golkar sebagai kendaraan politik mereka dalam setiap pertarungan politik elektoral. Elit-elit jawara banyak yang menduduki jabatan strategis yang memberikan keuntungan secara ekonomi dan politik kepada kelompok Jawara.¹¹

Menurut Lili Romili (2007), kelompok jawara di Banten berpengaruh dalam kemenangan Gubernur Banten di era desentralisasi. Mereka memenangkan anak tokoh besar jawara Banten menjadi Wakil Gubernur Banten dan kemudian

⁹ Antonius Made Tony Supriatma, “Menguatnya Kartel Politik Para Bos“, dalam *Jurnal Prisma* Volume 28 Nomor 2 Oktober 2009.

¹⁰ Edward Aspinall dan Marcus Mietzner (eds), *Problems of Democratisation in Indonesia : Elections, Institutions and Society*, (Singapura : ISEAS, 2010) hal 7-15.

¹¹ Andi Rahman Alamsyah, *Islam, Jawara dan Demokrasi : Geliat Politik Banten Pasca Orde Baru*, (Jakarta : PT Dian Rakyat, 2009), hal 64.

menjadi Gubernur Banten. Kelompok ini juga memiliki pengaruh yang kuat dalam perpolitikan lokal di Banten.¹²

Nankyung Choi (2007) menjelaskan kemunculan “orang kuat lokal” di Kota Batam. Ahmad Dahlan, putra asli melayu, berhasil menjadi pemenang dalam pemilihan Walikota Batam. Keberhasilan Ahmad Dahlan ditentukan oleh kemampuannya menggunakan Laskar Hulubalang Putih, sebuah milisi etnis melayu dengan anggota sekitar 10.000 orang dalam memengaruhi rakyat Batam. Disamping menggunakan milisi, Ahmad Dahlan didukung penuh oleh Forum 70, sebuah kelompok elit pebisnis. Ahmad Dahlan mampu menggalang dukungan rakyat melalui kombinasi sentimen-sentimen kultural dan kepentingan ekonomi.¹³

Sedangkan Jacqueline Vel (2005) meneliti pertarungan dua “orang kuat lokal” di Sumba Timur. Keduanya yakni Umbu Meheng Kunda dan Lukas Kaborang merupakan elit lama yang dibesarkan oleh Golongan Karya sebagai kekuatan utama kekuasaan Orde Baru. Mereka bertarung memperebutkan kekuasaan dalam konteks politik yang lebih terbuka dan demokratis. Masing-masing menggunakan simbol-simbol kultural dan keagamaan dalam memobilisasi dukungan rakyat untuk menjadi Bupati Sumba Timur tahun 2005.¹⁴

1.2. Perumusan Masalah

Pemilihan langsung kepala daerah di tingkat lokal di Indonesia era desentralisasi justru menghasilkan “orang kuat lokal” yang memiliki basis kuat di daerah. Sebagai contoh misalnya pengaruh Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulawesi Selatan) dan keluarga Yasin Daeng Limpo sebagai “orang kuat lokal” di Sulawesi Selatan. Melalui pengaruhnya yang kuat di militer, SOKSI dan Golkar, keturunan Yasin Daeng Limpo berhasil menduduki berbagai jabatan penting di Sulawesi Selatan era desentralisasi (**Lihat Tabel 1.3**). Disamping pengaruh politik yang kuat, Syahrul Yasin Limpo dan keluarga Yasin Daeng Limpo dikenal

¹² Lili Romli, “Jawara dan Penguasaan Politik Lokal di Provinsi Banten (2001-2006)”, (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, 2007).

¹³ Nankyung Choi, “Indonesia’s Direct Local Elections : Background and Institutional Framework”, *Rajaratnam School of International Studies Singapore Working Paper*, 2007, hal 343.

¹⁴ Jacqueline Vel, *Pilkada in East Sumba : An Old Rivalry in A New Democratic Setting*, dalam *Indonesia* Nomor 80 Oktober 2005 hal 94.

sebagai keluarga yang kaya raya, banyak pengikut dan didukung oleh kelompok preman yang loyal.¹⁵

Tabel 1.3
Silsilah Keluarga Yasin Limpo

No.	Nama	Jabatan Politik
1.	Nurhayati Yasin Limpo	Anggota DPR RI
2.	Syahrul Yasin Limpo	Gubernur Sulawesi Selatan
3.	Ikhsan Yasin Limpo	Bupati Gowa
4.	Haris Yasin Limpo	Anggota DPRD Makassar
5.	Tenri Olle Yasin Limpo	Ketua DPRD Gowa
6.	Tenri Angka Yasin Limpo	Anggota DPRD Sulawesi Selatan
7.	Irman Yasin Limpo	Kepala BKPM Sulawesi Selatan
8.	Dewi Yasin Limpo	Ketua DPD Hanura Sulawesi Selatan

Sumber : Antonius Made Tony Supriatma, "Menguatnya Kartel Politik Para Bos", dalam Jurnal *Prisma* Volume 28 Nomor 2 Oktober 2009

Tidak kalah menarik adalah pengaruh keturunan Tubagus Chasan Sochib di Banten. Melalui kekuatan politik Golkar, kekuatan milisi jawara dan jaringan bisnis keluarga, keturunan Tubagus Chasan Sochib berhasil menguasai perpolitikan lokal Banten. Mereka berhasil menjadi Gubernur, Wakil Walikota, Anggota DPRD Kota/Kabupaten, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPR RI dan Anggota DPD RI. (**Lihat Tabel 1.4**).

Tabel 1.4
Silsilah Keluarga Tubagus Chasan Sochib

No.	Nama	Jabatan Politik
1.	Ratu Atut Chosiyah	Gubernur Banten
2.	Hairul Jaman	Wakil Walikota Serang
3.	Ratna Komalasari	Anggota DPRD Kota Serang
4.	Ade Rosi Khaerunisa	Anggota DPRD Kota Serang
5.	Ratu Atut Chasanah	Anggota DPRD Provinsi Banten
6.	Aden Abdul Cholik	Anggota DPRD Provinsi Banten
7.	Hikmat Tomet	Anggota DPR RI
8.	Andika Haruzamy	Anggota DPD RI
9.	Heryani	Anggota DPRD Pandeglang

Sumber : Leo Agustino, "Dinasti Politik Pasca-Otonomi Orde Baru : Pengalaman Banten", dalam Jurnal *Prisma* Volume 29 Nomor 3 Juli 2010

¹⁵ Marco Bunte dan Andreas Ufen, *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, (London : Routledge, 2009), hal 186-187.

Sementara pengaruh Agustin Teras Narang semakin kuat di Kalimantan Tengah. Marga Narang juga berhasil menguasai posisi strategis di Kalimantan Tengah melalui kekuatan politik PDI Perjuangan dan bisnis distribusi minyak. Berikut ini daftar Marga Narang yang menduduki jabatan penting di Kalimantan Tengah : Agustin Teras Narang (Gubernur Kalimantan Tengah), Atu Narang (Ketua DPRD Kalimantan Tengah), Asdy Narang (Anggota DPR RI) dan Aries Narang (Ketua DPRD Palangkaraya).¹⁶

Di daerah Jambi muncul sosok yang menjadi “orang kuat lokal” dalam diri Zulkifli Nurdin. Zulkifli Nurdin adalah Gubernur Jambi dua periode (1999-2004 dan 2005-2010). Sebelum menjadi Gubernur Jambi di era desentralisasi, Zulkifli Nurdin menjadi pengusaha pribumi terkaya di Jambi yang mewarisi jaringan bisnis sang ayah Nurdin Hamzah. Zulkifli Nurdin memimpin berbagai organisasi profesi seperti Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Provinsi Jambi dan Gapensi (Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia) Provinsi Jambi. Kesuksesan di dunia usaha membuat Zulkifli Nurdin tertarik ke dunia politik dengan bergabung ke dalam Golongan Karya, partai terbesar di era Orde Baru. Jabatan Bendahara Partai Golkar dijabatnya pada tahun 1996 sesuai dengan latar belakangnya sebagai pengusaha.

Momentum reformasi tahun 1998 di Indonesia benar-benar dimanfaatkan oleh Zulkifli Nurdin untuk meningkatkan kekuasaan politik dan kekuatan ekonominya di Jambi. Zulkifli Nurdin kemudian berpindah partai dengan bergabung ke dalam Partai Amanat Nasional (PAN). Jabatan Ketua DPW PAN Provinsi Jambi langsung diperolehnya. Padahal Zulkifli Nurdin tidak terlibat dalam pembentukan Partai Amanat Nasional di Jambi. Zulkifli Nurdin lalu mencalonkan diri dan terpilih menjadi Anggota DPR RI hasil pemilu 1999. Tidak bertahan lama menjadi Anggota DPR RI, Zulkifli Nurdin mencalonkan diri dengan menjadi Calon Gubernur Jambi tahun 1999. Zulkifli Nurdin berhasil menjadi Gubernur Jambi walaupun Partai Amanat Nasional, partai pengusungnya cuma memiliki 3 anggota DPRD Provinsi. Zulkifli Nurdin berhasil mengalahkan Hasip Kalimudin Syam dan Prof. Dr. Ramlie Jalil. Hasip Kalimudin Syam adalah Wakil Gubernur *incumbent* yang dicalonkan Golkar, partai pemenang pemilu

¹⁶ Antonius Made Tony Supriatma, “Menguatnya Kartel Politik Para Bos“, dalam *Jurnal Prisma* Volume 28 Nomor 2 Oktober 2009.

1999 di Jambi dengan 14 anggota DPRD Provinsi. Sedangkan Prof. Dr. Ramlie Jalil adalah Ketua Bappeda Provinsi Jambi yang dicalonkan Partai Persatuan Pembangunan yang mempunyai 5 anggota DPRD Provinsi.

Zulkifli Nurdin dinilai sebagai pengusaha kaya tanpa pengalaman politik. Zulkifli Nurdin juga tidak memiliki rekam jejak keberhasilan dalam memimpin. Namun Zulkifli Nurdin berhasil mengalahkan lawan-lawan politiknya yang lebih mapan dan matang secara politik.¹⁷ Sulit bagi masyarakat umum mempercayai bahwa pemilihan Gubernur di Jambi yang dimenangkan oleh Zulkifli Nurdin bebas dari uang suap. Mengingat Zulkifli Nurdin adalah salah seorang pengusaha terkaya di Jambi.¹⁸

Jabatan sebagai Gubernur Jambi digunakan oleh Zulkifli Nurdin untuk melakukan konsolidasi kekuasaan dan memaksimalkan kekuasaannya. Citra sebagai Gubernur yang merakyat dan dermawan dengan mudah diraih oleh Zulkifli Nurdin melalui berbagai kunjungan-kunjungan dan bantuan-bantuan sosial yang diberikannya. Zulkifli Nurdin berhasil membentuk mesin politik yang variatif. Selain menguasai partai politik dan parlemen di Jambi, aktivis-aktivis gerakan 98 pun dirangkul menjadi staf pribadinya. Zulkifli Nurdin juga menguasai hampir semua paguyuban etnis yang ada di Jambi. Kerabat dan kroninya ditempatkan pada jabatan-jabatan yang strategis. Pers lokal di Jambi pun berhasil didekatinya. Hampir seluruh kekuatan sosial dan kekuatan politik berhasil dikuasainya.

Tidak mengherankan Zulkifli Nurdin terpilih kembali ketika terjadi pemilihan Gubernur Jambi tahun 2005. Kemenangan mutlak diperoleh Zulkifli Nurdin yang berpasangan dengan Anthoni Zeidra Abidin, seorang politisi Partai Golkar dengan meraih 80 % suara pemilih. Kemenangan kembali Zulkifli Nurdin terjadi dalam mekanisme pemilihan umum secara langsung kepala daerah. Jambi menjadi Provinsi pertama melakukan pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur di Indonesia.

¹⁷ Edward Aspinall dan Greg Fealy (eds), *Local Power and Politics in Indonesia : Decentralisation and Democratisation*, (Singapura : ISEAS, 2003), hal 66.

¹⁸ Herman Hidayat, *Politik Lingkungan : Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal 156-157.

Kemenangan mutlak dalam pemilihan Gubernur secara langsung jarang terjadi di Indonesia. Kemenangan dengan jumlah suara diatas 70 % seperti yang diraih Zulkifli Nurdin menandakan tidak adanya penantang yang kuat terhadap kekuasaan Gubernur yang sedang berkuasa.¹⁹ Namun kemenangan besar Zulkifli Nurdin tidak berarti pemerintahan yang dijalankan pada periode sebelumnya adalah pemerintahan yang bersih dan akuntabel.²⁰

Kekuasaan Zulkifli Nurdin sebagai Gubernur berakhir tahun 2010 bersamaan dengan habisnya masa jabatan Gubernur. Berhenti sebagai Gubernur bukan berarti akhir kekuasaan politik Zulkifli Nurdin. Zulkifli Nurdin masih mempunyai pengaruh dan bahkan mempunyai kekuatan potensial dalam politik lokal Jambi. Adiknya, Hazrin Nurdin menggantikannya menjadi Ketua DPW PAN Provinsi Jambi. Istrinya, Ratu Munawaroh Zulkifli terpilih menjadi Anggota DPR RI hasil pemilu 2009 dengan suara lebih dari 150.000 pemilih. Begitu juga anaknya, Zumi Zola Zulkifli yang terpilih menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur dan keponakannya, Sum Indra yang terpilih menjadi Wakil Walikota Jambi. Jaringan kekuasaannya tetap luas dengan terpilihnya mantan ajudan kepercayaannya, Katamso menjadi Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.

Menurut Syarif Hidayat (2009), kemenangan-kemenangan Zulkifli Nurdin dalam pemilihan Gubernur Jambi sangat sederhana. Zulkifli Nurdin diindikasikan terlibat KKN dengan birokrat lokal dan pengusaha. Birokrat lokal yang dimaksud adalah Ketua DPRD Provinsi. Ketiganya membentuk aliansi strategis dalam pemenangan Zulkifli Nurdin. Pembiayaan politik dalam pemenangan Zulkifli Nurdin dilakukan oleh pengusaha Sudiro Lesmana. Sekitar Rp 5.000.000.000-Rp.10.000.000.000 disumbangkan Sudiro Lesmana sebagai biaya kampanye Zulkifli Nurdin dalam pemilihan Gubernur Jambi. Sebagai kompensasinya Sudiro Lesmana mendapatkan mega proyek “Water Boom” senilai Rp. 128.000.000.000 pasca pelantikan Zulkifli Nurdin sebagai Gubernur Jambi.²¹

¹⁹ Edward dan Marcus Mietzner (eds), *Problems of Democratisation in Indonesia : Elections, Institutions and Society*, (Singapura : ISEAS, 2010), hal 135.

²⁰ Marcus Mietzner, “Indonesia’s Direct Election : Empowering the Electorate or Entrenching the New Order Oligarchy”, dalam Edward Aspinall dan Greg Fealy, *Soeharto’s New Order and Its Legacy*, (Canberra : ANU Press, 2010), hal 185-186.

²¹ Syarif Hidayat, “Pilkada, Money Politics and The Dangers of “Informal Governance” Practices”, dalam Maribeth Erb dan Priyambudhi Sulistiyanto, *Deepening Democracy in Indonesia*

Lebih lanjut menurut Syarif Hidayat, Zulkifli Nurdin juga diindikasikan melakukan mobilisasi dan melakukan intervensi dalam penunjukan setiap kepala dinas. Zulkifli Nurdin dinilai menguasai dan mengatur proyek-proyek penting di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Bisnis keluarga pun turut berkembang dari sektor properti, ritel, konstruksi dan dikenal memiliki mayoritas ruko (rumah toko) yang ada di Jambi.²²

Beberapa indikasi penyimpangan tersebut tidak mampu menyurutkan pengaruh Zulkifli Nurdin dalam politik lokal di Jambi. Zulkifli Nurdin selalu terbebas dari berbagai indikasi korupsi. Zulkifli Nurdin hanya sekali dipanggil sebagai saksi oleh KPK justru bukan dalam mega proyek “water boom” yang akhirnya batal dilaksanakan tetapi dalam kaitan dengan kasus pembangunan Mess Pemda Jambi di Jakarta. Dalam kasus Mess Pemda Jambi tersebut, mantan Sekretaris Daerah Chalik Saleh dan pengusaha Sudiro Lesmana yang juga menjadi kontraktor proyek tersebut divonis bersalah.

Kekuasaan Zulkifli Nurdin di Jambi tidak terbebas dari penentangan kelompok oposisi. Selain mendapat penentangan dari kelompok kritis terutama pegiat anti korupsi, penentangan terhadap Zulkifli Nurdin juga dilakukan oleh kelompok aktivis mahasiswa yang independen, aktivis serikat buruh dan aktivis serikat petani. Penentangan tersebut terutama dilakukan oleh dua organisasi rakyat, Persatuan Petani Jambi dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.

Mereka menilai pemerintahan Zulkifli Nurdin gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat di Jambi selama desentralisasi. Demonstrasi rutin yang melibatkan banyak massa dilakukan kelompok ini namun hampir tidak memberikan dampak terhadap kekuasaan Zulkifli Nurdin di Jambi. Zulkifli Nurdin berhasil mengatasi kelompok-kelompok penentang kekuasaannya dan tetap berkuasa hingga masa jabatannya sebagai Gubernur berakhir.

Atas dasar perumusan masalah di atas, maka tesis ini akan mencoba menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

? : *Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*, (Singapura : ISEAS Publishing, 2009), hal 137-141

²² Syarif Hidayat dan Gerry van Klinken, “Provincial Business and Politics”, dalam Geert Arend van Klinken dan Joshua Barker, *State of Authority : the State in Society in Indonesia*, (Ithaca : Cornell University Press, 2009), hal 149-150

1. **Bagaimana “orang kuat lokal” beroperasi dan dapat bertahan di arena politik lokal era desentralisasi ?**
2. **Bagaimana proses Zulkifli Nurdin dapat menjadi “orang kuat lokal” di Jambi era desentralisasi ?**
3. **Mengapa Zulkifli Nurdin menjadi “orang kuat lokal” di Jambi era desentralisasi ?**
4. **Bagaimana pengaruh Zulkifli Nurdin terhadap politik lokal di Jambi era desentralisasi ?**

Sedangkan batasan masalah yang digunakan adalah dinamika kekuasaan Zulkifli Nurdin dari masa pertama kali menjabat Gubernur Jambi melalui pemilihan anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 1999 hingga terpilihnya anaknya yang bernama Zumi Zola Zulkifli sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2011. Alasan pembatasan tersebut adalah dua cara pemilihan Gubernur Jambi, baik dipilih oleh anggota DPRD Provinsi maupun dipilih langsung oleh rakyat Jambi, Zulkifli Nurdin tetap terpilih menjadi Gubernur Jambi. Bahkan ketika sudah tidak menjabat Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin tetap berhasil membantu kemenangan anaknya menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui proses beroperasi dan bertahannya ”orang kuat lokal” di arena politik lokal era desentralisasi.
2. Mengetahui proses Zulkifli Nurdin menjadi ”orang kuat lokal” di Jambi era desentralisasi.
3. Mengetahui manfaat dan keuntungan yang didapatkan Zulkifli Nurdin dengan menjadi ”orang kuat lokal” di Jambi era desentralisasi.
4. Mengetahui pengaruh Zulkifli Nurdin terhadap politik lokal di Jambi era desentralisasi.

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

- a. Untuk memberikan kontribusi dalam bidang studi elit politik di tingkat lokal melalui dinamika kekuasaan elit lokal di Indonesia era desentralisasi.
 - b. Menambah perspektif tentang “orang kuat lokal” dalam melihat dinamika kekuasaan elit lokal di Indonesia era desentralisasi
2. Manfaat Praktis
- a. Sebagai informasi bagi pihak yang mempunyai ketertarikan dan perhatian terhadap kekuasaan elit lokal di Indonesia era desentralisasi.
 - b. Sebagai informasi bagi Pemerintah dan DPR RI yang menangani pemerintahan daerah dan desentralisasi bahwa ada fenomena “orang kuat lokal” di Indonesia era desentralisasi.

1.4. Kajian Literatur

Dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian yang membantu penulis untuk memahami permasalahan “orang kuat lokal”. *Pertama*, penelitian Michael Buehler dan Paige Tan yang melakukan penelitian mengenai kekuasaan “orang kuat lokal” bernama Yasin Daeng Limpo dan keturunannya di Sulawesi Selatan. Michael Buehler dan Paige Tan menggunakan teori mengenai hubungan partai-kandidat dalam politik lokal dalam penelitiannya. Menurut mereka, Yasin Daeng Limpo mewariskan jaringan ekonomi dan politik yang kuat kepada keturunannya. Sehingga tidak mengherankan keturunannya menguasai jabatan politik penting di Sulawesi Selatan seperti Anggota DPRD Kabupaten, Bupati, Anggota DPRD Provinsi, Bupati, Gubernur dan Anggota DPR RI. Yasin Daeng Limpo juga menjalin hubungan dengan tokoh nasional seperti Surya Paloh dan Edwin Kawilarang serta pengusaha keturunan seperti Anton Obey dan Peter Gozal. Keluarga Yasin Limpo menggunakan politik uang dan intimidasi pada setiap momentum pemilihan. Mereka juga memiliki pengaruh yang kuat di organisasi SOKSI dan FKPPi serta mempunyai milisi bernama Brigade 9-11 dan Brigade 02 yang beranggotakan ratusan preman.²³

²³ Michael Buehler dan Paige Tan, “Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics : a Case Study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi Province”, dalam *Indonesia* Nomor 84 Bulan Oktober Tahun 2007.

Kedua, Syarif Hidayat yang melakukan penelitian mengenai kekuasaan “orang kuat lokal” bernama Tubagus Chasan Sochib di Banten. Syarif Hidayat menggunakan teori “negara bayangan” dan “pemerintah informal” dalam penelitiannya. Menurutnya sebagai pengusaha besar di Banten ternyata Tubagus Chasan Sochib ternyata juga menjadi pemimpin besar kelompok Jawara Banten dan berteman dekat dengan banyak tokoh besar nasional seperti Jenderal Wiranto. Tubagus Chasan Sochib beserta kelompok Jawaranya berhasil menguasai politik lokal di Banten untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang dikontrol oleh pemerintah daerah. Tubagus Chasan Sochib sebagai “orang kuat lokal” memiliki dua sumber daya sekaligus yang tidak dimiliki kompetitornya yakni sumber daya kekerasan dan sumber daya keuangan. Pada masa orde baru Tubagus Chasan Sochib menjadi sesepuh Partai Golkar dan ketika era desentralisasi Tubagus Chasan Sochib berhasil memenangkan anaknya, Ratu Atut Chosiyah menjadi Wakil Gubernur Banten dan kemudian menjadi Gubernur Banten. Tubagus Chasan Sochib yang disebut “Tuan Besar” menjalankan praktek “negara bayangan” dan “pemerintahan informal” di Banten. Sebagai “Tuan Besar” di Banten, Tubagus Chasan Sochib dapat mengatur jabatan-jabatan politik dan proyek-proyek pemerintah di Banten.²⁴

Ketiga, Leo Agustino juga melakukan penelitian mengenai dinasti politik yang dibentuk oleh keturunan-keturunan “orang kuat lokal” bernama Tubagus Chasan Sochib di Banten. Tubagus Chasan Sochib bukan saja telah menjadi “orang kuat lokal” di Banten tetapi telah berhasil membangun dinasti politik di Banten dengan mendudukkan anak-anaknya, istri-istrinya, menantunya dan cucunya menjadi Gubernur, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPRD Kabupaten, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPR RI dan Anggota DPD RI. Dinasti politik “Tuan Besar” Chasan Sochib semakin kuat tidak saja melalui pengaturan jabatan politik dan pengaturan proyek tetapi berkembang dengan melakukan aktivitas ekonomi informal yang bersifat ilegal. Akibatnya otonomi

²⁴ Syarif Hidayat, “Shadow State...? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten”, dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed), *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal 267-303.

dan desentralisasi bisa dinilai rakyat justru memberikan kesengsaraan dan ketimpangan.²⁵

Keempat, Syarif Hidayat kembali melakukan penelitian orang kuat lokal tetapi mengambil lokasi di luar Banten yakni Jambi. Syarif Hidayat kembali menggunakan teori “negara bayangan” dan “pemerintahan informal” dalam meneliti kekuasaan Zulkifli Nurdin di Jambi. Menurutnya kekuasaan Zulkifli Nurdin sebagai Gubernur di Jambi ditopang persekutuan diantara birokrat, politisi dan pengusaha yang menjadi kroni Zulkifli Nurdin. Zulkifli Nurdin mendapatkan dukungan dana dari pengusaha kroninya dalam pilkada Gubernur Jambi tahun 2005 dan sebaliknya Zulkifli Nurdin memberikan kompensasi megaproyek ratusan milyar kepada pengusaha kroninya. Syarif Hidayat secara khusus mengambil studi kasus megaproyek “Water Boom” dalam membuktikan adanya praktek “pemerintahan informal” yang dijalankan oleh Zulkifli Nurdin dan kroninya di Jambi.²⁶

Kelima, Syarif Hidayat melanjutkan penelitiannya tentang kekuasaan Zulkifli Nurdin di Jambi. Syarif Hidayat menggunakan kembali teori “negara bayangan” dan “pemerintahan informal” serta menambahkan teori Daniel Arghiros tentang aliansi birokrat dan penguasa dalam penguasaan politik lokal dalam menganalisa kekuasaan Zulkifli Nurdin di Jambi. Menurutnya demokratisasi dan desentralisasi di tingkat lokal di Jambi dalam prakteknya didominasi oleh pembelian suara dan klientalisme politik. Zulkifli Nurdin dinilai merupakan aktor utama yang berpengaruh dalam politik lokal di Jambi. Dalam penelitiannya Syarif Hidayat kembali menggunakan studi kasus Megaproyek “Water Boom”. Kekuasaan Zulkifli Nurdin sebagai penguasa utama Jambi ditopang oleh tiga aktor politik penting di Jambi yang menjadi kroninya yaitu Sekretaris Daerah saat itu Chalik Saleh dan Ketua DPRD Provinsi saat itu Zoerman Manap serta sang adik Hazrin Nurdin yang merupakan manajer politik Zulkifli Nurdin. Oposisi terhadap kekuasaan Zulkifli Nurdin di Jambi dilakukan oleh dua aktor yaitu Wakil Gubernur saat itu Antony Zeidra Abidin dan kelompok

²⁵ Leo Agustino, “Dinasti Politik Pasca-Otonomi Orde Baru : Pengalaman Banten”, dalam *Jurnal Prisma* Volume 29 Nomor 3 Bulan Juli 2010.

²⁶ Syarif Hidayat, “Pilkada, Money Politics and The Dangers of “Informal Governance” Practices”, dalam Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto, *Deepening Democracy in Indonesia ? : Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*, (Singapura : ISEAS, 2009), hal 137-143.

lembaga swadaya masyarakat dimana salah satu yang paling aktif adalah gerakan mahasiswa.²⁷

Beberapa penelitian di atas menarik karena menganalisa kekuasaan "orang kuat lokal" di beberapa daerah di Indonesia dengan menggunakan perspektif teori-teori ilmu politik dan ekonomi politik seperti hubungan partai-kandidat dalam politik lokal, negara bayangan, ekonomi informal dan aliansi birokrat-pengusaha dalam penguasaan politik lokal. Perspektif yang diambil penulis adalah dengan menggunakan teori "orang kuat lokal" dan varian pengembangannya dalam menganalisa dinamika kekuasaan "orang kuat lokal" di Indonesia. Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin menjadi menarik karena Zulkifli Nurdin berhasil menjadi penguasa yang kuat di Jambi dengan menjadikan berbagai kekuatan sosial politik yang ada di Jambi dibawah kekuasaannya. Zulkifli Nurdin berhasil memadukan kekuasaan formal sebagai penguasa politik dengan kekuasaan informal sebagai "orang kuat lokal" di Jambi era desentralisasi.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Syarif Hidayat adalah perbedaan membuat peta relasi kekuasaan dan perbedaan beroperasinya "negara bayangan" dan "ekonomi informal" di Jambi era desentralisasi. Syarif Hidayat menuliskan peta relasi kekuasaan berbentuk oligarki dengan lima aktor utama Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi dan Sekretaris Daerah serta "HR" yang disebut sebagai pemangku otoritas informal. Gubernur bersama Ketua DPRD Provinsi, Sekretaris Daerah dan "HR" berada dalam satu aliansi berbeda dengan Wakil Gubernur. Sedangkan penulis melihat Zulkifli Nurdin sebagai Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi (Zoerman Manap) adalah dua "orang kuat lokal" yang dapat bersaing maupun dapat beraliansi dalam sebuah kepentingan ekonomi dan politik jangka pendek. Masing-masing membangun kekuatan ekonomi dan politiknya di Jambi era desentralisasi. Kemudian Syarif Hidayat menyebutkan proyek waterboom sebagai kompensasi atas bantuan keuangan yang diberikan Sudiro Lesmana kepada Zulkifli Nurdin dan Zoerman Manap dalam Pemilihan Gubernur Jambi tahun 2005. Zulkifli Nurdin, Zoerman Manap dan Sudiro Lesmana membangun Aliansi Bisnis dan Politik yang solid di Jambi era

²⁷ Syarif Hidayat dan Gerry van Klinken, "Provincial Business and Politics", dalam Geert Arend van Klinken dan Joshua Barker, *State of Authority : the State in Society in Indonesia*, (Ithaca : Cornell University Press, 2009), hal 149-150.

desentralisasi. Sedangkan penulis tidak melihat adanya aliansi bisnis dan politik yang solid. Indikasinya Sudiro Lesmana masuk penjara dalam kasus korupsi PLTD Muaro Jambi bersama Asad Syam.²⁸ Asad Syam adalah Mantan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi dan Anggota DPR RI periode 2009-2014. Asad Syam adalah Bupati petahana yang dikalahkan oleh Burhanudin Mahir, calon Bupati yang dijagokan Zulkifli Nurdin. Artinya Sudiro Lesmana hanyalah pengusaha biasa yang mencari proyek ke berbagai pihak di Jambi.

1.5. Kerangka Teori

a. "Orang Kuat Lokal"

Joel Migdal (1988) memberikan definisi mengenai "orang kuat lokal" sebagai pemimpin nonformal negara seperti tuan tanah, tengkulak, pengusaha, kepala suku, panglima perang, bos, petani kaya, pemimpin klan, *za'im*, *effendi*, *agha*, *cacique* dan *kulaks*, yang membangun organisasi sosialnya yang berbentuk jejaring dalam rangka menjalankan kontrol sosial atas masyarakat untuk menguasai keseluruhan populasi yang mendiami wilayah tertentu. Para "orang kuat lokal" melakukan berbagai kegiatan seperti pemberian kredit, pemberian akses rakyat kepada tanah, perlindungan keamanan, pemerasan dan tindakan lainnya. Mereka juga menerapkan hadiah, hukuman dan simbol sebagai bentuk kontrol sosial atas masyarakat. "Orang kuat lokal" beroperasi di negara pascakolonial dari benua Asia dan Afrika yang masih lemah melakukan kontrol sosial atas masyarakatnya terutama di tingkat lokal. Kontrol sosial terutama dilakukan untuk mengatur relasi sosial di dalam masyarakat, melakukan penetrasi di dalam masyarakat, mengambil sumber daya yang ada di dalam masyarakat dan menggunakan sumber daya yang ada di dalam masyarakat.²⁹

Dalam sebuah arena politik lokal, "orang kuat lokal" bersama birokrat di tingkat lokal yang menjalankan kebijakan pemerintah dan politisi lokal yang terdiri dari partai politik dan pemimpin formal di tingkat lokal, membentuk segitiga akomodasi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Mereka

²⁸ Diakses pada <http://www.jambiexpres.co.id/utama/20887-ma-tolak-pk-sudiro.html> tanggal 1 November 2011.

²⁹ Joel S. Migdal, *Strong Societies and Weak States : State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*, (Princeton, NJ : Princeton University Press, 1988), hal 3-41.

membangun apa yang disebut Joel Migdal sebagai jejaring pertukaran sosial ekonomi dan politik. “Orang kuat lokal” melakukan tawar-menawar dengan birokrat dan politisi yang menghasilkan kompromi atau kompetisi. “Orang kuat lokal” menawarkan stabilitas lokal yang ditukar dengan jaminan tidak mengganggu kekuasaan mereka yang telah berlangsung.³⁰ Bahkan mereka menawarkan untuk dapat terlibat langsung memengaruhi keputusan penting mengenai alokasi sumber daya dan aplikasi aturan-aturan kebijakan negara dengan cara menempatkan anggota keluarga mereka pada sejumlah jabatan penting demi menjamin alokasi sumber daya berjalan sesuai dengan aturan mereka sendiri.³¹

Jika yang terjadi kompromi maka “orang kuat lokal” akan bekerjasama memenangkan partai politik tertentu dan kandidat tertentu. Mereka menyediakan akses yang luas demi memaksimalkan dukungan masyarakat. Setelah kemenangan diperoleh, para politisi memberikan banyak keuntungan kepada “orang kuat lokal”. Para politisi juga akan meyakinkan birokrat di tingkat lokal agar jangan mengusik keberadaan “orang kuat lokal”³²

Keberlangsungan kekuasaan *local strongmen* atau “orang kuat lokal” ditentukan oleh perubahan-perubahan struktural seperti perubahan kepemilikan tanah, perubahan tarif pajak (kenaikan pajak) dan perubahan moda transportasi. Kekuasaan mereka juga ditentukan oleh program populis dan jejaring populis yang dibentuk oleh pemimpin negara di pusat. Apabila terjadi program populis dan jejaring populis yang dibentuk pemimpin negara di pusat maka “orang kuat lokal” tidak akan mendapatkan lagi keuntungan yang mereka peroleh.³³

Teresa Tu (2011) melakukan penelitian mengenai kekuasaan “orang kuat lokal” di Afghanistan yang bernama Dostum dengan mesin politik utamanya organisasi *Junbesh-i Milli-ye Islami* di Provinsi Balakh. Dostum menjadi figur yang paling berpengaruh di Provinsi Balakh. Dostum membangun kontrol sosialnya atas masyarakat Provinsi Balakh berdasarkan simbol, kharisma, kekuatan ekonomi dan kekuatan senjata. Dostum memahami pentingnya suara pemilih dari konstituennya di Provinsi Balakh. Dia membangun Universitas

³⁰ John T. Sidel, “Beyond Patron-Client Relations : Warlordism and Local Politics in The Phillipines”, dalam *Kasarinlan, A Philippine Quarterly of Third World Studies* 1st Quarter 1989

³¹ Joel S. Migdal, *Op.Cit.*, hal 238-258

³² *ibid*

³³ *ibid*

Baghlan, memberikan bantuan beasiswa, memperbaiki jalan dan membangun jaringan listrik. Dostum juga mengatur karir birokrasi dan jabatan militer di Provinsi Balakh.³⁴

Selain Dostum yang berkuasa di Provinsi Balakh, setidaknya ada tiga “orang kuat lokal” lainnya yang berkuasa di Provinsi-Provinsi Afghanistan. Ketiganya adalah Sher Mohammed Akhundzada yang berkuasa di Provinsi Alizais, Ahmad Wali Karzai yang berkuasa di Provinsi Popolzais dan Khan Mohammed yang berkuasa di Provinsi Alkozai. Ahmad Karzai adalah anak bungsu dari keluarga Karzai yang berkuasa di Provinsi Popolzais. Saudara kandung Ahmad Wali Karzai yang bernama Hamid Karzai adalah pemimpin nasional Afghanistan pasca Taliban.³⁵

“Orang kuat lokal” di Afghanistan pasca Taliban banyak yang menduduki jabatan politik formal seperti Gubernur. Seperti yang terjadi pada “orang kuat lokal” di Provinsi Nangarhar, Gul Agha Sherzai. Gubernur Agha Sherzai mendominasi politik lokal di Afghanistan pasca Taliban. Dia mengatur semua proyek rekonstruksi Afghanistan agar dikuasi kroni politiknya. Dia mendapatkan dukungan penuh dari para pemimpin suku di Nangarhar.³⁶

“Orang kuat lokal” hadir dan menguat kembali ketika negara-negara di Afrika pasca perang dingin. Negara-negara tersebut dalam kondisi melemah untuk melakukan kontrol sosialnya. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh “orang kuat lokal” yang berwujud panglima perang menguasai daerah-daerah di benua Afrika. Mereka menyandarkan kekuatan mereka pada kekuatan senjata dan menjalankan aktivitas perburuan rente ekonomi. Disamping itu mereka juga menjalankan aktivitas ekonomi yang ilegal seperti penyelundupan.³⁷

Nigeria, sebagai salah satu negara besar di Afrika mempunyai “orang kuat lokal” di Provinsinya. “Orang kuat lokal” hadir dalam politik lokal Nigeria era desentralisasi. Mereka melakukan berbagai strategi dalam meraih kemenangan

³⁴ Teresa Tu, “Strongmen and Their Organizations : An Examination of Junbesh in Balakh and The Taliban in Kandahar”, (Tesis MA, Universitas Georgetown, 2011).

³⁵ Antonio Giustozzi dan Noor Ullah, “The Inverted Cycle: Kabul and the Strongmen’s Competition for Control Over Kandahar 2001-2006”, dalam *Central Asian Survey* Volume 26 Nomor 2 Juni 2007.

³⁶ Dipali Mukhopadhyay, “Warlord as Bureaucrat : The Afghan Experience”, dalam *Carnegie Papers Middle East Program* No.101 Bulan Agustus 2009.

³⁷ William Reno, *Warlord Politics and African States*, (London : Lynne Rienner, 1998), hal 45-53.

dalam pemilihan umum di tingkat lokal, seperti pembelian suara yang dibungkus kedermawanan sosial, korupsi politik dan intimidasi oleh kelompok kekerasan yang mereka bina. Salah satu "orang kuat lokal" di Nigeria adalah Dr. Chris Uba yang menjadi penguasa Provinsi Anambra. Dr. Chris Uba merupakan adik Andy Uba, staf khusus Presiden Olegun Obasanjo dan Ugochukwu Uba, senator Republik Federal Nigeria.³⁸

Jaringan patronase politik yang penuh kekerasan belum bisa hilang di Asia Tengah (Kazakhstan, Uzbekistan dan Kyrgyztan). Jaringan tersebut tersebar dari presiden hingga kepala daerah di tingkat lokal. "Orang kuat lokal" di Asia Tengah mendominasi daerah kekuasaan mereka. Mereka mendapatkan uang sewa atas segala aktivitas bisnis di wilayah kekuasaan mereka, baik bisnis yang legal maupun bisnis yang ilegal. Mereka tidak saja menguasai sumber daya alam, perdagangan dan konstruksi. Mereka juga menjalankan usaha perjudian, narkotika dan prostitusi. Kekuasaan mereka bertahan sejak era komunisme hingga pasca komunisme. Pembunuhan politik sering dilakukan terhadap jurnalis dan aktivis LSM yang kritis terhadap mereka. Walaupun dengan kadar yang berbeda, kawasan Asia Tengah pasca otoritarianisme menjadi kawasan yang penuh dengan kekerasan, kekacauan dan dinasti politik.³⁹

b. "Bossisme Lokal"

John Sidel melakukan modifikasi terhadap teori Joel Migdal mengenai "orang kuat lokal". Menurutnya "orang kuat lokal" adalah "bossisme lokal" yang mempertahankan jejaring politik yang telah terjalin lama untuk memperoleh monopoli kontrol atas masyarakat melalui penguasaan sumber-sumber ekonomi dan kekuatan koersif dalam yurisdiksi teritorial kekuasaan mereka di era demokrasi. "Bossisme lokal" berwujud Walikota, Gubernur, Anggota Kongres dan Anggota Senat yang menjadi broker kekuasaan bagi patron politik mereka di tingkat nasional dan menjadi broker kekuasaan bagi klien politik mereka di tingkat daerah serta menjadi orang yang paling berkuasa di suatu daerah untuk

³⁸ John A.A. Ayoade, "Godfather Politics in Nigeria", dalam IFES Nigeria, *Money and Politics in Nigeria*, (Abuja : Petra Press, 2008), hal 85-95.

³⁹ Eric McGlinchey, *Chaos, Violence and Dynasty : Politics and Islam in Central Asia*, (Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 2011), hal 1-5.

mengeksploitasi rakyat dan alam yang ada di dalam wilayah kekuasaan mereka. Para “bossisme lokal” ini muncul melalui mekanisme pemilu yang kompetitif dan berkala serta diikuti partisipasi politik yang tinggi. Mereka menggunakan berbagai strategi dari pembelian suara, manipulasi hingga intimidasi dengan penggunaan kekerasan.⁴⁰

Bagi Sidel, negara tempat beroperasinya para “bossisme lokal” tidaklah menjadi lemah perannya seperti yang dibayangkan oleh Joel Migdal. Melalui corak kapitalisme-birokratiknya negara justru melakukan akumulasi modal melalui bantuan para “bossisme lokal”. Pemimpin negara di tingkat lokal yakni para “bossisme lokal” menggunakan aparatus negara untuk menggerakkan masyarakat agar mengikuti kehendaknya. Sehingga “bossisme lokal” seperti yang terjadi di Filipina merupakan aktivitas subordinasi aparat negara dalam kekuasaan para bos untuk melakukan akumulasi modal demi kepentingan pribadi dan keluarganya. Jejaring para “bossisme lokal” ini menguasai politik nasional dan pemimpin para “bossisme lokal” menjadi penguasa negara (presiden).⁴¹

“Bossisme lokal” ada di setiap level, ada bos yang menguasai distrik (kabupaten/kota), ada bos yang menguasai provinsi dan ada bos yang menguasai pusat. Jejaring patron-klien para bos di setiap level di Filipina membentuk kecenderungan rivalitas dua kelompok utama. Kedua kelompok besar tersebut akan berkompetisi dan saling mengalahkan satu sama lain. Rivalitas mereka berlangsung di tingkat pemilihan Walikota, pemilihan Gubernur, pemilihan anggota kongres/Senat dan puncaknya pemilihan Presiden. Jejaring patron-klien para “bossisme lokal” tidak statis dan permanen melainkan dinamis dan sangat cair. Mereka bisa berpindah-pindah patron di tingkat pusat, berpindah-pindah klien di tingkat lokal dan berpindah-pindah afiliasi partai politik nasional. Para “bossisme lokal” melakukan pertukaran (transaksional) suara pemilih dengan bantuan ekonomi, bibit, irigasi, pelunasan hutang dan alat tukar lainnya. Mereka sangat mengerti dengan memberikan bantuan kesehatan, memberikan bantuan pekerjaan, memberikan bantuan hukum, maka kemudian ketika hari H pemilihan

⁴⁰ John T. Sidel, *Capital, Coercion and Crime : Bossism in the Philippines*, (Stanford : Stanford University Press, 1999), hal 1-22.

⁴¹ *ibid*, hal 140-154.

umum, mereka mengubah bantuan-bantuan yang mereka berikan menjadi suara dan dukungan politik.⁴²

John Sidel menjelaskan pertumbuhan ekonomi, urbanisasi dan industrialisasi memodernisasi “orang kuat lokal” beserta relasi patron-kliennya menjadi lebih canggih, lebih modern dan lebih profesional dalam wujud “bossisme lokal” beserta mesin politiknya. Daya tahan setiap “bossisme lokal” ini berbeda-beda dari yang hanya bertahan satu generasi saja hingga yang bertahan multi generasi. Contoh “bossisme lokal” yang bertahan multi generasi adalah Keluarga Osmena di Provinsi Cebu. Diawali oleh Sergio Osmena (Anggota Senat dari Provinsi Cebu 1907-1935), dilanjutkan oleh sang anak Sergio Osmena Jr (Gubernur Cebu 1956-1972) dan dipertahankan oleh cucunya Emilio Osmena (Gubernur Cebu 1988-1995) dan Tommy Osmena (Walikota Cebu City 1988-1995).⁴³

Berbagai strategi dilakukan “bossisme lokal” untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan politiknya. Strategi tersebut diantaranya : (1). Menempatkan kerabat dan kroni sebagai walikota, wakil walikota dan anggota legislatif daerah. (2). Membentuk mesin politik sebagai broker suara. (3). Mengatur penempatan pejabat daerah. (4). Mengatur proyek pemerintah dan dana aspirasi. (5). Mengatur peraturan daerah. (6). Mengatur keringan pajak. (7). Mengatur pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah. (8). Memberikan konsesi dan kontrak pertambangan, kehutanan dan perkebunan. (9). Intimidasi dan kekerasan politik. (10). Menerapkan kebijakan tangan besi untuk mengatasi konflik tanah dan melemahkan serikat buruh. Para “bossisme lokal” selain melakukan pengumpulan uang terhadap sumber daya negara juga melakukan aktivitas ekonomi ilegal seperti judi, penyelundupan, penebangan liar dan lain-lain.⁴⁴

Fenomena “bossisme lokal” dengan bertahannya relasi sisa feodalisme di zaman kapitalisme dan demokrasi muncul akibat dari kebutuhan ekonomi yang konkret dan langsung dibutuhkan, ketimpangan sosial yang sangat tinggi dan

⁴² *ibid*, hal 1-22.

⁴³ John T. Sidel, “Philippine Politics in Town, District and Province : Bossism in Cavite and Cebu”, dalam *The Journal of Asian Studies* Volume 56 Nomor 4 Bulan November 1997.

⁴⁴ *Ibid*.

kelangkaan akses terhadap barang kebutuhan pokok. Penyebab yang lain adalah kegagalan kekerabatan masyarakat bekerja dan meningkatnya individualisme masyarakat, kegagalan aparat desa, aparat kota, aparat provinsi dan aparat pemerintah lainnya untuk menjamin kebutuhan subsisten (bertahan hidup) rakyat. Jadi ini bukan persoalan budaya politik tetapi lebih tepatnya sangat struktural.⁴⁵

John Sidel memberikan catatan kritis mengenai teori “orang kuat lokal” Joel Migdal. Pertama, sifat dasar negara dan sifat dasar masyarakat yang menyebabkan “orang kuat lokal” tumbuh dan berkembang. Kedua, kebangkitan “orang kuat lokal” dari dalam negara dan dari dalam masyarakat. Ketiga, Struktur negara yang menciptakan kondisi bagi bangkit, bertahan dan berhasilnya “orang kuat lokal”. Keempat, budaya politik dan tuntutan penduduk lokal yang partikular menyebabkan munculnya “orang kuat lokal”. Kelima, persediaan (*supply*) dari “orang kuat lokal” tidak selalu mencerminkan permintaan (*demand*) dari masyarakat. Keenam, “orang kuat lokal” tidak menghambat perkembangan kapitalisme dan justru memfasilitasi dan mengambil manfaat pertumbuhan industri dan perluasan pasar di daerah kekuasaan mereka.⁴⁶

John Sidel juga memperingatkan bahwa “orang-orang kuat lokal” (*local strongmen*) yang justru menguasai lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, parlemen dan pemilihan umum ketika terjadi desentralisasi dan demokratisasi pasca pemerintahan otoritarianisme, dapat muncul dan berkembang di Thailand dan Indonesia. “Orang kuat lokal” dihambat kemunculannya di Indonesia selama Orde Baru dan dihambat juga ketika sistem pemilihan tidak langsung. Namun apabila dilakukan perubahan sistem pemilihan menjadi pemilihan langsung maka “orang kuat lokal” dapat muncul dan berkembang di Indonesia.⁴⁷

William Case (2002) berpendapat fenomena “bossime lokal” sebenarnya memperlihatkan bahwa demokrasi di Filipina pasca otoritarianisme dan sentralisme Ferdinand Marcos merupakan demokrasi yang stabil tetapi

⁴⁵ John T. Sidel, *Op.Cit.*, hal 1-22.

⁴⁶ John T. Sidel, “Bossism and Democracy in the Philippines, Thailand and Indonesia : Towards An Alternative Framework for The Study “Local Strongmen”, dalam John Harris, Kristian Stokke dan Olle Tornquist (eds), *Politicising Democracy, The New Local Politics of Democratization*, (New York : Palgrave Macmillan, 2004), hal 53-57.

⁴⁷ *ibid*

mempunyai kualitas yang sangat rendah. Rendahnya kualitas demokrasi di Filipina dikarenakan walaupun pemilu diselenggarakan secara reguler tetapi banyak terjadi perilaku bos lokal yang melakukan berbagai kecurangan politik. Mereka melakukan mobilisasi suara rakyat dengan sogokan dan intimidasi.⁴⁸

“Bossisme lokal” membangun basis ekonomi dan politik mereka melalui cara kekerasan dan korupsi politik. Di dalam politik Filipina, fenomena “bossisme lokal” dengan “pasukan khusus” dan korupsi keuangan negara merupakan gejala yang endemik. Sehingga terdapat negara lemah dan “bossisme yang kuat” di dalam politik lokal Filipina. Politik elektoral yang kompetitif berjalan beriringan dengan klientalisme, politik uang dan intimidasi yang dimiliki oleh “Bossisme lokal”.⁴⁹

”Bossisme lokal” tumbuh subur di Filipina karena karakter masyarakat yang masih melegalkan ikatan patron-klien dengan para klan besar. Ikatan ini berlanjut karena semua klan besar menjadi majikan rakyat kecil tersebut di lahan pertanian, perkebunan, pertambangan dan industri di masa modern. Tak mengherankan ketika dilakukan pemilu, rakyat kecil akan cenderung tunduk kepada kekuasaan para bos.⁵⁰

”Bossisme lokal” pasti berbentuk keluarga politik di Filipina. ”Bossisme lokal” ini juga membangun sumber daya keuangan dari aktivitas ekonomi yang ilegal terutama judi togel yang bernama *jueteng* dan sabung ayam yang bernama *sabongan*. Sebuah survei tahun 90-an hampir 30 % laki-laki dewasa di Filipina menjadi penggemar berat *jueteng*. Sekitar 180 juta dollar uang yang beredar dalam judi *jueteng* per tahun. Bahkan kemenangan Gloria Macapagal Arroyo banyak dikarenakan persahabatan dengan Bong Pineda penguasa *jueteng* nasional. Para bos lokal juga menguasai bisnis penyelundupan. Mereka juga menghindari pajak dengan membangun pelabuhan siluman untuk ekspor impor tanpa terkena pajak. Pengalaman “bossisme lokal” di Filipina memperlihatkan banyak paradoks. Demokrasi tumbuh subur, tetapi oligarki juga bertambah subur. Alam yang kaya

⁴⁸ William Case, *Politics in Southeast Asia : Democracy or Less*, (Surrey : RoutledgeCurzon, 2002), hal 201-203.

⁴⁹ Carl A. Trocki (ed), *Gangsters, Democracy and The State in Southeast Asia*, (New York : Cornell Southeast Asian Program Publications, 2003), hal 7-15.

⁵⁰ Eva-Lotta E. Hedman, *Philippine Politics and Society in the 20th Century : Colonial Legacies, Post-Colonial Trajectories*, (London : Routledge, 2000), hal 89.

akan sumber daya alam tetapi rakyatnya miskin dengan para bos lokal bertambah kaya. Filipina merupakan gambaran negara yang lemah dengan bos politik yang kuat beserta jejaring politik mereka. Motif menguasai birokrasi adalah untung ekonomi pemburu rente (*rent seeking economy*). Negara menjadi alat dari bos lokal dan keluarga politiknya. Mereka membatasi pasar dengan kebijakan yang memberikan privelese kepada kelompok mereka. Negara cenderung lemah dan dilemahkan dalam berhadapan dengan mereka. Pasca otoritarianisme Marcos di Filipina, 83 % atau 166 anggota kongres merupakan bos lokal dari keluarga politik dan klan-klan terkenal. 60 % pejabat walikota dan gubernur berasal dari klan-klan ternama. Ada yang berasal dari klan kaya seperti Lopez dan Osmena. Ada yang membangun klan politiknya dari kemampuan membangun pasukan para militer seperti keluarga Durano dan Montano. Pemilu merupakan landasan legitimasi para bos lokal dengan jejaring keluarga politik mereka untuk mendirikan dinasti politik mereka secara demokratis (pemilu).⁵¹

Takeshi Kawanaka (1998) menjelaskan bahwa kekuasaan “bossisme lokal” selalu dibangun dari dinamika kompetisi dan kompromi diantara dua “orang kuat lokal” beserta keluarga politik dan mesin politik mereka. Kompetisi dan kompromi yang dilakukan keduanya berlangsung dalam durasi waktu yang pendek. Seperti yang terjadi dalam kompromi dan kompetisi diantara Jesse Robredo dan keluarga Robredo dengan Sulpicio Roco dan keluarga Roco di Naga, Filipina.⁵²

Patricio N. Abinales (2004) menilai ”bossisme lokal” tidak saja berkuasa dalam konteks masyarakat Filipina yang *mestizo* dan katolik. ”Bossisme lokal” juga berkuasa dalam konteks masyarakat Filipina yang melayu dan muslim. Misalnya dominasi Salipada Pendatun dan Keluarga Pendatun yang menjadi elit dominan di Cotabato. Keluarga ini menguasai ekonomi dan politik di Cotabato. Salipada Pendatun dan Keluarga Pendatun merupakan keturunan langsung Sharif

⁵¹ Alfred W. McCoy, *An Anarchy of Families : State and Family in the Philippines*, (Wisconsin : The University of Wisconsin University Press, 2009), hal 1-24.

⁵² Takeshi Kawanaka, ”The Robredo Style : The Philippine Local Politics in Transitions”, dalam *Kasarinlan, A Philippine Quarterly of Third World Studies*, Volume 13 Nomor 3 Tahun 1998.

Kabungsaan pendiri Kesultanan Magindanao. Keluarga ini sejak dahulu terkenal kaya raya dengan kepemilikan ribuan hektar tanah perkebunan.⁵³

c. “Orang Kuat Lokal” yang Predator

Vedi Hadiz menyatakan bahwa desentralisasi di Indonesia memberikan jalan bagi kebangkitan dan konsolidasi “orang kuat lokal”. Vedi Hadiz menggunakan juga kata oligarki lokal atau bos lokal untuk menggantikan kata “orang kuat lokal”. Kata bos lokal, oligarki atau “orang kuat lokal” merujuk kepada subyek yang sama.⁵⁴

Subyek tersebut adalah bertahannya warisan Orde baru yaitu kelompok predatoris yang kuat yang mengontrol kekuasaan negara (institusinya dan sumber dayanya) dan dibarengi dengan tidak terorganisirnya gerakan sosial yang independen di masa desentralisasi di Indonesia. Desentralisasi justru memperkuat posisi ekonomi dan politik “orang kuat lokal” yang predator ketimbang memperkuat masyarakat lokal.⁵⁵

Desentralisasi menyebabkan politik di tingkat lokal menguat kembali tetapi tidak disertai dengan konsolidasi demokrasi berideologi liberal karena menghasilkan “orang kuat lokal” yang predatoris dengan penggunaan politik uang dan premanisme. Pembajakan institusi demokrasi yang berlangsung selama desentralisasi dilakukan oleh koalisi yang memiliki kepentingan-kepentingan predatoris atau penghisap. Indikasinya dapat dilihat dari aktor politik yang terlibat seperti birokrat dan pengusaha yang masih membutuhkan dan bergantung pada proyek negara dan kontrak-kontrak pemerintah, politisi-politisi yang asal usulnya masih bisa dihubungkan dengan partai-partai lama Orde Baru dan rekrutmen aparatur politik dan operator politik masih berasal dari organisasi-organisasi seperti KNPI, HMI dan GMNI.⁵⁶

⁵³ Patricio N. Abinales, *Making Mindanao : Cotabato and Davao in the Formation of Philippine Nation-State*, (Manila : Ateneo De Manila University Press, 2004), hal 130-135.

⁵⁴ Vedi R. Hadiz, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia : A Southeast Asia Perspective*, (Stanford : Stanford University Press, 2010, hal 92-94.

⁵⁵ *ibid*, hal 47-49.

⁵⁶ Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, “Neo-liberal Reforms and Illiberal Consolidations : The Indonesian Paradox”, dalam *Journal of Development Studies* Volume 41 Nomor 2 Bulan Februari 2005.

Negara otoriter yang mendominasi kekuasaan selama era Orde Baru sudah tidak ada semenjak tahun 1998. Namun elemen-elemen Orde Baru ternyata telah menata kembali diri mereka di dalam jaringan patronase baru yang bersifat desentralistik, lebih cair dan saling bersaing satu sama lain. Logika utama kehidupan politik di Indonesia pasca-Soeharto tetap saja perebutan peluang-peluang untuk *rent-seeking* melalui pengamanan akses menuju posisi aparatur negara, untuk tujuan-tujuan akumulasi pribadi. Reformasi tidak berarti kekalahan politis bagi sederet kepentingan yang dipelihara dan dipupuk dibawah jaringan patronase Orde Baru yang luas.⁵⁷

Dalam penelitian Vedi R. Hadiz di Sumatera Utara, para elit menganggap lembaga-lembaga demokrasi yang digerakkan dengan politik uang dan kekerasan bisa sama menguntungkannya dengan perlindungan rezim otoritarian yang bersifat menyeluruh. Bahkan deretan kepentingan yang sekarang memerebutkan kekuasaan di tingkat lokal tampak lebih bervariasi dibandingkan pada masa Soeharto. Di dalamnya termasuk para pialang dan bandar politik ambisius, birokrat negara yang lihai dan masih bersifat predatoris, kelompok-kelompok bisnis baru yang berambisi tinggi serta beranekaragam gangster politik, kaum kriminal dan barisan keamanan sipil. Mayoritas dari kelompok-kelompok ini dibesarkan oleh rezim Orde Baru sebagai operator dan pelaksana lapangannya.⁵⁸

Oligarki yang dibesarkan oleh rezim otoritarian Orde Baru secara mengesankan berhasil melakukan metamorfosis menjadi oligarki dengan penggunaan politik uang. Oligarki baru yang hidup di masa pasca otoritarian berhasil memanfaatkan jaringan patronase dan mekanisme untuk mengalokasi kekuasaan dan kekayaan publik, mereka mendapatkan arena baru dalam wujud partai politik dan parlemen. Di dalam akomodasi sistem kekuasaan politik yang telah mengalami desentralisasi dan difusi berhasil mampu mengubah mereka yang pada awalnya seorang reformis menjadi bagian di dalam persatuan kapitalisme predatoris dan politik demokratis yang dibangun oleh kekuatan Oligarki.⁵⁹

⁵⁷ Vedi R. Hadiz, *Dinamika Kekuasaan : Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, (Jakarta : Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, 2005), hal 239-244.

⁵⁸ *ibid.*

⁵⁹ Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, *Reorganizing Power in Indonesia : The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, (London : Routledge, 2004), hal 187-188.

Desentralisasi telah dibajak oleh kepentingan predatoris lokal. Fakta memperlihatkan oligarki lama dan kepentingan predatoris tidak mampu dihilangkan oleh reformasi. Mereka berhasil menyesuaikan diri dan memperlihatkan bahwa mereka juga bagian dari demokrasi dan reformasi. Ada lima bentuk elit lokal yang bertarung dalam arena politik lokal di Indonesia era desentralisasi. Pertama, mantan elit yang dibesarkan oleh Orde Baru yang telah belajar untuk menguasai politik demokrasi pada tingkat lokal melalui penggunaan politik uang dan berbagai instrumen mobilisasi politik dan intimidasi. Kedua, birokrat tua yang dibesarkan oleh Orde Baru yang berharap mampu melakukan transformasi birokrasi yang telah lama mereka pegang menjadi kekuatan politik yang mampu secara langsung menentukan melalui pembangunan koalisi lokal sebagai kekuatan pendukungnya. Ketiga, pengusaha lokal dengan kategori pengusaha dibidang usaha kecil atau menengah seperti misalnya kontraktor, perdagangan dan jasa yang ambisi semakin meningkat. Keempat, kelompok preman dan kelompok kekerasan yang selama Orde Baru menjadi alat ditingkat lokal yang hendak mencoba mencari peruntungan dalam politik demokrasi. Kelima, kelompok politik yang biasanya menjadi operator dimasa Orde Baru terutama organisasi massa mahasiswa dan pemuda yang dibina Orde Baru seperti Himpunan Mahasiswa Islam, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia dan Komite Nasional Pemuda Indonesia.⁶⁰

“Orang kuat lokal” yang predator melakukan berbagai macam cara terutama politik uang dan premanisme politik dalam rangka mempertahankan dan mengamankan posisi mereka. Politik uang dilakukan karena tidak transparannya penghimpunan dana politik terutama di tingkat lokal. Pemilihan umum (eksekutif dan legislatif) di tingkat lokal telah berubah menjadi industri yang berbiaya tinggi. Rata-rata mengeluarkan biaya 10 juta dollar untuk kemenangan seorang gubernur dan 1,6 juta dollar untuk kemenangan seorang bupati. Premanisme politik dilakukan oleh satgas partai dan ormas yang menjadi milisi represif bagi

⁶⁰ Vedi R. Hadiz, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia : A Southeast Asia Perspective*, (Stanford : Stanford University Press, 2010, hal 92-94.

kekuasaan Orde Baru (FKPPI dan Pemuda Pancasila) serta organisasi kekerasan berbasis agama dan kedaerahan (FPI dan FBR).⁶¹

Vedi Hadiz mencatat bahwa kekuatan-kekuatan gerakan sosial memiliki akses yang kecil terhadap kekuasaan dan sumberdaya serta tidak dipersiapkan dengan baik berani menantang dan bertarung dengan elit lokal yang predatoris yang memiliki posisi sosial dominan. Pertarungan yang berakhir dengan kekalahan dipihak kekuatan-kekuatan gerakan sosial dikarenakan demokratisasi dan desentralisasi tidak berdampak positif bagi peningkatan kapasitas organisasi petani dan organisasi buruh sebagai kekuatan sosial utama gerakan sosial. Tanpa organisasi yang kuat dan vokal, buruh terisolasi dalam sistem pemilihan yang didominasi pembelian suara, biaya tinggi dan persekutuan pengusaha kota besar dan organisasi kekerasan. Tidak ada keberpihakan pemerintah ketika gerakan petani dan masyarakat adat menghadapi konflik tanah dengan perusahaan besar. Justru aparat keamanan kembali melakukan represi seperti jaman otoriter.⁶²

Menurut Benedict Anderson, fenomena "orang kuat lokal" dimaknai sebagai demokrasi tuan tanah (*cacique democracy*) di Filipina. Dimana demokrasi dikuasai keluarga-keluarga politik terkemuka di tingkat lokal hingga di tingkat pusat. Penguasa pusat tidak lain adalah keluarga politik yang dulu berkuasa di tingkat provinsi dan kota.⁶³

Nama-nama seperti Marcos, Conjuanco. Osmena, Quezon dan Macapagal merupakan mantan penguasa lokal yang kemudian berhasil menjadi presiden Filipina. Hakekat demokrasi tuan tanah adalah penerapan demokrasi prosedural melalui pemilihan kepala daerah yang berhasil mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi dan politik keluarga-keluarga politik melalui pelibatan anggota keluarga (saudara, anak, istri dan keponakan) dalam menjalankan kekuasaan. Tuan tanah ini dalam menjalankan kekuasaannya dipersenjatai dengan pasukan pengawal pribadi dan milisi pembunuh.⁶⁴

Ben Anderson menyebut demokrasi tuan tanah sebagai keunikan Filipina. Musuh terbesar dari demokrasi tuan tanah ini adalah gerakan sosial yang radikal

⁶¹ *ibid*, hal 133-141.

⁶² *ibid*, hal 143-160.

⁶³ Benedict Anderson, "Cacique Democracy in the Philippines : Origins and Dreams", dalam *New Left Review* No. 169 Bulan Mei-Juni 1988.

⁶⁴ *Ibid*.

dan intelektual yang radikal. Gerakan sosial yang radikal ini berwujud gerakan petani tak bertanah hukbalahap. Intelektual yang radikal ini berwujud dalam dua alumnus Universitas Filipina Nur Misuari dan Jose Maria Sison. Nur Misuari membentuk pergerakan MNLF (Moro National Liberation Front) dan Jose Maria Sison membentuk pergerakan NPA (New People Army).⁶⁵

Vedi Hadiz memiliki persamaan dan perbedaan pandangan dengan John Sidel mengenai "orang kuat lokal" di Indonesia. Mereka sama-sama menyepakati bahwa "orang kuat lokal" di Indonesia tidak brutal dengan melakukan kekerasan politik seperti pembunuhan politik yang marak terjadi di Filipina dan Thailand, kurang terlibat dalam aktivitas ekonomi ilegal seperti perjudian, narkoba, prostitusi dan penyelundupan seperti yang dilakukan "orang kuat lokal" di Thailand dan Filipina dan jaringan dan mesin politik "orang kuat lokal" di Indonesia belumlah sekuat di Filipina dan Thailand sehingga yang terbentuk adalah klik politik antara pengusaha, birokrat dan politisi.⁶⁶

Perbedaan keduanya adalah John Sidel tidak terlalu menekankan melemahnya gerakan sosial terutama kelompok buruh dan kelompok petani radikal sebagai prasyarat kemunculan "orang kuat lokal". Sedangkan bagi Vedi Hadiz melemahnya gerakan sosial terutama kelompok buruh dan kelompok petani menjadi prasyarat penting kemunculan "orang kuat lokal". Selain itu Vedi Hadiz juga menekankan pentingnya bertahannya kelompok otoriter yaitu kelompok predadoris yang kuat mengontrol negara (institusi dan sumber dayanya) sebagai landasan kemunculan "orang kuat lokal".⁶⁷ Dibawah ini ditampilkan tabel perbandingan "orang kuat lokal", bossisme lokal dan "orang kuat lokal" yang predator (**Tabel 1.5**).

⁶⁵ *ibid.*

⁶⁶ Vedi R. Hadiz, *Op.Cit*, hal 57-59.

⁶⁷ *ibid*, hal 143-145.

Tabel 1.5
Perbandingan "Orang Kuat Lokal", "Bossisme Lokal" dan "Orang Kuat Lokal" yang Predator

No.	Unsur Pembeding	"Orang Kuat Lokal"	"Bossisme Lokal"	"Orang Kuat Lokal" yang Predator
1.	Kontrol atas Masyarakat	1. Simbol 2. Hadiah 3. Hukuman	1. Politik Uang 2. Kekerasan	1. Politik Uang 2. Kekerasan
2.	Lokasi Penelitian	Negara Baru Merdeka	1. Filipina 2. Indonesia. 3. Thailand	Indonesia
3.	Latar Belakang Ekonomi	Selalu Orang Kaya	Tidak Selalu Orang Kaya	Tidak Selalu Orang Kaya
4.	Proses Pembentukan	1. Fragmentasi masyarakat . 2. Independensi antar organisasi sosial di negara baru merdeka	1. Kegagalan pemerintah memberikan kesejahteraan rakyat. 2. Kebutuhan ekonomi yang konkret dan langsung dibutuhkan. 3. Ketimpangan sosial yang tinggi. 4. Kelangkaan akses terhadap kebutuhan pokok.	1. Bertahannya warisan politik otoriter yaitu kelompok predatori yang kuat mengontrol kekuasaan negara (institusinya dan sumber dayanya). 2. Tidak terorganisirnya gerakan sosial yang independen
5.	Aktor	1. Tuan Tanah 2. Kepala Suku 3. Panglima Perang. 4. Pemimpin Klan 5. Pemimpin Tradisional	1. Kepala Daerah 2. Legislatur 3. Mantan Komandan Militer 4. Pengusaha	1. Mantan Elit Orde Baru. 2. Birokrat Tua Orde Baru 3. Pengusaha Lokal 4. Kelompok Preman 5. Kelompok Ormas Mahasiswa/Pemuda

No.	Unsur Pemandang	“Orang Kuat Lokal”	“Bossisme Lokal”	“Orang Kuat Lokal” yang Predator
6.	Kekuasaan di Tingkat Lokal	Tersebar kepada implementator /birokrat lokal (negara), politisi lokal dan orang kuat lokal	Terpusat kepada seorang bos lokal dengan birokrat dan milisi sebagai mesin politik	Terpusat kepada klik politik antara pengusaha, birokrat dan politisi
7.	Hubungan dengan Pemerintah Pusat	Terkadang bermusuhan dan terkadang bersekutu dengan negara	Bersekutu dan menjadi broker pemerintah pusat	Bersekutu karena mereka adalah bagian dari oligarki lama Orde Baru yang mampu bertahan
8.	Kontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Industrialisasi	Menghambat Industrialisasi dan Pertumbuhan Ekonomi	Mendorong dan bersifat positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi	Merugikan industrialisasi melalui politik perizinan yang mengeluarkan biaya siluman
9.	Afiliasi Partai Politik	Tidak Berafiliasi	Berpindah-pindah dari Partai Nasionalis ataupun Liberal tergantung patron elit pusat	Bisa bergabung dengan partai lama seperti Golkar, PDI Perjuangan dan PPP ataupun partai-partai baru seperti PAN, PKB, PKS dan partai lainnya.
10.	Reproduksi Kekuasaan	Keturunan langsung tanpa melalui mekanisme pemilihan umum	Keturunan langsung dan kroni melalui mekanisme pemilihan umum	Bagian dari klik politik melalui mekanisme pemilihan umum

Sumber : Diolah dari Joel S. Migdal, *Strong Societies and Weak States : State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*, Princeton, NJ : Princeton University Press, 1988, John T. Sidel, *Capital, Coercion and Crime : Bossism in the Philippines*, Stanford : Stanford University Press, 1999 dan Vedi R. Hadiz, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia : A Southeast Asia Perspective*, Stanford : Stanford University Press, 2010

1.6 Metode Penelitian

Dalam menjawab permasalahan penelitian digunakan sebuah metode penelitian. Pemilihan metode penelitian biasanya dilakukan berdasarkan cara yang paling tepat untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian kualitatif dalam ilmu politik adalah terminologi yang umum untuk merujuk kepada teknik-teknik pengumpulan data seperti observasi, observasi partisipan, wawancara individu yang intensif dan wawancara kelompok yang fokus, yang berusaha memahami pengalaman dan praktek informan kunci dan untuk menempatkan mereka secara tepat dalam konteksnya. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman subyektif dan pemaknaan yang mereka hubungkan dari pengalaman-pengalaman tersebut. Sudut pandang mereka menjadi yang terpenting.⁶⁸

Metode penelitian kualitatif identik dengan pendekatan intrepitif. Bahkan dikatakan secara fundamental metode penelitian kualitatif dibangun oleh pendekatan intrepitif. Secara mutlak peneliti harus melakukan intrepitasi.⁶⁹ Pendekatan intrepitif dalam studi ilmu politik terfokus kepada makna yang membentuk aksi dan institusi serta cara mereka melakukannya. Pendekatan intrepitif mempelajari keyakinan, ide atau wacana. Pendekatan ini mempelajari keyakinan didalamnya dan bahkan aksi, praktek dan institusi. Ada tiga arti penting pendekatan intrepitif. Pertama, orang bertindak atas dasar keyakinan dan preferensi mereka. Kedua, kita tidak dapat memisahkan keyakinan dan preferensi mereka dari fakta obyektif tentang mereka seperti kelas sosial, ras atau posisi institusionalnya. Ketiga, ideologi yang digunakan aktor-aktor politik untuk melegitimasi aksi mereka. Dalam memahami aksi, praktek dan institusi kita harus terlebih dahulu memahami makna, keyakinan dan preferensi orang-orang yang terlibat.⁷⁰

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pendekatan kualitatif adalah melalui pengamatan dan wawancara mendalam. Disamping wawancara mendalam dapat juga digunakan diskusi kelompok yang fokus. Wawancara

⁶⁸ David Marsh dan Gerry Stoker (eds), *Theory and Methods in Political Science*, (London : Macmillan Press Ltd, 1995), hal 197-199.

⁶⁹ John W. Creswell, *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, (London : Sage Publications, 2003), hal 182.

⁷⁰ David Marsh dan Gerry Stoker (eds), *Op.Cit*, hal 131-135.

mendalam adalah mendengarkan orang-orang berbicara agar memperoleh suatu wawasan tentang pandangan hidup mereka dan bagaimana mereka memandang segala hal sebagaimana adanya.⁷¹

Penelitian mengenai Fenomena “Orang Kuat Lokal” di Indonesia Era Desentralisasi : Studi Kasus tentang Dinamika Kekuasaan Zulkifli Nurdin di Jambi dilakukan di Jambi. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam dan studi dokumen. Keduanya akan saling memperkuat dengan cara data hasil wawancara diperkuat dengan berbagai dokumen yang relevan atau studi dokumen yang dilakukan diperkuat dengan wawancara mendalam yang relevan.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap narasumber-narasumber yang masuk ke dalam 7 (tujuh) kategori narasumber dengan total 28 narasumber. Kategori pertama adalah Pengurus Partai Politik di Provinsi Jambi. Narasumber yang termasuk dalam kategori pertama adalah : Saiful Azwar, S.Pt (Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi), Bambang Bayu Suseno, S.P. MM (Ketua DPD PAN Kabupaten Muaro Jambi), Drs. H. Arifien Manap (Ketua DPD Golkar Kota Jambi), Nuzul Prakasa (Wakil Ketua DPD Golkar Kota Jambi), Sufardi Nurzain, M.Si (Sekretaris Golkar Provinsi Jambi), Cornelis Buston, SP (Wakil Ketua DPD Demokrat Provinsi Jambi), Syahidan Alfajri (Ketua DPD Demokrat Kabupaten Muaro Jambi) dan Edi Purwanto, M.Si (Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi).

Kategori kedua adalah Birokrat di Pemerintah Provinsi Jambi. Narasumber yang termasuk dalam kategori kedua adalah : Dr. Heriyandi Roni, M.Si (Kepala Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Jambi), S (Mantan Pejabat Eselon II Pemerintah Provinsi Jambi) dan D (Pejabat Eselon III Pemerintah Provinsi Jambi). Kategori ketiga adalah Tim Sukses Zulkifli Nurdin. Narasumber yang termasuk dalam kategori ketiga adalah : HS (Tim Pemenangan Zulkifli Nurdin Pada Pemilihan Gubernur tahun 1999) dan MN (Tim Pemenangan Zulkifli Nurdin Pada Pemilihan Gubernur tahun 2005).

⁷¹ *ibid*, hal 15 dan 201.

Kategori keempat adalah Aktivistis Organisasi Masyarakat Sipil di Jambi. Narasumber yang termasuk dalam kategori keempat adalah : IS (Paguyuban Masyarakat Sunda Jambi), Rivani (CAPP), Kasmadi Kasyim, SH (YLBHL), Aidil (Ketua Persatuan Petani Jambi), Roida Pane (Ketua SBSI Provinsi Jambi), Willy (Aktivistis Petani) dan GT (Aktivistis Mahasiswa). Kategori kelima adalah jurnalis di Provinsi Jambi. Narasumber yang termasuk dalam kategori kelima adalah : Paisal Kumar (Pemimpin Redaksi Jambi Independen), JS (Koresponden Majalah Gatra) dan SS (Wartawan Tribun Jambi).

Kategori keenam adalah pengamat politik lokal di Jambi. Narasumber yang termasuk dalam kategori keenam adalah : NK (STISIP NH Jambi), AK (Universitas Jambi) dan PM (Universitas Jambi). Kategori ketujuh adalah penyelenggara pemilu di Jambi. Narasumber yang termasuk dalam kategori ini adalah Yasir Arafat, SE (Ketua KPUD Provinsi Jambi) dan Aldrin Ali, M.Si (Anggota Panwaslu Provinsi Jambi)

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pembahasan yang terdiri atas lima bab yaitu : Bab I Pendahuluan, Bab II Kemunculan Zulkifli Nurdin sebagai Orang Kuat Lokal di Jambi, Bab III Zulkifli Nurdin dan Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 1999 dan 2005, Bab IV Pengaruh Zulkifli Nurdin dalam Politik Lokal di Jambi dan Bab V Penutup.

Atas dasar perumusan masalah di atas, maka tesis ini akan mencoba menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan membahas tentang latar belakang permasalahan, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan metode penelitian yang digunakan. Dalam menganalisa permasalahan digunakan beberapa teori yang relevan yaitu teori tentang “orang kuat lokal”, teori tentang “bossisme lokal” dan teori tentang “orang kuat lokal” yang predator. Dijelaskan juga pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka.

Bab II Kemunculan Zulkifli Nurdin sebagai “Orang Kuat Lokal” di Jambi. membahas tentang proses Zulkifli Nurdin menjadi “orang kuat lokal” di Jambi era desentralisasi dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Zulkifli Nurdin dan keluarga Nurdin Hamzah. Pembahasan dalam Bab ini juga menjelaskan tentang “orang kuat lokal” yang lain yang juga muncul ketika reformasi berlangsung. Serta membahas kompromi dan kompetisi diantara Zulkifli Nurdin dan “orang kuat lokal” yang lain di Jambi era desentralisasi.

Bab III Zulkifli Nurdin dan Pemilihan Gubernur Jambi tahun 1999 dan 2005 membahas tentang tindakan-tindakan yang dilakukan Zulkifli Nurdin dalam merebut dan mempertahankan kekuasaannya ketika terjadi pemilihan umum kepala daerah secara langsung maupun pemilihan melalui anggota DPRD Provinsi Jambi. Bab ini juga menjelaskan manfaat-manfaat ekonomi dan politik yang diperoleh Zulkifli Nurdin ketika menjabat sebagai Gubernur Jambi. Serta membahas dampak kekuasaan Zulkifli Nurdin bagi kesejahteraan rakyat di Jambi.

Bab IV Pengaruh Zulkifli Nurdin dalam Politik Lokal di Jambi membahas tentang pengaruh Zulkifli Nurdin terhadap LSM lokal, jurnalis, paguyuban etnis, kelompok kekerasan dan pilkada di kabupaten/kota. Bab ini juga membahas keberhasilan Zulkifli Nurdin melemahkan gerakan sosial di Jambi. Serta membahas keberhasilan Zulkifli Nurdin menguasai Partai Amanat Nasional di Jambi.

Bab V Penutup membahas tentang kesimpulan dan implikasi teoritis. Dalam membahas kesimpulan dijelaskan tentang beberapa kesimpulan yang diperoleh. Dalam membahas implikasi teoritis dijelaskan tentang implikasi-implikasi teoritis yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk konfirmasi dan revisi.

BAB 2 KEMUNCULAN ZULKIFLI NURDIN SEBAGAI "ORANG KUAT LOKAL" DI JAMBI

Dalam bab ini dibahas empat pokok bahasan utama. Pokok bahasan pertama mengenai sejarah singkat Provinsi Jambi. Pokok bahasan kedua mengenai kebangkitan "orang kuat lokal" di Jambi. Pokok bahasan ketiga mengenai kompromi dan kompetisi "orang kuat lokal" di Jambi. Pokok bahasan keempat mengenai "orang kuat lokal" dari Keluarga Nurdin Hamzah. Sedangkan pokok bahasan yang terakhir mengenai peta jaringan kekuasaan Zulkifli Nurdin.

2.1 Sejarah Singkat Provinsi Jambi

Sebelum terbentuknya organisasi-organisasi perjuangan kemerdekaan berskala nasional di Karesidenan Jambi, perjuangan melawan kolonialisme Belanda dilakukan oleh pejuang-pejuang lokal. Salah satu pejuang terbesar di Karesidenan Jambi adalah Raden Mat Taher. Perlawanan Raden Mat Taher dapat ditumpas setelah gugurnya Raden Mat Taher pada akhir Januari 1907.⁷²

Perjuangan melawan kolonialisme di Karesidenan Jambi dilanjutkan oleh Sarekat Islam. Sarekat Islam merupakan wadah perjuangan kemerdekaan pertama berskala nasional yang berdiri di Karesidenan Jambi pada masa kolonialisme. Sarekat Islam Cabang Jambi yang kemudian dikenal sebagai *sarekat abang* dibangun oleh Raden Gunawan dan berkembang pesat di Jambi.⁷³

Pemerintah kolonial di Jambi berusaha menghancurkan gerakan *sarekat abang* di Jambi dengan mendirikan organisasi *Samaratul Insan*, sebuah organisasi Islam sebagai wadah para ulama di Jambi agar tidak terpengaruh ideologi *sarekat abang*. Disamping itu pemerintah kolonial juga menugaskan seorang kontrolir bernama De Graaf dan seorang kontraktor bangunan keturunan arab bernama Sayid Al-Musawa untuk mengawasi ulama dan rakyat Jambi agar terbebas dari pengaruh *sarekat abang*.⁷⁴

⁷² Elsbeth Locher-Scholten, *Kesultanan Sumatera dan Negara Kolonial : Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, (Jakarta : YOI, 2008), hal 278-279.

⁷³ Hartono Margono, Mujilan dan J.R. Chaniago, *Sejarah Sosial Jambi : Jambi sebagai Kota Dagang*, (Jakarta : Depdikbud, 1984), hal 65-68.

⁷⁴ *ibid.*

Pengendalian ulama memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas politik di Jambi saat itu. Legitimasi ulama yang kuat bersumber pada kepercayaan masyarakat Jambi akan nilai-nilai kultural yang diwakili dalam sebuah *seloko* atau ungkapan *Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah*. Ungkapan tersebut menggambarkan Islam dan Budaya Melayu Jambi merupakan satu kesatuan yang menjadi pegangan hidup masyarakat Jambi.⁷⁵

Sarekat Abang memutuskan melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1916 di seluruh wilayah Karesidenan Jambi. Kebesaran pemberontakan *sarekat abang* di Jambi hanya bisa disejajarkan dengan pemberontakan komunis tahun 1926-1927. Kader *sarekat abang* yang tewas mencapai 390 orang. Ribuan kader *sarekat abang* lainnya juga banyak yang ditahan dan dihukum mati. 1.387 orang kader dipenjara 10-20 tahun, 1.465 orang kader dipenjara dibawah 10 tahun dan 63 orang kader dijatuhi hukuman mati. Pemberontakan *sarekat abang* berhasil menewaskan 63 orang polisi kolonial, 9 orang administrator lokal dan seorang kontrolir bangsa Eropa.⁷⁶

Setelah kehancuran gerakan *sarekat abang*, organisasi perjuangan kemerdekaan baru muncul kembali di Jambi menjelang Perang Dunia II. Cabang Muhammadiyah berdiri di Jambi tahun 1930-an, Partai Syarikat Islam Indonesia Cabang Jambi berdiri di Jambi tahun 1939, Partai Muslimin Jambi dan Partai Arab Indonesia berdiri di Jambi tahun 1940.⁷⁷

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945 diterima di Jambi pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui Dr. AK Gani. Dr. AK Gani menyampaikan berita proklamasi dari Kota Palembang kepada R. Sudarsono, pimpinan serikat buruh di Jambi. R. Sudarsono segera menyebarkan berita proklamasi ke seluruh daerah bekas Karesidenan Jambi. Kepemimpinan politik di daerah bekas Karesidenan Jambi berada di tangan Republik Indonesia melalui Komite Nasional Indonesia di Daerah Jambi.⁷⁸

⁷⁵ Eva Zulfita, dkk, *Dampak Globalisasi Informasi dan Komunikasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Jambi*, (Jakarta : Depdikbud, 1993), hal 38-40.

⁷⁶ Elsbeth Locher-Scholten, *Op. Cit*, hal 311-312.

⁷⁷ *ibid*, hal 331-332.

⁷⁸ Depdikbud, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jambi*, (Jakarta : Depdikbud, 1982), hal 45-51.

Bekas Karesidenan Jambi masuk ke dalam wilayah administrasi Republik Indonesia dengan tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah.⁷⁹ Bekas Karesidenan Jambi terdiri dari tiga daerah kekuasaan yaitu Merangin, Batanghari dan Jambi. Terbentuknya Jambi menjadi Provinsi didasarkan oleh UU No. 61 tahun 1958 yang merupakan penggabungan dua UU darurat yang mendahuluinya yaitu UU darurat Nomor 10 tahun 1957 dan UU darurat Nomor 19 tahun 1957. Provinsi Jambi berdiri dengan wilayah kekuasaan bekas Karesidenan Jambi yang dimekarkan yang meliputi Kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi. Ditambah Kabupaten Kerinci yang sebelumnya bagian dari Sumatera Barat.⁸⁰

Proses politik kelahiran Provinsi Jambi diawali dari tuntutan dua organisasi pemuda, Himpunan Pemuda Merangin-Batanghari (HP Merbahari) dan Front Pemuda Jambi (Fropeja) agar Keresidenan Jambi dirubah menjadi daerah tingkat I Provinsi. Tuntutan dua organisasi pemuda tersebut disampaikan secara resmi tertanggal 10 April 1954 dan diterima langsung oleh Wakil Presiden RI Mohammad Hatta ketika berkunjung ke Bangko, Merangin. Tuntutan pembentukan Provinsi Jambi dicanangkan kembali dalam pelaksanaan Kongres Pemuda se-Daerah Jambi yang berlangsung 30 April-3 Mei 1954 dengan mengutus tiga orang delegasi dan seorang penasehat menghadap Menteri Dalam Negeri saat itu Prof. Dr. Mr. Hazairin.⁸¹

Perjuangan pembentukan Provinsi Jambi kemudian berlanjut dengan pelaksanaan Kongres Rakyat Jambi tanggal 14-18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni. Hasil dari Kongres Rakyat Jambi adalah pembentukan wadah perjuangan bernama Badan Kongres Rakyat Jambi (BKRD) untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi Daerah Otonom Tingkat I Provinsi Jambi. Atas desakan Kongres Pemuda se-Daerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957 yang meminta BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara *de facto* menjadi Provinsi Jambi, BKRD menyelenggarakan Sidang Pleno.⁸²

⁷⁹ *ibid*, hal 94.

⁸⁰ Hartono Margono, Mujilan dan J.R. Chaniago, *Op.Cit*, hal 5.

⁸¹ BKPMMD Provinsi Jambi, *Jambi Province and Regional Profile Investment Opportunities*, (Jambi : PT Profajar Printing, tanpa tahun), hal 11-12.

⁸² *ibid*, hal 12.

Setelah diselenggarakannya Sidang Pleno Badan Kongres Rakyat Jambi (BKRD) pada tanggal 6 Januari 1957, BKRD menyatakan bahwa Keresidenan Jambi menjadi Daerah Otonom Tingkat I Provinsi yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Menindaklanjuti hasil sidang Pleno BKRD maka pada tanggal 21 Januari 1957 diadakan rapat segitiga antara BKRD, Dewan Banteng (selaku penguasa pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah) dan Panglima TT II Sriwijaya (selaku penguasa militer Sumatera Selatan dan Jambi). Rapat segitiga memutuskan sebagai berikut :⁸³

- a. Dewan Banteng mengangkat Acting Gubernur Provinsi Jambi atas usul BKRD.
- b. Dewan Banteng mengesahkan Staff Acting Gubernur Provinsi Jambi sesuai dengan usul yang diajukan oleh Acting Gubernur.
- c. Pelaksanaan angka (1) dan (2) ini dilakukan pada tanggal 1 Februari 1957
- d. Realisasi Provinsi Jambi selanjutnya mengenai soal-soal keuangan dan pembangunan dilakukan secara berangsur-angsur, menempuh perundingan antara BKRD dengan Dewan Banteng

Pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein melantik Residen Jambi Djamin Gelar Datuk Bagindo sebagai *Acting* Gubernur Provinsi Jambi dan Haji Hanafie sebagai Wakil *Acting* Gubernur Provinsi Jambi dan sebelas orang staf (**Lihat Tabel 2.1**). Selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 1957, Presiden Republik Indonesia Soekarno menandatangani Undang-Undang Darurat No. 19 tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Jambi yang dilakukan di Denpasar, Bali. Undang-Undang Darurat tersebut kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958.⁸⁴

⁸³ Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, *Relief Kesejarahan dan Perjuangan Rakyat Jambi*, (Jambi : Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, 2008), hal 23.

⁸⁴ *Ibid.*

Tabel 2.1
Nama 11 Orang Staf *Acting* Gubernur Provinsi Jambi

No.	Nama
1.	H. Abdul Manap
2.	Kms. H.A. Somad
3.	Syamsu Bahrun
4.	M.Adnan Kasim
5.	Imron Nungcik
6.	Rd. Hasan Amin
7.	Rd. Suhur
8.	Abd. Umar
9.	Salim
10.	Nuhan
11.	Manan

Sumber : BKPM Provinsi Jambi, Jambi Province and Regional Profile Investment Opportunities, tanpa tahun

Pasca penetapan UU Nomor 61 tahun 1958, Menteri Dalam Negeri Sanoesi Hardjadinata mengangkat Djamin Gelar Datuk Bagindo sebagai sebagai D.D (*Dienst Doendie*) Gubernur yakni Residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi. Sesudah dilantik menjadi Pejabat Gubernur Provinsi, pada tanggal 30 Desember 1957, Djamin Gelar Datuk Bagindo atas nama Menteri Dalam Negeri meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di Gedung Nasional Jambi. Besoknya, Djamin Gelar Datuk Bagindo atas nama Menteri Dalam Negeri melantik dan mengambil sumpah anggota DPRD Provinsi Jambi. Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Des/2/40/57 diangkat 30 orang Anggota DPRD Provinsi Jambi. Komposisi anggota DPRD Provinsi Jambi berdasarkan hasil pemilu 1955 sebagai berikut. Partai Masyumi mempunyai anggota DPRD Provinsi terbanyak dengan 18 anggota. Disusul Partai NU dengan 7 anggota dan PNI dengan 2 anggota. Sisanya PSII, PSI dan PKI masing-masing mempunyai 1 anggota. (**Lihat Tabel 2.2**).⁸⁵

⁸⁵ *ibid*, hal 23-24.

Tabel 2.2
Perolehan Kursi DPRD Provinsi Jambi Pemilu 1955

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi DPRD
1.	Partai Masyumi	18
2.	Partai NU	7
3.	PNI	2
4.	PSII	1
5.	PSI	1
6.	PKI	1

Sumber : Sekretariat DPRD, 2008

M. Joesoef Singedekane menggantikan Djamin Gelar Datuk Bagindo sebagai Gubernur Provinsi Jambi periode 1957-1967. M. Joesoef Singedekane merupakan orang dekat Presiden Soekarno dan menjadi pengikut setia Bung Karno.⁸⁶ Berakhirnya kekuasaan Bung Karno menyebabkan berakhir pula kepemimpinan M. Joesoef Singedekane di Provinsi Jambi. Jusuf Singedekane kemudian berkarir di Sekretariat Negara sebagai Deputi Menteri Sekretaris Negara.⁸⁷

Pemerintahan Orde Baru selaku penguasa baru mengendalikan semua daerah-daerah di Indonesia. Sehingga Gubernur Jambi dan Ketua DPRD Provinsi Jambi selanjutnya ditentukan oleh Pemerintah Orde Baru. Diawali dengan pengangkatan H. Abdul Manap, salah satu tokoh pendiri Provinsi Jambi sebagai Pejabat Gubernur 1967-1968. H. Abdul Manap adalah salah satu dari sebelas staf acting Gubernur dimasa awal pembentukan Provinsi Jambi. H. Abdul Manap merupakan pejabat kepolisian di masa kolonialisme dengan jabatan terakhir Pembantu Kepala Polisi dan pernah menjabat Wedana di Muaro Tebo.⁸⁸

Abdul Manap menjadi orang melayu Jambi (asal Sarolangun) pertama yang menjabat Gubernur Jambi. Setelah kepemimpinan singkat H. Abdul Manap berturut-turut Jambi dipimpin oleh pendatang-pendatang dari luar Jambi. R.M Noer Atmadibrata (orang Sunda), Djamaludin Tambunan, SH (orang Batak) dan Masejhun Sofwan, SH (orang Jawa). Menjelang kejatuhan Orde Baru, Jambi

⁸⁶ Wawancara dengan H (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 1 Desember 2011.

⁸⁷ Robinson Pangaribuan, *The Indonesian State Secretariat 1945-1993*, (Perth : Asia Research Centre Murdoch University, 1995), hal 24.

⁸⁸ Depdikbud, *Op.Cit*, hal 21 dan 117.

kembali dipimpin oleh orang melayu Jambi (asal Jambi Seberang) Drs. H. Abdurrahman Sayuti yang sebelumnya menjabat Wakil Gubernur Provinsi Jambi (**Lihat Tabel 2.3**).

Tabel 2.3
Gubernur-Gubernur Provinsi Jambi

No.	Nama Gubernur	Periode	Keterangan
1.	M. Joesoef Singedekane	1957-1967	
2.	H. Abdul Manap	1967-1968	Pejabat Gubernur
3.	R.M. Noer Atmadibrata	1968-1974	
4.	Djamaluddin Tambunan, SH	1974-1979	
5.	Edy Sabara	1979	Pejabat Gubernur
6.	Mascjehun Sofwan, SH	1979-1989	
7.	Drs. H. Abdurrahman Sayoeti	1989-1999	
8.	Drs. H. Zulkifli Nurdin, MBA	1999-2005	
9.	Dr. Ir. H. Sudarsono H, SH, MA	2005	Pejabat Gubernur
10.	Drs. H. Zulkifli Nurdin, MBA	2005-2010	

Sumber : DPRD Provinsi Jambi, 2008

Kondisi yang terjadi di Jambi merupakan gambaran umum dominasi Pemerintahan Orde Baru terhadap daerah. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, Pemerintahan Orde Baru merupakan Orde Pemerintahan Otokratik dimana Indonesia dipimpin orang kuat yang melakukan berbagai manuver politik dan dalil hukum sehingga kekuasaan politik dan pemerintahan dapat terpusat ditangannya. Sentralisasi kekuasaan terkumpul ditangan presiden yang kerap menggunakan dalih "demi kepentingan bangsa". Melalui UU Nomor 5 tahun 1974, Pemerintahan Orde Baru bermaksud meminimalisir potensi daerah yang mencoba membuat gerakan-gerakan yang mengganggu stabilitas daerah dan jalannya roda pembangunan.⁸⁹

Ketentuan UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah pasal 15 menyiratkan bahwa para calon yang telah disepakati dan dimusyawarahkan antara pimpinan DPRD / pimpinan fraksi dengan Mendagri harus diajukan pada Presiden melalui Mendagri untuk diangkat salah satu dari

⁸⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, "Satu Abad Desentralisasi di Indonesia", dalam *Jurnal Prisma* Volume 29 Nomor 3 Bulan Juli Tahun 2010.

sedikitnya dua calon yang diajukan. Keputusan terakhir berada ditangan Presiden Soeharto.⁹⁰

Dampak kebijakan Orde Baru bagi daerah adalah terkontrolnya badan eksekutif dan legislatif di kabupaten, kota dan provinsi dalam hegemoni Pemerintah Pusat. Kontrol ini dilakukan melalui penentuan posisi pejabat tinggi di daerah dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri yang mempunyai kepentingan mengendalikan kekuasaan elit lokal. Kontrol tidak hanya dilakukan pada lembaga sipil di pemerintahan daerah saja tetapi juga dilakukan pada lembaga kemiliteran. Pemerintahan Orde Baru menyediakan hadiah jabatan legislatif (Ketua DPRD) dan eksekutif (Gubernur/Walikota/Bupati) kepada perwira aktif maupun purnawirawan.⁹¹

Jambi selama Orde Baru tidak memiliki Gubernur yang berasal dari kalangan militer. Ini berbeda dengan banyak daerah lain di Indonesia. Dua puluh dari dua puluh enam Gubernur pada tahun 1970 berasal dari kalangan tentara dan empat belas dari dua puluh tujuh pada tahun 1997 berasal dari kalangan tentara.⁹²

Namun bukan berarti militer tidak berperan di Jambi selama Orde Baru, mereka justru ditempatkan sebagai pemimpin legislatif daerah (Ketua DPRD). Sejak tahun 1972 hingga tahun 1999 Ketua DPRD Provinsi Jambi dijabat oleh kalangan militer (TNI ataupun Polri). Berturut-turut Ketua DPRD dipimpin oleh empat purnawirawan berpangkat kolonel. Kolonel M. Thaher, Kolonel Kemas A. Roni, Kolonel Supomo dan Kolonel H.M Syukur. Terakhir dipimpin oleh seorang jenderal yang sekaligus Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi, Brigjen H.M. Chaerun **(Lihat Tabel 2.4)**.

⁹⁰ Moch Nurhasim (ed), *Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan P2P LIPI, 2005), hal 222.

⁹¹ Leo Agustino dan Mohammad Agus Yosuff, "Politik Lokal di Indonesia : Dari Otokratik Ke Reformasi Politik", dalam *Jurnal Imu Politik* Edisi 21 Tahun 2010.

⁹² Henk Schulte Nordholt,, "Desentralisasi di Indonesia : Peran Negara Kurang, Lebih Demokratis ?" dalam John Harriss, Kristian Stokke dan Olle Tornquist, (eds), *Politisasi Demokrasi : Politik Lokal Baru*, (Jakarta : Penerbit Demos, 2005), hal 49.

Tabel 2.4
Ketua-Ketua DPRD Provinsi

No.	Nama Ketua DPRD	Periode
1.	H. Hanafie	1958
2.	H. A. Moerad Alwi	1958-1960
3.	H.M. Saleh Yasin	1961-1967
4.	Drs. Rd. Ismail Muhammad	1968-1971
5.	Kol. Pol. (Purn) M. Thaher	1972-1977
6.	Kol. Pol. (Purn) Kms A. Roni	1977-1982
7.	Kol. TNI. (Purn) Supomo	1982-1987
8.	Kol. TNI. (Purn) H.M. Syukur	1987-1997
9.	Brigjend. TNI (Purn) H.M. Chaerun	1997-1999
10.	Ir. H. Nasrun H.R. Arbain, M.Si	1999-2004
11.	H. Zoerman Manap	2004-2009

Sumber : DPRD Provinsi Jambi, 2008

Orde Baru menjalankan beberapa program dalam menjaga keteraturan politik dari tingkat pusat hingga daerah. Pertama, melakukan demobilisasi dan depolitisasi masyarakat melalui pengeluaran rakyat dari proses politik. Kedua, menyederhanakan sistem kepartaian menjadi dua partai politik dan satu kelompok fungsional kekaryaan (Golkar). Ketiga, membentuk UU Partai Politik yang melarang kegiatan partai politik di kecamatan dan desa. Keempat melakukan kebijakan asas tunggal dan deideologisasi yang menghasilkan massa mengambang. Melalui penerapan program diatas Orde Baru berhasil menciptakan demokrasi prosedural dengan adanya partai politik dan parlemen. Golkar sebagai kelompok konservatif yang terorganisir dengan mudah menjadi penguasa pada pemilu-pemilu Orde Baru (**Lihat Tabel 2.5**)⁹³

Tabel 2.5
Hasil Perolehan Suara untuk DPR RI pada Pemilu Tahun 1977-1997

No.	Partai	1977	1982	1987	1992	1997
1.	Golkar	62,1 %	64,2 %	73,2 %	68,1 %	74,5 %
2.	PPP	29,3 %	28,0 %	16,0 %	17,0 %	22,4 %
3.	PDI	8,6 %	7,9 %	10,9 %	14,9 %	3,1 %

Sumber : Andreas Ufen, 2009

⁹³ Andreas Ufen, "Political Parties and Democratization in Indonesia", dalam Marco Bunte dan Andreas Ufen (eds), *Democratization in Post-Soeharto Indonesia*, (Routledge : New York and London, 2009), hal 156-157.

Upaya menciptakan keteraturan dan ketertiban politik pun dijalankan di Jambi dengan membangun dominasi Golongan Karya sebagai kekuatan politik utama Orde Baru di Provinsi Jambi. Golkar Provinsi Jambi berhasil memenangkan pemilu legislatif untuk DPRD Provinsi Jambi secara mutlak. Kemenangan Golkar Provinsi Jambi selalu diatas kemenangan Golkar di tingkat pusat. Kecenderungan suara Golkar selalu naik pada setiap pemilu (**Lihat Tabel 2.6**).

Tabel 2.6
Hasil Perolehan Suara untuk DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu 1977-1997

No.	Partai	1977	1982	1987	1992	1997
1.	Golkar	83,50%	84,81%	88,94%	90,83%	91,99%
2.	PPP	15,66%	13,84%	8,18%	4,82%	6,03%
3.	PDI	0,84%	1,35%	2,88%	4,35%	1,98%

Sumber : Badan Kesbanglinmas Provinsi Jambi, 2001

2.2 Kebangkitan “Orang Kuat Lokal” di Jambi

Soeharto sebagai pemimpin Orde Baru menyatakan berhenti sebagai Presiden dan digantikan oleh wakilnya, B.J. Habibie. B.J. Habibie diangkat sumpah menjadi Presiden baru yang menjanjikan bergulirnya reformasi politik di Indonesia.⁹⁴ Kejatuhan Soeharto sering dikumandangkan sebagai kemenangan demokrasi. Pada satu sisi cara pandang tersebut benar. Indonesia telah mengenal multi partai, parlemen yang berfungsi, kebebasan pers dan terjadi desentralisasi. Pada sisi yang lain juga terlihat masyarakat dan politik yang belum berubah dari kondisi ketika Soeharto berkuasa. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya sikap intoleran terhadap oposisi, kinerja ekonomi yang stagnan, kekerasan atas nama etnik dan agama dan munculnya separatisme.⁹⁵

Reformasi yang bergulir di Indonesia juga berlangsung di Jambi. Reformasi membuat semua tokoh politik di Jambi baik yang tua maupun muda merasa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan kekuasaan politik di legislatif maupun eksekutif. Dimana sebelumnya prinsip senioritas dijunjung

⁹⁴ Adam Schwarz, *A Nation in Waiting : Indonesia's Search for Stability*, (New South Wales : Allen & Uwin, 2001), hal 208-210.

⁹⁵ David Bouchier dan Vedi R. Hadiz (eds), *Indonesian Politics and Society : A Reader*, (London : RoutledgeCurzon, 2003), hal 21-23.

tinggi dalam rekrutmen pemimpin baik di legislatif maupun eksekutif. Reformasi sepertinya menjanjikan adanya sirkulasi elit di Provinsi Jambi.⁹⁶

Pertarungan pertama diawali dengan pertarungan partai-partai dalam pemilu tahun 1999. Pada pemilu multipartai pertama pasca Orde Baru tersebut, Partai Golkar tetap berhasil menjadi pemenang pertama dalam pemilu tahun 1999. Namun terjadi penurunan suara yang cukup signifikan dari pemilu sebelumnya. PDI Perjuangan mengalami peningkatan suara yang besar dari pemilu sebelumnya dengan menjadi pemenang kedua. Disusul Partai Persatuan Pembangunan dan dua partai baru hasil reformasi yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa (**Lihat Tabel 2.7**).

Tabel 2.7
Hasil Perolehan Suara untuk DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu 1999

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	34,5
2.	PDI Perjuangan	24,7
3.	PPP	11,0
4.	Partai Amanat Nasional	7,7
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	4,8

Sumber : Badan Kesbanglinmas Provinsi Jambi, 2001

Pemilu 1999 di Jambi memberikan peluang bagi aktor-aktor politik baru hasil reformasi dan aktor politik lama yang mampu bertahan untuk berkompetisi memperebutkan jabatan-jabatan politik seperti Gubernur, Ketua DPRD ataupun Anggota DPR RI. Pemilu 1999 seolah menjadi tanda terjadinya pergeseran kekuatan politik di Jambi. Hasilnya muncul empat tokoh baru dalam politik lokal di Jambi hasil reformasi.⁹⁷

Pertama, seorang kontraktor pemda yang menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi, Nasrun Arbain terpilih menjadi Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 1999-2004. Nasrun Arbain menjadi Ketua DPRD Provinsi Jambi pertama yang bukan berasal dari purnawirawan TNI/Polri dan veteran pejuang kemerdekaan. Kedua, seorang pengusaha pribumi terkaya yang menjabat Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, Zulkifli Nurdin terpilih menjadi Anggota DPR

⁹⁶ Wawancara dengan Yasir Arafat (Ketua KPU Provinsi Jambi), Jambi, 24 November 2011.

⁹⁷ Wawancara dengan PM (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 1 Desember 2011.

RI. Sebelum reformasi Zulkifli Nurdin aktif di Partai Golkar dan menjadi Bendahara Partai Golkar sejak tahun 1996. Ketiga, seorang pengusaha yang menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan, Agneta Singedekane terpilih menjadi Anggota DPR RI. Agneta Singedekane merupakan anak dari Gubernur pertama Jambi, Jusuf Singedekane. (Lihat Tabel 2.3). Keempat, seorang kontraktor pemda yang menjadi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, Zoerman Manap terpilih menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 1999-2004. Zoerman Manap merupakan anak pertama dari Gubernur kedua Jambi, Haji Abdul Manap (Lihat Tabel 2.3).⁹⁸

Semua tokoh tersebut juga aktif di Gapensi dan Kadin serta berbagai asosiasi-asosiasi pengusaha atau kontraktor di Jambi. Zulkifli Nurdin pernah menjadi Ketua Gapensi dan Ketua Kadin di Jambi. Sedangkan Zoerman Manap pernah menjadi Ketua Gapensi di Jambi.⁹⁹

Politik lokal di Jambi pasca Orde Baru dipengaruhi oleh ikatan-ikatan emosional dan ikatan-ikatan primordialisme. Pengaruh ikatan emosional dan ikatan-ikatan primordialisme seperti asal usul keluarga dan latar belakang menjadi faktor yang menentukan. Situasi yang berbeda dengan masa Orde Baru dahulu.

Secara sederhana di Jambi ini masih berlaku ikatan-ikatan emosional. Politik lokal itu biasanya ada pengaruh ikatan emosional dan primordialisme kedaerahan. Biasanya itu yang kental. Biasanya siapa orangtuanya. Siapa dia, dari latar belakang apa dia.¹⁰⁰

Walaupun dinilai ada perbedaan dengan masa Orde Baru tetapi aktor-aktor yang muncul pasca pemilu 1999 masih ada kaitan atau hubungan politik dengan Orde Baru. Aktor-aktor tersebut tetap merupakan bagian elit lokal yang dibesarkan oleh Orde Baru.¹⁰¹ Pergeseran kekuatan politik Jambi pada pemilu 1999 justru memperlihatkan reformasi di Jambi telah berhasil dibajak oleh kekuatan yang berhasil mengatasnamakan rakyat dalam memanfaatkan demokratisasi sehingga mereka menduduki jabatan-jabatan penting pemerintahan

⁹⁸ Wawancara dengan PM (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 1 Desember 2011.

⁹⁹ *ibid.*

¹⁰⁰ Wawancara dengan Yasir Arafat (Ketua KPU Provinsi Jambi), Jambi, 24 November 2011.

¹⁰¹ Wawancara dengan SS (Wartawan Tribun Jambi), Jambi, 21 November 2011.

di daerah. Jabatan-jabatan tersebut nantinya akan mereka gunakan untuk kepentingan mereka sendiri bukan kepentingan rakyat.¹⁰²

Nasrun Arbain, Agneta Singedekane, Zulkifli Nurdin dan Zoerman Manap, keempatnya berprofesi sebagai pengusaha dan aktif di partai-partai Orde Baru sebelum reformasi terjadi. Mereka semua mengembangkan usahanya sebagai pengusaha di era Orde Baru. Nasrun Arbain dan Agneta Singedekane sama-sama aktif di PDI sedangkan Zulkifli Nurdin dan Zoerman Manap sama-sama aktif di Golkar.¹⁰³

Fakta ini menunjukkan kesamaan dengan temuan penelitian Vedi Hadiz mengenai elit-elit baru di Sumatera Utara hasil reformasi. Dalam penelitiannya ditemukan juga fakta bahwa pemain-pemain di politik lokal Sumatera Utara yang muncul sebagai aktor-aktor politik baru adalah para pengusaha kecil atau menengah yang paling tidak sebagian tergantung kepada proyek dan kontrak negara dan politisi profesional dengan kaitan khusus ke partai-partai Orde Baru (Golkar, PDI dan PPP).¹⁰⁴

Keempat tokoh baru hasil reformasi tersebut mengembangkan kekuatan politik mereka masing-masing. Dalam perjalanannya hanya dua orang tokoh baru, yaitu Zulkifli Nurdin dan Zoerman Manap yang berhasil melakukan pengembangan kekuatan politik mereka secara maksimal di Jambi. Nasrun Arbain kalah dalam pertarungan dengan Agneta Singedekane di internal PDI Perjuangan.¹⁰⁵ Agneta Singedekane kemudian diangkat menjadi sekretaris pribadi Presiden Megawati Soekarnoputri.¹⁰⁶

Zulkifli Nurdin dan Zoerman Manap berhasil mendudukkan keluarga dan kroni mereka ke dalam pemerintahan dan partai politik. Interaksi keduanya yang

¹⁰² Wawancara dengan Kasmadi Kasyim (Advokat/Ketua LBH Lingkungan), Jambi, 6 Februari 2012.

¹⁰³ Wawancara dengan PM (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 1 Desember 2011.

¹⁰⁴ Vedi R. Hadiz, *Dinamika Kekuasaan : Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*, (Jakarta : Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, 2005), hal 245.

¹⁰⁵ Wawancara dengan H (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 1 Desember 2011.

¹⁰⁶ Tjipta Lesmana, *Dari Soekarno Sampai SBY : Intrik dan Lobi Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal 254.

memengaruhi perpolitikan Jambi di masa-masa selanjutnya. Terkadang mereka berkonflik dan terkadang mereka berkoalisi.¹⁰⁷

Zoerman Manap sebagai anak pertama almarhum Abdul Manap, tokoh pendiri provinsi Jambi dan Gubernur Jambi kedua, berhasil membangun keluarga politiknya semakin kuat di Jambi (**Lihat Tabel 2.8**). Zoerman Manap, terpilih menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi (1999-2004), Ketua DPRD Provinsi Jambi (2004-2009) dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi (2009-2014). Adiknya, Arifien Manap, terpilih menjadi Walikota Jambi dua periode (1998-2003 dan 2003-2008). Anaknya, Nuzul Prakasa Zoerman, terpilih menjadi anggota DPRD Kota Jambi (2004-2009 dan 2009-2015). Keponakannya, Arif Munandar terpilih menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adik iparnya, Maesita Arifin terpilih menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Jambi (2009-2015).

Tabel 2.8
Silsilah Keluarga Haji Abdul Manap

Nama	Status Keluarga	Jabatan Politik
Zoerman Manap	Anak	Ketua DPRD Provinsi Jambi Periode 2004-2009
Arifien Manap	Anak (Adik Zoerman Manap)	Walikota Jambi Periode 1998-2003 dan 2003-2008
Nuzul Prakasa Zoerman	Cucu (Anak Zoerman Manap)	Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Periode 2004-2009
Maesita Arifien	Menantu (Adik Ipar Zoerman Manap)	Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Periode 2009-2014
Arif Munandar	Cucu (Keponakan Zoerman Manap)	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Zoerman Manap dan keluarganya juga menguasai Partai Golkar. Zoerman menjadi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi selama tiga periode hingga sekarang. Arifien Manap menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Jambi. Nuzul Prakasa Zoerman menjadi Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Jambi. Maesita Arifien menjadi Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Jambi.

¹⁰⁷ Wawancara dengan H (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 1 Desember 2011.

Zulkifli Nurdin sebagai anak pertama almarhum Nurdin Hamzah, pengusaha pribumi terkaya di Jambi juga berhasil membangun keluarga politiknya semakin kuat dan berpengaruh di Jambi (**Lihat Tabel 2.9**). Zulkifli Nurdin, terpilih menjadi Gubernur Jambi dua periode (1999-2004 dan 2005-2010). Istrinya, Ratu Munawaroh Zulkifli, terpilih menjadi Anggota DPR RI (2009-2014). Anaknya, Zumi Zola Zulkifli, terpilih menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur (2011-2016). Keponakannya, Sum Indra, terpilih menjadi Wakil Walikota Jambi (2008-2013).

Tabel 2.9
Silsilah Keluarga Nurdin Hamzah

Nama	Status Keluarga	Jabatan Politik
Zulkifli Nurdin	Anak	Gubernur Jambi Periode 1999-2004 dan 2005-2010
Ratu Munawaroh Zulkifli	Menantu (Istri Zulkifli Nurdin)	Anggota DPR RI Periode 2009-2014
Hazrin Nurdin	Anak (Adik Zulkifli Nurdin)	Ketua DPW PAN Provinsi Jambi
Zumi Zola Zulkifli	Cucu (Anak Zulkifli Nurdin)	Bupati Tanjung Jabung Timur Periode 2011-2016
Sum Indra	Cucu (Keponakan Zulkifli Nurdin)	Wakil Walikota Jambi Periode 2008-2013

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Zulkifli Nurdin dan keluarganya juga menguasai Partai Amanat Nasional. Zulkifli Nurdin menjadi Ketua DPW PAN Provinsi Jambi dua periode dan sekarang menjadi Ketua MPP DPW PAN Provinsi Jambi. Hazrin Nurdin menggantikannya menjadi Ketua DPW PAN Provinsi Jambi sejak tahun 2010. Zumi Zola Zulkifli menjadi Ketua DPD PAN Tanjung Jabung Timur dan Ketua BM PAN Provinsi Jambi. Sum Indra menjadi Ketua DPD PAN Kota Jambi.

Keluarga Nurdin Hamzah dan Keluarga Abdul Manap juga berhasil membangun simbol-simbol kekuasaan mereka di Jambi. RSUD di Kota Jambi diberi nama RSUD Abdul Manap, ayah dari Zoerman Manap. Sedangkan RSUD di Tanjung Jabung Timur diberi nama RSUD Nurdin Hamzah, ayah dari Zulkifli Nurdin. Bahkan Zulkifli Nurdin dan Keluarga Nurdin Hamzah membangun lebih banyak simbol (**Lihat Tabel 2.10**). Mereka mempunyai tiga sekolah tinggi

dengan nama Nurdin Hamzah yaitu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nurdin Hamzah, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nurdin Hamzah dan Akademi Bahasa Asing Nurdin Hamzah. Mereka juga mempunyai masjid yang mereka beri nama Masjid Nurdin Hasanah, perumahan elit Nurdin Hamzah, dua supermarket dengan nama Supermarket Enha dan NH Plaza dan mempunyai kompleks pemakaman keluarga.¹⁰⁸

Tabel 2.10
Simbol-Simbol Kebesaran Keluarga Nurdin Hamzah

No.	Simbol	Keterangan
1.	Masjid Nurdin Hamzah	Tempat Ibadah
2.	RSUD Nurdin Hamzah	Rumah Sakit
3.	STISIP Nurdin Hamzah	Perguruan Tinggi
4.	STMIK Nurdin Hamzah	Perguruan Tinggi
5.	ABA Nurdin Hamzah	Perguruan Tinggi
6.	SMA Yayasan Dewi Nurdin Hamzah	Sekolah
7.	SMK Yayasan Dewi Nurdin Hamzah	Sekolah
8.	Supermarket Enha	Supermarket
9.	Supermarket NH Plaza	Supermarket
10.	Perumahan Nurdin Hamzah	Perumahan
11.	Pemukaman Nurdin Hamzah	Kompleks Pemakaman

Sumber : wawancara dengan PM

Keluarga Nurdin Hamzah dan Keluarga Abdul Manap membangun bisnis mereka di Jambi sebagai pengusaha lokal. Zulkifli Nurdin, Hazrin Nurdin dan Zoerman Manap menjadi pengusaha lokal di Jambi pada masa Orde Baru. Mereka semua aktif di Gapensi dan Kadin Jambi.¹⁰⁹

Kontraktor pada era sentralisasi merupakan bagian penting dari elit bisnis-politik di Indonesia terutama di daerah-daerah. Kontraktor menjadi besar bukan karena kemampuan teknisnya melainkan karena koneksi politiknya. Mereka akan menurunkan bahan material dan kualitas pekerjaan mereka untuk mendapatkan untung. Mereka menyuap panitia tender dan pejabat-pejabat yang berwenang mengalokasikan proyek-proyek pemerintah. Perilaku korup dan menyimpang dari kontraktor ini bertahan pada era desentralisasi. Mereka bisa mendominasi parlemen pusat dan parlemen daerah. Mereka terlibat menjadi tim sukses bahkan

¹⁰⁸ Wawancara dengan PM (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 1 Desember 2011

¹⁰⁹ *ibid*

terlibat langsung dalam pemenangan Gubernur. Organisasi kontraktor bentukan negara yang terbesar adalah Gabungan Pengusaha Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi). Gapensi mendominasi pengaturan proyek-proyek pemerintah selama era sentralisasi dan tetap dominan ketika terjadi perubahan politik tahun 1998.¹¹⁰

Reformasi dan desentralisasi di Jambi menghasilkan dua keluarga politik dominan yakni keluarga Nurdin Hamzah dan keluarga Abdul Manap. Kekuatan kedua keluarga ini ditopang oleh kekayaan yang besar dan mempunyai jaringan akses ke pusat. Tokoh-tokoh lain belum mampu mengimbangi kekuatan kedua keluarga ini.

Di Jambi ada dua kekuatan besar pasca reformasi, keluarga Zulkifli (Zulkifli Nurdin) dan keluarga Manap (Zoerman Manap). Susah bagi kekuatan lain menyaingi dua kekuatan ini. Keduanya punya semua. Di politik kan ada finansial, jaringan akses ke pusat. Banyak tokoh muda muncul tapi mereka tidak mampu mengimbangi dua kekuatan ini.¹¹¹

Ketidakmampuan tokoh-tokoh di luar kekuatan dua keluarga tersebut karena pada masa desentralisasi kemampuan finansial menjadi faktor penting dan penentu. Uang dibutuhkan untuk menguasai dan memimpin partai. Uang juga dibutuhkan untuk kebutuhan kemenangan dalam pemilihan kepala daerah.

Di luar dinasti-dinasti itu punya keterbatasan aset finansial ya. Penguasaan kapital lah. Kapital sangat-sangat berpengaruh. Kita bicara riil. Ketika memimpin partai kalau kita tidak punya uang agak sulit memobilisasi. Apalagi kalau dikaitkan dengan pemilu, tidak realistis kalau tidak punya uang. Mungkin tapi tidak realistis.¹¹²

Zulkifli Nurdin berhasil menjadi tokoh besar di Jambi karena faktor ketokohan Nurdin Hamzah sebagai pengusaha sukses dan dermawan. Nurdin Hamzah selalu memberikan sumbangan kepada masyarakat miskin setiap Lebaran. Ketokohan Zoerman Manap juga dibangun dari nama besar orangtuanya, mantan Gubernur Jambi Haji Abdul Manap. Nama besar Haji Abdul Manap inilah yang membuat dia disegani dan dihormati. Sehingga tetap bisa bertahan lama sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi.

¹¹⁰ Gerry van Klinken dan Edward Aspinall, "Building Relations : Corruption, Competition and Cooperation in the Construction Industry", dalam Edward Aspinall and Gerry van Klinken (eds), *The State and Illegality in Indonesia*, (Leiden : KITLV Press, 2011), hal 139-156.

¹¹¹ Wawancara dengan Paisal Kumar (Pemimpin Redaksi Jambi Independen), Jambi, 6 Februari 2012.

¹¹² Wawancara dengan Yasir Arafat (Ketua KPU Provinsi Jambi), Jambi, 24 November 2011.

Dia (Zulkifli Nurdin) ini terlahir dari seorang ayah yang sudah sangat terkenal di Jambi ini sebagai pengusaha sukses dan tentu juga dermawan. Itu juga diingat oleh seluruh masyarakat Jambi, khususnya di Kota Jambi. Setiap tahun ada yang menerima paket setiap tahun ketika Lebaran. Ketokohnya dia (Zulkifli Nurdin) juga berasal dari ayahnya dan keluarganya. Zoerman Manap ini juga tidak bisa dilepaskan dari kebesaran nama orangtuanya. Orangtuanya kan mantan Gubernur Jambi Pak Abdul Manap. Ketika dia (Zoerman Manap) muncul di wilayah politik kebesaran nama orangtuanya juga cukup menopang. Menopang keberhasilan dia (Zoerman Manap) untuk berpolitik. Dia (Zoerman Manap) punya *branded* lah. Jadi semacam dia (Zoerman Manap) bermerek lah dibandingkan orang-orang partai yang berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Jadi dia (Zoerman Manap) disegani, dihormati. Zoerman Manap usianya sudah diatas rata-rata tapi bisa *survive* jadi Ketua DPD Golkar.¹¹³

Ada dua aspek yang mendorong kemunculan “orang kuat lokal” di Jambi seperti Zulkifli Nurdin dan Zoerman Manap. Pertama, mereka memiliki akses ekonomi dan politik yang kuat pada masa sebelum reformasi. Sehingga mereka yang paling siap menghadapi demokratisasi. Kedua, tidak adanya kekuatan alternatif yang lahir dari gerakan reformasi. Kelompok reformis di Jambi gagal berkonsolidasi sehingga tidak bisa menjadi alternatif.¹¹⁴

Era desentralisasi justru memperkuat kekuatan politik lama untuk kembali. Kekuatan reformasi mengalami demobilisasi dan domestikasi. Tidak ada perbedaan gagasan yang substantif ditawarkan elit-elit lama yang bertarung di era desentralisasi. Indonesia mengikuti jejak tetangganya Filipina dan Thailand, yang lebih dahulu melakukan demokratisasi, untuk jatuh dalam dominasi politik uang, mesin politik dan politik pencitraan di dalam pemilihan legislatif dan eksekutif.¹¹⁵

Kekuatan reformasi tidak mempersiapkan diri menghadapi demokrasi elektoral di era desentralisasi. Mereka tidak bisa merubah gerakan massa menjadi gerakan politik elektoral. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan politik elektoral juga didesain oleh politisi lama agar kekuatan reformasi tidak muncul.¹¹⁶

¹¹³ Wawancara dengan Yasir Arafat (Ketua KPU Provinsi Jambi), Jambi, 24 November 2011.

¹¹⁴ Wawancara dengan Kasmadi Kasyim (Advokat/Ketua LBH Lingkungan), Jambi, 6 Februari 2012.

¹¹⁵ Edward Aspinall, “Elections and Normalization of Politics in Indonesia”, dalam *South East Asia Research*, Volume 13 Nomor 2.

¹¹⁶ Vince Boudreau, “Elections, Repression and Authoritarian Survival In Post-Transition Indonesia and Philippines”, dalam *The Pacific Review* Volume 22 Nomor 2 Bulan Mei Tahun 2009.

2.3 Kompromi dan Kompetisi “Orang Kuat Lokal” di Jambi

Desentralisasi menyebabkan “orang kuat lokal” seperti Zulkifli Nurdin dan Zoerman Manap muncul dan sangat berpengaruh di tingkat lokal. Tetapi tidak semua elit tradisional dari masa lalu dapat otomatis menjadi “orang kuat lokal”. Dengan sistem politik yang terdesentralisasi memungkinkan “orang kuat lokal” mempunyai pengaruh politik yang kuat pada lembaga-lembaga politik. “Orang kuat lokal” di Jambi berasal dari kalangan pengusaha. Mereka membentuk keluarga-keluarga politik dan menempatkan diri mereka dan keluarga mereka pada jabatan-jabatan formal pemerintahan sehingga kekuasaan mereka semakin kuat. “Orang kuat lokal” di Jambi juga bisa berasal dari kalangan birokrasi. Birokrasi dinilainya memiliki jaringan-jaringan politik. Tetapi tetap birokrasi tersebut harus mempunyai uang yang banyak.¹¹⁷

Jabatan formal sebagai Gubernur menjadi faktor paling menentukan dalam menjadikan seseorang disebut “orang kuat lokal”. Dan semakin kuat jika “orang kuat lokal” membentuk institusi keluarga politik dan bisa menurunkan kekuasaannya kepada anaknya. Namun orang kuat lokal memiliki kelemahan yakni tidak memiliki kekebalan hukum terutama apabila sudah terlibat kasus korupsi dan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan masa jabatan formalnya sudah berakhir.¹¹⁸

Desentralisasi memberikan kesempatan kepada “orang kuat lokal” seperti Zulkifli Nurdin dan Zoerman Manap untuk berkuasa dan mengembangkan kekuasaannya. Seandainya masih era sentralisasi tentu sangat sulit untuk Zulkifli Nurdin dan Zoerman Manap muncul menjadi “orang kuat lokal”. Keduanya dinilai sering berkompetisi namun juga bisa berkompromi karena keduanya masih punya pertalian keluarga melalui perkawinan.

Kesempatan, selama ini semua diatur dari pusat. Dengan otonomi ini kesempatan untuk mereka (Zulkifli Nurdin dan Zoerman Manap) eksis. Bagaimanapun perangnya keluarga manap (Zoerman Manap) dan nurdin (Zulkifli Nurdin), mereka punya ikatan keluarga.¹¹⁹

¹¹⁷ Wawancara dengan Heriyandi Roni (Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi), Jambi, 24 November 2011.

¹¹⁸ *ibid.*

¹¹⁹ Wawancara dengan Paisal Kumar (Pemimpin Redaksi Jambi Independen), Jambi, 6 Februari 2012.

Relasi antara Zoerman Manap beserta Keluarga Abdul Manap dan Zulkifli Nurdin beserta Keluarga Nurdin Hamzah harus dilihat sebagai relasi yang dinamis. Terkadang mereka bisa berkoalisi dan terkadang mereka bisa berkompetisi. Politik kepentingan yang bisa menyatukan dan memisahkan kedua keluarga.¹²⁰

Arifien Manap menilai persaingan politik maupun pertemanan politik antara Keluarga Abdul Manap dengan Keluarga Nurdin Hamzah merupakan hal yang biasa dalam politik. Menurutnya hal tersebut terjadi karena kedua keluarga membela kepentingan partai masing-masing. Kedua keluarga juga masing-masing merasa besar.

Itulah yang namanya politik. Kadang berteman, kadang berlawanan. Kita cakar-cakaran biasa karena untuk kepentingan partai. Tidak bisa kita (Keluarga Abdul Manap) harus mengekor sama dia (Keluarga Nurdin Hamzah). Dia (Keluarga Nurdin Hamzah) merasa besar, kita (Keluarga Abdul Manap) juga merasa besar.¹²¹

Kerjasama Keluarga Nurdin Hamzah dan Keluarga Abdul Manap terjadi pertama kali pada pemilihan Walikota Jambi tahun 1998. Ketika itu Hazrin Nurdin membantu keuangan dalam kemenangan Arifien Manap menjadi Walikota Jambi. Arifien Manap pun memberikan banyak proyek kepada Hazrin Nurdin.¹²²

Namun Arifien Manap membantah peran Hazrin Nurdin dalam kemenangannya dalam pemilihan walikota Jambi tahun 1998. Arifien Manap menilai kemenangannya ditentukan oleh statusnya sebagai anak Haji Abdul Manap. Sebagai anak veteran dan pendiri Provinsi Jambi, dia dibantu oleh keluarga besar Abdul Manap, partai-partai politik dan dukungan dari Danrem Garuda Putih Jambi.

Keluarga saya (Keluarga Abdul Manap), keluarga besar. Jadi anggota DPRD banyaklah keluarga saya. Suara Golkar banyak lari ke saya padahal diplot Chalik Saleh. ABRI dan PPP ke saya. PDI juga ke saya. Perintah Danrem dukung saya.¹²³

¹²⁰ Wawancara dengan Bambang Bayu Suseno (Ketua DPD PAN Kabupaten Muaro Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

¹²¹ Wawancara dengan Arifien Manap (Ketua DPD Golkar Kota Jambi), Jambi, 3 Desember 2011.

¹²² Wawancara dengan H (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 1 Desember 2011.

¹²³ Wawancara dengan Arifien Manap (Ketua DPD Golkar Kota Jambi), Jambi, 3 Desember 2011.

Puncak keharmonisan hubungan dua keluarga politik ini adalah ketika PAN dan Golkar sama-sama memberikan dukungan kepada pasangan Zulkifli Nurdin-Anthoni Zeidra Abidin dalam pemilihan Gubernur Jambi tahun 2005. Kemenangan Zulkifli Nurdin dalam pemilihan tersebut dan terpilihnya Zoerman Manap menjadi Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2004-2009 sebelumnya, membuat hubungan dua keluarga politik ini semakin mesra dan harmonis. Mereka berkolaborasi dalam sebuah mega proyek “waterboom” bernilai ratusan milyar, yang kemudian menuai banyak kritikan dan sarat dengan korupsi.¹²⁴

DPW PAN Provinsi Jambi menentukan pilihan berkoalisi dengan Partai Golkar dalam pemilihan Gubernur tahun 2005 berdasarkan kalkulasi politik. Mengingat Partai Golkar adalah pemenang pemilu legislatif 2004 maka wajar apabila PAN ingin berkoalisi dengan Golkar. Walaupun sebenarnya PAN siap maju mendukung Zulkifli Nurdin tanpa dukungan Golkar. PAN sangat percaya dipasangkan dengan siapapun, Zulkifli Nurdin saat itu diyakini pasti menang dalam pemilihan Gubernur Jambi tahun 2005.¹²⁵

DPD Golkar Provinsi Jambi juga mengakui bahwa Zulkifli Nurdin berpasangan dengan tokoh selain calon dari Golkar pasti menang dalam pemilihan Gubernur tahun 2005. Namun Zulkifli Nurdin memilih Golkar karena Zulkifli Nurdin ingin mengamankan jabatannya. Hal tersebut dimungkinkan dengan dukungan Golkar di parlemen yang menjadi mayoritas.¹²⁶

Pasca pemilihan Gubernur tahun 2005 hubungan antara keluarga Nurdin dan keluarga Manap terus mengalami penurunan. Arifien Manap menjelaskan hubungannya dengan Zulkifli Nurdin memang memburuk disebabkan oleh banyak perbedaan pandangan politik mereka. Apalagi sejak dia kawin lagi, hubungan mereka bertambah buruk. Istri pertama Arifien Manap yang telah meninggal, Hj. Nuridjah Nurdin adalah adik kandung Zulkifli Nurdin. Semenjak itu perbedaan antara dia dengan Zulkifli Nurdin sudah semakin jelas.

¹²⁴ Syarif Hidayat dan Gerry van Klinken, “Provincial Business and Politics”, dalam Geert Arend van Klinken dan Joshua Barker, *State of Authority : the State in Society in Indonesia*, (Ithaca : Cornell University Press, 2009), hal 149-151.

¹²⁵ Wawancara dengan Bambang Bayu Suseno (Ketua DPD PAN Kabupaten Muaro Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

¹²⁶ Wawancara dengan Nuzul Prakasa, (Wakil Ketua DPD Golkar Kota Jambi), Jambi, 25 November 2011

Kalau politik kita (Keluarga Nurdin Hamzah dan Keluarga Arifien Manap) berbeda pandangan tidak dapat disatukan. Waktu itu ada gejolak politik antara saya (Arifien Manap) dengan gubernur (Zulkifli Nurdin). Banyaklah permasalahan yang timbul. Termasuklah masalah keluarga. Karena saya (Arifien Manap) dengan dia (Zulkifli Nurdin) itu apa, adiknya dia (Hj. Nuridjah Nurdin) itu istri saya (Arifien Manap). Adiknya meninggal, mulai itu. Saya kan tiga tahun menduda, saya kawin lagi. *Nah* disitu rusak sudah hubungan.¹²⁷

Perbedaan antara kedua keluarga politik terbesar di Jambi ini semakin terlihat dalam sejumlah pilkada. Sebagai contoh pemilihan Bupati Sarolangun tahun 2006, Zulkifli Nurdin menarik Sekretaris Daerah Kota Jambi, Hasan Basri Agus menjadi Calon Bupati Sarolangun dari PAN. Arifien Manap sebagai atasan Hasan Basri Agus merasa tersinggung karena Keluarga Manap hendak mempromosikan Hasan Basri Agus sebagai pengganti Arifien Manap dalam pemilihan Walikota Jambi tahun 2008. Arifien Manap dan Zoerman Manap kemudian menetapkan Maryadi Syarif sebagai calon Bupati Sarolangun dari Golkar. Puncak pertentangan dua keluarga ini terjadi dalam Pemilihan Walikota Jambi tahun 2008. Zulkifli Nurdin mencalonkan pasangan Bambang Priyanto dan keponakannya Sum Indra dalam Pilkada Kota Jambi tahun 2008. Keputusan Zulkifli Nurdin tersebut dijawab Zoerman Manap dengan mencalonkan pasangan Asnawi AB dan anak kandungnya Nuzul Prakasa Zoerman sebagai Calon dari Partai Golkar.¹²⁸

Persaingan seperti yang terjadi antara Zulkifli Nurdin beserta Keluarga Nurdin Hamzah dengan Zoerman Manap beserta Keluarga Abdul Manap merupakan hal yang lazim karena tumbangunya rezim yang otoriter dan sentralistik secara otomatis memberikan peluang bagi aktor-aktor politik yang sebelumnya berada didalam dan diluar Orde Baru untuk memperebutkan kekuasaan yang ditinggalkannya.¹²⁹ Perebutan kekuasaan cenderung diikuti oleh aktor-aktor yang dulu dibesarkan oleh Orde Baru. Hal ini yang dilihat oleh Jacqueline Vel dan Marcus Mietzner.

¹²⁷ Wawancara dengan Arifien Manap (Ketua DPD Golkar Kota Jambi), Jambi, 3 Desember 2011.

¹²⁸ Wawancara dengan H (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 1 Desember 2011.

¹²⁹ Moch Nurhasim (ed), *Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan P2P LIPI, 2005), hal 2.

Jacqueline Vel menyaksikan pertarungan dua “orang kuat lokal” di Sumba Timur dalam Pilkada Sumba Timur 2005, Umbu Mehang Kunda melawan Lukas Kaborang. Umbu Mehang Kunda, seorang pengusaha yang menjadi Bupati Sumba Timur tahun 1999-2004. Sedangkan Lukas Kaborang, seorang birokrat karir yang pernah menjadi Bupati Sumba Timur tahun 1994-1999. Masing-masing sudah pernah saling mengalahkan. Lukas Kaborang mengalahkan Umbu Mehang Kunda pada pemilihan tahun 1994 dan Umbu Mehang Kunda mengalahkan Lukas Kaborang pada pemilihan tahun 1999. Keduanya bertemu kembali dalam pemilu tahun 2005. Umbu Mehang Kunda yang dicalonkan Partai Golkar berhasil menang dengan 40 % suara sedangkan Lukas Kaborang hanya memperoleh 34 % suara. Bagi Jacqueline Vel, pemenang sebenarnya adalah Partai Golkar. Mengingat keduanya dilahirkan dan dibesarkan oleh Partai Golkar.¹³⁰

Marcus Mietzner menilai dominasi kekuatan dari jaringan elit lama dalam proses politik demokratis di Indonesia era desentralisasi menghasilkan demokrasi elektoral berkualitas rendah. Fenomena inilah yang terjadi pada pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2005. Pemilihan tersebut menghasilkan kekalahan gubernur petahana, pensiunan jenderal dan pengusaha keturunan tokoh senior Golkar oleh birokrat karir yang pernah menjadi Gubernur Maluku dan Gubernur Maluku. Ternyata semua kandidat yang maju dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2005 adalah elit-elit yang dulu dibesarkan Golkar ketika era sentralisasi.¹³¹

2.4 “Orang Kuat Lokal” dari Keluarga Nurdin Hamzah

Hampir tidak ada keluarga politik di Jambi yang miskin, mereka pasti memiliki uang yang banyak. Hal ini juga terjadi dalam diri Zulkifli Nurdin dan Keluarga Nurdin Hamzah.¹³² Nurdin Hamzah mendirikan PT Nurdin Hamzah (NV Nurdin Hamzah), perusahaan besar di Jambi yang fokus menjadi pemasok sembako di Provinsi Jambi termasuk Provinsi lain seperti Jakarta dan Surabaya.

¹³⁰ Jacqueline Vel, *Pilkada in East Sumba : An Old Rivalry in A New Democratic Setting*, dalam Jurnal Indonesia Nomor 80 Oktober 2005 hal 94.

¹³¹ Marcus Mietzner, “Indonesia and the Pitfalls of Low-Quality Democracy : a Case Study of the Gubernatorial Elections in North Sulawesi”, dalam Marco Bunte dan Andreas Ufen (eds), *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, (London : Routledge, 2009), hal 143-146.

¹³² Wawancara dengan Rivani (Aktivis LSM Cappa Jambi), Jambi, 22 November 2011.

PT Nurdin Hamzah juga menjadi pemasok semua produk Unilever. Keluarga Nurdin Hamzah mempunyai bisnis inti di bidang perdagangan. PT Nurdin Hamzah menjadi distributor utama sembako untuk Provinsi Jambi sejak awal kekuasaan Orde Baru. (Lihat Tabel 2.11).¹³³

Tabel 2.11
Perusahaan Keluarga Nurdin Hamzah

No.	Nama Perusahaan	Lokasi
1.	PT Nurdin Hamzah	Jambi, Jakarta dan Surabaya
2.	PT Indowana Citra Persada	Tangerang
3.	PT Gemilang Jambi Development	Jambi
4.	PT Dinza Jaya Putra	Jakarta

Sumber : diolah dari beberapa sumber

Kelurga Nurdin Hamzah merupakan keluarga terpandang sejak dulu. Sebagai ilustrasi ketika naik pesawat menjadi barang mewah ketika itu, Keluarga Nurdin Hamzah sudah memiliki pesawat sendiri. Mereka juga memiliki pabrik gula yang besar di Surabaya. Jabatannya sebagai Gubernur membantu Zulkifli Nurdin semakin memperkuat bisnis keluarga Nurdin di Jambi yang sempat goyah karena banyak anggota keluarga Nurdin yang memilih bisnis di kota-kota besar di pulau jawa.¹³⁴

Zulkifli Nurdin mewarisi banyak kekayaan dari Nurdin Hamzah. Zulkifli Nurdin mengakui mayoritas hartanya merupakan warisan dari orangtuanya. Berdasarkan data KPUD Prvinsi Jambi jumlah kekayaan Zulkifli Nurdin pada tahun 2005 mencapai sebesar Rp 45.460.000.000. Harta tersebut terdiri dari beberapa tanah di Jakarta, kebun dan bangunan di Jambi.¹³⁵

Zulkifli Nurdin mengaku rutin melaporkan penambahannya kepada KPK setiap 2 tahun sekali.¹³⁶ Hal itu dilakukan Zulkifli Nurdin karena dia merasa pasti ada penambahan harta kekayaannya yang berasal dari sewa ruko-

¹³³ Wawancara dengan PM (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 1 Desember 2011.

¹³⁴ Wawancara dengan MN (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 3 Desember 2011.

¹³⁵ Syaipul Bukhori, "Zulkifli Nurdin, Calon Gubernur Jambi Terkaya", Tempo Interaktif, diakses pada http://www.tempo.co.id/hg/nusa/sumatera/2005/06/24/brk.20050624-62985_id.html tanggal 1 November 2011.

¹³⁶ Diakses pada <http://www.inilah.com/read/detail/38349/gubernur-jambi-lapor-kekayaan/tanggal> 1 November 2011.

rukonya dan penghasilan perusahaanya di Jakarta.¹³⁷ Susah menebak harta kekayaan Zulkifli Nurdin secara pasti. Diperkirakan Zulkifli Nurdin mempunyai ratusan ruko yang dimiliki yang bernilai ratusan milyar.¹³⁸

Nilai aset keluarga Nurdin Hamzah merupakan yang terbanyak diantara pengusaha pribumi. Keluarga Nurdin Hamzah mempunyai banyak aset berupa tanah dan bangunan. Bisnis awal Keluarga Nurdin Hamzah adalah menjual gula. Keluarga Nurdin Hamzah mirip dengan Keluarga Achmad Bakrie di Lampung. Mereka sudah kaya sejak lama sehingga perkiraan aset keluarga Nurdin Hamzah sudah mencapai trilyunan rupiah.

Bisnis awal (Keluarga Nurdin Hamzah) gula. Mirip Ahmad Bakrie di Lampung lah. *Kalo* aset keluarga trilyunan. Punya banyak aset tanah dan bangunan. Rumahnya yang di kemang (Jakarta) *aja* dijual harta Cornelis Buston, Fasha, Efendi Hatta tidak ada apa-apanya.¹³⁹

Modal reputasi Nurdin Hamzah sebagai orang pribumi terkaya di Jambi membantu Zulkifli Nurdin memuluskan ambisi-ambisi politiknya. Apalagi Zulkifli Nurdin meniru aksi-aksi kedermawanan sang ayah melalui kunjungan langsung ke masyarakat membawa bantuan. Saat itu masyarakat Jambi yang belum terbiasa melihat pemimpin langsung turun ke masyarakat tersentuh hatinya. Citra pemimpin yang merakyat dan dermawan melekat pada diri Zulkifli Nurdin membuat masyarakat tidak mempedulikan visi misinya dalam pencalonan sebagai Gubernur tahun 1999 dan tahun 2005.¹⁴⁰

Status pengusaha kaya dan dari keluarga terpandang juga membantu kemenangan Teras Narang menjadi Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2005. Teras Narang mewarisi usaha besar yang dibangun ayahnya W.A Narang. W.A. Narang mendirikan perusahaan perdagangan NV Dajak Handel My.¹⁴¹

Nama besar keluarga merupakan modal yang penting dalam politik lokal di Jambi pasca reformasi. Disadari atau tidak kekuatan-kekuatan paternalistik

¹³⁷ Diakses pada <http://infojambi.com/v.1/headlines/11382-sehari-jelang-lengser-zulkifli-nurdin-kumpulan-wartawan.html> diakses pada 1 November 2011.

¹³⁸ Wawancara dengan JS (Wartawan Majalah Gatra), Jambi, 21 November 2011.

¹³⁹ Wawancara dengan H (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 1 Desember 2011.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Paisal Kumar (Pemimpin Redaksi Jambi Independen), Jambi, 6 Februari 2012.

¹⁴¹ Okamoto Masaaki dan Abdur Rozaki, *Kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasi*, (Yogyakarta : IRE Press, 2006), hal 140.

berpengaruh. Banyak kemudahan yang didapat dari nama besar keluarga karena ada investasi sosial yang dilakukan orang tua mereka yang mereka tidak tahu tetapi mereka turut menikmatinya.

Tanpa disadari kekuatan paternalistik itu berpengaruh. Modal awal, itu kekuatan. Ada kemudahan dari nama besar keluarga. Ada investasi sosial yang dilakukan orang tua yang kita tidak tahu.¹⁴²

Nilai-nilai tradisional, emosional dan paternalistik membuat keluarga Nurdin Hamzah sangat berpengaruh di Jambi sebelah timur, di hilir sungai batanghari terutama di Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur. Dikotomi *ulu-ilir* (hulu-hilir) dikenal dalam politik lokal Jambi sejak masa awal kemerdekaan. Daerah dataran rendah seperti Tanjung Jabung Timur merupakan daerah yang punya semangat anti republik sedangkan daerah dataran tinggi seperti Merangin dan Kerinci merupakan daerah yang menjadi pendukung utama kekuasaan Republik di Jambi.¹⁴³ Keluarga Nurdin Hamzah mempunyai basis yang kuat dengan pendukung-pendukung fanatik di Tanjung Jabung Timur. Abdullah Hich yang menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2001-2011 masih merupakan kerabat Keluarga Nurdin Hamzah.¹⁴⁴

Zulkifli Nurdin sudah membangun dinasti politiknya secara kasat mata. Istrinya, Ratu Munawaroh Zulkifli menjadi anggota DPR RI. Anaknya, Zumi Zola Zulkifli menjadi Bupati. Adiknya, Hazrin Nurdin menjadi Ketua DPW PAN Provinsi Jambi. Keponakannya, Sum Indra menjadi Wakil Walikota. Zulkifli Nurdin membangun dinasti politiknya melalui jalinan politik uang dan patron-klien. Partai politik bersikap pragmatis terhadap adanya dinasti politik dan tidak melarang. Masyarakat juga dilatih untuk bersikap pragmatis. Ketika uang menjadi ukuran maka dinasti politik akan bertahan.

Keluarga Nurdin (Keluarga Nurdin Hamzah) sudah membangun dinasti politik kasat mata sekali. Istri, menantu, keponakan, anak, dikader untuk menjadi penguasa politik. Politik kita akan menjadi sakit *kalo* patronase, patron klien seperti ini. Ada perselingkuhan patronase dan kooptasi. Orang diracuni kalo mau buat partai harus duit banyak. Celaknya struktur partai memperbolehkan, istri jadi DPR, adik ketua partai, anak

¹⁴² Wawancara dengan Syahidan, Ketua DPRD Muara Jambi Periode 2009-2014, Jambi, 24 November 2011.

¹⁴³ Elsbeth Locher-Scholten, *Kesultanan Sumatera dan Negara Kolonial : Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907)*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal hal 337.

¹⁴⁴ Wawancara dengan Yasir Arafat (Ketua KPU Provinsi Jambi), Jambi, 24 November 2011.

bupati, keponakan wakil walikota. Artinya partai kan bersifat pragmatis. PAN juga mendidik untuk jadi pemimpin partai harus kaya. Mengkooptasi pikiran masyarakat, dinasti politik itu dilarang sekarang boleh. Masyarakat pragmatis, bantuan tidaklah *charity* tapi sudah politis. Masyarakat mengajukan proposal kepada semua kandidat. Siapa menyumbang paling banyak itu yang akan dipilih.¹⁴⁵

Zulkifli Nurdin memenuhi kriteria sebagai “orang kuat lokal”. Dia bisa menjadikan anaknya sebagai bupati dan keponakannya sebagai wakil walikota. Zulkifli Nurdin juga sangat dihormati dan disegani di daerah. Zulkifli Nurdin merupakan tokoh sentral yang kuat di Provinsi Jambi.

Dia (Zulkifli Nurdin) bisa kita sebut orang kuat. Anaknya kan jadi bupati. Menurut masyarakat dia (Zulkifli Nurdin) tokoh yang kuat. Kemudian keponakannya menjadi wakil walikota. Kemudian ketokohnya di daerah-daerah (kabupaten/kota) masih sangat dihormati dan disegani. Untuk provinsi jambi, Zulkifli Nurdin merupakan tokoh sentral yang kuat.¹⁴⁶

Melalui desentralisasi dan otonomi daerah, Zulkifli Nurdin dengan mudah membangun kekuatan ekonomi dan politiknya. Kekuasaannya dibangun dari uang dan nepotisme. Perilakunya berbahaya bagi kehidupan demokrasi di Jambi karena Zulkifli Nurdin membuat suksesi kekuasaan menjadi terhambat dengan menempatkan jabatan-jabatan politik berada disekitar lingkungan keluarganya.¹⁴⁷

Karakter rezim desentralisasi yang diwakili oleh sosok Zulkifli Nurdin tidak jauh berbeda dengan pemimpin Jambi ketika masa rezim orde baru. Berganti orang tanpa berganti sistem. Sama-sama menggunakan sistem yang legal formal, sistem yang tidak mengakomodasi kepentingan rakyat dan sistem yang berpihak kepada modal. Desentralisasi hanya menghasilkan raja-raja kecil di daerah. Pada hakekatnya tetap elit yang berkuasa.¹⁴⁸

Kekuasaan “orang kuat lokal” di Jambi masih bisa bertahan bahkan cenderung ditiru. Dominasi “orang kuat lokal” di Jambi hanya bisa diakhiri dengan tindakan-tindakan yang radikal. Seperti moratorium PNS, pembaruan

¹⁴⁵ Wawancara dengan Rivani (Aktivis LSM Cappa Jambi), Jambi, 22 November 2011.

¹⁴⁶ Wawancara Edi Purwanto (Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi), Jambi, 22 November 2011.

¹⁴⁷ Wawancara AK (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 21 November 2011.

¹⁴⁸ Wawancara dengan Rivani (Aktivis LSM Cappa Jambi), Jambi, 22 November 2011.

undang-undang politik, revolusi sosial dan produksi gagasan alternatif dari perguruan tinggi.

Keluarga politik ini akan tetap bertahan hingga 10 tahun ke depan karena generasi selanjutnya mengikuti gaya dari Zulkifli Nurdin. Zulkifli Nurdin bukan sesuatu yang dihindarkan tetapi inspiratif. Keluarga politik ini bisa hilang apabila ada reformasi struktural dan radikal misalnya moratorium PNS, pembaruan undang-undang politik, revolusi sosial didorong. Karena secara tradisional dipotong alat produksinya para elit-elit. Produksi gagasan alternatif tidak terjadi di kampus-kampus di Jambi.¹⁴⁹

2.5 Peta Jaringan Kekuasaan Zulkifli Nurdin

Kekuasaan Zulkifli Nurdin disokong oleh jaringan kekuasaan yang dibangunnya. Jaringan patronase ini digunakannya secara maksimal dalam merebut kekuasaan politik formal dan mempertahankan kekuasaan tersebut serta memperluas kekuasaannya hingga kabupaten/kota di Jambi. Jaringan ini berintikan keluarga besar Nurdin Hamzah di Jambi. Keputusan-keputusan penting diambil oleh keluarga besar Nurdin Hamzah dengan Zulkifli Nurdin sendiri sebagai figur dominan.¹⁵⁰

Selain Zulkifli Nurdin, keluarga besar Nurdin Hamzah terdiri dari adik Zulkifli Nurdin, Hazrin Nurdin dan istri Zulkifli Nurdin, Ratu Munawaroh.¹⁵¹ Keluarga besar Nurdin Hamzah juga terdiri dari Adik Zulkifli Nurdin yang lain Dewi Nurdin, keponakannya Sum Indra (Anak Dewi Nurdin) dan anak sulung Zulkifli Nurdin yaitu Zumi Zola. Tokoh “HR” yang disampaikan Syarif Hidayat (2009) sebagai manajer bisnis dan politik Zulkifli Nurdin dan yang menghubungkan Zulkifli Nurdin dengan pengusaha, LSM dan partai politik menurut penulis mendekati profil Hazrin Nurdin.

Selanjutnya jaringan patronase kekuasaan Zulkifli Nurdin juga membentuk lingkaran-lingkaran pendukung. Ada beberapa lingkaran pendukung yang membentuk jaringan patronase kekuasaan Zulkifli Nurdin. Lingkaran pertama diisi oleh kerabat jauh keluarga Nurdin Hamzah. Tokoh-tokoh yang termasuk

¹⁴⁹ Wawancara dengan Kasmadi Kasyim (Advokat/Ketua LBH Lingkungan), Jambi, 6 Februari 2012.

¹⁵⁰ Jawa Pos News Network (JPNN), “Hazrin Dapat Restu Keluarga”. diakses pada <http://www.jpnn.com/berita.detail-54475> tanggal 1 November 2011.

¹⁵¹ Majalah GATRA, “Dinasti Politik Lokal Makin Kental”, diakses pada <http://www.gatra.com/artikel.php?id=135228> tanggal 1 November 2011.

dalam lingkaran pertama ini adalah Abdullah Hich (Bupati Tanjung Jabung Timur 2001-2010)¹⁵² dan A.M Firdaus (Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi).¹⁵³

Lingkaran kedua diisi oleh politisi Partai Amanat Nasional. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam lingkaran kedua ini adalah Chairul Naim Anik (Mantan Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi, Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2004-2009 dan Anggota DPR RI periode 2009-2014)¹⁵⁴ dan Haji Bakri (Ketua DPP PAN Korwil Provinsi Jambi dan Bengkulu dan Anggota DPR RI).¹⁵⁵ Lingkaran ketiga diisi oleh Politisi partai lain. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam lingkaran ketiga ini adalah Nasrullah Hamka (Ketua PBB Provinsi Jambi)¹⁵⁶, Nasrun Arbain (Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 1999-2004)¹⁵⁷ dan Muhkasim Stering (Mantan Bupati Tanjung Jabung Timur dan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi)¹⁵⁸

Lingkaran keempat diisi oleh aktivis mahasiswa dan pemuda. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam lingkaran keempat ini adalah Jefri Hendrik (Mantan Ketua BEM Universitas Jambi dan Mantan Ketua HMI Cabang Jambi) dan Asad Isma (Ketua GP Ansor Provinsi Jambi).¹⁵⁹ Lingkaran kelima diisi oleh aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam lingkaran kelima ini adalah Husni Thamrin (Pinang Sebatang) dan Doni Pasaribu (Gita Buana),¹⁶⁰

Lingkaran keenam diisi oleh aktivis organisasi massa. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam lingkaran keenam ini adalah Indra Armendaris (Pemuda Pancasila)¹⁶¹ dan Ikatan Pemuda Bersatu (IPB).¹⁶² Lingkaran ketujuh diisi oleh birokrat Pemerintah Provinsi Jambi. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam lingkaran

¹⁵² Wawancara dengan Yasir Arafat (Ketua KPU Provinsi Jambi), Jambi, 24 November 2011.

¹⁵³ Wawancara dengan JS (Wartawan Majalah Gatra), Jambi, 21 November 2011.

¹⁵⁴ Jawa Pos News Network (JPNN), "Tak Mau Nyalon, Ratu Menangis", diakses pada <http://www.jpnn.com/berita.detail-57764> tanggal 1 November 2011.

¹⁵⁵ Subhan MA Rachman, "Pergulatan Wacana Al-Quran Bergambar Kandidat Gubernur di Provinsi Jambi", dalam *Jurnal Innovatio* Volume 6 Nomor 12, Edisi Juli-Desember 2007.

¹⁵⁶ Wawancara dengan PM (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 1 Desember 2011.

¹⁵⁷ Wawancara dengan H (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 1 Desember 2011.

¹⁵⁸ Jambi Ekspres, "Giliran Hazrin Sebar Atribut" diakses pada <http://www.jambiekspres.co.id/index.php/politik/5660-giliran-hazrin-sebar-atribut.html> tanggal 1 November 2011.

¹⁵⁹ Wawancara GT (Aktivis Mahasiswa), Jambi 25 November 2011.

¹⁶⁰ Wawancara dengan PM (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 1 Desember 2011.

¹⁶¹ Wawancara dengan SS (Wartawan Tribun Jambi), Jambi, 21 November 2011.

¹⁶² Wawancara dengan Rivani (Aktivis LSM Cappa Jambi), Jambi, 22 November 2011.

ketujuh ini adalah Chalik Saleh (Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi)¹⁶³, Nino Guritno (Mantan Kepala Dinas PU Provinsi Jambi)¹⁶⁴ dan Rahmat Derita (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi).¹⁶⁵ Lingkaran kedelapan diisi oleh jurnalis. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam lingkaran kedelapan ini adalah Noer Faisal (Pelita).¹⁶⁶

Tabel 2.12
Peta Jaringan Kekuasaan Zulkifli Nurdin

No.	Jaringan	Keterangan	Tokoh Penting
1.	Lingkaran Inti	Keluarga Besar Nurdin Hamzah	Hazrin Nurdin
2.	Lingkaran Pertama	Kerabat Jauh Keluarga Nurdin Hamzah	AM Firdaus
3.	Lingkaran Kedua	Politisi PAN	Chairul Naim Anik
4.	Lingkaran Ketiga	Politisi partai lain	Nasrullah Hamka
5.	Lingkaran Keempat	Aktivis Mahasiswa dan Pemuda	Jefri Hendrik
6.	Lingkaran Kelima	Aktivis LSM Lokal	Husni Thamrin
7.	Lingkaran Keenam	Aktivis Organisasi Massa	Indra Armendaris
8.	Lingkaran Ketujuh	Birokrat Lokal	Chalik Saleh
9.	Lingkaran Kedelapan	Jurnalis Lokal	Noer Faisal

Sumber : diolah dari beberapa sumber

¹⁶³ Syarif Hidayat dan Gerry van Klinken, "Provincial Bussiness and Politics", dalam Geert Arend van Klinken dan Joshua Barker, *State of Authority : the State in Society in Indonesia*, (Ithaca : Cornell University Press, 2009), hal 149-150.

¹⁶⁴ Wawancara dengan D (Pejabat Eselon III Pemprov Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

¹⁶⁵ Wawancara dengan PM (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 1 Desember 2011.

¹⁶⁶ *ibid.*

BAB 3

ZULKIFLI NURDIN DAN PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 1999 DAN 2005

Dalam bab ini dibahas empat pokok bahasan utama. Pokok bahasan pertama mengenai Strategi dalam Pemilihan Gubernur dengan sub bahasan Pemilihan Gubernur tahun 1999 dan Pemilihan Gubernur tahun 2005. Pokok bahasan kedua mengenai Membangun Kekuasaan Politik dengan sub bahasan Membesarkan Partai Amanat Nasional, Mendapatkan Dukungan dari DPRD Provinsi Jambi, Memanfaatkan Birokrasi Pemerintah Daerah, Menjadi Patron dan Broker Kekuasaan Bagi Bupati dan Walikota dan Menjalin Kedekatan dengan Penyelenggara Pemilu. Pokok bahasan ketiga mengenai Politik Uang dan Pengumpulan Dana yang Menyimpang dengan sub bahasan Politik Uang dan Pengumpulan Dana yang Menyimpang. Sedangkan Pokok bahasan terakhir mengenai Model Pembangunan Zulkifli Nurdin dengan sub bahasan Berpihak ke Korporasi Besar, Proyek Besar yang Bermasalah, Kasus Waterboom dan Kasus Mess Pemda Jambi dan Menyulut Konflik dengan Masyarakat.

3.1 Strategi dalam Pemilihan Gubernur

3.1.1 Pemilihan Gubernur tahun 1999

Desentralisasi ternyata melahirkan pragmatisme rakyat dalam memilih kepala daerah di Jambi. Pragmatisme tersebut diperlihatkan dengan penggunaan preferensi menjatuhkan pilihan kandidat berdasarkan materi yang didapat bukan berdasarkan kapabilitas. Sehingga hanya orang kaya-orang kaya yang mempunyai peluang besar menjadi kepala daerah di masa desentralisasi.¹⁶⁷ Idealisme tidak menarik bagi rakyat yang menggunakan uang sebagai ukuran dalam memilih kepala daerah.

Pilkada masih diukur dengan uang. Kalau tidak punya uang, seidealis apapun tidak dipilih orang.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Wawancara dengan Cornelis Buston, (Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi), Jambi, 23 November, 2011.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Roida Pane, (Ketua Wilayah SBSI Provinsi Jambi), Jambi, 25 November, 2011.

Prinsip siapa yang punya uang banyak akan berkuasa berlaku di Jambi era desentralisasi. Zulifli Nurdin menggunakan prinsip tersebut dalam mengalahkan pesaing politiknya. Hal tersebut ditunjang dengan kepemilikan uang dan modal yang besar.¹⁶⁹

Keberhasilan Zulkifli Nurdin memenangkan pemilihan Gubernur di Jambi tahun 1999 (**Lihat Tabel 3.1**) lebih banyak disebabkan karena kesempatan dan kepemilikan modal. Kesempatan diperoleh Zulkifli Nurdin ketika terjadi reformasi yang menghasilkan desentralisasi dan otonomi daerah. Reformasi membawa perubahan kepemimpinan politik di Jambi. Sedangkan kepemilikan modal membantu Zulkifli Nurdin membentuk tim pemenang yang solid dan mempunyai doktrin-doktrin sesuai kepentingan Zulkifli Nurdin.

Kepemilikan modal dan kesempatan kunci keberhasilan Zulkifli Nurdin (menjadi gubernur). Dengan modal kita bisa membentuk tim. Tim yang solid yang bisa didoktrinasi.¹⁷⁰

Tabel 3.1
Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi tahun 1999

No.	Nama Calon Gubernur	Latar Belakang	Partai Pendukung	Jumlah Suara
1.	Hasip Kalimudin Syam	Birokrat	Golkar	13
2.	Ramlie Jalil	Birokrat	PPP	2
3.	Zulkifli Nurdin	Pengusaha	PDI P & PAN	30

Sumber : KPU Provinsi Jambi, 2001

Citra diri Zulkifli Nurdin yang lebih merakyat (*low profile*) membuat dia lebih disukai ketimbang sosok birokrat-birokrat Orde Baru yang kaku yang menjadi pesaing politiknya.¹⁷¹ Zulkifli Nurdin juga dinilai berhasil memunculkan diri sebagai sosok reformis bagi masyarakat Jambi saat itu. Disamping tentunya faktor nama besar keluarga dan kekayaan yang dimilikinya.

Sepuluh tahun yang lalu dia (Zulkifli Nurdin) kuat. Dia (Zulkifli Nurdin) politisi yang didukung keluarga yang di masyarakat jambi kuat ya. Dia

¹⁶⁹ Wawancara Edi Purwanto (Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi), Jambi, 22 November 2011.

¹⁷⁰ Wawancara dengan IA (Pengurus Paguyuban Masyarakat Sunda Provinsi Jambi), Jambi, 22 November, 2011.

¹⁷¹ Wawancara dengan Cornelis Buston, (Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi), Jambi, 23 November, 2011.

(Zulkifli Nurdin) punya *resources* sosial yang bagus, *resources* ekonomi yang bagus. Pada zaman itu psikologi masyarakat masih reformasi, masyarakat masih punya penilaian emosional pada reformasi. Pak Hasip (Hasip Kalimudin Syam) dilabel orang lama dengan label birokrasinya. Zulkifli Nurdin dianggap orang baru yang masih *fresh*. Berasal dari keluarga yang bukan sembarang kan kalo di jambi kan. Dari orang melayu mereka terkaya.¹⁷²

Zulkifli Nurdin membangun pencitraan sebagai sosok reformis dengan menggandeng Amien Rais yang saat itu dianggap tokoh reformasi. Amien Rais tercatat berkali-kali datang ke Jambi untuk memenuhi undangan dari Zulkifli Nurdin. Selain citra reformis, kunci keberhasilan Zulkifli Nurdin memenangkan Pemilihan Gubernur Jambi tahun 1999 adalah dengan menjadikan Nasrun Arbain sebagai kepala tim pemenangannya. Sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan saat itu dan juga menjabat Ketua DPRD Provinsi Jambi, Nasrun Arbain memiliki kendali penuh atas 10 kursi DPRD Provinsi Jambi (**Lihat Tabel 3.2**). Disamping Nasrun Arbain terkenal sebagai pelobi yang ulung.¹⁷³

Tabel 3.2
Lima Besar Perolehan Suara Partai Politik di Jambi Hasil Pemilu 1999

No.	Partai Politik	Jumlah Suara DPRD	Jumlah Kursi DPRD
1.	Partai Golkar	398.255	14
2.	PDI Perjuangan	284.958	10
3.	Partai Persatuan Pembangunan	126.915	5
4.	Partai Amanat Nasional	89.308	3
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	55.587	2

Sumber : KPU Provinsi Jambi, 2001

Strategi yang disusun Zulkifli Nurdin dan Nasrun Arbain sebenarnya sederhana. Mereka berupaya mengkonsolidasikan sebanyak mungkin anggota DPRD Provinsi Jambi dengan kompensasi sejumlah uang (**Lihat Tabel 3.3**). Masing-masing partai ada yang menjadi penanggungjawabnya. PAN yang memiliki 3 kursi DPRD dikonsolidasikan oleh Zulkifli Nurdin sendiri. PDI

¹⁷² Wawancara dengan Sufardi Nurzain (Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi), Jambi, 23 November, 2011.

¹⁷³ Wawancara dengan JS (Wartawan Majalah Gatra), Jambi, 21 November 2011.

Perjuangan yang memiliki 10 kursi DPRD dikonsolidasikan oleh Nasrun Arbain. PPP yang memiliki 5 kursi DPRD dan secara resmi tidak mendukung Zulkifli Nurdin dikonsolidasikan oleh adiknya Nasrun Arbain, yang menjadi pengurus PPP dan anggota DPRD Provinsi dari PPP. Terakhit 5 partai gurem yang masing-masing punya 1 kursi DPRD Provinsi Jambi dan TNI/Polri yang punya 5 kursi DPRD Provinsi Jambi. dikonsolidasikan oleh Nasrun Arbain. Rata-rata 1 anggota DPRD Provinsi Jambi mendapatkan Rp. 100.000.000. Kecuali Nasrun Arbain yang mendapatkan Rp. 1.000.000.000. Total biaya yang dikeluarkan Zulkifli Nurdin untuk mengkonsolidasikan anggota DPRD Provinsi Jambi kurang lebih Rp 5.000.000.000. ¹⁷⁴

Tabel 3.3

Distribusi Suara untuk Zulkifli Nurdin dalam Pemilihan Gubernur Jambi tahun 1999

No.	Partai	Jumlah Suara	Keterangan
1.	PDI Perjuangan	10	Resmi Mendukung Zulkifli Nurdin
2.	PAN	3	Resmi Mendukung Zulkifli Nurdin
3.	TNI/Polri	5	Tidak Ada Keterangan
4.	PPP	5	Resmi Mendukung Ramli Jalil
5.	Golkar	2	Resmi Mendukung Hasip Kalimudin
6.	PBN	1	Resmi Mendukung Zulkifli Nurdin
7.	Partai Sunni	1	Resmi Mendukung Zulkifli Nurdin
8.	PBB	1	Resmi Mendukung Zulkifli Nurdin
9.	PKP	1	Resmi Mendukung Zulkifli Nurdin
10.	Partai Persatuan	1	Resmi Mendukung Zulkifli Nurdin

Sumber : Wawancara dengan H

Strategi pembelian suara dan kompromi politik dalam pemilihan Gubernur di Indonesia era desentralisasi merupakan strategi yang sering dilakukan. Pemilihan Gubernur Banten melalui perhitungan suara terbanyak di DPRD Provinsi Banten juga tidak luput dari pembelian suara. Kemenangan Djoko Munandar sebagai Gubernur Banten ditentukan oleh kemampuan melakukan politik uang. Kemenangan tersebut juga dibantu oleh kompromi politik yang dilakukan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. ¹⁷⁵

¹⁷⁴ Wawancara dengan H (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 1 Desember 2011.

¹⁷⁵ Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed), *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal 291.

Pemilihan Gubernur melalui pemilihan Anggota DPRD Provinsi pada masa pasca Orde Baru cenderung melibatkan politik uang walaupun sampai sekarang selalu sulit untuk dibuktikan dan tidak ada tersangka yang berhasil diturunkan dari jabatannya sebagai Gubernur. Anggota DPRD menggunakan hadiah finansial dari kandidat Gubernur sebagai preferensinya dalam memilih. Anggota DPRD menganggap biasa pemberian hadiah tersebut karena mereka merasa sebagai mitra kerja sehingga sangat wajar mendapatkan hadiah.¹⁷⁶

3.1.2 Pemilihan Gubernur tahun 2005

Pemilihan Gubernur Jambi melalui suara anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 1999 dinilai rentan terhadap politik uang. Kandidat lebih mengedepankan kekuatan finansial dalam mencari dukungan anggota DPRD Provinsi Jambi. Rakyat tidak langsung terlibat dalam proses tersebut karena mewakili suaranya melalui Anggota DPRD Provinsi Jambi.¹⁷⁷

Ketika pemilihan langsung diberlakukan pada pemilihan Gubernur Jambi tahun 2005 maka ada optimisme akan hadirnya pemilihan Gubernur yang bersih politik uang. Pemilihan Gubernur secara langsung mempunyai kelebihan pelibatan langsung rakyat secara massif dan luas, berbeda dengan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD, yang minus pelibatan langsung rakyat secara massif dan luas. Demokrasi tidak hanya ditentukan oleh 45 orang anggota DPRD Provinsi Jambi melainkan ditentukan oleh seluruh rakyat Jambi.¹⁷⁸

Pemilihan Gubernur Jambi 2005 yang dilakukan secara langsung ternyata tidak berhasil menghilangkan politik uang. Zulkifli Nurdin kembali menjadi pemenang dalam pemilihan Gubernur Jambi tahun 2005. Kemenangan Zulkifli Nurdin dalam Pemilihan Gubernur Jambi tahun 2005 tetap ditentukan oleh faktor politik uang selain karena Zulkifli Nurdin berrstatus petahana yang sedang berkuasa dan memiliki pengaruh yang besar.¹⁷⁹

¹⁷⁶ Nankyung Choi, "Local Elections and Party Politics in Post-Reformasi Indonesia : A View from Yogyakarta", dalam *Contemporary Southeast Asia* Volume 26 Nomor 2 tahun 2004.

¹⁷⁷ Wawancara dengan NK (Dosen STISIP Nurdin Hamzah Jambi), Jambi, 25 November 2011.

¹⁷⁸ Wawancara dengan Yasir Arafat (Ketua KPU Provinsi Jambi), Jambi, 24 November 2011.

¹⁷⁹ Wawancara dengan Nuzul Prakasa, (Wakil Ketua DPD Golkar Kota Jambi), Jambi, 25 November 2011.

Politik uang tetap terjadi dalam Pemilihan Gubernur Jambi tahun 2005 dikarenakan masyarakat Jambi tingkat pendidikannya masih rendah dan tingkat ekonominya belum sejahtera. Kombinasi keduanya akan membawa masyarakat Jambi sama seperti Anggota DPRD jatuh ke dalam politik uang. Sebagai petahana, Zulkifli Nurdin lebih banyak memiliki fasilitas. Dia bisa melakukan tugasnya ke kabupaten sambil melakukan kampanye terselubung¹⁸⁰

Data dari Bappeda Provinsi Jambi tahun 2005 memperlihatkan hanya 26 % penduduk Jambi yang menikmati elektrifikasi (2004), hanya 35 % penduduk Jambi yang menikmati pelayanan air minum perpipaan dan hanya 52,89% penduduk usia 16-18 yang menikmati bangku sekolah di SMA/SMK (2003). Tidak mengherankan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi masih dibawah rata-rata nasional (2002).¹⁸¹

Ada sekitar 103.149 orang pengangguran di Jambi tahun 2005 dari total 2.657.536 penduduk (**Lihat Tabel 3.4**). 800.789 orang penduduk diperkirakan hidup dalam kemiskinan atau sekitar 30,13 % dari total jumlah penduduk (**Lihat Tabel 3.5**). Mayoritas penduduk Jambi mempunyai pengeluaran per kapita per bulan dibawah Rp.300.000 (**Lihat Tabel 3.6**)¹⁸²

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Bekerja, Pengangguran dan Bukan Angkatan Kerja tahun 2005

Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Bekerja	Jumlah Pengangguran	Jumlah Bukan Angkatan Kerja
2.657.536	1.097.207	103.149	619.329

Sumber : Bappeda Provinsi Jambi, 2005

Tabel 3.5

Estimasi Jumlah Penduduk Miskin Pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005

Estimasi Jumlah Penduduk Miskin	
Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
801.789	30,13

Sumber : Bappeda Provinsi Jambi, 2005

¹⁸⁰ Wawancara dengan NK (Dosen STISIP Nurdin Hamzah Jambi), Jambi, 25 November 2011.

¹⁸¹ Bappeda Provinsi Jambi, *Jambi Dalam Angka 2005*.

¹⁸² Bappeda Provinsi Jambi, *Jambi Dalam Angka 2005*.

Tabel 3.6
Jumlah Penduduk dan Golongan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Tahun 2005

Golongan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan	Jumlah Penduduk
40.000-59.999	4.637
60.000-79.999	27.828
80.000-99.999	89.517
100.000-149.999	548.229
150.000-199.999	617.912
200.000-299.999	748.910
300.000-499.999	437.517
500.000 dan Lebih	182.986
	2.657.536

Sumber : Bappeda Provinsi Jambi, 2005

Kemenangan Zulkifli Nurdin dalam pemilihan Gubernur tahun 2005 disebabkan oleh seringnya Zulkifli Nurdin bertemu masyarakat secara langsung dan memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Rakyat merasa ada kedekatan emosional antara mereka dengan Zulkifli Nurdin. Program-program Zulkifli Nurdin menjadi tidak penting bagi masyarakat. Zulkifli Nurdin memanfaatkan hal tersebut untuk kemenangannya semata. Bukan untuk melihat kondisi riil masyarakat Jambi.¹⁸³

Zulkifli Nurdin juga terbantu dengan pemilihan mitra koalisi partai pengusungnya yakni Partai Golkar. Selain PAN yang memiliki suara signifikan, Golkar juga merupakan partai besar dan pemenang pemilu 2004 di Jambi. (**Lihat Tabel 3.7**). Tokoh yang diajukan Golkar juga merupakan tokoh nasional yaitu Anthoni Zeidra Abidin. Anthoni Zeidra Abidin juga merupakan seorang tokoh senior di Partai Golkar. Anthoni Zeidra Abidin mempunyai pengaruh yang kuat di internal Partai Golkar sehingga Partai Golkar sebagai mesin politiknya bergerak secara optimal.¹⁸⁴

¹⁸³ Wawancara Edi Purwanto (Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi), Jambi, 22 November 2011.

¹⁸⁴ Wawancara dengan H (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 1 Desember 2011.

Tabel 3.7
Lima Besar Perolehan Suara Partai Politik di Jambi Hasil Pemilu 2004

No.	Partai Politik	Jumlah Suara DPRD	Jumlah Kursi DPRD
1.	Partai Golkar	317.643	11
2.	Partai Amanat Nasional	207.431	8
3.	PDI Perjuangan	144.344	6
4.	Partai Persatuan Pembangunan	76.393	5
5.	Partai Demokrat	66.561	2

Sumber : KPU Provinsi Jambi, 2005

Zulkifli Nurdin bersama Anthoni Zeidra Abidin berhasil memenangkan pemilihan Gubernur Jambi tahun 2005 (**Lihat Tabel 3.8**). Pasangan Zulkifli Nurdin-Anthoni Zeidra Abidin (ZN-AZA) menang mutlak atas pesaing politiknya pasangan Hasip-Nasrun dan Pasangan Usman-Irsal. Pasangan ZN-AZA menang di semua kabupaten termasuk di Batanghari yang menjadi basis politik bagi Hasip Kalimudin Syam dan di Tanjung Jabung Barat yang menjadi basis politik bagi Usman Ermulan. Keduanya merupakan putra asli daerah tersebut dan pernah menjabat Bupati di daerah tersebut.

Tabel 3.8
Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Jambi tahun 2005

No.	Kabupaten/Kota	Hasip-Nasrun	Zulkifli-Antony	Usman-Irsal
1.	Batanghari	17.116	72.565	3.749
2.	Bungo	15.432	95.769	7.490
3.	Kerinci	29.927	102.200	17.353
4.	Kota Jambi	17.601	184.067	9.057
5.	Merangin	26.628	92.234	8.199
6.	Muaro Jambi	12.079	118.011	6.765
7.	Sarolangun	22.342	57.354	6.075
8.	Tanjung Jabung Barat	10.113	76.547	10.228
9.	Tanjung Jabung Timur	4.343	91.635	4.802
10.	Tebo	9.946	101.780	8.762
	Total	165.527	992.162	82.480

Sumber : KPU Provinsi Jambi, 2006

NDI (National Democratic Institute) melakukan survei mengenai pengaruh metode komunikasi politik terhadap keterpilihan kandidat dalam pemilihan langsung Gubernur Sulawesi Utara tahun 2005 dan Walikota Manado

2005. Hasilnya menurut pemilih metode komunikasi politik yang paling efektif adalah dengan politik uang. Politik uang berpengaruh 30 % terhadap kemenangan Gubernur Sulawesi Utara terpilih dan kemenangan Walikota Manado terpilih.¹⁸⁵

Biaya yang dikeluarkan seorang kandidat untuk memenangkan pemilihan Gubernur secara langsung bisa mencapai Rp.100 milyar. Sedangkan biaya yang dikeluarkan seorang kandidat untuk menjadi Bupati/Walikota bisa mencapai Rp. 16 Milyar. Sebagai ilustrasi kemenangan dalam pemilihan Bupati di Kepulauan Sula, Maluku utara yang hanya berpenduduk 108.000 jiwa bisa menghabiskan biaya Rp. 5 Milyar.¹⁸⁶

3.2 Membangun Kekuasaan Politik

3.2.1 Membesarkan Partai Amanat Nasional

Zulkifli Nurdin menjadi arsitek kebesaran Partai Amanat Nasional di Jambi. Zulkifli Nurdin menjadi figur sentral di PAN berkat jaringan keluarga Nurdin Hamzah dan jabatannya sebagai Gubernur Jambi. Melalui jabatan dan jaringan keluarganya, Zulkifli Nurdin berhasil meningkatkan suara PAN di DPRD Provinsi Jambi (**Lihat Tabel 3.9**). Perolehan suara PAN meningkat dari hanya 3 kursi DPRD Provinsi di Pemilu 1999 menjadi 8 kursi DPRD Provinsi di Pemilu 2004 dan bertahan menjadi 8 kursi DPRD Provinsi di Pemilu 2009.

Kebetulan gubernur pertama pasca reformasi itu ketua PAN Zulkifli Nurdin. Sebenarnya ini titik balik kebesaran PAN. Bukan hanya gubernur saja Ketua PAN ini mempunyai *track record* keluarga yang menjadi perhitungan. Memang inilah figur sentral ini. Dengan kepiawaian beliau kita (PAN) jadi delapan (kursi DPRD) di pemilu 2004. Ketikapun 2009 kita (PAN) tetap delapan (kursi DPRD). Itulah perkembangan PAN di Provinsi Jambi.¹⁸⁷

¹⁸⁵ David T. Hill, "Assesing Media Impact on Local Elections in Indonesia", dalam Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto, *Deepening Democracy in Indonesia ? : Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*, (Singapura : ISEAS, 2009), hal 235-243.

¹⁸⁶ Marcus Mietzner, "Indonesia's Direct Election : Empowering the Electorate or Entrenching the New Order Oligarchy", dalam Edward Aspinall dan Greg Fealy, *Soeharto's New Order and Its Legacy*, (Canberra : ANU Press, 2010), hal 180.

¹⁸⁷ Wawancara dengan Bambang Bayu Suseno (Ketua DPD PAN Kabupaten Muaro Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

Tabel 3.9
Perolehan Kursi PAN di DPRD Provinsi Jambi Pada Pemilu Tahun 1999 hingga Pemilu Tahun 2009

No.	Pemilu	Perolehan Kursi	Jumlah Kursi
1.	Pemilu 1999	3	45
2.	Pemilu 2004	8	45
3.	Pemilu 2009	8	45

Sumber : DPW PAN Provinsi Jambi, 2012

Perkembangan suara PAN juga terjadi di DPRD Kabupaten/Kota di Jambi. perkembangan pesat terjadi pada pemilu 2004 (**Lihat Tabel 3.10**). PAN mengalami peningkatan suara di semua kabupaten/kota. Pada pemilu 2009 PAN mengalami penurunan 1-2 kursi di beberapa kabupaten/kota seperti Kota Jambi, Kerinci, Bungo, Tebo dan Tanjung Jabung Timur. PAN mengalami penurunan 3 kursi di Kabupaten Batanghari. Walaupun terjadi penurunan tetapi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci, PAN tetap menjadi pemenang Pemilu 2009.

Tabel 3.10
Perolehan Kursi PAN di DPRD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Pada Pemilu Tahun 1999 hingga Pemilu Tahun 2009

No.	Nama Kabupaten/Kota	Perolehan Kursi PAN		
		Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009
1.	Kota Jambi	3	8	6
2.	Kota Sungaipenuh	-	-	3
3.	Kabupaten Batanghari	2	4	1
4.	Kabupaten Muaro Jambi	1	5	5
5.	Kabupaten Sarolangun	1	3	3
6.	Kabupaten Merangin	2	4	4
7.	Kabupaten Kerinci	5	7	5
8.	Kabupaten Bungo	3	5	4
9.	Kabupaten Tebo	2	3	2
10.	Kabupaten Tanjab Barat	3	4	4
11.	Kabupaten Tanjab Timur	2	13	11
Jumlah		24	56	48

Sumber : DPW PAN Provinsi Jambi (2012)

Jabatan Zulkifli Nurdin sebagai Gubernur Jambi benar-benar dimanfaatkan oleh PAN sebagai media konsolidasi kekuatan PAN. Kader-kader PAN menyadari

bahwa popularitas Zulkifli Nurdin melebihi popularitas PAN. Hal ini memberikan semangat bagi kader PAN di Jambi.

Konsolidasi kekuatan-kekuatan partai kita (PAN) himpun ketika pak zul (Zulkifli Nurdin) jadi gubernur. Ada gairah. Jadi melalui survei pun kita (PAN) menyadari popularitas Zulkifli Nurdin melebihi popularitas partai. Pak Zulkifli Nurdin mempunyai sesuatu yang kita (PAN) manfaatkan.¹⁸⁸

Zulkifli Nurdin berkontribusi besar bagi perkembangan PAN di Provinsi Jambi. Zulkifli Nurdin tidak hanya menjadi tokoh besar tetapi sudah menjadi ikon PAN di Jambi. Pengaruhnya sangat kuat dan dominan. Apapun keputusan Zulkifli Nurdin maka secara otomatis menjadi keputusan PAN.

Kontribusi beliau (Zulkifli Nurdin) sangat besar melihat hasil pemilu 2004 dan 2009. Beliau (Zulkifli Nurdin) merupakan ikon PAN di Provinsi Jambi. Apabila beliau (Zulkifli Nurdin) ngomong a otomatis dibawah akan menurut.¹⁸⁹

Dampaknya sebenarnya bagi PAN adalah ketergantungan terhadap figur Zulkifli Nurdin. Kebesaran Zulkifli Nurdin membuat PAN agak terlena karena terlalu mengandalkan figur. Ketika Zulkifli Nurdin sudah tidak menjabat Gubernur Jambi lagi maka PAN harus bersiap-siap merubah PAN mejadi lebih solid dan mandiri. PAN harus terbiasa tanpa kemudahan yang dirasakan selama Zulkifli Nurdin menjadi Gubernur.¹⁹⁰

Sebenarnya sangat mudah melihat pengaruh Zulkifli Nurdin bagi perkembangan PAN di Jambi. Ketika Zulkifli Nuridn membesar popularitasnya maka PAN akan ikut membesar popularitasnya. Demikian juga ketika Zulkifli Nurdin mulai mengecil popularitasnya maka PAN akan ikut mengecil popularitasnya.¹⁹¹

Kekuatan Zulkifli Nurdin terutama terletak pada jabatannya sebagai Gubernur Jambi. Jabatan itu yang membesarkan PAN di Jambi yang bukan basis warga Muhammadiyah. Ketika Zulkifli Nurdin tidak menjadi Gubernur, PAN

¹⁸⁸ Wawancara dengan Bambang Bayu Suseno (Ketua DPD PAN Kabupaten Muaro Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

¹⁸⁹ Wawancara dengan Saiful Azwar (Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

¹⁹⁰ *ibid.*

¹⁹¹ Wawancara dengan Syahidan, Ketua DPRD Muaro Jambi Periode 2009-2014, Jambi, 24 November 2011.

mulai diremehkan. Apalagi ketika Hazrin Nurdin yang menggantikan Zulkifli Nurdin sebagai Ketua DPW PAN bukanlah pejabat publik maka PAN semakin diremehkan.

Jambi ini kan basis NU. *Kok* bisa gitu kan. Dikatakan Islam modern di Jambi juga tidak. Semua juga sudah tau kan kalo soal itu. Ini sudah dibuktikan ketika Zulkifli Nurdin sudah tidak menjadi Gubernur lagi, orang sudah mulai memandang sebelah mata terhadap PAN. Ketika PAN dipimpin oleh adik kandungnya (Hazrin Nurdin) orang memandang sebelah mata.¹⁹²

3.2.2 Mendapatkan Dukungan dari DPRD Provinsi Jambi

Zulkifli Nurdin selalu mendapat dukungan dari Ketua DPRD Provinsi Jambi. Nasrun Arbain mendukung Zulkifli Nurdin pada periode 1999-2004. Zoerman Manap mendukung Zulkifli Nurdin pada periode 2005-2010. Hampir semua kebijakan Zulkifli Nurdin lolos. Tidak mengherankan jika Zulkifli Nurdin selalu berkolaborasi dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi karena Zulkifli Nurdin tidak ingin dihambat segala kebijakannya. Pilihan berkoalisi dengan Partai Golkar pada tahun 2005 adalah untuk mendapatkan kestabilan di parlemen. Sehingga program Zulkifli Nurdin akan lancar.¹⁹³

Kemampuan Zulkifli Nurdin mendapatkan dukungan DPRD Provinsi terletak kepada kekuatan modalnya sehingga Zulkifli Nurdin bisa mengontrol DPRD Provinsi Jambi.¹⁹⁴ Zulkifli Nurdin pandai melakukan pendekatan kepada DPRD Provinsi Jambi terutama berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur dan Rancangan Peraturan Daerah (**Lihat Tabel 3.11**). Zulkifli Nurdin menggunakan uang untuk kelancaran pendekatannya dengan DPRD Provinsi Jambi. Ketika itu DPRD Provinsi berwenang untuk menerima atau menolak LPJ Gubernur.

Prolegda lebih mudah lolos karena yang dulu (Zulkifli Nurdin) tau dia kuat. Kalau dulu (Zulkifli Nurdin) hanya mengeluarkan 500 juta untuk mengesahkan sebuah ranperda.¹⁹⁵

¹⁹² Wawancara dengan NK (Dosen STISIP Nurdin Hamzah Jambi), Jambi, 25 November 2011.

¹⁹³ Wawancara dengan Saiful Azwar (Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

¹⁹⁴ Wawancara dengan Rivani (Aktivis LSM Cappa Jambi), Jambi, 22 November 2011.

¹⁹⁵ Wawancara dengan D (Pejabat Eselon III Pemprov Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

Tabel 3.11
Jumlah Perda dan Keputusan Daerah tahun 2004-2009

No.	Tahun	Jumlah Perda	Jumlah Keputusan Daerah
1.	2004	8	11
2.	2005	5	14
3.	2006	9	16
4.	2007	9	31
5.	2008	17	22
6.	2009	11	23

Sumber : Bappeda. Jambi Dalam Angka 2009

Hasil dari kolaborasi Zulkifli Nurdin dan Ketua DPRD Provinsi Jambi adalah tingginya pengeluaran rutin untuk kesejahteraan aparatur daerah dibandingkan dengan pengeluaran pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik (**Lihat Tabel 3.12 dan Tabel 3.13**). Hanya pada APBD tahun 2005 dan 2006 saja pengeluaran pembangunan bisa mengalahkan pengeluaran rutin. Hal tersebut memperlihatkan prioritas yang dipilih Zulkifli Nurdin ketika menjabat Gubernur Jambi

Tabel 3.12
Struktur APBD 2001-2004 (dalam juta)

No.	Tahun	Penerimaan		Pengeluaran		
		Penerimaan Daerah	Urusan Kas dan Perhitungan	Pengeluaran Rutin	Pengeluaran Pembangunan	Urusan Kas dan Perhitungan
1.	2001	296.735	9.835	173.405	55.550	9.835
2.	2002	449.304	11.048	235.087	128.405	11.028
3.	2003	607.487	12.123	366.228	185.624	12.124
4.	2004	126.822	n.a	581.432	n.a	11.290

Sumber : Bappeda, Jambi Dalam Angka 2005

Tabel 3.13
Struktur APBD 2005-2009 (dalam juta)

No.	Tahun	Jenis Penerimaan				Jenis Belanja		
		Silpa	PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain	Rutin	Pembangunan	Pembiayaan
1.	2005	168.930	344.881	393.688	10.252	226.474	416.359	n.a
2.	2006	278.917	385.043	625.074	0	277.848	685.391	15.000
3.	2007	312.577	450.225	679.282	25.018	779.358	327.338	1.000
4.	2008	359.488	626.525	745.861	64.410	893.258	511.724	5.000
5.	2009	386.302	528.193	802.386	25.072	844.933	686.928	8.924

Sumber : Bappeda, Jambi Dalam Angka 2009

Menurut Nankyung Choi, DPRD di Indonesia era desentralisasi tidak dapat terlepas dari politik uang. Gubernur harus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD Provinsi. Hal ini menyebabkan Gubernur memberikan uang sogokan dan fasilitas finansial kepada DPRD sebagai satu-satunya cara yang paling efektif mempertahankan kekuasaannya.¹⁹⁶

3.2.3 Memanfaatkan Birokrasi Pemerintah Daerah

Keterlibatan PNS dalam pemilihan kepala daerah hampir tidak dapat dihindari. Keterlibatan tersebut adalah konsekuensi dari desentralisasi yang memberikan kewenangan mutlak kepada kepala daerah. Hampir semua PNS akan terlibat, entah karena motivasi jabatan atau karena takut kepada atasan. Jadi secara naluriah PNS akan berpolitik.¹⁹⁷

Desentralisasi menyebabkan Gubernur mempunyai kekuasaan penuh dalam mengangkat dan memberhentikan pejabat. Zulkifli Nurdin sebagai gubernur memanfaatkan jabatan-jabatan eselon dalam birokrasi pemerintah daerah untuk dijadikan jabatan yang transaksional terutama jabatan kepala dinas. Pengangkatan kepala dinas berdasarkan investasi politik selama pilkada. Sekretaris daerah sebagai Ketua Baperjakat bekerja dengan tidak maksimal karena

¹⁹⁶ Nankyung Choi, "Indonesia's Direct Elections : Background and Institutional Framework", dalam *Rajaratnam School of International Studies Working Paper* Nomor 137 Agustus 2007.

¹⁹⁷ Wawancara dengan Sufardi Nurzain (Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi), Jambi, 23 November, 2011.

semua kekuasaan berada ditangan Gubernur dan dirinya sendiri juga diangkat oleh Gubernur.¹⁹⁸

Zulkifli Nurdin dinilai gagal mereformasi perilaku birokrasinya. Birokrasi di era kekuasaan Zulkifli Nurdin tetap birokrasi yang asal bapak senang, tidak efisien, berbiaya tinggi dan melakukan korupsi. Dua orang mantan sekretaris daerahnya bahkan terlibat korupsi.

Sekda (sekretaris daerah) di jaman Zulkifli Nurdin masuk penjara. Ini memperlihatkan tidak terjadi reformasi birokrasi. Di Jambi cukup buruk *yah* perilaku birokrasinya. PNS di Jambi tidak efisien, *high cost*, koruptif sangat jauh dari *good governance*. PNS asal bapak senang. Mengangkat pejabat bukan berbasis kinerja.¹⁹⁹

PNS terlibat politik apabila sengaja dilibatkan oleh gubernur petahana.²⁰⁰ Zulkifli Nurdin setidaknya menggunakan birokrasi untuk membangun pencitraan yang baik tentang dia.²⁰¹ Apalagi dengan latar belakangnya seorang pengusaha yang kaya raya maka Zulkifli Nurdin berperilaku seperti anak raja dengan ego yang tinggi dan dominan. Posisi birokrasi diberikan kepada pihak yang menguntungkannya.

Karena dia (Zulkifli Nurdin) ini kan anak raja gitu kan. Egosentrisnya cukup tinggi, dominan. Siapa yang menyenangkan beliau akan mendapatkan posisi.²⁰²

Zulkifli Nurdin menggunakan PNS dan Birokrat melalui pengaturan pejabat-pejabat yang setia kepadanya dan pejabat-pejabat yang memberikan dukungan finansial kepadanya pada saat pemilihan Gubernur. PNS dan Birokrat dimanfaatkan hak pilihnya agar memilih sesuai dengan keinginan Zulkifli Nurdin. Misalnya PNS di lingkungan Provinsi Jambi beserta keluarganya dimobilisasi mendukung keponakannya menjadi Wakil Walikota dan Istrinya menjadi Anggota DPR RI. PNS dan Birokrat juga dimanfaatkan untuk penggalangan dana politik

¹⁹⁸ Wawancara Edi Purwanto (Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi), Jambi, 22 November 2011.

¹⁹⁹ Wawancara dengan Kasmadi Kasyim (Advokat/Ketua LBH Lingkungan), Jambi, 6 Februari 2012.

²⁰⁰ Wawancara dengan Yasir Arafat (Ketua KPU Provinsi Jambi), Jambi, 24 November 2011.

²⁰¹ Wawancara dengan Sufardi Nurzain (Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi), Jambi, 23 November, 2011.

²⁰² Wawancara dengan Syahidan, Ketua DPRD Muaro Jambi Periode 2009-2014, Jambi, 24 November 2011.

bagi Zulkifli Nurdin. Misalnya melalui pengaturan pemenang kontrak tender pemerintah daerah.²⁰³

Zulkifli Nurdin mengangkat AM Firdaus sebagai sekretaris daerah. Sebelumnya, AM Firdaus adalah Kepala Dispenda Provinsi Jambi. Zulkifli Nurdin juga mengangkat Junaidi T. Noor sebagai Kepala Bappeda Provinsi Jambi. AM Firdaus masih terhitung saudara kandung dengan Zulkifli Nurdin dan Junaidi T. Noor adalah teman sekolah Zulkifli Nurdin ketika di SMA 2 Jambi.²⁰⁴

Menurut Marcus Mietzner, birokrat dan birokrasinya di era pasca Orde Baru secara ideal sesuai semangat demokratisasi adalah bekerja secara efektif dan akuntabel dalam mengimplementasikan kebijakan yang diambil oleh pemimpin eksekutif dan pemimpin legislatif. Namun dalam prakteknya para birokrat mempunyai logika sendiri karena secara institusional memiliki kemandirian institusi. Kemandirian institusi ini dimanfaatkan oleh para birokrat untuk mengumpulkan dana taktis dan mengakumulasinya sepanjang karir birokrasinya yang panjang. Dengan dana taktisnya birokrat mampu menjalin kerjasama mutualisme dengan politisi. Politisi mendapatkan dana sedangkan birokrat mendapatkan perlindungan dan promosi.²⁰⁵

3.2.4 Menjadi Patron dan Broker Kekuasaan bagi Bupati dan Walikota

Zulkifli Nurdin berusaha menempatkan orang kepercayaan di setiap pilkada kabupaten/kota agar bisa mengatur proyek-proyek pemerintah daerah. Melalui adiknya, Hazrin Nurdin, posisi kepala dinas kabupaten/kota nantinya bisa diatur. Kemudian Hazrin Nurdin bisa mengatur semua proyek di kabupaten/kota tersebut.²⁰⁶

Biasanya Zulkifli Nurdin melalui Hazrin Nurdin akan memberikan pinjaman uang dalam pilkada. Besarannya bervariasi tergantung kebutuhannya. Misalnya dalam pencalonan walikota tahun 2008, Bambang Priyanto kandidat yang diusung PAN meminjam uang Rp. 5.000.000.000. Pinjaman ini akan dikembalikan dalam bentuk uang sejumlah yang dipinjam beserta beberapa

²⁰³ Wawancara dengan PM (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 1 Desember 2011.

²⁰⁴ *ibid.*

²⁰⁵ Marcus Mietzner, "Soldiers, Parties and Bureaucrats : Illicit Fund-Raising in Contemporary Indonesia", dalam *Journal South East Asia Research* Volume 16 Nomor 2.

²⁰⁶ Wawancara dengan JS (Wartawan Majalah Gatra), Jambi, 21 November 2011.

proyek pemerintah sebagai imbalannya. Agar tidak dirugikan biasanya Hazrin Nurdin meminta jaminan sertifikat tanah dan bangunan yang dimiliki kandidat.²⁰⁷

Zulkifli Nurdin dinilai lebih berhasil mengembangkan kekuasaannya di kabupaten/kota ketimbang pendahulunya. Zulkifli Nurdin membangun hegemoni kekuasaan politiknya hingga ke kabupaten/kota melalui pilkada kabupaten/kota. Hampir semua pilkada bupati/walikota sepanjang tahun 2006-2008 dimenangkan oleh kandidat yang dijagokan Zulkifli Nurdin melalui kendaraan politik Partai Amanat Nasional.

Manajerial kekuasaannya (Zulkifli Nurdin) lebih berhasil. Saya katakan membangun hegemoni politik yah. Itu dibuktikan ketika ia (Zulkifli Nurdin) berkuasa dulu. Pemilihan (kepala daerah) secara langsung di kabupaten-kabupaten itu rata-rata didominasi oleh PAN. Hegemoni saat itu berada di kekuasaan PAN yang dipimpin oleh pak zul (Zulkifli Nurdin) sendiri.²⁰⁸

DPW PAN Provinsi Jambi mengakui ketika Zulkifli Nurdin menjadi Gubernur banyak calon bupati yang merapat ke PAN.²⁰⁹ DPW PAN mengakui pula bahwa mereka sengaja menggunakan jalur pemerintahan untuk konsolidasi partai. Ketika Zulkifli Nurdin melakukan kunjungan ke kabupaten maka selain ada urusan pemerintahan juga ada urusan kepartaian. Mengingat bupati-bupati mayoritas juga menjadi kader PAN.

Jujur kita (PAN) mengakui menggunakan jalur pemerintahan untuk konsolidasi partai. Ketua PAN yang jadi Gubernur, ketika kunjungan ke kabupaten tentu Bupati yang sibuk karena bupati orang PAN.²¹⁰

Zulkifli Nurdin berhasil memenangkan delapan bupati/walikota dari sepuluh pilkada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama tahun 2006-2008 (**Lihat Tabel 3.14**). Banyak bupati/walikota tersebut yang kemudian menjadi pengurus DPW PAN Provinsi atau DPD PAN Kabupaten/Kota. Zulkifli Nurdin benar-benar menjadi patron dan broker kekuasaan yang sukses di Jambi.

²⁰⁷ Wawancara dengan H (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 1 Desember 2011.

²⁰⁸ Wawancara dengan NK (Dosen STISIP Nurdin Hamzah Jambi), Jambi, 25 November 2011.

²⁰⁹ Wawancara dengan Saiful Azwar (Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

²¹⁰ Wawancara dengan Bambang Bayu Suseno (Ketua DPD PAN Kabupaten Muaro Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

Tabel 3.14
Pemilihan Bupati dan Walikota di Provinsi Jambi tahun 2006-2008

No.	Kab/Kota	Tahun	Kandidat PAN	Pemenang Pilkada
1.	Tanjab Timur	2006	Abdullah Hich-M. Juber	Abdullah Hich-M. Juber
2.	Muaro Jambi	2006	Burhanudin Mahir-Muchtar Muis	Burhanudin Mahir-Muchtar Muis
3.	Tanjab Barat	2006	Syafrudin-Katamso	Safrial-M. Yamin
4.	Tebo	2006	Madjid Muaz-Sukandar	Madjid Muaz-Sukandar
5.	Bungo	2006	Zulfikar Achmad-Sudirman Zaini	Zulfikar Achmad-Sudirman Zaini
6.	Batanghari	2006	Syahirsyah-Ardian Faisal	Syahirsyah-Ardian Faisal
7.	Sarolangun	2006	Hasan Basri Agus-Cek Endra	Hasan Basri Agus-Cek Endra
8.	Merangin	2008	Nalim-Hasan Basri Harun	Nalim-Hasan Basri Harun
9.	Kerinci	2008	Hasani Hamid-Afrizal	Murasman-Rachman
10.	Kota Jambi	2008	Bambang Priyanto-M. Sum Indra	Bambang Priyanto-M. Sum Indra

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Zulkifli Nurdin menyediakan bantuan dukungan PAN sebagai persyaratan pencalonan Bupati/Walikota. Zulkifli Nurdin juga membantu peminjaman uang yang dibutuhkan selama kampanye berlangsung. Melalui Hazrin Nurdin bantuan keuangan kepada calon kandidat yang diusung PAN mengalir. Kompensasinya adalah pemberian proyek pemerintah ketika Bupati/Walikota tersebut berkuasa.²¹¹

3.2.5 Menjalin Kedekatan dengan Penyelenggara Pemilu

Zulkifli Nurdin memiliki kedekatan yang lebih dengan penyelenggara pemilu ketimbang Zoerman Manap ataupun politisi yang lain. Ini dibuktikan dengan kedekatan Zulkifli Nurdin dan Prof Rozali Abdullah (Mantan Ketua KPU Provinsi Jambi saat Pemilihan Gubernur tahun 2005) tetap berlanjut dengan

²¹¹ Wawancara dengan H (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 1 Desember 2011.

pengangkatan Prof. Rozali Abdullah sebagai Ketua STISIP Nurdin Hamzah Jambi setelah tidak menjabat Ketua KPU Provinsi Jambi.²¹²

Selain dengan Prof. Rozali Abdullah, Zulkifli Nurdin dekat dengan Ir. Abdul Rasyid. Ketika Hazrin Nurdin menikahkan anaknya di Jambi, Ir. Abdul Rasyid menjadi sekretaris panitianya.²¹³ Zulkifli Nurdin juga mengangkat Chairul Naim Anik menjadi Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi karena pengalaman Chairul Naim Anik sebagai anggota KPU Provinsi Jambi.²¹⁴

3.3 Politik Uang dan Pengumpulan Dana yang Menyimpang.

3.3.1 Politik Uang

Masyarakat Jambi cenderung permisif terhadap politik uang. Uang yang diterima dijadikan preferensi dalam memilih kandidat. Uang menjamin kemenangan dalam pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif.

Kita ngomong keluar busa, akhir-akhirnya mana uang untuk kami. Mereka tetap seperti itu. Terakhir-terakhir itu (politik uang) yang sangat berpengaruh besar. Jadi (berhasil) mereka kalau dikasih.²¹⁵

Sebagai contoh untuk menjadi seorang anggota DPRD kabupaten/kota melalui politik uang dibutuhkan dana sekitar 70 juta untuk dapat 700 suara.²¹⁶

Pemilihan kepala daerah melalui DPRD menyebabkan banyak perilaku politik uang. Namun ketika pemilihan kepala daerah berubah menjadi pilihan rakyat secara langsung juga tetap terjadi politik uang. Bahkan politik uang yang dikeluarkan lebih banyak.

Dijamin melalui pilkada dana yang dikeluarkan lebih besar. Hampir dapat dipastikan tidak dilaporkan secara transparan dan akuntabel kepada penyelenggara pemilukada. Begini tentunya dengan pilkada *cost* politik atau tendensi untuk *money politics* cukup besar.²¹⁷

Politik uang sering dibicarakan di masyarakat Jambi. Walaupun masih sulit untuk dibuktikan oleh pihak penyelenggara dan pengawas pemilu. Secara

²¹² Wawancara dengan PM (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 1 Desember 2011.

²¹³ *ibid.*

²¹⁴ Wawancara dengan NK (Dosen STISIP Nurdin Hamzah Jambi), Jambi, 25 November 2011.

²¹⁵ Wawancara dengan Nuzul Prakasa, (Wakil Ketua DPD Golkar Kota Jambi), Jambi, 25 November 2011.

²¹⁶ Wawancara dengan Saiful Azwar (Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

²¹⁷ Wawancara dengan Syahidan, Ketua DPRD Muaro Jambi Periode 2009-2014, Jambi, 24 November 2011.

umum yang pasti dilakukan kandidat adalah memberikan uang pada saat kampanye. Biasanya dengan dalih pengganti uang transportasi.

Masyarakat yang paling bawah kan biasanya ada penerahan dalam kampanye. Biasanya diberi uang untuk *transport*. Ada pendapatan musimanlah. Apalagi kalau dikaitkan dengan isu-isu politik uang dan lain sebagainya. Walaupun kita tidak bisa membuktikan secara kasat mata tetapi hal hal seperti itu sering dibicarakan.²¹⁸

Realitas lapangan sebenarnya memperlihatkan politik uang yang vulgar dan berbagai intimidasi terjadi dalam pilkada. Namun pengawas pemilu tidak serius untuk mengungkap politik uang.²¹⁹ Zulkifli Nurdin membangun kekuatan politiknya terutama dengan politik uang. Tanpa politik uang tidak mungkin Zulkifli Nurdin dapat mengalahkan pesaing politiknya.²²⁰

Panwaslu Provinsi Jambi mengakui bahwa Pemilihan Gubernur di Indonesia termasuk di Jambi sulit terbebas dari politik uang dan intimidasi. Hal tersebut dikarenakan cara pemilihan yang ada selama ini menggunakan media kampanye/sosialisasi yang mengeluarkan banyak biaya dan tenaga kandidat. Kandidat meyakini kampanye atau sosialisasi sebagai cara yang paling efektif untuk pencitraan agar bisa meraup suara pemilih. Pemilih menantikan keuntungan apa yang akan didapat dari seorang kandidat dalam sebuah kampanye atau sosialisasi. Pemilih menggunakan ukuran uang, kaos, sarung dan barang-barang lain sebagai landasannya memilih kandidat bukan visi misi ataupun program seorang kandidat. Ada simbiosis mutualisme antara rakyat pemilih dengan kandidat. Kandidat butuh suara dari pemilih, pemilih butuh uang dari kandidat.²²¹

Politik uang merebak di dalam demokrasi prosedural yang diterapkan di era desentralisasi karena tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikan rakyat di Jambi masih rendah. Rakyat belum bebas memilih ketika rakyat masih hidup tidak sejahtera. Ketergantungan ekonomi dan tidak mandiri secara ekonomi membuat rakyat tidak memiliki pilihan –pilihan yang bebas.

Kita harus memahami demokrasi kita hari ini adalah demokrasi prosedural bukan demokrasi substansial. Erat kaitannya dengan

²¹⁸ Wawancara dengan Yasir Arafat (Ketua KPU Provinsi Jambi), Jambi, 24 November 2011.

²¹⁹ Wawancara dengan SS (Wartawan Tribun Jambi), Jambi, 21 November 2011.

²²⁰ Wawancara dengan Kasmadi Kasyim (Advokat/Ketua LBH Lingkungan), Jambi, 6 Februari 2012.

²²¹ Wawancara dengan Aldrin Ali (Panwaslu Provinsi Jambi), Jambi, 1 Maret 2012.

kapasitas warganegara, erat kaitannya dengan ekonomi warganegara. Karena faktanya masyarakat Jambi banyak yang menengah ke bawah. Sudah bisa ditebak terjadi *money politics*. Ketika kita memiliki ketergantungan ekonomi dan tidak mandiri secara ekonomi maka kita tidak memiliki pilihan-pilihan yang bebas.²²²

Hazrin Nurdin ditunjuk Zulkifli Nurdin menjadi bendahara politiknya sejak maju dalam pemilihan Gubernur tahun 1999. Hazrin Nurdin dipilih karena dia memegang uang tunai yang paling banyak diantara keluarga Nurdin Hamzah. Dia juga terkenal piawai dalam merancang operasi-operasi politik uang Zulkifli Nurdin.²²³

Biaya yang dikeluarkan Hazrin Nurdin sekitar Rp 5.000.000.000 untuk mengamankan suara anggota DPRD Provinsi Jambi pada pemilihan Gubernur Jambi tahun 1999. Hazrin Nurdin sudah lama menjadi kontraktor di pemda sejak masa Orde Baru. Dia sangat piawai dalam memenangkan proyek-proyek pemerintah daerah sejak masa Orde Baru. Hazrin Nurdin juga yang membiayai kemenangan Arifien Manap menjadi walikota Jambi tahun 1998.²²⁴

Hasip Kalimudin Syam sebagai lawan utama Zulkifli Nurdin ketika pemilihan Gubernur tahun 1999 memang memiliki aset yang banyak. Sebagai mantan Bupati Batanghari dua periode, mantan Sekretaris Daerah Provinsi dan mantan Wakil Gubernur tentulah Hasip Kalimudin mempunyai aset yang berlimpah. Tetapi dia tidak memiliki banyak uang tunai. Selain tidak punya uang tunai yang banyak, Hasip Kalimudin Syam juga tidak berani bagi-bagi uang besar dalam pemilihan Gubernur tahun 1999. Sedangkan Zulkifli Nurdin melalui Hazrin Nurdin berani bagi-bagi uang.

Hasip (Hasip Kalimudin Syam) banyak aset. Hasip (Hasip Kalimudin Syam) *gak* punya *cash money*. Dia (Hasip Kalimudin Syam) *nebar* uang itu *gak* berani. Hazrin (Hazrin Nurdin) berani.²²⁵

Zulkifli Nurdin menghabiskan uang Rp 60.000.000.000 dalam pemilihan Gubernur Jambi tahun 2005. Jumlah tersebut untuk menjamin kemenangannya

²²² Wawancara dengan Kasmadi Kasyim (Advokat/Ketua LBH Lingkungan), Jambi, 6 Februari 2012.

²²³ Wawancara dengan H (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 1 Desember 2011.

²²⁴ *ibid.*

²²⁵ Wawancara dengan H (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 1 Desember 2011.

karena ketakutannya akan manuver-manuver pasangan Hasip Kalimudin Syam dan Nasrun Arbain. Sebenarnya Zulkifli Nurdin cukup mengeluarkan biaya minimal saja sebesar Rp. 20.000.000.000 untuk biaya saksi, biaya atribut dan biaya tim sukses.

Periode kedua (Pemilihan Gubernur tahun 2005) habis 60 M (milyar). Sebenarnya dia (Zulkifli Nurdin) gak harus mengeluarkan sebanyak itu. Tapi dia (Zulkifli Nurdin) panik. Dia (Zulkifli Nurdin) 20 M (milyar) aja, .normatif aja. Sebab tidak mungkin dibawah 20 M (milyar). Karena saksi aja sudah 5 M (milyar). Dia (Zulkifli Nurdin) cemas karena nasrun (Nasrun Arbain) melapis hasip (Hasip Kalimudin Syam). Nasrun (Nasrun Arbain) kan banyak *move*. Tim sukses kan juga mengharapkan duit mengalir. Hazrin (Hazrin Nurdin) juga gitu orangnya gampang cemas. Dak kampanye bae dio (Zulkifli Nurdin) menang. Tapi karena ada nasrun (Nasrun Arbain). Gosipnya nasrun (Nasrun Arbain) akan bagi-bagi bibit dari (kota) jambi sampe bungo. Kan banyak lahan tidur. Ditanamin sawit yang dikelola warga.²²⁶

Kemenangan Zulkifli Nurdin pada pemilihan Gubernur tahun 2005 mutlak ditentukan oleh kemampuan finansialnya dalam melakukan politik uang. Melalui uangnya Zulkifli Nurdin mengumpulkan hampir seluruh kekuatan sosial dan politik di jambi untuk mendukungnya. Kompetitornya dalam setiap pemilihan Gubernur tidak ada yang bisa mengimbangi politik uang yang dilancarkan Zulkifli Nurdin. Zulkifli Nurdin bisa menghimpun dukungan dari kelompok etnis, kelompok LSM, jurnalis dan kelompok agama yang ada di Jambi.

Masalahnya kandidat yang lain tidak ada yang bisa menandingi *money politics* nya. Kompetitornya tidak ada. Usman Ermulan tidak mampu untuk itu. Hasip Kalimudin Syam juga tidak maksimal. Masyarakat di Jambi pemikirannya ada uang baru pilih. Dia (Zulkifli Nurdin) menghabiskan uang banyak untuk pemenangannya pada 2005. Dia (Zulkifli Nurdin) mengakomodasi seluruh LSM. Dia (Zulkifli Nurdin) bagi-bagi uang ke mesjid. Kadang satu mesjid bisa dapat 10 juta. Tim suksesnya begitu gemuk. Itulah yang dilakukannya *money politics*. Hampir semua suku di Jambi, dia (Zulkifli Nurdin) mempunyai gelar (kehormatan). Dia (Zulkifli Nurdin) membina pers dan mensuplai dana yang cukup bagus. Kawan-kawan pers menulis hanya untuk mendapatkan imbalan sesuatu dari pemerintah.²²⁷

Masalah politik uang terletak pada pembuktiannya. Sebuah tindakan dianggap politik uang apabila sudah mempunyai keputusan hukum dari

²²⁶ Wawancara dengan H (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 1 Desember 2011.

²²⁷ Wawancara dengan JS (Wartawan Majalah Gatra), Jambi, 21 November 2011.

pengadilan. Masyarakat sering sekali membicarakan namun tidak pernah ada yang bersedia menjadi saksi dalam persidangan.²²⁸

Politik uang memang sulit untuk dibuktikan dari aspek hukum pemilu. Sangat sulit membuktikan politik uang karena sifatnya mutualisme, masing-masing sama-sama merasa diuntungkan. Sangat sulit untuk mencari dua alat bukti dengan dua orang saksi dalam situasi yang saling menguntungkan.

Jika dikaji dari aspek hukum pemilu, maka sangatlah sulit untuk membuktikan terjadinya simbiose mutualisme ini, karena harus dibuktikan dengan dua orang saksi dan dua alat bukti. Disamping masih lemahnya payung hukum mengenai sanksinya. *Nah*, dalam situasi yang saling menguntungkan ini siapa sih yang mau diperkarakan? Makanya Panwaslu lebih berorientasi kepada dua hal, yaitu, pertama preemptif, menciptakan situasi kondisi agar pelaku takut untuk berbuat. Kedua preventif, melakukan pencegahan dengan membuat pemetaan dan menjaga super ketat daerah yang berpotensi konflik. Artinya, kembali kepada pertanyaan anda, apakah ada politik uang dan intimidasi? Jawabannya adalah sama dengan maaf, kentut. Tercium baunya tapi tidak diketahui siapa pelakunya.²²⁹

Solusi terhadap politik uang adalah dengan merevisi UU pemilu agar bisa memberikan hukuman yang berat sekali bagi pelaku politik uang. Harus ada ketegasan dan keseriusan regulasi. Tanpa itu politik uang akan tetap marak dalam pilkada.

Money politics pun rendah sekali hukumannya. Kurungan enam bulan, dibawah satu tahun. Sangat sangat ringan sekali. Terus kamu siapa ? saya pribadi pak. Nah itu kan terputus calonnya. Yang ngasih memang tim sukses, calonnya tidak tersentuh. Harusnya siapapun calonnya tim sukses *didis* (didiiskualifikasi) juga. Jadi ketika anda *money politics* anda didis. Selesai. Regulasi itu yang harus dibuat serius.²³⁰

Menurut Michael Buehler, perubahan institusional berupa pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak tahun 2005 di Indonesia mengalami penyimpangan dari tujuan mulianya mengembalikan kekuasaan sejati ke tangan rakyat. Pilkada secara langsung memaksa para elit lokal untuk bekerja lebih giat dan rutin kepada rakyat pemilih agar mendapatkan akses kepada

²²⁸ Wawancara dengan Yasir Arafat (Ketua KPU Provinsi Jambi), Jambi, 24 November 2011.

²²⁹ Wawancara dengan Aldrin Ali (Panwaslu Provinsi Jambi), Jambi, 1 Maret 2012.

²³⁰ Wawancara Edi Purwanto (Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi), Jambi, 22 November 2011.

kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Namun implikasi dari pilkada langsung adalah meningkatnya biaya pemenangan politik, merubah pola akumulasi kekuasaan, membangkitkan mesin politik, meningkatnya korupsi politik dan meningkatnya peranan jaringan personal yang dimiliki oleh broker kekuasaan.²³¹

3.3.2 Pengumpulan Dana yang Menyimpang

Zulkifli Nurdin diduga melakukan pengumpulan dana yang menyimpang melalui keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi. Banyak kasus yang melibatkan Zulkifli Nurdin seperti kasus pembangunan “waterboom” dan kasus pembangunan mess pemda Jambi di Jakarta. Zulkifli Nurdin selalu lolos dari kasus-kasus tersebut karena memiliki akses jaringan yang kuat terhadap penegak hukum.²³²

Sebagai contoh disebutkan Zulkifli Nurdin memiliki kedekatan dengan Kejati Provinsi Jambi, Kemas Yahya Rahman. Zulkifli Nurdin selalu datang ke acara penting yang diselenggarakan Kemas Yahya Rahman dan keluarga. Zulkifli Nurdin mengikuti resepsi pernikahan anak Kemas Yahya Rahman di Jakarta dan syukuran keluarga Kemas Yahya Rahman di Palembang. Kedekatan ini membuat Zulkifli Nurdin terbebas dari dugaan korupsi, mulai dari renovasi kantor gubernur, mess pemda, waterboom dan jembatan batanghari 2.²³³

Keterlibatan Zulkifli Nurdin dalam kasus “waterboom” dan kasus mess pemda di Jakarta cukup kuat. Sebagai Gubernur tidak mungkin Zulkifli Nurdin tidak mengetahuinya. Apalagi dalam persidangan kasus “waterboom”, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Chalik Saleh menyebut nama Zulkifli Nurdin berkali-kali sebagai penerima uang dari pengusaha Sudiro Lesmana. Sayangnya kesaksian Chalik Saleh tidak bisa dibuktikan dalam proses persidangan.²³⁴

²³¹ Michael Buehler, “The Rise of Sharia by-Laws in Indonesian Districts : An Indication for Changing Patterns of Power Accumulation and Political Corruption”, dalam *Journal South East Asia Research* Volume 16 Nomor 2.

²³² Wawancara dengan Rivani (Aktivis LSM Cappa Jambi), Jambi, 22 November 2011.

²³³ Syaiful Bukhori, dkk, ”Setelah Senandung Dinyanyikan”, Diakses pada <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/03/24/LU/mbm.20080324.LU126727.id.html> Tanggal 1 November 2011.

²³⁴ Wawancara dengan JS (Wartawan Majalah Gatra), Jambi, 21 November 2011.

Chalik Saleh dalam persidangannya sebagai terdakwa kasus korupsi pembangunan mess pemda Jambi mengakui selain dirinya, Zulkifli Nurdin juga menerima uang Rp. 2.000.000.000 dari pengusaha Sudiro Lesmana.²³⁵ Zulkifli Nurdin mengakui dirinya diberi cek senilai Rp. 2.000.000 tetapi sudah dikembalikan kepada Sudiro Lesmana. Zulkifli Nurdin juga mengaku dialah yang membuat *MoU* Pembangunan Mess Jambi senilai Rp. 36 Milyar antara Pemprov dan PT Cipta Pesona Usaha milik Sudiro Lesmana. Tetapi dia merasa tidak diberi tahu perkembangannya oleh Chalik Saleh dan Sudiro Lesmana.²³⁶

Banyak yang menilai tidak masuk akal jika Zulkifli Nurdin tidak terlibat dalam kasus besar korupsi di Jambi yaitu waterboom dan mess pemda di Jakarta. Mengingat posisinya sebagai Gubernur yang merancang proyek-proyek tersebut. Tidak mungkin bawahannya berani untuk tidak berkonsultasi dan tidak melapor kepada Zulkifli Nurdin. Apalagi dalam megaprojek bernilai puluhan hingga ratusan milyar.²³⁷

Biaya pemenangan sebagai kepala daerah yang besar cenderung membuat kepala daerah terpilih melakukan korupsi. Semakin besar biaya yang dikeluarkan kepala daerah ketika pilkada maka kecenderungannya semakin besar pula untuk melakukan korupsi. Setidaknya menggunakan jabatannya untuk kepentingannya sendiri.

Sangat memungkinkan bahwa setiap kepala daerah yang mengeluarkan dana besar mengembalikan dana besar tersebut. Ya tentunya mengarah kepada hal-hal yang kiranya menggunakan jabatannya untuk kepentingan sendiri, banyak korupsi.²³⁸

Selain dari proyek pemerintah, Zulkifli Nurdin juga sering menggunakan dana bantuan sosial yang dikelolanya. Terlebih ketika menjelang pemilihan Gubernur tahun 2005, pemeriksaan terhadap dana bantuan sosial tidak seketat sekarang pengawasannya. Bantuan sosial tersebut digunakan untuk mendekati masyarakat dan pembesaran PAN.

²³⁵ Diakses pada <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=8576> tanggal 1 November 2011.

²³⁶ Diakses pada <http://nasional.kompas.com/read/2008/08/14/0005186/zulkifli.mengaku.kembalikan.rp.2.miliar> tanggal 1 November 2011

²³⁷ Wawancara dengan SS (Wartawan Tribun Jambi), Jambi, 21 November 2011.

²³⁸ Wawancara dengan Syahidan, Ketua DPRD Muaro Jambi Periode 2009-2014, Jambi, 24 November 2011.

Beliau tidak memikirkan *fee*. Beliau menggunakan semua APBD untuk bantuan ke masyarakat. Waktu itu anggaran masih longgar beliau manfaatkan untuk bantuan sosial. Tidak untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan masyarakat dan pembesaran partai.²³⁹

Zulkifli Nurdin juga mendapatkan bantuan dana dari perusahaan besar yang beroperasi di Jambi. Walaupun memang susah melacak bukti-bukti langsung mengenai kontribusi perusahaan besar. Sangat logis perusahaan besar terlibat memberikan sumbangan kepada kandidat. Perusahaan harus mengelola berbagai resiko atau manajemen resiko termasuk resiko politik. Dalam konteks inilah perusahaan besar terlibat dalam pilkada. Indikasinya bisa dilihat dari sebenarnya Zulkifli Nurdin punya kewenangan untuk mengkaji ulang izin-izin konsesi perkebunan dan pertambangan yang telah dia keluarkan kepada perusahaan-perusahaan besar seperti tuntutan masyarakat. Zulkifli Nurdin juga bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang harus dipatuhi perusahaan. Tetapi itu semua tidak dilakukannya.²⁴⁰

Dalam pengumpulan dana melalui proyek pemerintah, Zulkifli Nurdin menugaskan Hazrin Nurdin. Bagi Hazrin Nurdin tidak ada kontraktor yang istimewa. Baginya yang terpenting pengusaha tersebut memberikan komisi sepuluh persen untuknya. Semua proyek diambil oleh Hazrin Nurdin sampai proyek-proyek penunjukkan langsung senilai 40 juta pun diambil. Apa yang dilakukan Hazrin Nurdin mirip dengan apa yang dilakukan M. Nazarudin, tersangka kasus korupsi yang sedang populer saat ini.

Uang segala-galanya buat dia (Hazrin Nurdin). Penunjukkan langsung 40 juta aja diambilnya. Dia (Hazrin Nurdin) gak punya alat berat. Cuma modal surat-surat aja. Kayak nazarudin (M. Nazarudin) dapet *fee* aja. Dia (Hazrin Nurdin) komisi aja. Kayak nazarudin (M. Nazarudin) persis. Komisi sepuluh persen bersih. Urusan kepala dinas urusan (kontraktor) sendiri.²⁴¹

Praktek kutipan dalam proyek pemerintah yang dilakukan oleh Hazrin Nurdin mirip dengan yang dilakukan oleh “Tuan Besar”, seorang “orang kuat lokal” yang muncul di Banten era desentralisasi. “Tuan Besar” mengutip *fee*

²³⁹ Wawancara dengan Saiful Azwar (Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

²⁴⁰ Wawancara dengan Rivani (Aktivis LSM Cappa Jambi), Jambi, 22 November 2011.

²⁴¹ Wawancara dengan H (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 1 Desember 2011.

sebesar 10-11 % proyek pemerintah yang berlangsung di Banten. “Tuan Besar” menguasai berbagai proyek pemerintah yang bernilai besar di Banten era desentralisasi.²⁴²

Menurut Marcus Mietzner, prasyarat transisi demokrasi yang sukses adalah kemampuan negara untuk memperkenalkan dan menerapkan mekanisme pendanaan yang transparan bagi aktor-aktor politik kunci seperti partai politik. Partai politik pasca Orde Baru mengumpulkan dana dari subsidi negara, donasi dan korupsi. Hal tersebut dikarenakan format kepartaian yang berubah dari partai massa yang tradisional yang mengandalkan iuran dan kontribusi internal menjadi partai elit yang modern tetapi berbiaya tinggi tanpa iuran dan kontribusi internal karena menggunakan kampanye media yang mahal dan menyewa berbagai konsultan dari luar.²⁴³

Partai politik pasca Orde Baru juga mengalami komersialisasi. Partai politik hanya memberi ruang bagi kalangan yang berduit saja. Tidak heran apabila pengusaha-pengusaha memperoleh jabatan-jabatan penting di partai politik dan mendominasi di parlemen. Dalam konteks pilkada partai politik memilih kandidat yang punya banyak uang dari eksternal (birokrat, purnawirawan dan pengusaha) ketimbang mengusung kader sendiri dari internal partai karena partai tidak sanggup membiayai kampanye secara mandiri.²⁴⁴

3.4 Model Pembangunan Zulkifli Nurdin

3.4.1. Berpihak ke Korporasi Besar

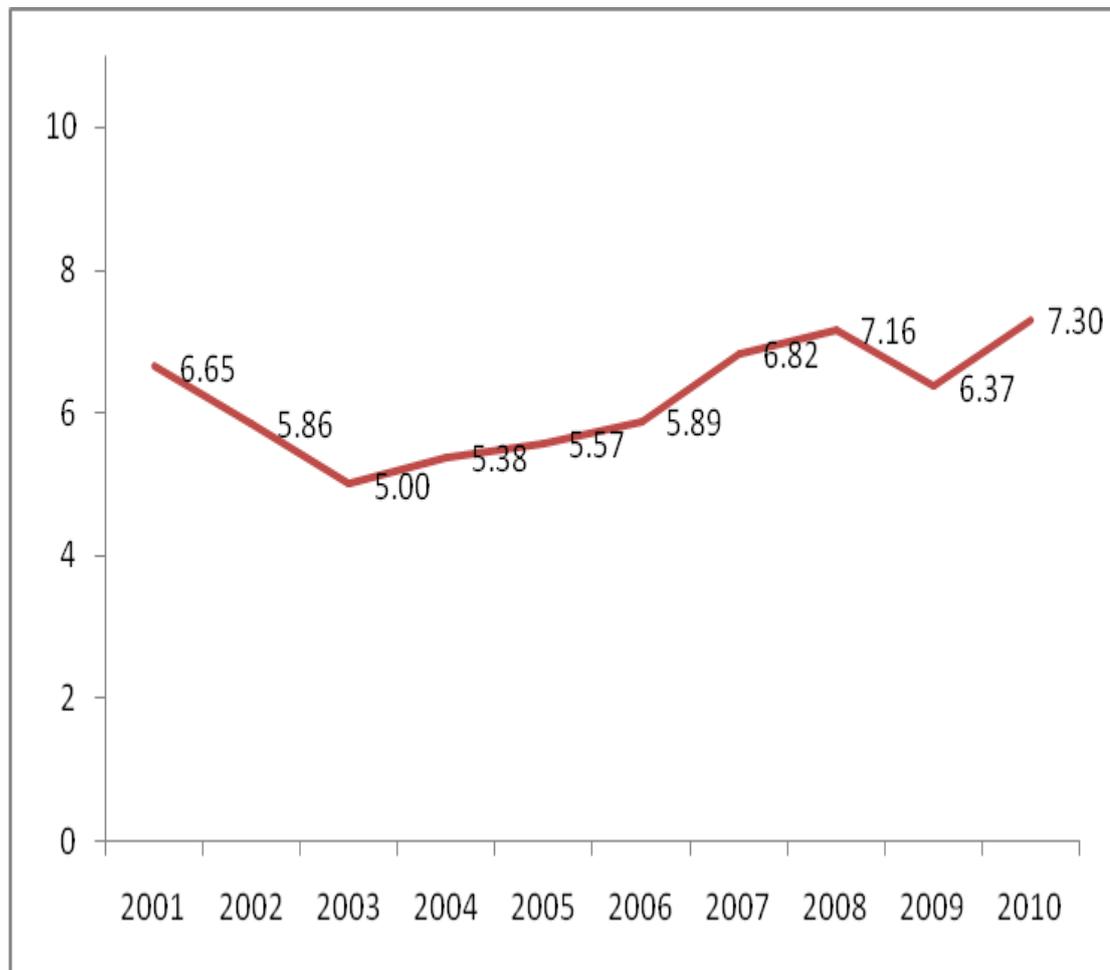
Pertumbuhan ekonomi Jambi dibawah kepemimpinan Zulkifli Nurdin mengalami peningkatan (**Lihat Tabel 3.15**). Pertumbuhan ekonomi Jambi selalu diatas 5 %. Pertumbuhan ekonomi Jambi yang terendah adalah 5 % pada tahun 2003. Bahkan pada tahun 2008 dan tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Jambi menembus 7 %. Pertumbuhan ekonomi Jambi tahun 2008 mencapai 7,16 %. Pertumbuhan ekonomi Jambi tahun 2010 mencapai 7,30 %.

²⁴² Syarif Hidayat, “Shadow State ...? : Bisnis dan Politik di Provinsi Banten”, dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta : YOI, 2007), hal 294-295.

²⁴³ Marcus Mietzner, “Soldiers, Parties and Bureaucrats : Illicit Fund-Raising in Contemporary Indonesia”, dalam *Journal South East Asia Research* Volume 16 Nomor 2.

²⁴⁴ *ibid.*

Tabel 3.15
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2001-2010



Sumber : Bappeda Provinsi Jambi, 2011

Pertumbuhan ekonomi Jambi yang tinggi ternyata tidak berkorelasi dengan penambahan tenaga kerja yang tinggi pula (**Lihat Tabel 3.16**). Tidak ada lonjakan penambahan tenaga kerja yang signifikan. Jumlah pekerja sektor industri justru menurun.

Tabel 3.16
Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005, 2007 dan 2008

No.	Lapangan Usaha	Jumlah Penduduk yang Bekerja		
		2005	2007	2008
1.	Pertanian	631.399	688.429	688.541
2.	Pertambangan	11.737	n.a	n.a
3.	Industri	76.374	50.749	44.892
4.	Listrik, Gas dan Air	3.189	n.a	n.a
5.	Konstruksi	34.047	50.923	39.891
6.	Perdagangan	163.899	179.389	180.281
7.	Transportasi	48.101	54.850	65.967
8.	Keuangan/Asuransi, Persewaan, Jasa Perusahaan	6.153	6.741	7.014
9.	Jasa Kemasyarakatan	122.308	128.639	131.495
10.	Lainnya	n.a	12.148	24.592
Jumlah Total Pekerja		1.097.207	1.171.868	1.182.673
Jumlah Total Penduduk		2.657.536	2.742.196	2.788.269

Sumber : Bappeda, Jambi Dalam Angka 2006 dan 2009

Pertumbuhan ekonomi Jambi yang tinggi lebih disebabkan oleh investasi modal terutama pada industri batubara yang baru berkembang dengan kebutuhan tenaga kerja terdidik dan terampil. Disamping perkembangan investasi di sektor kehutanan dan perkebunan. Mayoritas tenaga kerja di provinsi Jambi masih mengandalkan sektor pertanian. Dimana sektor pertanian karakter tenaganya tidak terdidik dan tidak terampil (**Lihat Tabel 3.17**). Ketika mencoba masuk ke industri seperti batubara para tenaga kerja sektor pertanian tersebut akan kalah dan tersisih.²⁴⁵

²⁴⁵ Wawancara dengan D (Pejabat Eselon III Pemprov Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

Tabel 3.17
Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Jambi Tahun 2009

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Pernah Sekolah	51.907
2.	Tidak Tamat SD	263.219
3.	SD	338.923
4.	SMP	244.856
5.	SMA	184.284
6.	SMK	84.950
7.	Diploma	38.558
8.	Sarjana	53.895
Jumlah Total Pekerja		1.260.592

Sumber : Bappeda Provinsi Jambi, Jambi Dalam Angka 2009

Sektor Pertanian menjadi sektor terbesar penyumbang PDRB Provinsi Jambi tahun 2004-2009. Diikuti oleh sektor perdagangan pada peringkat kedua dan sektor industri pengolahan pada peringkat ketiga. Sektor pertambangan berada pada peringkat keempat penyumbang PDRB Provinsi Jambi tahun 2004-2009 (**Lihat Tabel 3.18, Tabel 3.19 dan Tabel 3.20**).

Sub sektor tanaman perkebunan menyumbang porsi terbesar dalam sektor pertanian. Sub sektor minyak bumi dan gas alam hampir menyumbang seluruh sektor pertambangan. Sub sektor barang kayu dan hasil hutan menyumbang porsi terbesar dalam sektor industri pengolahan kecuali tahun 2009 (**Lihat Tabel 3.18, Tabel 3.19 dan Tabel 3.20**).

Tabel 3.18
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2004-2005 (dalam juta rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2004	2005
1.	Pertanian	3.643.690,63	3.811.540,80
	Tanaman Perkebunan	1.516.507,13	1.588.828,60
	Kehutanan	271.999,16	265.755,77
	Lainnya	1.855.184,34	1.956.956,43
2.	Pertambangan	1.572.121,28	1.588.492,98
	Migas	1.444.783,41	1.454.904,69
	Non-Migas	0	0
	Lainnya	127.337,87	133.588,29
3.	Industri Pengolahan	1.702.804,45	1.769.220,83
	Barang Kayu & Hasil Hutan	881.113,06	900.056,99
	Kertas & Barang Cetak	95.503,34	97.931,43
	Lainnya	726.188,05	771.232,41
4.	Listrik dan Air Bersih	93.080,12	97.824,03
5.	Bangunan	443.302,02	535.289,07
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.971.469,95	2.149.765,19
7.	Pengangkutan & Komunikasi	953.896,76	1.021.598,53
8.	Keuangan	446.225,86	483.787,03
9.	Jasa-Jasa	1.126.294,40	1.162.453,71
	Total PDRB	11.953.885,47	12.619.972,18

Sumber : Bappeda Provinsi Jambi, Jambi Dalam Angka 2005

Tabel 3.19
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2005-2006 (dalam juta rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2006	2007
1.	Pertanian	4.034.894,15	4.437.448,46
	Tanaman Perkebunan	1.757.430,82	2.072.372,66
	Kehutanan	267.990,41	274.831,23
	Lainnya	2.009.472,92	2.090.244,57
2.	Pertambangan	1.676.722,57	1.614.206,55
	Migas	1.507.755,41	1.371.324,03
	Non-Migas	27.862,29	75.550,14
	Lainnya	141.104,87	167.332,38
3.	Industri Pengolahan	1.847.833,47	1.948.460,26
	Barang Kayu & Hasil Hutan	901.648,46	904.232,20
	Kertas & Barang Cetakan	99.498,13	101.571,04
	Lainnya	846.686,88	942.657,02
4.	Listrik dan Air Bersih	102.860,81	109.743,85
5.	Bangunan	507.983,85	654.223,43
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	2.326.608,87	2.464.612,40
7.	Pengangkutan & Komunikasi	1.082.250,89	1.159.479,50
8.	Keuangan	511.717,65	609.271,18
9.	Jasa-Jasa	1.209.748,36	1.277.715,71
	Total PDRB	13.363.620,73	14.275.161,35

Sumber : Bappeda Provinsi Jambi, Jambi Dalam Angka 2007

Tabel 3.20
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2008-2009 (dalam juta rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2008	2009
1.	Pertanian	4.691.195,98	4.998.781,32
	Tanaman Perkebunan	2.197.097,04	2.351.750,07
	Kehutanan	270.900,40	264.386,11
	Lainnya	2.223.198,54	2.382.645,14
2.	Pertambangan	1.851.478,43	1.864.642,89
	Migas	1.447.701,50	1.475.920,44
	Non-Migas	224.678,85	196.397,28
	Lainnya	179.098,08	192.325,18
3.	Industri Pengolahan	2.058.252,13	2.158.283,62
	Barang Kayu & Hasil Hutan	908.668,66	105.572,67
	Kertas & Barang Cetakan	103.757,30	37.001,15
	Lainnya	1.045.826,17	2.015.709,80
4.	Listrik dan Air Bersih	117.730,99	128.645,78
5.	Bangunan	721.482,38	782.474,70
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	2.562.858,25	2.756.590,81
7.	Pengangkutan & Komunikasi	1.198.512,56	1.268.174,97
8.	Keuangan	754.770,87	889.519,04
9.	Jasa-Jasa	1.341.488,97	1.425.145,98
	Total PDRB	15.297.770,57	16.272.259,12

Sumber : Bappeda Provinsi Jambi, Jambi Dalam Angka 2009

Sinar Mas Group (SMG) melalui anak perusahaannya menjadi penyumbang terbesar sub sektor barang kayu dan hasil hutan, yang menjadi penyumbang terbesar sektor industri pengolahan. Sinar Mas Group (SMG) melalui Sinar Mas Forestry (SMF) menguasai hutan tanaman industri di Provinsi Jambi. Ada perbedaan data penguasaan lahan Sinar Mas Group (SMG).²⁴⁶

Versi pertama adalah versi Sinar Mas Group (SMG) dan Pemerintah Daerah. Menurut versi ini, Sinar Mas Group (SMG) menguasai 200.000 hektar hutan tanaman industri dan ada 100.000 hektar lagi sebagai bagian rencana ekspansi. Sedangkan versi kedua berasal dari LSM lingkungan KKI Warsi Jambi. Menurut KKI Warsi Jambi, Sinar Mas Group (SMG) menguasai hampir 350.000 hektar hutan tanaman industri. Selain PT Wira Karya Sakti (PT WKS), anak perusahaan yang lain yang menangani hutan tanaman industri adalah PT Rimba Hutani Mas (PT RHM). PT RHM mendapatkan izin pengelolaan hutan tanaman industri sejak tahun 2004. PT RHM mengelola sekitar 51.260 hektar hutan tanaman industri.²⁴⁷

Sebelum Zulkifli Nurdin berkuasa, ada 9 izin pengelolaan Hutan Tanaman Industri diberikan kepada 9 perusahaan dengan total luas areal 127.165 hektar. Ketika Zulkifli Nurdin berkuasa bertambah 9 izin pengelolaan Hutan Tanaman Industri yang baru. Izin baru tersebut diberikan kepada 9 perusahaan dengan total luas areal 536.644 hektar (**Lihat Tabel 3.21**).

Selain itu dua perusahaan sudah dalam status pencadangan pengelolaan Hutan Tanaman Industri dengan luas total areal sebesar 135.675 hektar. Sinar Mas Group (SMG) melalui dua anak perusahaan Sinar Mas Forestry (SMF) menguasai mayoritas pengelolaan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Jambi. PT Wira Karya Sakti (PT WKS) dan PT Rimba Hutani Mas (PT RHM) adalah dua anak perusahaan Sinar Mas Forestry dengan total penguasaan areal 345.072 hektar.

²⁴⁶ Nur Hidayat dan Jogi Sirait, "Basa-Basi di Taman Raja", dalam Majalah Gatra Nomor 48, Kamis, 8 Oktober 2009.

²⁴⁷ Nur Hidayat dan Jogi Sirait, "Basa-Basi di Taman Raja", dalam Majalah Gatra Nomor 48, Kamis, 8 Oktober 2009.

Tabel 3.21
Izin Pengelolaan HTI di Provinsi Jambi tahun 1995-2010

No.	Nama Perusahaan	Luas HTI (dalam hektar)	Tanggal Izin SK Definitif
1.	PT Wanakasita Nusantara	9.030	18 Desember 1995
2.	PT Arangan Hutani Lestari	9.400	12 Desember 1995
3.	PT Wana Teladan	9.800	5 Agustus 1996
4.	PT Wana Perintis	6.900	18 Desember 1996
5.	PT Dyera Hutani Lestari	8.000	13 Januari 1997
6.	PT Limbah Kayu Utama	19.300	27 Februari 1998
7.	PT Wana Mukti Wisesa	9.105	27 Februari 1998
8.	PT Samhutani	35.955	25 Februari 1999
9.	PT Gamasia Hutani	19.675	30 September 1999
10.	PT Rimba Hutani Mas	51.260	9 Maret 2004
11.	PT Jebus Maju	15.012	9 September 2004
12.	PT Wira Karya Sakti	293.812	10 September 2004
13.	PT Tebo Multi Agro	19.770	19 Juli 2006
14.	PT Mugitriman Internasional	37.500	13 Juli 2009
15.	PT Bukit Kausar	10.785	23 Juli 2009
16.	PT Agronusa Alam Sejahtera	22.525	5 Agustus 2009
17.	PT Malaka Agro Perkasa	24.485	28 September 2009
18.	PT Lestari Asri Jaya	61.495	Februari 2010
	Total	663.809	

Sumber : Kelompok Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, 2010

Manfaat dari investasi besar pada sub sektor kehutanan dan tanaman perkebunan tidak dinikmati oleh banyak rakyat Jambi. Sub sektor ini tidak ada kemampuan menciptakan nilai tambah. Padahal Provinsi Jambi kaya akan bahan mentah. Kondisi ini menguntungkan pihak asing seperti Singapura.²⁴⁸

Investasi tersebut juga dimanfaatkan oleh korporasi besar seperti Sinar Mas Group melakukan politik kartel. Sinar Mas Group melalui PT Wira Karya Sakti sedang membentuk kartel pengelolaan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Jambi. Dengan penguasaan minimal 300.000 hektar memperlihatkan Sinar Mas Group adalah penguasa hutan di Jambi.

Sinar Mas (Sinar Mas Group) penguasa hutan. Menguasai lahan 300.000 hektar. Sinar Mas (Sinar Mas Group) ada dibelakang WKS (PT Wira Karya Sakti). WKS (PT Wira Karya Sakti) membentuk kartel.²⁴⁹

²⁴⁸ Wawancara dengan D (Pejabat Eselon III Pemprov Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

²⁴⁹ Wawancara dengan D (Pejabat Eselon III Pemprov Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

Keberpihakan Zulkifli Nurdin terhadap pengusaha sudah direncanakannya sejak awal. Model pembangunannya adalah pro terhadap modal. Keberpihakan Zulkifli Nurdin ditunjukkan untuk memperoleh dana sebanyak-banyaknya dengan cara secepat-cepatnya. Sehingga bisa memulai bisnis perizinan terutama izin untuk mengambil kekayaan alam. Zulkifli Nurdin menjadi pemburu rente. Tidak ada kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat miskin.²⁵⁰

Berdasarkan data resminya, Zulkifli Nurdin mengakui hanya penambahan 33.490 hektar hutan produksi selama kekuasaannya (**Lihat Tabel 3.22**). Tidak ada informasi dari mana asal lahan sebesar itu. Mengingat tidak ada perubahan luas areal hutan lindung dan hutan wisata menurut data resmi Gubernur Jambi.

Tabel 3.22
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi

No.	Tahun	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Wisata & Hutan Suaka Alam
1.	2000/2001	1.278.700	191.130	679.120
2.	2001/2002	1.278.700	191.130	679.120
3.	2002/2003	1.278.700	191.130	679.120
4.	2003/2004	1.278.700	191.130	679.120
5.	2004/2005	1.278.700	191.130	679.120
6.	2005/2006	1.278.700	191.130	679.120
7.	2006/2007	1.312.190	191.130	679.120
8.	2007/2008	1.312.190	191.130	679.120
9.	2008/2009	1.312.190	191.130	679.120
10.	2009/2010	1.312.190	191.130	679.120

Sumber : LKPJ Gubernur Jambi tahun 2010

Politik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia era desentralisasi tidak jauh berbeda dengan era sentralisasi. Izin-izin pengelolaan hutan tanaman industri tetap banyak dikeluarkan kepada perusahaan besar terutama di pulau sumatera, pulau jawa dan pulau kalimantan. Izin tersebut dikeluarkan pemerintah daerah untuk mendapatkan dana dari eksploitasi sumber daya alam. Izin dalam skala

²⁵⁰ Wawancara dengan Rivani (Aktivis LSM Cappa Jambi), Jambi, 22 November 2011.

besar dikeluarkan seperti izin pengelolaan hutan tanaman industri di Kalimantan Tengah seluas 120.000 hektar.²⁵¹

Daerah dengan sumber daya alam yang tinggi akan mempertahankan metode kontrol atas sumber daya alam melalui bisnis perizinan yang diterapkan orde baru. Bisnis perizinan memberikan uang yang besar bagi politisi dan birokrat di daerah. Mereka menggunakan uang tersebut untuk mendukung kepentingan – kepentingan politis mereka dan menjamin loyalitas pendukung mereka.²⁵²

Selain menambah areal pengelolaan Hutan Tanaman Industri, Zulkifli Nurdin berhasil menambah luas areal perkebunan kelapa sawit dan karet. Jumlah perkebunan kelapa sawit meningkat dari 301.979 hektar kebun sawit pada tahun 2001 menjadi 493.737 hektar kebun kelapa sawit pada tahun 2009. Jumlah perkebunan karet meningkat dari 558.633 hektar kebun karet pada tahun 2001 menjadi 650.623 hektar kebun karet pada tahun 2009.²⁵³

Penambahan areal perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet juga diikuti penambahan jumlah perusahaan yang terlibat. Dari 7 perusahaan *crumb rubber* pada tahun 2001 bertambah menjadi 9 perusahaan *crumb rubber* pada tahun 2005 dan 11 perusahaan *crumb rubber* pada tahun 2009. Dari 23 perusahaan kelapa sawit tahun 2005 menjadi 35 perusahaan kelapa sawit pada tahun 2009.²⁵⁴

Ada lima kelompok usaha yang menguasai kelapa sawit di Provinsi Jambi. Kelimanya adalah Sinar Mas Group, Bakrie Plantation Group, Gudang Garam Group, Asian Agri Group dan Wilmar Group. Ada 150.000 hektar kebun kelapa sawit yang dikelola sendiri dan ada 315.000 hektar kebun kelapa sawit yang dikelola melalui konsep plasma oleh kelima kelompok usaha tersebut. Hanya 20.000 hektar kebun kelapa sawit yang dikelola oleh negara melalui PTPN VI.²⁵⁵

Zulkifli Nurdin lebih berpihak kepada perusahaan besar dan bisnis keluarganya ketimbang kepentingan rakyat. Zulkifli Nurdin memfasilitasi

²⁵¹ Semiarto A. Purwanto, “Forest Resource Management and Self-Governance in Regional Autonomy Indonesia”, dalam Maribeth Erb, Priyambudi Sulistiyanto dan Carole Faucher, *Regionalism in Post-Suharto Indonesia*, (London : Routledge, 2005), hal 224-233.

²⁵² John F. McCarthy, “Dijual ke Hilir : Merundingkan Kembali Kekuasaan Publik Atas Alam di Kalimantan Tengah” dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta : YOI, 2007), hal 195-210.

²⁵³ Bappeda Provinsi Jambi, *Jambi Dalam Angka 2005-2009*.

²⁵⁴ Bappeda Provinsi Jambi, *Jambi Dalam Angka 2005-2009*.

²⁵⁵ Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, *Peluang Industri Hilir Sawit*, 2008.

berbagai izin perusahaan besar seperti Sinar Mas Group dan justru tidak memberikan proteksi terhadap kepentingan vital rakyat seperti tanah.

Zulkifli Nurdin kooperatif terhadap masuknya investasi dan modal ke Jambi. Perusahaan besar juga tidak sanggup memberikan tekanan kepada Zulkifli Nurdin karena dia juga punya aset ekonomi yang cukup besar. Yang terjadi (Zulkifli Nurdin) kooperatif saat mengeluarkan izin-izin. Seharusnya Zulkifli Nurdin sebagai pimpinan politik melakukan proteksi terhadap kepentingan vital warganegara (tanah). Ekspansi Sinar Mas Group terus terjadi dan ekspansi bisnis keluarga Zulkifli Nurdin pun juga terjadi. Dia (Zulkifli Nurdin) lebih memilih memfasilitasi kepentingan vital borjuasi nasional ketimbang kepentingan vital rakyat.²⁵⁶

Zulkifli Nurdin berhasil menambah jumlah perusahaan yang berinvestasi dan nilai investasi selama kekuasaannya. Zulkifli Nurdin berhasil mengembangkan investasi domestik dan investasi asing di Provinsi Jambi (**Lihat Tabel 3.23 dan Tabel 3.24**). Investasi asing mengalami peningkatan yang signifikan selama kekuasaan Zulkifli Nurdin. Dari hanya 15 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp 502.534.680.000 tahun 1999 berubah menjadi 87 perusahaan dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.982.487.470.000 tahun 2008. Terjadi peningkatan empat kali lipat nilai investasi.

Tabel 3.23

Jumlah Investasi Perusahaan PMDN di Provinsi Jambi 1998-2008

No.	Tahun	Jumlah Perusahaan	Investasi (Juta)
1.	1998	93	5.836.124,64
2.	1999	89	5.595.854,11
3.	2000	93	7.296.560,03
4.	2001	87	7.621.781,09
5.	2002	99	8.046.466,84
6.	2003	110	8.371.161,23
7.	2004	114	8.534.189,37
8.	2005	120	8.788.966,51
9.	2006	124	9.283.666,14
10.	2007	127	9.123.509,32
11.	2008	126	8.838.272,41

Sumber : BKPMMD Provinsi Jambi (2009)

²⁵⁶ Wawancara dengan Kasmadi Kasyim (Advokat/Ketua LBH Lingkungan), Jambi, 6 Februari 2012.

Tabel 3.24
Jumlah Investasi Perusahaan PMA di Provinsi Jambi 1998-2008

No.	Tahun	Jumlah Perusahaan	Investasi (Juta)
1.	1998	11	237.697,77
2.	1999	15	502.534,68
3.	2000	25	651.345,75
4.	2001	35	665.266,64
5.	2002	39	852.014,98
6.	2003	43	652.289,38
7.	2004	47	667.455,71
8.	2005	53	730.529,92
9.	2006	58	1.170.499,22
10.	2007	67	1.171.456,29
11.	2008	87	1.982.487,47

Sumber : BKPM Provinsi Jambi (2009)

3.4.2. Proyek Besar yang Bermasalah

Proyek Besar yang dinilai bermasalah adalah program *replanting* karet dan sawit sejuta hektar. Henri Masyur, Ketua DPW PKS Provinsi Jambi menyatakan replanting karet yang menelan anggaran hingga Rp.70.400.000.000 hanya memberi tambahan 21.000 hektar dari 130 ribu hektar yang ditargetkan. Selain itu Henri Masyur melihat program ini belum tepat sasaran, belum lagi dari kualitas bibit ternyata juga mengalami banyak permasalahan di lapangan.²⁵⁷

Program sawit sejuta hektar milik rakyat Zulkifli Nurdin memang gagal tapi ratusan ribu hektar kelapa sawit sudah terjadi dalam bentuk perusahaan-perusahaan raksasa kelapa sawit. Penguasaan areal hutan tanaman industri pun semakin luas terutama milik perusahaan raksasa Sinar Mas Group (SMG).

Sawit sejuta hektar diatas kertas tidak terjadi. Ternyata sawit 1,1 juta hektar sudah terjadi. Kalau pemerintah masih *mempublish* lahan sawit masih 400 ribu hektar di lapangan mencapai 800.000 ribu hektar. Kalau di perkebunan kelapa sawit berbagi ya. Ada raja garuda mas punya sukanto tanoto. Kalau kehutanan sinar mas yang paling jago. SMG (Sinar Mas Group) kan holdingnya. Guritanya sudah hulu ke hilir. Sinar Mas Forestry inilah yang membawahi WKS (PT Wira Karya Sakti). Ada APP untuk pulp and paper. WKS (PT Wira Karya Sakti) punya HTI.

²⁵⁷ Metro Jambi, “ Catatan Hitam Rezim ZN dan Pemborosan Uang Rakyat Pelantikan HBA”, diakses pada <http://infojambi.com/v.1/opini/11454-catatan-hitam-rezim-zn-dan-pemborosan-uang-rakyat-pelantikan-hba.html> tanggal 1 November 2011.

Mereka (PT Wira Karya Sakti) melampaui penguasaan angka psikologis setengah juta.²⁵⁸

Hampir semua program Zulkifli Nurdin belum berhasil memberikan kesejahteraan bagi rakyat Jambi. Ada beberapa program Zulkifli Nurdin yang dinilai publik gagal. Pertama, gagalnya program pembuatan jalan menuju Kerinci dengan membelah Taman Nasional Kerinci Seblat. Berbagai organisasi masyarakat seperti Walhi menentang keras program ini. Kedua, gagalnya program sawit sejuta hektar. Program ini gagal karena tidak ada lahan sejuta yang kosong di Jambi. Selain itu juga 600.000 hektar lahan sudah dikuasai oleh Sinar Mas Group (PT RHM dan PT WKS). Ketiga, gagalnya program pembangunan pelabuhan samudera di Muara Sabak. Keempat, gagalnya program *replanting* atau peremajaan karet. Banyak dugaan bibit karet yang dibagikan Zulkifli Nurdin tidak bisa menghasilkan.²⁵⁹

Tidak ada warisan yang ditinggalkan Zulkifli Nurdin yang bermanfaat untuk rakyat. Jembatan Batanghari 2 yang sering Zulkifli Nurdin klaim sebagai keberhasilan juga tidak memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Ratusan milyar untuk pembangunan sebuah jembatan dinilai tidak memberikan manfaat yang besar.

Kalau hasilnya 10 tahun tidak ada. Batanghari 2 pun bermasalah. Berapa tahun anggaran itu dikerjakan. Ratusan milyar. Dibandingkan biaya dengan manfaat tidak sebanding.²⁶⁰

Zulkifli Nurdin juga tidak memberikan komitmen terhadap penguatan ekonomi rakyat kecil melalui ekonomi kerakyatan. Berbagai programnya seperti patin jambal dan *replanting* karet tidak jelas implementasinya. Program-programnya tidak dirancang dengan baik. Justru program seperti *replanting* karet menambah beban masyarakat.

Proyek patin jambal dan *replanting* karet masih bias implementasinya. Tidak dipikir panjang sebuah program dirancang. Masyarakat disuruh menebang karetnya terus diganti dengan karet baru, terus rakyat makan apa ?. Itu yang tidak terselesaikan dengan pemerintah jambi ketika itu.

²⁵⁸ Wawancara dengan Rivani (Aktivis LSM Cappa Jambi), Jambi, 22 November 2011.

²⁵⁹ Wawancara dengan JS (Wartawan Majalah Gatra), Jambi, 21 November 2011.

²⁶⁰ Wawancara dengan Paisal Kumar (Pemimpin Redaksi Jambi Independen), Jambi, 6 Februari 2012.

Sehingga program itu tidak berjalan dengan maksimal. Jadi program-program yang diciptakan itu banyak yang instan. Sehingga uang rakyat yang didistribusikan itu tidak keliatan.²⁶¹

3.4.3. Kasus Waterboom dan Kasus Mess Pemda

Zulkifli Nurdin banyak mengeluarkan proyek yang bermasalah. Misalnya Gerakan Masyarakat Peduli Daerah Jambi (GMPDJ) melaporkan dugaan korupsi Zulkifli Nurdin dalam pembangunan kantor gubernur Jambi senilai Rp 35.280.898.000.²⁶² Zulkifli Nurdin juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembangunan mess pemda jambi di jalan cidurian, cikini.²⁶³ Hakim Hendra Yosphin, hakim yang memimpin sidang kasus mess pemda Jambi menyatakan Zulkifli Nurdin harus bertanggungjawab selain terdakwa Chalik Saleh dan Sudiro Lesmana dalam kasus renovasi mess pemda Jambi karena menandatangani nota kesepahaman (MoU) Pemprov Jambi yang merujuk pada pekerjaan renovasi mess Pemda Jambi di Jakarta.²⁶⁴

Proyek Jembatan Batanghari 2 juga diperiksa KPK karena ada dugaan terjadi korupsi dalam proyek yang menghabiskan dana Rp. 161.000.000.000. Proyek yang dimulai tahun 2003 diperkirakan selesai tahun 2006 dengan menghabiskan dana Rp. 95 milyar. Dalam pelaksanaan baru selesai tahun 2009 dengan menghabiskan dana Rp. 161.000.000.000²⁶⁵

Proyek yang fenomenal adalah pembangunan taman rekreasi dan wisata yang dikenal sebagai “waterboom” senilai Rp.121.700.203.065. *MoU* antara Pemprov Jambi dengan perusahaan Sudiro Lesama pun sudah ditandatangani. Proyek tersebut dinilai bermasalah karena anggaran yang dinilai terlalu besar dan membebani APBD Provinsi Jambi.²⁶⁶

Arifien Manap mempunyai pendapat mengenai pembangunan waterboom. Menurutnya pembangunan waterboom yang digagas Zulkifli Nurdin kemahalan. Sebagai perbandingan Arifien Manap memberikan izin pembangunan waterboom

²⁶¹ Wawancara Edi Purwanto (Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi), Jambi, 22 November 2011.

²⁶² Suara Pembaruan, 2 Maret 2005.

²⁶³ Jawa Pos, 28 September 2007.

²⁶⁴ Koran Tempo, 16 Oktober 2008.

²⁶⁵ Syaiful Bukhori, “Proyek Batanghari II Jambi Rampung, KPK Tetap Usut Dugaan Korupsi”, Koran Tempo, 8 Agustus 2009.

²⁶⁶ Syarif Hidayat, “Bisnis dan Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasca Pilkada”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan (JEP)* Volume XV Nomor 1 tahun 2007.

milik hotel abadi di kota Jambi yang hanya menghabiskan anggaran Rp. 8.000.000.000.

Gubernur (Zulkifli Nurdin) bikin waterboom 80 miliar. Saya (Arifien Manap) tanya ke hotel abadi yang sudah bikin waterboom berapa biayanya. Mereka bilang 8 miliar. Untuk perbandingan dengan gubernur (Zulkifli Nurdin) punya, saya (Arifien Manap) izinkan pembangunan waterboom hotel abadi. Saya (Arifien Manap) mau tunjukkan ini lho 8 miliar.²⁶⁷

Sudiro Lesmana, pengusaha yang terpidana kasus waterboom dibawa ke Jambi bukan oleh Zulkifli Nurdin melainkan oleh keponakan Wakil Gubernur Anthoni Zeidra Abidin. Sehingga tidak ada hubungan istimewa antara Zulkifli Nurdin dengan Sudiro Lesmana.²⁶⁸ Sudiro Lesmana datang ke semua pejabat untuk mencari proyek. Sudiro Lesmana juga menjadi terpidana dalam kasus PLTD di Muaro Jambi yang melibatkan mantan Bupati Muaro Jambi Asad Syam dan mantan sekda Muaro Jambi Muchtar Muis.²⁶⁹

Sudiro Lesmana itu orang Cina Timor, Cina Flores. Yang bawa bukan Zulkifli Nurdin tapi keponakan AZA (Anthoni Zeidra Abidin-Wakil Gubernur Jambi 2005-2010). (Berjenis kelamin) Cewek dia. Sudiro Lesmana main ke siapa saja di Jambi.²⁷⁰

3.4.4 Menyulut Konflik dengan Masyarakat

Kebijakan Zulkifli Nurdin sebagai Gubernur tidak jauh bergeser dari latar belakangnya sebagai pengusaha. Tujuan dari kebijakannya adalah bagaimana Jambi aman untuk investasi. Zulkifli Nurdin gagal dalam mengetahui konflik-konflik di dalam masyarakatnya. Warisan yang dia tinggalkan adalah konflik yang semakin tinggi.

Pak zul (Zulkifli Nurdin) kan latar belakangnya pengusaha. Misalnya diluncurkan program heboh sawit sejuta hektar. Bangun jembatan muara sabak misalnya. Yang tujuannya untuk modal aman berinvestasi. Infrastruktur untuk rakyat tidak dipikirkan yang dipikirkan infrastruktur untuk modal. Pak zul (Zulkifli Nurdin) juga gagal dalam memotret konflik-konflik sosial. Misalnya konflik Sinar Mas Group dengan petani. Terjadi juga penggunaan aparat kekerasan. Tidak ada evaluasi dari

²⁶⁷ Wawancara dengan Arifien Manap (Ketua DPD Golkar Kota Jambi), Jambi, 3 Desember 2011.

²⁶⁸ Wawancara dengan H (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 1 Desember 2011.

²⁶⁹ Wawancara dengan JS (Wartawan Majalah Gatra), Jambi, 21 November 2011.

²⁷⁰ Wawancara dengan H (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 1 Desember 2011.

pemerintah bahwa ada konflik yang dihasilkan dari kebijakan mereka yang pro investasi. Jambi sering ditutup asap. Paling parah 2007. Kenapa ada asap karena hutan dihancurkan. Warisan pak zul adalah konflik semakin tinggi.²⁷¹

Masalah terbesar di Jambi adalah konflik tanah yang banyak.²⁷² Konflik lahan di Jambi tahun 2001 ada 45 sekarang menjadi 75 di tahun 2011. Selama sepuluh tahun kualitas pelanggaran HAM makin tinggi. Berbagai petinggi Komnas HAM berkali-kali datang ke Jambi seperti Ifdhal Kasim, Ridha Saleh dan Joni Simanjuntak.²⁷³

Konflik tanah yang sangat tinggi di Jambi merupakan konsekuensi dari kekurangan lahan garapan yang dialami petani di Jambi. Zulkifli Nurdin telah mengeluarkan 900 ribu hektar lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Sehingga memicu konflik dengan masyarakat.

Dari 3 juta penduduk Jambi 1,4 juta petani. Apabila hidup layak dibutuhkan 2 hektar maka dibutuhkan 2,8 juta hektar. (jumlah total tanah di Jambi) 4,9 juta hektar. (dipakai) 2,2 juta hektar (untuk) hutan lindung. Sisa 2,7 juta hektar. Kurangi danau, sungai, lereng. Sisa 2,4 juta hektar. Kurangi 900 ribu untuk izin kelapa sawit. Sisa 1,4 juta hektar. Permintaan lahan masih tinggi. Akibatnya konflik. Rebutan lahan. Sekarang kan sudah keliatan.²⁷⁴

Zulkifli Nurdin bertanggungjawab atas berbagai konflik sumber daya alam yang terjadi di Jambi. Zulkifli Nurdin adalah sebuah ironi, seorang gubernur terkaya tetapi rakyatnya miskin. Zulkifli Nurdin sedari awal memberikan kontribusi akan terjadinya konflik sumber daya alam di Jambi.

Konflik sumber daya alam di Jambi yang terjadi memiliki akar yang lama. Bahkan Zulkifli Nurdin sebagai pemimpin politik mempunyai sumbangan yang besar akan terjadinya konflik sda (sumber daya alam). Gubernurnya terkaya tetapi masyarakat termasuk paling rendah pendapatannya.²⁷⁵

Keberhasilan Zulkifli Nurdin mengembangkan investasi perkebunan kelapa sawit dan industri batubara tidak berdampak langsung kepada

²⁷¹ Wawancara dengan Rivani (Aktivis LSM Cappa Jambi), Jambi, 22 November 2011.

²⁷² Wawancara dengan S (Mantan Kepala Biro Setda Pemprov Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

²⁷³ Wawancara dengan Rivani (Aktivis LSM Cappa Jambi), Jambi, 22 November 2011.

²⁷⁴ Wawancara dengan D (Pejabat Eselon III Pemprov Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

²⁷⁵ Wawancara dengan Kasmadi Kasyim (Advokat/Ketua LBH Lingkungan), Jambi, 6 Februari 2012.

kesejahteraan rakyat. Rakyat justru menderita akibat kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM. Selain itu juga lahan yang diberikan kepada perusahaan kelapa sawit sebagian besar diambil dari lahan masyarakat. Sehingga menimbulkan banyak konflik lahan di Jambi. Ada 47 lokasi atau titik konflik lahan di Jambi dimana yang terbesar terjadi di senyerang, kabupaten tanjung jabung barat dan karang mendapo, kabupaten sarolangun. Dalam konflik lahan tersebut tidak jarang aparat penegak hukum melakukan pelanggaran HAM terhadap petani hingga berujung kematian petani. Hingga saat ini konflik tersebut masih berlangsung **(Lihat Tabel 3.25)**.

Investasi perkebunan kelapa sawit dan tambang batubara tidak berdampak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Malah menimbulkan masalah lingkungan dan rusaknya jalan. Lahan yang diberikan kepada atau dimiliki perkebunan kelapa sawit menimbulkan konflik lahan. Karena lahan tersebut sebagian besar milik masyarakat. Ada 47 lokasi di jambi rawan konflik lahan. Salah satu yang terbesar adalah kasus senyerang, karang mendapo. Ada (petani) yang meninggal. Bahkan komnas ham menilai pelanggaran ham di jambi sangat tinggi karena pelakunya adalah aparat penegak hukum langsung. Setahun bisa 4 kali komnas ham datang langsung. Tapi ya komnas ham tidak punya kewenangan lebih. Jambi seolah-olah damai tetapi ketegangan ada didalamnya. Yang sewaktu waktu meletus.²⁷⁶

²⁷⁶ Wawancara dengan JS (Wartawan Majalah Gatra), Jambi, 21 November 2011.

Tabel 3.25
Konflik Lahan Antara Masyarakat dengan Perusahaan tahun 2000-2010

No.	Lokasi	Perusahaan yang Terlibat	Korban	Keterangan
1.	Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Warga versus PT Wira Karya Sakti	1 orang warga meninggal	Penyerobotan Lahan
2.	Simpang Meranti, Kabupaten Sarolangun	Warga versus PT Migra Agro Lestari	-	Penyerobotan Lahan
3.	Tanjung, Kabupaten Muaro Jambi	Warga versus PT Bukit Bintang Sawit	-	Pelanggaran Kesepakatan
4.	Sungai Abang, Kabupaten Tebo	Warga versus Tebo Multi Agro	-	Penyerobotan Lahan
5.	Koto Buayo, Kabupaten Batanghari	Warga versus PT Tunjuk Langit Sejahtera	1 orang warga luka	Sertifikat Lahan
6.	Pemayungan, Kabupaten Tebo	Warga versus PT Lestari Asri Jaya	1 orang ditahan	Penyerobotan Lahan
7.	Sekumbang, Kabupaten Muaro Jambi	Warga versus PT Wira Karya Sakti		Penyerobotan Lahan
8.	Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Warga versus PT Indosawit Subur		Perbatasan Lahan
9.	Jelatang, Kabupaten Merangin	Warga versus PT Krisna Duta Agroindo		Pencemaran Lingkungan
10.	Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi	Warga versus PT Kirana Sekernan		Penyerobotan Lahan
11.	Dusun Mudo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Warga versus PT ABC		Izin Pengelolaan
12.	Muara Ketalo, Kabupaten Tebo	Warga versus PT AA		CSR
13.	Pandan Lagam, Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Warga versus PT Kaswari		Penyerobotan Lahan
14.	Danau Lamo, Kabupaten Tebo	Warga versus PT Wira Karya Sakti		Penyerobotan Lahan

No.	Lokasi	Perusahaan yang Terlibat	Korban	Keterangan
15.	Rantau Pandan, Kabupaten Bungo	Warga versus PT Bumi Bara Persada		Ganti Rugi Lahan
16.	Sekumbang, Kabupaten Muaro Jambi	Warga versus PT Wira Karya Sakti		Penyerobotan Lahan
17.	Bungku, Kabupaten Batanghari	Warga versus PT Asiatik Persada		Penyerobotan Lahan
18.	Senamat, Kabupaten Bungo	Warga versus PT Anugrah Bungo Lestari		Pencemaran Lingkungan

Sumber : Kelompok Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Jambi, 2010

Desentralisasi justru memperluas dan meningkatkan konflik masyarakat dengan korporasi besar terutama dalam konflik sumber daya alam. Dalam konflik tersebut pemerintah daerah dan aparat keamanan tetap berpihak kepada korporasi sama seperti pada masa Orde Baru. Pemerintah daerah masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Otonomi daerah justru memperluas dan meningkatkan konflik masyarakat terutama berkaitan dengan konflik sumber daya alam. Dulu kita bayangkan reformasi dan otoda militer harus kembali ke barak. Pendekatan represi kepolisian dikurangi. Kenyataannya reformasi sama saja. Polisi masih jagoan menembaki masyarakat ketika berkonflik. Berkolaborasi dengan pengusaha. Bahkan yang lebih parah indikasi menunjukkan banyak kebijakan pemerintah daerah disetir oleh kebijakan pro investasi. Setiap gubernur berkuasa selalu bilang kita butuh investasi. Bukan kita butuh penguatan rakyat untuk menopang kesejahteraan rakyat.²⁷⁷

²⁷⁷ Wawancara dengan Rivani (Aktivis LSM Cappa Jambi), Jambi, 22 November 2011.

BAB 4

PENGARUH ZULKIFLI NURDIN DALAM POLITIK LOKAL DI JAMBI

Dalam bab ini dibahas enam pokok bahasan utama. Pokok bahasan pertama mengenai Menjalankan Kontrol Atas Masyarakat Jambi dengan sub bahasan Citra Keluarga Dermawan, Kontrol terhadap LSM Lokal di Jambi, Meredam Jurnalis dengan Iklan, Memobilisasi Dukungan Paguyuban Etnis, Memanipulasi Legitimasi Relijius dan Merekrut Aktivis Gerakan Reformasi 98. Pokok bahasan kedua mengenai Melemahkan Gerakan Sosial di Jambi dengan sub bahasan Persatuan Petani Jambi (PPJ) dan Gerakan Petani di Jambi dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Gerakan Buruh di Jambi. Pokok bahasan ketiga mengenai Dukungan dari Kelompok Kekerasan di Jambi. Pokok bahasan keempat mengenai Penguasa Tanjung Jabung Timur. Pokok bahasan kelima mengenai Pengaruh Zulkifli Nurdin dalam Pilkada dengan sub bahasan Pemilihan Walikota Jambi tahun 2008 dan Pemilihan Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2011. Sedangkan pokok bahasan terakhir mengenai Dominasi Keluarga Nurdin Hamzah di Partai Amanat Nasional dengan sub bahasan Hazrin Nurdin menjadi Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, Ratu Munawaroh terpilih menjadi Anggota DPR RI Dapil Jambi dan Zumi Zola Calon Gubernur Jambi Tahun 2015.

4.1. Menjalankan Kontrol Atas Masyarakat Jambi

4.1.1 Citra Keluarga Dermawan

Kemenangan Zulkifli Nurdin dalam dua kali pemilihan Gubernur Provinsi Jambi didukung oleh bertahannya citra mengenai keluarga Nurdin Hamzah yang dermawan. Masyarakat Jambi terutama di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah rutin mendapatkan bantuan sosial dari keluarga Nurdin Hamzah. Citra keluarga Nurdin Hamzah yang dermawan terus menerus berkembang di tengah masyarakat Jambi.²⁷⁸

Zulkifli Nurdin berhasil membangun pengaruh yang kuat di tengah masyarakat. Bahkan Zulkifli Nurdin menjadi identik dengan Jambi. Jambi mulai

²⁷⁸ Wawancara dengan MN (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 3 Desember 2011.

dikenal dan bertambah terkenal ketika Zulkifli Nurdin menjabat Gubernur Jambi. Hingga saat ini orang mengingat Jambi maka akan mengingat Zulkifli Nurdin.²⁷⁹

Zulkifli Nurdin dikenal sangat dekat dan dikenal masyarakat terutama melalui kedermawanannya. Setiap melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah dia menyumbang dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat setempat. Hal ini yang membuat Zulkifli Nurdin selalu diingat masyarakat Jambi.

Memang dia (Zulkifli Nurdin) ini orang yang cukup dekat dengan masyarakat. Saking dekatnya kalau masyarakat melihat dia (Zulkifli Nurdin) datang masyarakat cukup antusias. Sebagai gubernur dia (Zulkifli Nurdin) cukup dikenal dan dekat dengan masyarakat. Cukup dermawan. Begitu kedermawan ini yang cukup dikenal. Kemana dia (Zulkifli Nurdin) turun ke daerah-daerah, ada orang yang patut dia (Zulkifli Nurdin) sumbangkan dananya, dia (Zulkifli Nurdin) sumbangkan. Dalam bentuk apapun apakah uang barang dan sebagainya. Inilah yang dikenal dan sulit dilupakan masyarakat.²⁸⁰

Citra keluarga yang dermawan, secara sistematis dibangun oleh keluarga Nurdin Hamzah. Mereka membuat semacam ritual masyarakat berdesak-desakan di depan rumah pribadinya untuk mendapatkan paket sembako dan sarung. Ritual ini dilakukan setiap lebaran dan momen lainnya yang melibatkan ribuan orang. Berita orang berdesakan dan berebutan zakat di rumahnya Zulkifli Nurdin di kampung manggis tersebar secara rutin setiap tahun sejak jaman orde baru.²⁸¹

Zulkifli Nurdin dinilai melanjutkan politik pencitraan yang dilakukan sang ayah Nurdin Hamzah. Zulkifli Nurdin mendekati diri dengan masyarakat melalui sumbangan-sumbangan. Tidak saja menyumbang ke masjid, Zulkifli Nurdin juga rutin menyumbang ke gereja. Ironisnya kecenderungan politik pencitraan dengan politik uang tersebut ditiru. Sehingga muncul kesadaran untuk menjadi Gubernur diperlukan uang yang banyak. Zulkifli Nurdin berhasil membentuk pola pikir rakyat yang keliru bahwa uang lebih penting ketimbang visi dan program.²⁸²

Masyarakat mengira Zulkifli Nurdin memberikan sumbangan dan bantuan dari kantongnya pribadi. Padahal sebenarnya Zulkifli Nurdin memberikan

²⁷⁹ Wawancara dengan Yasir Arafat (Ketua KPU Provinsi Jambi), Jambi, 24 November 2011.

²⁸⁰ Wawancara dengan Yasir Arafat (Ketua KPU Provinsi Jambi), Jambi, 24 November 2011.

²⁸¹ Wawancara dengan JS (Wartawan Majalah Gatra), Jambi, 21 November 2011.

²⁸² Wawancara Edi Purwanto (Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi), Jambi, 22 November 2011.

sumbangan menggunakan dana-dana pemerintah seperti dana bantuan sosial. Hal ini yang kurang dipahami masyarakat.²⁸³

Dengan citra kedermawanan Zulkifli Nurdin, masyarakat mempersepsikan Zulkifli Nurdin adalah pemimpin yang baik. Zulkifli Nurdin dipandang tidak tamak, tidak memperkaya diri dan menjadi Gubernur hanya untuk pengabdian dan mencari nama harum bagi keluarga besarnya. Zulkifli Nurdin bahkan dinilai berkurang hartanya secara drastis sejak menjabat Gubernur Jambi. Persepsi ini sungguh keliru apabila publik lebih kritis dan mendapatkan informasi yang obyektif.²⁸⁴

Menurut Syarif Hidayat, Zulkifli Nurdin berhasil membangun citra yang baik mengenai dirinya sehingga dapat terpilih menjadi Gubernur Jambi dan mempertahankan jabatannya hingga dua periode. Citra yang baik tersebut diantaranya pengusaha papan atas Jambi yang berasal dari keluarga pengusaha besar di Jambi dan memiliki sebagian besar pertokoan di Jambi. Zulkifli Nurdin juga dikenal sebagai sosok yang berkecukupan namun memiliki sifat kedermawanan. Sehingga sangat kecil kemungkinan Zulkifli Nurdin menyalahgunakan otoritas yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi.²⁸⁵

4.1.2 Kontrol terhadap LSM lokal di Jambi

Zulkifli Nurdin berhasil mengendalikan LSM lokal di Jambi dengan baik. Zulkifli Nurdin melakukan pendekatan ke beberapa elit LSM lokal di Jambi. Pendekatannya melalui pemberian berbagai bantuan kepada elit tersebut. Misalnya kemudahan pencairan dana kegiatan organisasi mereka. Zulkifli Nurdin diakui memang hebat dalam pendekatan. Sebagian elit LSM yang melakukan perjuangan advokasi terhadap rakyat berhasil dikontrol oleh Zulkifli Nurdin dengan fasilitas-fasilitas yang dia tawarkan.

Karena pendekatannya, dia (Zulkifli Nurdin) melakukan pendekatan kepada beberapa elit *NGO* (LSM). Mohon maaf bisa mengendalikan LSM. Meninabobokan teman-teman kita di jalanan (aktivis). Ada

²⁸³ Wawancara dengan SS (Wartawan Tribun Jambi), Jambi, 21 November 2011.

²⁸⁴ Wawancara dengan PM (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 1 Desember 2011.

²⁸⁵ Syarif Hidayat, "Bisnis dan Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasca Pilkada", dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan (JEP)*, Volume XV Nomor 1 Tahun 2007.

kongkow-kongkow bareng. *Ngobrol* bareng. Mungkin ada (kasih duit) tetapi kecenderungan seperti itu. Minta bantuan mudah. Sehingga tidak muncul gebrakan-gebrakan yang besar. Itu yang dilakukan pak Zulkifli Nurdin. Kalau soal pendekatan pak Zulkifli Nurdin tidak ada duanya. Sebagian elit LSM yang melakukan perjuangan advokasi ketemu dengan itu (Zulkifli Nurdin) selesai dengan fasilitas. Habis itu terlupakan lagi. Elitnya berkompromi untuk kepentingan pribadi. Perjuangan yang melibatkan sekian ribuan orang sia-sia. Tidak ada perjuangan yang tulus. Riak-riak ada habis itu hilang. Saya takut kalau ini berlanjut *trust* masyarakat tidak ada.²⁸⁶

Setiap hendak menyampaikan pidato Laporan Pertanggungjawabannya sebagai Gubernur, Zulkifli Nurdin juga memobilisasi dukungan melalui ormas dan LSM pendukungnya. Ormas dan LSM tersebut digunakan untuk membungkam suara-suara kritis pengkritik kebijakan Zulkifli Nurdin. Ormas dan LSM tersebut secara terbuka belum ada yang melakukan represi terhadap kelompok pengkritik Zulkifli Nurdin mengingat belum juga ada perlawanan yang keras terhadap Zulkifli Nurdin di Jambi.

Zulkifli Nurdin juga membangun kelompok pendukung. Ini terlihat ketika LPJ Gubernur. Sangat terlihat ada kelompok pendukung LPJ Gubernur. LSM dan Ormas. Prinsipnya mematikan gerakan kritis. Di jambi belum ada perlawanan yang cukup keras sehingga wajar tidak ada represi yang juga keras.²⁸⁷

Zulkifli Nurdin baru akan melakukan intimidasi apabila kooptasi yang dia lakukan gagal.²⁸⁸ Seperti yang pernah disaksikan dan dialami oleh tiga narasumber AK, SS dan GT. Ketiganya pernah menyaksikan dan mengalami intimidasi secara langsung ketika tiga organisasi mahasiswa kelompok cipayung mengkritisi kebijakan Zulkifli Nurdin yang dianggap merugikan kepentingan masyarakat. Intimidasi yang diterima mereka adalah ancaman fisik yang dilakukan oleh kelompok pendukung Zulkifli Nurdin.

Masyarakat lebih mudah terkooptasi melalui desentralisasi. Tidak heran jika banyak aktivis LSM mempunyai profesi sampingan sebagai kontraktor

²⁸⁶ Wawancara Edi Purwanto (Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi), Jambi, 22 November 2011.

²⁸⁷ Wawancara dengan Kasmadi Kasyim (Advokat/Ketua LBH Lingkungan), Jambi, 6 Februari 2012.

²⁸⁸ Wawancara dengan Rivani (Aktivis LSM Cappa Jambi), Jambi, 22 November 2011.

pemerintah daerah.²⁸⁹ Mayoritas masyarakat Jambi pada umumnya apatis dan hanya tertarik dengan politik ketika pilkada berlangsung. Sedangkan elemen masyarakat yang kritis didominasi aktivis LSM yang beretnis batak. Namun mereka ini hanya kritis untuk mencari proyek dari pemerintah daerah.

Mayoritas masyarakat jambi apatis hanya heboh kalau mau pemilukada. Yang kritis banyak orang batak tapi ujungnya paket (proyek) juga.²⁹⁰

Ada beberapa elit LSM lokal yang dikenal sangat dekat dengan Zulkifli Nurdin. Diantaranya adalah Doni Pasaribu (Gita Buana), Husni Thamrin (Pinse) dan Pahrin Siregar.²⁹¹ Serta dua organisasi LSM lokal yang cukup besar di Jambi yaitu LSM IPB dan Barisan Pemuda Legok.²⁹²

Kontrol atas LSM lokal lazim dilakukan oleh elit lokal di Indonesia era desentralisasi. LSM lokal diberikan uang agar tidak mengkritik kebijakan pemimpin daerah. Ada banyak ratusan LSM lokal yang berdiri di sebuah daerah namun hanya sedikit yang bersikap kritis. Mayoritas bisa ditundukkan oleh elit lokal.²⁹³

4.1.3 Meredam Jurnalis dengan Iklan

Salah satu kunci keberhasilan Zulkifli Nurdin mengontrol masyarakat adalah melalui kontrolnya terhadap media massa di Jambi. Zulkifli Nurdin mengalokasikan iklan pribadi ataupun sebagai Gubernur pada semua media massa yang bersedia menulis hal-hal yang baik saja tentang dirinya. Setiap kegiatannya selalu dia masukkan dalam berita di koran lokal. Terutama koran-koran besar seperti Jambi Independen dan Jambi Ekspres. Melalui kedekatannya dengan media massa, Zulkifli Nurdin berhasil menanamkan citra yang positif tentang dirinya dan pemerintahannya.²⁹⁴

Media massa di Jambi dikontrol dengan baik sehingga tidak ada media massa yang berani melawan Zulkifli Nurdin. Koran lokal sering diberikan iklan-

²⁸⁹ Wawancara dengan Syahidan, Ketua DPRD Muaro Jambi Periode 2009-2014, Jambi, 24 November 2011.

²⁹⁰ Wawancara dengan D (Pejabat Eselon III Pemprov Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

²⁹¹ Wawancara dengan PM (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 1 Desember 2011.

²⁹² Wawancara dengan Rivani (Aktivis LSM Cappa Jambi), Jambi, 22 November 2011.

²⁹³ Andi Faisal Bakti, "Kekuasaan Keluarga di Wajo, Sulawesi Selatan", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta : YOI, 2007) hal 491-503.

²⁹⁴ Wawancara dengan PM (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 1 Desember 2011.

iklan oleh Pemerintah Provinsi. Hal ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan pers. Bagi pimpinan perusahaan tidak ada gunanya melawan karena tidak akan kebagian iklan. Bagi wartawan di lapangan tidak ada gunanya menulis kritis tentang Zulkifli Nurdin karena pasti tidak akan dimuat oleh redaksi.²⁹⁵

Zulkifli Nurdin mendekati media massa demi pencitraan yang baik tentang dirinya. Pendekatan tersebut dilakukan agar tidak ada kritik terhadap dirinya. Zulkifli Nurdin terkenal sangat sensitif dengan kritik.

Zulkifli (Zulkili Nurdin) lebih ke pencitraan. Setiap kegiatannya diekspos. Kalau ada kritik biasanya *sensi*. Zulkifli Nurdin banyak mendekati diri ke media. Jadi apapun kegiatan, sekecil apapun kadang baru rencana, itu diekspos. Zulkifli Nurdin punya uang sehingga bisa mengekspos seolah-olah berhasil. Padahal kalau mau diakui sedikitlah walaupun ada.²⁹⁶

Menurut David T. Hill, ada dua strategi yang biasanya dilakukan rezim Orde Baru dalam mengontrol jurnalis di Indonesia, yaitu membeli atau mengintimidasi. Dua strategi ini ternyata bertahan pada era desentralisasi. Keberhasilan dalam pemilukada sangat ditentukan oleh kemampuan kandidat mempunyai akses terhadap media massa lokal. Melalui penelitiannya pada empat pemilukada, David T. Hill melihat akses terhadap media massa lokal memperbesar pengaruh politik terhadap pemilih. Iklan-iklan setengah halaman di media massa lokal memengaruhi persepsi pemilih dalam pemilukada.²⁹⁷

Strategi membeli jurnalis inilah yang dilakukan oleh Zulkifli Nurdin dalam mengontrol pers di Jambi. Syahrul Yasin Limpo, sebagai “orang kuat lokal” di Sulawesi Selatan juga melakukan strategi membeli dalam melakukan kontrol terhadap jurnalis lokal. Bahkan Syahrul Yasin Limpo menguasai kepemilikan sebuah surat kabar populer *Pedoman Rakyat* dan radio populer *Suara Celebes* di Sulawesi Selatan.²⁹⁸

²⁹⁵ Wawancara dengan SS (Wartawan Tribun Jambi), Jambi, 21 November 2011.

²⁹⁶ Wawancara dengan Paisal Kumar (Pemimpin Redaksi Jambi Independen), Jambi, 6 Februari 2012.

²⁹⁷ David T. Hill, “Assesing Media Impact on Local Elections in Indonesia”, dalam Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto, *Deepening Democracy in Indonesia ? : Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*, (Singapura : ISEAS, 2009), hal 229-235.

²⁹⁸ Michael Buehler, “Rise of The Clans : Direct Elections in South Sulawesi Show That a New Breed of Political Godfathers is Coming to Power in Indonesia’s Regions”, dalam *Inside Indonesia* Nomor 90 Bulan Oktober-Desember 2007.

4.1.4 Memobilisasi Dukungan Paguyuban Etnis

Zulkifli Nurdin memanfaatkan paguyuban etnis dalam menggalang dukungan masyarakat. Melalui organisasi-organisasi etnis Zulkifli Nurdin hendak menanamkan pengaruh yang kuat melalui strategi kultural. Paguyuban etnis-etnis memberikan banyak anugerah etnis berbentuk gelar adat kepada Zulkifli Nurdin.²⁹⁹

Zulkifli Nurdin menugaskan kerabatnya dan kroninya untuk menguasai berbagai paguyuban etnis di Jambi. Adik iparnya (istri Hazrin Nurdin) Ade Mirawati menjadi Ketua Himpunan Masyarakat Jambi Asal Sumatera Selatan (HIMJAS). Orang dekatnya di PAN seperti Chairul Naim Anik menjadi Ketua Paguyuban Masyarakat Minang PKDP dan Haji Bakri menjadi Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Jambi. Orang dekatnya di pemerintahan seperti Rahmat Derita Harahap (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi) menjadi Ketua Lembaga Budaya Batak Jambi (LBBJ).³⁰⁰

Zulkifli Nurdin memanfaatkan etnis dan budaya untuk kepentingan politiknya. Zulkifli Nurdin hendak memobilisasi masyarakat yang masih punya kesetiaan etnis di Jambi. Apa yang dilakukan Zulkifli Nurdin tidak dilakukan elit-elit lain.

Beliau (Zulkifli Nurdin) punya tim yang tidak struktural. Para kyai-kyai, para tua-tua, para tokoh-tokoh. Yang seneng *tempoyak* dikasih *tempoyak*. Yang suka sayur asam dikasih sayur asam. Yang suka *asam pade* dikasih *asam pade*. Jarang yang melihat ke arah sana bahwa budaya bisa bermanfaat untuk kepentingan politis. Lebih malu ditegur ketua paguyuban ketimbang ditegur lurah atau camat. Ini tidak diyakini oleh kandidat lain.³⁰¹

Berikut ini gelar-gelar adat yang didapatkan oleh Zulkifli Nurdin dari berbagai paguyuban etnis di Jambi (**Lihat Tabel 4.1**). Masyarakat Melayu Jambi menganugerahinya gelar *Sri Paduko Putro Mangku Negero*. Masyarakat Bugis Jambi, melalui Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), menganugerahinya gelar *Daeng Mamase*. Masyarakat Minang Jambi menganugerahinya gerlar *Maharajo Dewang Sangguano*. Masyarakat Batak

²⁹⁹ Wawancara dengan PM (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 1 Desember 2011.

³⁰⁰ *ibid.*

³⁰¹ Wawancara dengan IA (Pengurus Paguyuban Masyarakat Sunda Provinsi Jambi), Jambi, 22 November, 2011.

Jambi menganugerahinya gelar *Jaihutan Mangaraja*. Masyarakat Sumatera Selatan Jambi menganugerahinya gelar *Arif Mangku Negoro*. Masyarakat Jawa Jambi melalui paguyuban wisnu murti mempercayainya menyandang gelar adat *Kanjeng Adipati Haryo Ponoto Nagoro*, yang penganugerahannya dihadiri langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Masyarakat Sunda di Jambi menganugerahinya gelar kehormatan adat *Rakean Pangraksa Praja*.³⁰²

Tabel 4.1
Gelar Adat Zulkifli Nurdin

No.	Gelar Adat	Keterangan
1.	Sri Paduko Putro Mangku Negoro	Melayu Jambi
2.	Daeng Mamase	Bugis
3.	Maharajo Dewang Sangguano	Minang
4.	Jaihutan Mangaraja	Batak
5.	Arif Mangku Negoro	Melayu Palembang
6.	Kanjeng Adipati Haryo Ponoto Nagoro	Jawa
7.	Rakean Pangraksa Praja	Sunda

Sumber : Wawancara dengan PM

Menurut Benny Subianto, simbol-simbol etnis yang melahirkan politik etnis berlangsung di Indonesia era desentralisasi. Simbol-simbol etnis berpengaruh besar terhadap kemenangan kandidat dalam pemilukada. Dalam pemilukada seorang kandidat akan juga dilihat secara personal berdasarkan daerah asalnya, bahasa ibunya dan etnisnya oleh pemilih.³⁰³

Organisasi etnis berkembang pesat di Indonesia era desentralisasi. Organisasi ini memiliki kedekatan antara anggota dengan pengurus. Biasanya organisasi ini beraktivitas non politis. Namun ketika pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan, pengurus organisasi etnis akan menggiring anggotanya mendukung kandidat tertentu.³⁰⁴

³⁰² Wawancara dengan PM (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 1 Desember 2011.

³⁰³ Benny Subianto, "Ethnic Politics and The Rise of The Dayak Bureaucrats in Local Elections : Pilkada in Six Kabupaten in West Kalimantan", dalam Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto, *Deepening Democracy in Indonesia ? : Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*, (Singapura : ISEAS, 2009), hal 327-330.

³⁰⁴ Nankyung Choi, "Local Elections and Democracy in Indonesia : The Riau Archipelago", dalam *Journal of Contemporary Asia* Volume 37 Nomor 3 Agustus 2007.

4.1.5 Memanipulasi Legitimasi Religijs

Zulkifli Nurdin membagikan Al-Quran bergambar dirinya di Masjid Al Falah bulan Oktober 2004 menjelang pelaksanaan pemilihan Gubernur tahun 2005. Yayasan Al Arafah yang diketuai Haji Bakri, seorang kroni dekatnya, menjadi pelaksana pembagian Al-Quran tersebut. Banyak protes dari ulama, LSM, ormas dan politisi atas pembagian Al-Quran bergambar wajah Zulkifli Nurdin tersebut.³⁰⁵

Bersamaan dengan permasalahan yang dialami Zulkifli Nurdin, Bupati Pemalang HM Machroes SH dan Bupati Indramayu Irianto MS Syaifudin juga sedang menghadapi gugatan yang sama. Mereka berdua juga membagi-bagikan Al-Quran bergambar diri mereka. Keputusan MUI Pemalang dan MUI Indramayu dalam fatwanya menyatakan bahwa membagikan Al-Quran bergambar manusia adalah *haram* dan tidak dibenarkan. Sedangkan MUI Provinsi Jambi menyatakan *mubah* tentang pembagian Al-Quran yang bersampul gambar Zulkifli Nurdin. Hal tersebut dapat terjadi karena hubungan baik Zulkifli Nurdin dengan Ketua MUI Provinsi Jambi dan pengurus lainnya.³⁰⁶

Zulkifli Nurdin membangun hubungan baik dengan Ketua MUI Provinsi Jambi, Sulaiman Abdullah. Sulaiman Abdullah sendiri mengaku kagum dengan Zulkifli Nurdin. Kekaguman Sulaiman Abdullah karena ketika dia sakit, ditengah aktivitas padatnya Zulkifli Nurdin datang membesuk dan memberikan bantuan dana pengobatan.³⁰⁷

Banyak pemimpin-pemimpin Majelis Ulama Indonesia di tingkat Provinsi yang mendapatkan posisi elit, baik secara religijs, sosio politik dan ekonomi di daerahnya.³⁰⁸ Hal tersebut dikarenakan organisasi seperti MUI memang dipercaya oleh banyak umat muslim di Indonesia. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan yang mapan seperti MUI sering dipatuhi oleh umat muslim terutama dalam masyarakat pedesaan. Fatwa MUI menjadi mekanisme untuk

³⁰⁵ Subhan MA Rachman, "Pergulatan Wacana Al-Quran Bergambar Kandidat Gubernur di Provinsi Jambi", dalam *Jurnal Innovatio* Volume 6 Nomor 12, Edisi Juli-Desember 2007.

³⁰⁶ *ibid.*

³⁰⁷ *ibid.*

³⁰⁸ John Olle, "The Majelis Ulama Indonesia Versus Heresy : The Resurgence of Authoritarian Islam" dalam Geert Arend van Klinken dan Joshua Barker (ed), *State of Authority : the State in Society in Indonesia*, (Ithaca : Cornell University Press, 2009), hal 103.

menjawab semua permasalahan yang dialami umat.³⁰⁹ MUI sejak masa Orde Baru menjadi alat kontrol negara terhadap ulama. MUI dijadikan media depolitisasi ulama agar tidak ada radikalisme ulama yang bisa membahayakan rezim Orde Baru.³¹⁰

4.1.6 Merekrut Aktivis Gerakan Reformasi 98

Banyak aktivis gerakan reformasi 98 di Jambi yang menjadi kekuatan politik pendukung Zulkifli Nurdin. Terlebih ketika Gubernur dipilih langsung, peranan aktivis gerakan reformasi 98 semakin besar sebagai kekuatan yang menopang kekuasaan Zulkifli Nurdin. Para aktivis mendapatkan kompensasi uang dari dukungannya kepada Zulkifli Nurdin melalui berbagai proposal kegiatan yang mereka ajukan. Bahkan secara pribadi beberapa pemimpin gerakan 98 di Jambi dijadikan staf pribadi Zulkifli Nurdin.

Sebelum (tahun) 2005, DPR (DPRD Provinsi Jambi) yang mengamankan (Zulkifli Nurdin). Setelah (tahun) 2005 Asad Isma (Ketua GP Ansor). Orang itu ngeri itu (Asad Isma) memanfaatkan proposal (kegiatan organisasi). 100 juta 200 juta macam *cek* (air). Sebenarnya punya peran masing-masing. Kalau Asad Isma ke *grassroot* ke LSM. Bisa gaya keras-keras macam preman. Kalau Asad Isma lebih ke lapangan. Jefri (Ketua HMI) ke konsep, tataran konsep. Ngonsep ngonsep pidato kan *dia* (Jefri Hendrik). Sibuk lari-lari jadwal ini jadwal itu.³¹¹

Salah satu bukti kehebatan Zulkifli Nurdin sebagai penguasa di Jambi adalah keberhasilannya mengkooptasi banyak aktivis gerakan mahasiswa 98 ke dalam barisan pendukungnya. Zulkifli Nurdin menjadi patron bagi aktivis gerakan mahasiswa 98 di Jambi. Sebagian besar aktivis gerakan 98 menjadi kekuatan pendukung Zulkifli Nurdin.

Gerakan mahasiswa terkooptasi karena sistem yang dibangun feodal. Patron kliennya sangat kuat. Ketika sosok Zulkifli Nurdin menjadi gubernur pertama kali, sebagian besar kekuatan reformasi (aktivis 98) menjadi kekuatan pendukung.³¹²

³⁰⁹ Greg Fealy dan Sally White, *Expressing Islam : Religious Life and Politics in Indonesia*, (Singapura : ISEAS, 2008), hal 8-9.

³¹⁰ Donald J. Porter, *Managing Politics and Islam in Indonesia*, (London : Routledge-Curzon, 2002), hal 77-82.

³¹¹ Wawancara GT (Aktivis Mahasiswa), Jambi 25 November 2011.

³¹² Wawancara dengan Kasmadi Kasyim (Advokat/Ketua LBH Lingkungan), Jambi, 6 Februari 2012.

Zulkifli Nurdin merekrut aktivis mahasiswa 98 untuk tujuan strategis. Pertama, Zulkifli Nurdin ingin dianggap bagian dari gerakan reformasi. Kedua, Zulkifli Nurdin ingin mengontrol gerakan yang berpotensi mengkritisi kebijakannya. Ketiga, aktivis mahasiswa 98 bisa dimanfaatkan dalam pemilukada. Zulkifli Nurdin berhasil membangun sistem dimana semua aktivis mahasiswa akan berlomba-lomba mendekat kepadanya.³¹³

Organisasi mahasiswa seperti HMI, PMII, GMKI, PMKRI dan GMNI juga tidak luput dari pengaruh Zulkifli Nurdin. Setiap ketua cabang organisasi tersebut akan berusaha mencari perhatian Zulkifli Nurdin agar bisa direkrut menjadi staf pribadi. Demikian pula sama halnya dengan organisasi pemuda seperti GP Ansor dan KNPI.³¹⁴

Semua organisasi mahasiswa sejak tahun 1999 hingga akhir masa jabatannya berusaha mencari perhatian Zulkifli Nurdin. Agar dilihat oleh Zulkifli Nurdin, mereka sering melakukan aksi massa sebagai posisi tawar kepada Zulkifli Nurdin. Tujuannya agar mendapatkan uang dari proposal kegiatan yang mereka ajukan kepada Zulkifli Nurdin. Apalagi menjelang pidato LPJ di DPRD Provinsi Jambi, kritik menjadi sangat sensitif bagi Zulkifli Nurdin. Ada kritik normatif pun Zulkifli Nurdin bisa tersinggung. Disinilah aktivis tersebut dapat berkenalan dengan Zulkifli Nurdin.³¹⁵

Sebagai contoh setiap ketua cabang organisasi massa mahasiswa berskala nasional di Jambi baru dilantik maka cara yang efektif berkenalan dengan Zulkifli Nurdin adalah melalui aksi keprihatinan. Setelah Zulkifli Nurdin mendengar aksi mereka, mereka pun mengajukan proposal kegiatan. Bantuan uang dari Zulkifli Nurdin pun mengalir ke organisasi mahasiswa. Rata-rata setiap proposal dibantu Rp. 10.000.000. Tradisi ini berlangsung turun temurun selama Zulkifli Nurdin menjadi Gubernur Jambi.³¹⁶

Menurut Mikaela Nyman, aktivis gerakan 98 di Indonesia mengalami kendala tidak bisa bersatu pasca kejatuhan Soeharto. Tidak ada kesepakatan strategi apa yang dilakukan pasca jatuhnya Soeharto. Mereka juga tidak berhasil

³¹³ Wawancara dengan PM (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 1 Desember 2011.

³¹⁴ *ibid.*

³¹⁵ Wawancara GT (Aktivis Mahasiswa), Jambi 25 November 2011.

³¹⁶ Wawancara GT (Aktivis Mahasiswa), Jambi 25 November 2011.

menyesuaikan diri dengan perubahan politik terutama pada institusi-institusi politik formal hasil reformasi. Mereka tidak mampu masuk ke dalam arena politik formal pada era pasca reformasi.³¹⁷

Karakter oposisi termasuk gerakan mahasiswa pada masa sentralisme Orde Baru adalah secara institusional tidak terorganisir dengan baik, terpecah dan multi ideologi. Ketika berada di era transisi maka kekuatan oposisi ini akan berhadapan dengan kekuatan otoriter yang masih kuat. Hasilnya oposisi tetap lemah dan konsolidasi cepat dilakukan kelompok otoriter yang muncul menjadi penguasa. Hasilnya tidak ada pembeda yang jelas antara reformis dan status quo.³¹⁸

4.2 Melemahkan Gerakan Sosial di Jambi

4.2.1 Persatuan Petani Jambi (PPJ) dan Gerakan Petani di Jambi

Kondisi gerakan sosial di Jambi era desentralisasi tetap melemah. Model pembangunan yang masih pro modal membuat masyarakat Jambi semakin bergantung dengan negara. Buruh menjadi tidak berani bergerak ketika ancaman PHK menghangat. Petani yang tidak terorganisir dan mengalami depolitisasi lama ketika direpresi mereka takut dan terpaksa menerima program-program kemitraan dengan perusahaan besar diatas lahan yang sudah mereka miliki sejak turun temurun. Masyarakat adat pun berhasil dirumahkan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut membuat fragmentasi di dalam gerakan sosial di Jambi semakin besar. Konsolidasi gerakan sosial di Jambi dikalahkan oleh konsolidasi modal dan kooptasi negara.³¹⁹

Gerakan sosial di Jambi masih punya potensi yang besar. Terutama gerakan buruh dan gerakan petani di Jambi. Ada Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) yang membangun gerakan buruh di Jambi. Ada Persatuan Petani Jambi (PPJ), Serikat Tani Nasional (STN) dan Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (AGRA) yang membangun gerakan

³¹⁷ Mikaela Nyman, "Civil Society and the Challenges of the Post-Suharto Era", dalam Marco Bunte dan Andreas Efen (ed), *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, (London : Routledge, 2009), hal 251-270.

³¹⁸ Edward Aspinall, *Opposing Suharto : Compromise, Resistance and Regime Change in Indonesia*, (Stanford : Stanford University Press, 2005), hal 1-5.

³¹⁹ Wawancara dengan Rivani (Aktivis LSM Cappa Jambi), Jambi, 22 November 2011.

petani di Jambi. Persatuan Petani Jambi (PPJ) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) menjadi dua organisasi yang terbesar melakukan gerakan kesejahteraan dan melawan ketidakadilan korporasi.³²⁰

Kelompok petani di Jambi adalah kekuatan politik yang signifikan sejak masa reformasi hingga masa sekarang. Signifikansi kelompok petani dilihat dari segi kuantitas, petani yang mendominasi tenaga kerja di Jambi. Terlebih jika terjadi banyak konflik lahan maka semakin terlihat kekuatan dari kelompok petani.³²¹

Desentralisasi dan otonomi daerah di Jambi menghasilkan multi konflik agraria. Multi konflik agraria disebabkan oleh konflik lahan antara perusahaan besar kehutanan dan perkebunan, ketidakjelasan arah dari tata produksi pertanian dan tidak ada kemajuan dari profesi sebagai petani. Jambi sebenarnya lumbung pangan tetapi berubah menjadi importir pangan dan perkebunan kelapa sawit besar.³²²

Konflik lahan terbesar melibatkan petani dengan perusahaan PT Wira Karya Sakti (PT WKS), anak perusahaan Sinar Mas Group (SMG). Konflik tersebut sudah berumur panjang dan belum selesai hingga sekarang. Melalui izin konsesi yang diberikan kepada PT WKS, PT WKS melakukan ekspansi besar-besaran hutan tanaman industri dan pembangunan kelapa sawit. Padahal lahan yang diberikan izin konsesi kepada PT WKS adalah punya masyarakat setempat sejak ratusan tahun yang lalu.³²³

Konflik agraria terbesar di Jambi adalah konflik yang menyangkut Hutan Tanaman Industri (HTI). Berbagai organisasi petani aktif melakukan perlawanan diantaranya Persatuan Petani Jambi (PPJ), Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dan Serikat Tani Nasional (STN). Organisasi petani yang terbesar adalah Persatuan Petani Jambi (PPJ). Persatuan Petani Jambi (PPJ) menjadi kekuatan utama petani melawan korporasi besar terutama Sinar Mas Group (SMG). Ekspansi bisnis Sinar Mas Group (SMG) hingga melingkupi lima kabupaten. Kelimanya adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten

³²⁰ *ibid.*

³²¹ Wawancara dengan D (Pejabat Eselon III Pemprov Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

³²² *ibid.*

³²³ Wawancara Aidil, (Ketua Persatuan Petani Jambi), Jambi, 3 Desember 2011.

Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tebo. Basis perjuangan kelompok Persatuan Petani Jambi (PPJ) juga mengikuti ekspansi bisnis Sinar Mas Group (SMG) tersebut. Konflik yang pertama, terbesar dan terlama berada di Tanjung Jabung Barat sehingga basis perlawanan Persatuan Petani Jambi (PPJ) pun terbesar disana.

PPJ (Persatuan Petani Jambi) berhadapan dengan SMG (Sinar Mas Group) khususnya HTI (Hutan Tanaman Industri) yang sudah ekspansi di lima kabupaten. PPJ memang menjadi ikon ketika terjadi konflik perusahaan HTI dengan masyarakat jambi. Basisnya mengikuti konflik HTI di tanjab barat, tanjab timur, muaro jambi, batanghari dan tebo. Konflik pertama dan terbesar di tanjab barat sehingga basis PPJ terbesar pun dari sana.³²⁴

Sinar Mas Group (SMG) dinilai sebagai perusahaan yang paling banyak menguasai sumber daya alam di Jambi, dari hulu hingga ke hilir. Sinar Mas Group (SMG) selain menguasai Hutan Tanaman Industri (HTI), mereka juga menguasai perkebunan dan sekarang mereka sedang mengembangkan bisnis di pertambangan. Hampir tidak ada yang bisa menandingi kebesaran mereka.³²⁵

Persatuan Petani Jambi (PPJ) berulang kali melakukan aksi petani yang melibatkan ribuan petani sebagai bentuk kekecewaan petani akan permasalahan yang mereka hadapi. Setiap aksi mereka selalu dijanjikan berbagai kesepakatan yang tidak kunjung diwujudkan. Aksi-aksi yang dilakukan Persatuan Petani Jambi (PPJ) merupakan akumulasi kekecewaan petani atas tuntutan pengembalian tanah mereka yang tidak kunjung dilakukan perusahaan PT Wira Karya Sakti (PT WKS), anak perusahaan Sinar Mas Group (SMG) di Jambi. Puncak aksi terbesar Persatuan Petani Jambi (PPJ) adalah pada 17 Maret 2008, ketika itu sekitar 16.000 massa petani mengepung Kantor Gubernur Jambi. Mereka menuntut lahan mereka yang diambil oleh PT Wira Karya Sakti (PT WKS) dan meminta jaminan Pemerintah Provinsi bahwa PT WKS tidak akan menggusur lagi lahan mereka.³²⁶

Setiap terjadi konflik antara petani dengan PT Wira Karya Sakti (PT WKS) maka akan berujung kepada kriminalisasi petani. Pihak keamanan terutama

³²⁴ Wawancara Willy, (Aktivis Petani), Jambi, 25 November 2011.

³²⁵ *ibid.*

³²⁶ *ibid.*

kepolisian cenderung tidak netral dan berpihak kepada perusahaan. Padahal petani hanya memperjuangkan lahan mereka yang sudah turun temurun mereka kelola.

Kalau konflik terjadi kriminalisasi terhadap petani. Padahal petani bertahan untuk hidup bukan untuk kaya. Tidak ada hutan di dalam desa tetapi hutan itu berada di dalam desa. Maksudnya masyarakat sudah tahu tapal-tapal batasnya hutan. Secara turun temurun itu hutan mereka. Pihak keamanan menjadi bempur perusahaan. Tidak ada sifat netral dari polri.³²⁷

Zulkifli Nurdin dinilai sebagai orang yang paling bertanggungjawab atas konflik lahan yang terjadi di Jambi selama desentralisasi. Selain mengeluarkan izin-izin kepada perusahaan seperti Sinar Mas Group, Zulkifli Nurdin selalu melakukan pembohongan publik dalam setiap mediasi yang dilakukannya. Misalnya Zulkifli Nurdin akan memberikan izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) kepada petani. Padahal menurut petani tidak mungkin diberikan izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) diatas lahan yang telah diberikan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada PT Wira Karya Sakti (PT WKS). Zulkifli Nurdin juga berjanji memberikan bantuan uang sebesar Rp. 5.000.000.000 kepada petani di daerah konflik. Semua janji-janji Zulkifli Nurdin dalam setiap mediasi belum direalisasikan hingga masa jabatannya berakhir.

Ketika Zulkifli Nurdin berkuasa banyak izin-izin dikeluarkan. Akumulasinya kita rasakan sekarang. Kalau kita melihat izin terbesar WKS (PT Wira Karya Sakti) di jaman Gubernur Zulkifli Nurdin. Kalau (Gubernur) yang sekarang *timpa tangga tahlilnya* (mendapat musibah). Tidak mungkin izin konsesi sudah keluar dibuat lagi izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Jadi apa yang dilakukan Zulkifli Nurdin adalah pembohongan publik.. Dicabut dulu izin konsesinya baru diberikan izin HTR. Logika. Itu saya katakan pembohongan publik. 41.000 di dalam HTI WKS dan 41.000 di luar areal HTI WKS dijanjikan. Tapi realisasinya satu jengkal pun tidak ada. Dia (Zulkifli Nurdin) menjanjikan Rp.5.000.000.000. Itu hanya isapan jempol. Zulkifli Nurdin tidak komitmen dengan apa yang disampaikannya. Kita tekan kembali 2010, dia (Zulkifli Nurdin) berjanji sebelum jabatannya habis, konflik PPJ dengan WKS sudah selesai. Buktinya sampai hari ini pun tidak.³²⁸

Konflik lahan di Jambi selama desentralisasi berbanding lurus dengan izin konsesi yang diberikan kepada perusahaan. Misalnya izin konsesi paling besar di

³²⁷ Wawancara Aidil, (Ketua Persatuan Petani Jambi), Jambi, 3 Desember 2011.

³²⁸ *ibid.*

kabupaten Tanjung Jabung Barat maka perlawanan petani pertama di daerah Tanjung Jabung Barat. Otomatis basis terkuat perlawanan petani juga di Tanjung Jabung Barat. Sehingga represi yang terberat pun didapatkan di daerah ini. Banyak petani yang meninggal ditembak aparat keamanan. Seperti yang terjadi pada konflik penyerang berdarah.³²⁹

Sinar Mas Group (SMG) yang menjadi musuh kelompok petani Persatuan Petani Jambi (PPJ) bukan saja telah melakukan monopoli Hutan Tanaman Industri (HTI) tetapi mereka juga melakukan alih status lahan untuk memperluas pengelolaan mereka. Mereka merubah status Area Pengguna Lain (APL) menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI). Seharusnya Area Pengguna Lain (APL) diberikan kepada petani karena jumlah penduduk yang bertambah.

Sinar Mas itu bandit. Lebih dari monopoli. Segala *lin* mereka kuasai bukan hanya HTI saja. APL bisa dirubah status oleh mereka jadi hutan produksi. Dari HP mereka langsung dapat izin konsesi disana. Seharusnya Hutan Produksi dirubah jadi APL. Masyarakat kan semakin bertambah sementara APL kan semakin menyempit.³³⁰

Perubahan hutan produksi menjadi areal pengguna lain terutama perkebunan sebenarnya tidak menjawab problem mendasar konflik agraria di Jambi. Problem mendasarnya adalah ketidakmampuan merubah dari penghasil bahan mentah produk pertanian dan perkebunan menjadi penghasil produk yang bernilai tambah. Hal tersebut yang tidak terjadi di Provinsi Jambi (**Lihat Tabel 4.2**).³³¹

³²⁹ Wawancara Aidil, (Ketua Persatuan Petani Jambi), Jambi, 3 Desember 2011.

³³⁰ *ibid.*

³³¹ Wawancara dengan D (Pejabat Eselon III Pemprov Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

Tabel 4.2
Luas dan Produksi Komoditi Pertanian tahun 2009 dan tahun 2010

No.	Komoditi	Tahun 2009		Tahun 2010		Bentuk Produksi
		Luas	Produksi	Luas	Produksi	
1.	Karet	645.145	280.620	646.698	280.928	KKK
2.	Kelapa Sawit	489.384	1.265.789	490.151	1.266.225	CPO
3.	Kelapa	118.557	113.340	118.557	113.340	Kopra
4.	Cassiavera	47.447	57.680	46.620	57.450	Kulit Kering
5.	Kopi	24.918	12.731	24.918	12.731	Kopi Beras
Total		1.325.451	1.629.802	1.326.944	1.730.674	

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2010

Problem riil dari masyarakat Jambi adalah konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan. Problem ini tidak bisa diselesaikan oleh Zulkifli Nurdin karena tidak ada kemauan dan komitmen untuk menyelesaikan. Hal ini memperlihatkan Zulkifli Nurdin tidak berpihak kepada petani.

Problem-problem riil kan banyak. Mengapa tidak menyelesaikan konflik lahan masyarakat dengan perusahaan. Sampai hari ini kan tidak jelas mana yang selesai. WKS (PT Wira Karya Sakti) dengan HGU nya 600.000 hektar. HGU nya seratus tahun tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai petani meninggal pun tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kan masyarakat bertanya-tanya ada permainan apa. Katanya pro masyarakat ketika masyarakat menghadapi problem riil, pemerintah provinsi tidak bisa berbuat apa-apa. Gak ada yang tidak bisa diselesaikan. Komitmen mau apa nggak.³³²

Zulkifli dinilai memiliki kewenangan besar sebagai pemimpin di Jambi selama desentralisasi. Zulkifli Nurdin berhak memberikan izin atau tidak memberikan kepada perusahaan yang sudah, sedang atau akan beroperasi di Jambi. Namun Zulkifli Nurdin tidak menggunakan kewenangannya yang besar untuk memperjuangkan kepentingan petani.³³³

³³² Wawancara Edi Purwanto (Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi), Jambi, 22 November 2011.

³³³ *ibid.*

Dalam keadaan terdesak akibat didemo lebih dari sepuluh ribu petani, Zulkifli Nurdin berjanji akan memberikan 41.000 lahan di luar konsesi PT WKS dan 41.000 lahan di dalam konsesi PT WKS. Ternyata yang Zulkifli Nurdin sebenarnya tawarkan adalah relokasi ke daerah lain. Tetapi Zulkifli Nurdin tidak mengetahui bahwa tidak ada lagi lahan kosong sebesar itu di provinsi Jambi. Seandainya pun ada pasti ada pemilikinya.³³⁴

Zulkifli Nurdin cenderung membela korporasi besar kehutanan dan perkebunan. Birokrasi Zulkifli Nurdin terutama dinas kehutanan adalah juru bicara ataupun pelobi Sinar Mas Group.³³⁵ Zulkifli Nurdin juga melakukan pendekatan kepada Irmansyah, sebagai ketua PPJ saat itu. Dengan menjanjikan berbagai bantuan pribadi kepada Irmansyah. Irmansyah sebagai ketua PPJ saat itu kemudian menerima mediasi yang dilakukan Zulkifli Nurdin dengan kesepakatan pola kemitraan 41 ribu hektar di dalam areal PT Wira Karya Sakti dan 41 ribu hektar di luar areal PT Wira Karya Sakti. Kesepakatan yang sangat merugikan petani tersebut terpaksa diterima karena Irmansyah adalah tokoh besar dalam gerakan petani Jambi.

Inilah permainan ketua lama (Irmansyah) dengan Zulkifli Nurdin. Ketua yang lama (Irmansyah) kalau ketemu gubernur (Zulkifli Nurdin) ketemu sendiri. Ke Jakarta sendiri. Dia (Irmansyah) itu sudah dianggap dewa apa yang dilakukan dianggap benar. Ketua yang lama (Irmansyah) dapat dana dari WKS (PT Wira Karya Sakti). Kita selidiki baru ketahuan dia dapat kebun 25 hektar, kolam ikan delapan, sapi delapan. Kita dapat bukti dokumentasi dia (Irmansyah) dapat bantuan dari WKS (PT Wira Karya Sakti) bentuk jaring ikan. Artinya kolaborasi.³³⁶

PPJ sempat hampir bubar karena ketidakpercayaan anggota kepada pengurus. PPJ melakukan konsolidasi ulang selama setahun untuk membangun kembali gerakan petani Jambi pasca Irmansyah. Tidak semuanya berhasil dikonsolidasikan PPJ, ada 20 % basis petani PPJ yang ikut Irmansyah.³³⁷

Irmansyah adalah tokoh besar di PPJ. Dia yang mendirikan dan merintis organisasi PPJ dari awal.³³⁸ Pelajaran yang dipetik adalah membangun jejaring

³³⁴ Wawancara Willy, (Aktivis Petani), Jambi, 25 November 2011.

³³⁵ *ibid.*

³³⁶ Wawancara Aidil, (Ketua Persatuan Petani Jambi), Jambi, 3 Desember 2011

³³⁷ *ibid.*

³³⁸ Wawancara Willy, (Aktivis Petani), Jambi, 25 November 2011

kelompok masyarakat sipil lebih potensial mendorong perubahan ketimbang mempercayakan perjuangan kepada aktivis-aktivis tertentu.³³⁹

4.2.2 Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Gerakan Buruh di Jambi

Desentralisasi tidak memberikan perubahan kesejahteraan terhadap buruh di Jambi. Perubahan hanya pada tataran kebijakan yang pada kenyataannya di lapangan tidak ada perubahan yang berarti. Ada beberapa indikator yang memperlihatkan tidak ada perubahan yang signifikan yang dialami buruh di Jambi selama desentralisasi. Pertama, buruh di Jambi masih menerima upah yang minimal dan status pekerjaannya kontrak (**Lihat Tabel 4.3 dan Tabel 4.4**). Kedua, buruh di Jambi baru terorganisir ketika ada kasus yang menimpa mereka. Ketiga, masih banyak buruh di Jambi yang belum masuk serikat buruh. Keempat, masih banyak buruh yang tidak mengerti hak-haknya sebagai pekerja dan belum memiliki kesadaran kelas.

Kalau praktek di lapangan tidak ada yang berubah. Di tataran kebijakan banyak yang berubah. Implementasi tetap sama-sama saja. Misalnya tentang upah sampai sekarang menentukan upah tetap upah minimum dan masih hitungan seorang lajang bukan keluarga. Masih tetap seperti yang lamalah. Selain upah masalah yang dihadapi buruh di Jambi adalah sistem kerja kontrak. Kalau ada kasus militan nian matipun mau. Gerakan buruh di Jambi masih sangat-sangat kecil. Buruh yang tak terorganisir sangat banyak. Tidak sampai 100 ribu buruh yang masuk serikat dari 500 ribu. Jadi hanya 20 %.. Buruh belum-belum betul sadar haknya. Buruh di Jambi lebih agama ketimbang kelasnya.³⁴⁰

Tabel 4.3
Kebutuhan Fisik Minimum Provinsi Jambi 2001-2005

No.	Tahun	Kebutuhan untuk Seorang Pekerja Bujangan
1.	2001	361.889
2.	2002	428.703
3.	2003	448.857
4.	2004	440.363
5.	2005	495.242

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, 2005

³³⁹ Wawancara dengan Rivani (Aktivis LSM Cappa Jambi), Jambi, 22 November 2011

³⁴⁰ Wawancara dengan Roida Pane, (Ketua Wilayah SBSI Provinsi Jambi), Jambi, 25 November, 2011

Tabel 4.4
Kebutuhan Fisik Minimum Provinsi Jambi tahun 2005-2009

No.	Tahun	Kebutuhan untuk Seorang Pekerja Bujangan
1.	2005	495.242
2.	2006	571.142
3.	2007	693.718
4.	2008	734.169
5.	2009	918.000

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, 2009

Berdasarkan data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2009 tercatat ada 96 perusahaan *outsourcing* di Provinsi Jambi dengan total pekerja 7.407. Hanya 77 perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dari seharusnya 1.602 perusahaan. Hanya 4 perusahaan yang mempunyai koperasi pekerja yaitu : PT Asiatic Persada, PT Inti Indo Sawit, PT Nusantara VI dan PT Bank Mandiri. Provinsi Jambi baru mempunyai 13 orang mediator hubungan industrial dan tercatat ada sekitar 37 perusahaan yang melakukan PHK terhadap 492 pekerja.³⁴¹

Zulkifli Nurdin dan birokrasinya tidak berpihak kepada kesejahteraan buruh. Sebagai Gubernur Zulkifli Nurdin tidak berinisiatif menaikkan upah buruh (**Lihat Tabel 4.5**), tidak pernah bertemu serikat buruh dan tidak pernah menghadiri pertemuan tripartit. Singkatnya Zulkifli Nurdin tidak peduli dengan nasib buruh di Jambi.

Kenaikan upah buruh karena desakan buruh melalui demo bukan kebaikan hati gubernur (Zulkifli Nurdin). Gubernur (Zulkifli Nurdin) hanya tergantung dengan dewan pengupahan yang ada. Gubernur (Zulkifli Nurdin) punya kewenangan untuk menambahkan UMP tapi tidak dilakukan. Pemimpin di jambi tidak pernah melakukan perubahan kenaikan upah dari usulan dewan pengupahan. Gubernur (Zulkifli Nurdin) harusnya bisa berpikir sendiri melihat status sosial buruh. Dia (Zulkifli Nurdin) tidak mungkin di ptun kan sama pengusaha kalau menaikkan UMP dari usulan dewan pengupahan. Gubernur (Zulkifli Nurdin) tidak pernah bertemu dengan serikat buruh. Gubernur (Zulkifli Nurdin) tidak paham tentang perburuhan dan tidak mau belajar. Seharusnya setahun sekali dia (Zulkifli Nurdin) memanggil serikat buruh, asosiasi pengusaha, disnaker untuk membicarakan masalah buruh. Ada lembaga LKS tripartit ketuanya gubernur seharusnya di

³⁴¹ Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 2009

sinilah semua masalah dibicarakan. Gubernur (Zulkifli Nurdin) sekalipun tidak pernah ikut dalam pertemuan LKS tripartit. Mereka tidak peduli dengan keadaan buruh di Jambi.³⁴²

Tabel 4.5
Upah Minimum Provinsi Jambi tahun 2009 dan 2010

No.	Tahun	Upah Minimum Provinsi
1.	2009	800.000
2.	2010	900.000

Sumber : Dinas Sosial Tenagakerja dan Transmigrasi, 2010

Buruh perkebunan yang paling berkembang di Jambi tetapi mereka menghadapi berbagai masalah seperti kondisi pekerjaan yang berat dan status kerja kontrak. Partai politik di Jambi tidak ada yang membantu perjuangan buruh. Partai politik menganggap persoalan buruh tidak menarik sehingga tidak perlu membangun komunikasi dengan buruh.

Buruh kuat di sektor perkebunan saat ini. Kondisi buruh perkebunan sangat memprihatinkan. Resikonya sangat tinggi statusnya tidak tetap. Sektor perkebunan banyak permasalahan karena tidak dianggap karyawan. Kerjanya berat resikonya tinggi. Tidak ada partai yang membantu perjuangan buruh mendapatkan upah yang layak. Tidak ada tindakan dan komunikasi yang dibangun dengan kita. Buruh dianggap tidak seksi isunya oleh partai politik di Jambi.³⁴³

SBSI dan PPJ menjalin hubungan komunikasi. SBSI dan PPJ sering melakukan diskusi-diskusi bersama. Kendalanya mereka tidak bisa aksi bersama karena SBSI kurang mengerti isu petani dan sebaliknya PPJ kurang mengerti isu buruh.

Hubungan komunikasi ada dengan PPJ tetapi karena kepentingan berbeda jarang turun ke jalan bersama. Mereka (PPJ) tidak mengerti persoalan buruh dan kami (SBSI) tidak mengerti persoalan petani. Tapi kalau di tataran diskusi kita sering bertemu.³⁴⁴

SBSI di Jambi saat ini sedang berjuang untuk pembentukan dewan pengupahan di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Pembentukan dewan

³⁴² Wawancara dengan Roida Pane, (Ketua Wilayah SBSI Provinsi Jambi), Jambi, 25 November, 2011

³⁴³ Wawancara dengan Roida Pane, (Ketua Wilayah SBSI Provinsi Jambi), Jambi, 25 November, 2011

³⁴⁴ *ibid.*

pengupahan di kabupaten/kota akan membantu peningkatan upah buruh di Jambi. Hambatannya pengusaha selalu beralasan tidak ada struktur apindo di tingkat kabupaten. Sebenarnya pengusaha menghindari kewajiban dari dewan pengupahan di kabupaten/kota yang mengharuskan upah lebih tinggi 5 % dari UMP.

Tidak ada dewan pengupahan di kabupaten kota. Semua terfokus ke provinsi. Alasan klasik apindo tidak punya dpc di tiap kabupaten. Apindo tidak mau buat dewan pengupahan di kabupaten karena UMK harus 5 % lebih tinggi dari UMP. Masa kerjanya sekian tahun pengusaha hanya membayar sesuai UMP.³⁴⁵

Zulkifli Nurdin melemahkan gerakan sosial di Jambi karena secara potensial musuh utama dari “orang kuat lokal” seperti Zulkifli Nurdin adalah gerakan sosial seperti gerakan buruh dan gerakan petani. Pelemahan gerakan sosial menjadi salah satu indikator berkuasanya “orang kuat lokal” di era desentralisasi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Benedict Anderson mengenai “orang kuat lokal” di Filipina.

4.3 Dukungan dari Kelompok Kekerasan di Jambi

Zulkifli Nurdin melakukan praktek-praktek intimidasi melalui kaki tangannya, sebuah ormas kepemudaan. Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila melakukan intimidasi terhadap aktivis-aktivis terutama mahasiswa yang berani melakukan kritik. Pemuda Pancasila sebenarnya tidak terlalu besar lagi di Jambi namun tetap saja masih ditakuti. Wartawan sering menyaksikan secara langsung intimidasi Pemuda Pancasila saat mahasiswa aksi mengkritisi kebijakan Zulkifli Nurdin. Intimidasi terutama dilakukan terhadap organisasi mahasiswa diluar kelompok Cipayung.³⁴⁶

Zulkifli Nurdin juga melakukan intervensi terhadap organisasi kekerasan di Jambi. Melalui Hazrin Nurdin yang menjadi Ketua AMPG Provinsi Jambi yang pertama. Hazrin Nurdin juga dekat dengan Pemuda Pancasila. Ketua Pemuda

³⁴⁵ *ibid.*

³⁴⁶ Wawancara dengan SS (Wartawan Tribun Jambi), Jambi, 21 November 2011.

Pancasila Indra Armendaris dikenal sebagai orang dekat Hazrin Nurdin. Hazrin Nurdin juga pernah mendatangkan Habieb Riziq Shihab ke Jambi.³⁴⁷

Zulkifli Nurdin hadir dan memberikan sambutan dalam MLB MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi. MLB yang dihadiri 1200 kader. Pemuda Pancasila Provinsi Jambi memilih Indra Armendaris sebagai Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi. MLB dilakukan setelah Efendi Hatta dibekukan sebagai Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi.³⁴⁸

Selain menggunakan ormas kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, LSM lokal juga dilibatkan dalam tindakan-tindakan intimidasi. Nama-nama LSM lokal di Jambi menggunakan nama-nama yang berkonotasi kekerasan. Mereka bertujuan untuk menjadi kroni dari dinasti-dinasti politik seperti Zulkifli Nurdin.

Nama-nama LSM di Jambi unik. Ada Tegas, Libas, Terabas. Mereka bertujuan melindungi kroni politik. Mereka menjadi kroni dinasti-dinasti politik. Polanya sama tapi lebih cair.³⁴⁹

Intimidasi sering dilakukan kelompok preman tidak hanya kepada mahasiswa tetapi juga terhadap masyarakat. Misalnya ketika demonstrasi dihadang preman atau preman mendatangi rumah kita. Hazrin Nurdin sengaja menjadi ketua AMPG Provinsi Jambi untuk mengawasi kelompok kritis terhadap Zulkifli Nurdin. Hazrin Nurdin juga menggunakan AMPG untuk mengontrol keluarga Manap.

Tidak menjadi rahasia kelompok masyarakat diintimidasi oleh kelompok-kelompok preman. Ada demonstrasi masyarakat dihadang oleh preman. Atau rumah mereka diketuk-ketuk oleh preman. Anda tau AMPG siapa dulu ketua AMPG. Ketua AMPG hazrin nurdin. Baru sekarang diambil oleh Fasya. Ini strategi juga oleh keluarga nurdin untuk mengontrol keluarga manap. AMPG kan organisasi semi militer seperti banser.³⁵⁰

Fenomena kelompok kekerasan di Jambi menjadi sebuah pameo di masyarakat untuk menang pilkada kita harus banyak uang dan ajak preman-

³⁴⁷ Wawancara dengan PM (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 1 Desember 2011.

³⁴⁸ Diakses pada <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=47310> tanggal 1 Desember 2011.

³⁴⁹ Wawancara dengan Rivani (Aktivis LSM Cappa Jambi), Jambi, 22 November 2011.

³⁵⁰ Wawancara dengan Rivani (Aktivis LSM Cappa Jambi), Jambi, 22 November 2011.

preman jadi tim sukses.³⁵¹ Dengan uang Zulkifli Nurdin dinilai mengontrol kelompok-kelompok preman.

Dengan modal anda bisa kontrol banyak hal. Munculnya kelompok-kelompok preman. Secara politik tidak matang tapi mereka punya otot dan massa. Itu bisa masuk ke dalam struktur politik dengan uang anda bisa kontrol itu.³⁵²

Sebagai seorang aktivis mahasiswa sejak tahun 1997, GT seorang aktivis mahasiswa punya pengalaman langsung tidak mengenakan ketika menjadi aktivis mahasiswa di Jambi. GT dan beberapa aktivis mahasiswa Jambi pernah diculik selama 4 jam untuk diinterogasi oleh pendukung Zulkifli Nurdin di dalam kampus IAIN Sultan Thaha Syaifudin di daerah Telanai. Mereka dibawa masing-masing dari sekretariat mereka pada malam hari dan baru dilepaskan pagi hari setelah mereka berjanji merubah sikap mereka. Hal itu terjadi setelah pernyataan bersama organisasi mahasiswa yang mengkritisi kebijakan Zulkifli Nurdin pada saat pidato LPJ Gubernur di depan anggota DPRD Provinsi Jambi.³⁵³

Vigilantisme adalah praktek kekerasan yang dilakukam sekelompok orang untuk mengontrol perilaku warga yang menyimpang di luar jalur hukum. Kelompok vigilantisme adalah kelompok yang mengangkat diri mereka sendiri sebagai pihak yang berwenang menerapkan pemberlakuan hukum. Salah satu organisasi yang dikenal melakukan vigilantisme di Indonesia adalah Pemuda Pancasila.³⁵⁴

Pemuda Pancasila merupakan organisasi pemuda yang menjadi kelompok kekerasan bagi kepentingan kekuasaan otoriter Orde Baru. Pemuda Pancasila memobilisasi massanya untuk menyerang aktivis LSM yang kritis, mengusur lahan warga dan mengintimidasi aktivis mahasiswa. Pemuda Pancasila juga terlibat dalam kampanye pemenangan Golkar dalam pemilu Orde Baru.³⁵⁵

³⁵¹ Wawancara Edi Purwanto (Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi), Jambi, 22 November 2011.

³⁵² Wawancara dengan Rivani (Aktivis LSM Cappa Jambi), Jambi, 22 November 2011.

³⁵³ Wawancara GT (Aktivis Mahasiswa), Jambi 25 November 2011.

³⁵⁴ Cho Youn Mee, Syafrin Sairin dan Irwan Abdullah, "Kekerasan Vigilantism dalam Tatanan Sosial: Sebuah Usulan Kerangka Analisis Kekerasan dari Kasus Amerika Serikat, Afrika Selatan dan Indonesia", Jurnal *Humaniora* Volume 17 Nomor 1 Februari 2005.

³⁵⁵ Loren Rytter, "Pemuda Pancasila : The Last Loyalist Free Men of Suharto's Order", dalam Jurnal *Indonesia* Nomor 66 Bulan Oktober 1998.

Banyak aktivis organisasi pemuda seperti KNPI, AMPI, Pemuda Panca Marga, FKPPPI dan Pemuda Pancasila yang dibesarkan Orde Baru menyebar ke berbagai partai di masa reformasi. Ada yang tetap di Golkar, ada yang menyeberang ke partai hasil reformasi seperti PDI Perjuangan dan PAN. Organisasi pemuda tersebut ketika Orde Baru berkuasa bertugas menggalang suara untuk Golkar, memeriahkan kampanye Golkar dengan massa yang banyak dan mengintimidasi lawan politik. Mereka menjadi kelompok para militer yang berfungsi melindungi kepentingan ekonomi dan politik Orde Baru. Ada ratusan anggota DPR RI pemilu 1999 dan 2004 yang berlatar belakang ormas pemuda. Salah satunya adalah Yorrys Raweyai mantan pentolan Pemuda Pancasila yang menjadi anggota DPR RI dan juga menjadi Ketua Umum AMPG, sayap pemuda Partai Golkar. Selain Yorrys Raweyai, ada 12 anggota DPR RI, 115 anggota DPRD Provinsi dan 400 anggota DPRD Kota/Kabupaten yang berlatarbelakang kader Pemuda Pancasila.³⁵⁶

Kelompok kekerasan seperti Pemuda Pancasila dapat bertahan pada masa reformasi. Kelompok tersebut malah ditiru oleh partai-partai yang lahir pasca reformasi. Partai-partai ramai mendirikan satgas partai yang sebenarnya berperan sebagai preman partai sedangkan organisasi preman seperti Pemuda Pancasila mendirikan partai preman, Partai Patriot Pancasila. Intimidasi yang menjadi andalan kelompok kekerasan sebenarnya sudah usang sebagai bagian dari strategi pemenangan pemilu.³⁵⁷

Kelompok kekerasan di Indonesia era desentralisasi memberikan dukungan kepada pejabat-pejabat di Pemerintah Provinsi. Dukungan tersebut dilakukan terutama ketika terjadi peristiwa politik penting seperti Pemilihan Gubernur dan Laporan Pertanggung Jawaban Gubernur di depan sidang DPRD. Kelompok kekerasan ini bertugas menghadapi pengkritik kebijakan patron politiknya. Mereka tak segan melakukan kekerasan fisik seperti penganiayaan.

³⁵⁶ Loren Rytter, "Their Moment in the Sun : the New Indonesian Parliamentarians from the Old OKP", dalam Geert Arend van Klinken dan Joshua Barker, *State of Authority : the State in Society in Indonesia*, (Ithaca : Cornell University Press, 2009), hal 185.

³⁵⁷ Ian Wilson, "The Rise and Fall of Political Gangsters in Indonesian Democracy", dalam Edward Aspinall dan Marcus Mietzner (ed), *Problems of Democratisation in Indonesia : Elections, Institutions and Society*, (Singapura : ISEAS, 2010), hal 199-210.

Mayoritas anggota kelompok kekerasan adalah masyarakat miskin tak berpendidikan dan bekerja di sektor informal.³⁵⁸

4.4 Penguasa Tanjung Jabung Timur

Zumi Zola berhasil memenangi Pemilihan Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2011 dengan perolehan 57.415 suara (48,12 %). Bupati petahana, M. Juber mendapatkan 48.510 suara (40,66 %) dan calon Bupati yang lain Saipudin mendapatkan 13.380 suara (11,21 %).³⁵⁹ Ketika kampanye Zumi Zola hanya mengandalkan dua orang menjadi juru kampanyenya yaitu Zulkifli Nurdin dan Hazrin Nurdin.³⁶⁰

Kemenangan Zumi Zola tersebut adalah contoh kebesaran pengaruh Zulkifli Nurdin dan praktek oligarki lokal yang dijalankannya. Pengaruh Zulkifli Nurdin lebih menonjol ketimbang sisi selebritis Zumi Zola. Zumi Zola takkan menang tanpa dukungan Zulkifli Nurdin.

Inilah sebuah bentuk oligarki lokal yang mau tidak mau harus menurunkan tahtanya. Karena sosok ayahnya lah. Sosok Zulkifli Nurdin lebih wah ketimbang Zumi Zola. Zulkifli Nurdin dan Keluarga Nurdin yang lebih berpengaruh ketimbang sisi selebritis. Dia (Zumi Zola) takkan menang tanpa dukungan Zulkifli Nurdin.³⁶¹

Kemenangan Zumi Zola dalam pemilihan Bupati Tanjung Jabung Timur karena jaringan yang luas yang dimiliki keluarga Nurdin di Tanjung Jabung Timur. Zumi Zola memanfaatkan jaringan politik ayahnya dan kakeknya. Secara materi Zumi Zola juga lebih unggul.

Zumi (Zumi Zola) dilahirkan dalam lingkup keluarga yang besar. Dari segi materi dia (Zumi Zola) sudah kaya. Dari sisi jaringan dia (Zumi Zola) sudah sangat luas didukung jaringan ayahnya kakeknya.³⁶²

³⁵⁸ Okamoto Masaaki dan Abdur Rozaki, *Kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasi*, (Yogyakarta : IRE Press, 2006), hal 21-41.

³⁵⁹ Metro Jambi, "Zumi Zola Bupati Termuda", diakses pada <http://www.metrojambi.com/headline/4456-zumi-zola-bupati-termuda.html> tanggal 1 Februari 2011.

³⁶⁰ Metro Jambi, "Hanya Andalkan Tokoh Lokal", diakses pada <http://www.metrojambi.com/politik/3019-hanya-andalkan-tokoh-lokal.html> tanggal 1 November 2011.

³⁶¹ Wawancara AK (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 21 November 2011.

³⁶² Wawancara dengan Yasir Arafat (Ketua KPU Provinsi Jambi), Jambi, 24 November 2011.

Kemenangan Zumi Zola selain karena nama besar keluarga Nurdin Hamzah juga dipengaruhi politik uang yang mereka lakukan. Hazrin Nurdin merekrut ketua RT sebagai tim sukses dan memberikan uang setiap bulan kepada mereka. Hazrin Nurdin juga sering turun langsung ke rumah warga memberikan uang kepada masyarakat.

Cem mano dak menang (bagaimana tidak menang). Datang Hazrin (Hazrin Nurdin) ke toko beli rokok kasih seratus ribu. *Ditanya* di rumah *ado berapa* orang. *Cem mano* orang *dak* terikat. RT (ketua RT) digaji tiap bulan. *Dak biso belari* lah. Karena orang tau *datuknyo* (Nurdin Hamzah) *bapaknyo* (Zulkifli Nurdin) otomatis kenal *dio* (Zumi Zola).³⁶³

Bawaslu menyatakan pilkada Bupati Tanjung Jabung Timur sebagai pilkada dengan pelanggaran politik uang terbesar nomor tiga di Indonesia. Pada pilkada Tanjung Jabung Timur tercatat terjadi 33 kali pelanggaran politik uang. Pelanggaran politik uang terjadi adalah seperti membujuk seseorang untuk memilih seseorang kandidat dengan imbalan uang dari Rp. 50.000 hingga Rp. 3.000.000.³⁶⁴

Zulkifli Nurdin lebih memprioritaskan pembangunan ke daerah asalnya Muara Sabak, Tanjung Jabung Timur.³⁶⁵ Sehingga pembangunan proyek raksasa Jembatan Batanghari 2 merupakan bagian strategi politik Zulkifli Nurdin. Zulkifli Nurdin sangat ngotot agar Jembatan tersebut terealisasi. Perencanaan kurang matang sehingga waktu pengerjaannya mundur dari yang dijadwalkan dan dana yang digunakan semakin besar. Tetapi itu tetap dilakukan oleh Zulkifli Nurdin. Bagi Zulkifli Nurdin membangun jembatan raksasa ke kampung halamannya merupakan sebuah keharusan. Karena dia tahu manfaat politik dan ekonomi pembangunan jembatan raksasa tersebut.³⁶⁶

Bagi partai-partai lain, kemenangan Zumi Zola bukanlah sebuah kejutan. Justru kejutannya kalau Zumi Zola kalah dalam pemilihan Bupati Tanjung Jabung

³⁶³ Wawancara dengan MN (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 3 Desember 2011.

³⁶⁴ Diakses pada <http://www.tribunnews.com/2011/12/20/politik-uang-dan-pns-tak-netral-warnai-pilkada-2011> tanggal 1 Desember 2011.

³⁶⁵ Wawancara dengan Syahidan, Ketua DPRD Muara Jambi Periode 2009-2014, Jambi, 24 November 2011.

³⁶⁶ Wawancara dengan SS (Wartawan Tribun Jambi), Jambi, 21 November 2011.

Timur. Zumi Zola menang karena faktor Zulkifli Nurdin yang telah banyak membangun kawasan Tanjung Jabung Timur.

Kemenangan zumi zola tidak perlu diragukan lagi. Karena bapaknya (Zulkifli Nurdin) punya jasa yang besar sekali terhadap tanjung jabung timur. Yang selama ini 3 jam lebih sekarang ke tanjung jabung cuma satu jam. Saya kira itu wajar sekali. Hadiah untuk bapaknya (Zulkifli Nurdin). Anaknya (Zumi Zola) bisa mengabdikan disana. Justru kalau dia (Zumi Zola) kalah itu aneh.³⁶⁷

Zumi Zola menang karena dia anak seorang Zulkifli Nurdin. Zulkifli Nurdin merupakan tokoh yang disegani di Tanjung Jabung Timur. Selain Zumi Zola juga memiliki kelebihan sebagai seorang artis nasional. Lawan beratnya, bupati petahana M. Juber juga dinilai sangat lemah dalam melakukan politik uang. Bahkan M. Juber tergolong politisi tidak punya uang.

Zumi (Zumi Zola) menang karena dia anak Zulkifli Nurdin. Zulkifli Nurdin tokoh yang disegani disana. Zumi Zola juga artis. Pilkada selalu berbicara tentang kekuatan finansial logistik. Juber (M. Juber) waktu itu lemah di faktor finansial. Orangnyanya lurus sederhana. Katakanlah tidak punya uang.³⁶⁸

Menurut anggota KPU Tanjung Jabung Timur, Idrus, Zumi Zola menjadi Calon Bupati Terkaya dalam Pemilihan Bupati Tanjung Jabung Timur tahun 2011. Total kekayaan Zumi Zola mencapai Rp 3.283.000.000. Sedangkan Bupati petahana. M. Juber hanya mempunyai kekayaan sebesar Rp 377.000.³⁶⁹

Bagi kader PAN sendiri menilai banyak faktor yang menyebabkan kemenangan Zumi Zola. Pertama, Zumi Zola sudah dikenal masyarakat terutama pada kalangan pemilih pemula. Kedua, Paguyuban etnis juga dimobilisasi. Ketiga, PAN di Tanjung Jabung Timur mempunyai 37.000 pemilih berdasarkan hasil pemilu 2009. Tetapi faktor terbesar tentu keluarganya. Ayah, ibu dan pamannya turun langsung berkampanye ke tengah masyarakat.

Zumi Zola sudah dikenal masyarakat. Zumi Zola garap pemilih pemula. Paguyuban (etnis) kami dari partai yang garap. Ibu ratu (Ratu Munawaroh) pak zul (Zulkifli Nurdin) juga turun kesana. Ada

³⁶⁷ Wawancara dengan Cornelis Buston, (Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi), Jambi, 23 November, 2011.

³⁶⁸ Wawancara dengan Sufardi Nurzain (Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi), Jambi, 23 November, 2011.

³⁶⁹ Metro Jambi, "Yopi dan Zumi Terkaya", diakses pada <http://www.metrojambi.com/headline/3715-yopi-dan-zumi-terkaya-.html> tanggal 1 November 2011

masyarakat yang ingin balas jasa ke pak zulkifli nurdin karena pembangunan Tanjab Timur. Kalau ketua partai lain mana mau turun ke bawah. Pak hazrin nurdin mau turun kebawah. Selama 3 bulan penuh kami berangkat jam 8 pagi pulang jam 3 pagi terus berangkat lagi jam 8 pagi. Kita sosialisasi mengingatkan bahwa ini anak pak zul (Zulkifli Nurdin). Kita pendekatan untuk mengingatkan ini putra pak zulkifli nurdin dan beliau sudah banyak membantu tanjab timur. Apalagi di tanjung jabung timur sangat signifikan mendongkrak suara disana.³⁷⁰

4.5 Pengaruh Zulkifli Nurdin dalam Pilkada

4.5.1 Pemilihan Walikota Kota Jambi Tahun 2008

Pasangan Bambang Priyanto-Sum Indra memenangkan pemilihan walikota kota Jambi tahun 2008. Pasangan ini mendapatkan 98.180 suara. Disusul pasangan Asnawi AB-Nuzul Prakasa Zoerman memperoleh 77.043 suara. Sedangkan pasangan Zulkifli Somad-Agus Roni memperoleh 22.405 suara dan pasangan Sutrisno-Efendi Hatta mendapatkan 22.405 suara.³⁷¹

Beberapa kelompok warga Jambi menuntut kecurangan dalam pemilihan walikota Jambi diusut. Banyak warga yang tidak mendapatkan kartu pemilih. Warga juga menduga kebijakan KPUD Kota Jambi mengizinkan penggunaan KTP sebagai pengganti kartu pemilih menguntungkan pihak Bambang Priyanto-Sum Indra.³⁷²

Zulkifli Nurdin terlibat dalam kemenangan pasangan Bambang Priyanto-Sum Indra pada pemilihan walikota Jambi tahun 2008. Kepentingan Zulkifli Nurdin adalah agar keluarga Nurdin Hamzah mempunyai pengaruh di Kota Jambi yang selama sepuluh tahun dikuasai keluarga Abdul Manap melalui Arifien Manap yang menjadi walikota Jambi sejak tahun 1998 hingga tahun 2008.³⁷³

Zulkifli Nurdin membantu pendanaan pasangan Bambang-Sum Indra. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.10.000.000.000 dengan rincian dari Bambang Priyanto Rp.5.000.000.000 dan dari Sum Indra Rp.5.000.000.000. Karena tidak memiliki uang tunai sebesar itu maka Bambang Priyanto meminjam uang tersebut kepada Hazrin Nurdin dengan jaminan aset berupa tanah dan bangunan. Hazrin

³⁷⁰ Wawancara dengan Saiful Azwar (Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

³⁷¹ Diakses pada <http://nasional.kompas.com/read/2008/08/22/01295763/warga.datangi.kpu> tanggal 1 Desember 2011.

³⁷² *ibid.*

³⁷³ Wawancara dengan PM (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 1 Desember 2011.

Nurdin meminjamkan uang kepada calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah dengan tujuan apabila sudah menang maka Hazrin Nurdin akan meminta imbalan proyek-proyek pemerintah.³⁷⁴

Sebagai contoh bentuk dukungan langsung Zulkifli Nurdin kepada pasangan Bambang Priyanto-Sum Indra, Zulkifli Nurdin mengadakan silaturahmi dengan masyarakat Batak di rumah pribadinya di daerah kampung manggis. Acara yang diselenggarakan Lembaga Budaya Batak yang dipimpin oleh Rahmat Derita Harahap (Kepala Dinas Pendidikan) dan Benhard Panjaitan (Kasubdin Dinas PU) mengambil tema “Semalam di Bonapasogit”. Bintang tamu pada acara tersebut adalah musisi papan atas etnis Batak seperti Victor Hutabarat, Rita Butar-Butar, Trio Ambisi, Jack Marpaung, Joel Simorangkir, Maya Tanjung dan Herti Sitorus. Hadir dalam acara tersebut pasangan Bambang Priyanto-Sum Indra yang akan maju menjadi Walikota-Wakil Walikota Jambi tahun 2008. Zulkifli Nurdin menyatakan dukungannya dan mengajak masyarakat Batak di Jambi agar mendukung pasangan Bambang. Zulkifli Nurdin melalui anak buahnya membagi-bagikan sarung cap gajah duduk kepada ribuan orang yang hadir. Banyak pejabat yang hadir bahkan turut membantu membagi-bagikan sarung.³⁷⁵

4.5.2 Pemilihan Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2011

Pasangan Usman Ermulan-Katamso memenangkan pemilihan Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2011. Pasangan ini mendapatkan 76.414 suara mengalahkan pasangan bupati dan wakil bupati petahana Safrial-Yamin. Pasangan Safrial-Yamin mendapatkan suara 64.487 suara.³⁷⁶

Pasangan Safrial-Yamin menggugat ke Mahkamah Konstitusi dengan menghadirkan 140 saksi. Mereka merasa ada kecurangan yang dilakukan oleh pasangan Usman Ermulan-Katamso. Kecurangan tersebut mereka duga sistematis, terstruktur dan masif.³⁷⁷

³⁷⁴ Wawancara dengan H (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 1 Desember 2011.

³⁷⁵ Wawancara dengan PM (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 1 Desember 2011.

³⁷⁶ Diakses pada <http://www.tribunnews.com/2010/12/03/mk-kukuhkan-pasangan-usman-katamso-pimpin-tanjabbar> tanggal 1 Desember 2011.

³⁷⁷ *ibid.*

Berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pasangan Safrial-Yamin diprediksi memenangkan pemilihan Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2011. Melalui 440 responden dengan *margin of error* sebesar 4,5 %, Safrial-Yamin diprediksi akan mendapatkan 60 % suara.³⁷⁸

Ada pengaruh dukungan Zulkifli Nurdin terhadap kemenangan Usman-Katamso dalam pemilihan Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2011.³⁷⁹ Usman Ermulan saat itu tidak punya uang. Tapi PAN yakin Usman Ermulan masih punya pengaruh di Tanjung Jabung Barat. Apalagi didampingi oleh mantan ajudan Zulkifli Nurdin, Katamso.³⁸⁰

Pengaruh Zulkifli Nurdin yang besar dalam politik lokal mendorong banyak calon bupati atau calon walikota yang ingin menjadi calon PAN. Hal tersebut karena para kandidat tahu bahwa Zulkifli Nurdin merupakan figur sentral maka mekanisme di internal PAN akan mudah. Bahkan tidak jarang Zulkifli Nurdin membantu biaya pencalonan kandidat.

Karena besar pengaruh beliau (Zulkifli Nurdin) di provinsi jambi banyak calon-calon bupati menggunakan kendaraan PAN. Karena beliau figur sentral maka proses di dalam tidak terlalu berat. Bahkan di suatu daerah apabila tidak mampu pendanaan beliau membantu pendanaan. Pembiayaan-pembiayaan itu biaya perahu tidak ada. Malah dibantu pembiayaan³⁸¹

Menurut H, seorang temannya yang berprofesi advokat bercerita bahwa seorang kliennya Kepala Cabang Bank "B", sebuah bank umum nasional, mengalami stress berat karena pada hari jumat sore diminta Hazrin Nurdin, salah satu nasabahnya, agar mencairkan uang tunai sebesar Rp 6.000.000.000 untuk dia ambil uang tersebut keesokan harinya. Uang tersebut akhirnya bisa dikumpulkan susah payah sang Kepala Cabang dengan menghimpun dana dari beberapa nasabah prioritasnya yaitu beberapa pengusaha keturunan di Jambi. Ternyata hari

³⁷⁸ Diakses pada http://www.jambi-independent.co.id/jio/index.php?option=com_content&view=article&id=1063 tanggal 1 Desember 2011.

³⁷⁹ Wawancara Edi Purwanto (Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi), Jambi, 22 November 2011.

³⁸⁰ Wawancara dengan Saiful Azwar (Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

³⁸¹ *ibid.*

minggu besoknya bertepatan dengan kampanye terakhir pilkada Tanjung Jabung Barat tahun 2011 yang dihadiri Hazrin Nurdin.³⁸²

4.6 Dominasi Keluarga Nurdin Hamzah di Partai Amanat Nasional

4.6.1 Hazrin Nurdin menjadi Ketua DPW PAN Provinsi Jambi

Hazrin Nurdin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPW PAN Provinsi Jambi dalam Musyawarah DPW PAN Provinsi Jambi ke-4. Hatta Rajasa yang turut hadir menyampaikan Zulkifli Nurdin sebagai mantan Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, hanya bergeser ke samping, Zulkifli Nurdin akan tetap berjuang untuk PAN. Hal tersebut menggambarkan betapa pentingnya sosok Zulkifli Nurdin bagi PAN di Jambi.³⁸³

Zulkifli Nurdin menggunakan PAN untuk menciptakan dinasti politiknya. Tidak ada produksi pemimpin PAN di luar saudara dan kroninya.³⁸⁴ DPW PAN Provinsi Jambi seharusnya dipimpin oleh Chairul Naim Anik bukannya Hazrin Nurdin. Chairul Naim Anik dinilai punya pengalaman politik yang lebih matang selain pernah menjadi Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi dua periode, Chairul Naim Anik juga pernah menjadi anggota KPU Provinsi Jambi.

Begitu kepemimpinan diserahkan ke hazrin nurdin hegemoni politik PAN bergeser. Kan dia (Hazrin Nurdin) lebih arogan. Kharismanya beda jauh, berbeda kelas. Chairul Naim dia berangkat dari bawah. Pernah di KPU. Saya tau persis kemampuan dia (Chairul Naim) berpolitik. Hati-hati, cermat, pendidikan bagus hukum trisakti. Dia (Chairul Naim) sebenarnya lebih cakap karena dia pernah jadi sekretaris. Hazrin (Hazrin Nurdin) ini kan bukan dari PAN. Dia (Hazrin Nurdin) dari Golkar secara emosional belum (diterima). Karena terpaksa aja. Waktu di Golkar, dia (Hazrin Nurdin) juga bukan elit yang diperhatikan. Disitu rusaknya PAN disitu. Dia (Hazrin Nurdin) tidak punya kemampuan memimpin di dalam partai. Mungkin dia (Hazrin Nurdin) berhasil di dalam bisnis tapi belum tentu di partai. Wawasan dia (Hazrin Nurdin) tentang politik masih jauh.³⁸⁵

Bagi pengurus PAN, pergantian Ketua DPW PAN Provinsi Jambi dari Zulkifli Nurdin ke Hazrin Nurdin merupakan hal yang biasa. Seorang kakak

³⁸² Wawancara dengan H (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 1 Desember 2011.

³⁸³ Diakses pada <http://infojambi.com/v.1/headlines/11450-ketua-dpw-pan-jambi-azrin-nurdin-terpilih-secara-aklamasi.html> tanggal 1 November 2011.

³⁸⁴ Wawancara dengan JS (Wartawan Majalah Gatra), Jambi, 21 November 2011.

³⁸⁵ Wawancara dengan NK (Dosen STISIP Nurdin Hamzah Jambi), Jambi, 25 November 2011.

digantikan adiknya. Sama-sama dari keluarga Nurdin yang punya jaringan politik yang luas.

Dari sisi sistem sama saja. Dari pak zul (Zulkifli Nurdin) ke pak hazrin (Hazrin Nurdin). Toh perubahan ini dari kakak ke adik. Kemudian *track record* keluarga. *Track record* jaringan.³⁸⁶

Tidak ada perbedaan antara Hazrin Nurdin dan Zulkifli Nurdin soal pendanaan. Keduanya sama-sama membantu keuangan PAN. Hazrin Nurdin dan Zulkifli Nurdin tidak pelit terhadap PAN.

Saya pikir sama-sama keduanya royal kepada partai. Sisi finansial tidak ada kegoncangan.³⁸⁷

4.6.2 Ratu Munawaroh terpilih menjadi Anggota DPR RI Dapil Jambi

Ratu Munawaroh Zulkifli berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilihan anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi Jambi tahun 2009. Ratu Munawaroh Zulkifli berhasil meraih suara sebesar 157.651 suara pemilih dari total 1.333.626 pemilih. Selain Ratu Munawaroh Zulkifli, terpilih juga salah satu orang dekat Zulkifli Nurdin, Haji Bakri. Haji Bakri mendapat 18.954 suara pemilih (**Lihat Tabel 4.6**).

Tabel 4.6

Rekapitulasi Daftar Calon Terpilih DPR RI Dapil Provinsi Jambi Pemilu tahun 2009

No.	Nama Calon Terpilih	Nama Partai	Suara Sah
1.	Ratu Munawaroh Zulkifli	PAN	157.651
2.	Dr. Indrawati Sukadis	Partai Demokrat	53.008
3.	H. Irsal Yunus, SE, MM	PDI Perjuangan	43.007
4.	Drs.H.A. Murady Darmansyah	Partai Hanura	39.224
5.	Selina Gita, SE	Partai Golkar	38.262
6.	Drs. H. Asad Syam, MM	Partai Demokrat	22.827
7.	H.A. Bakri HM, SE	PAN	18.954

Sumber : KPU Provinsi Jambi, 2010

³⁸⁶ Wawancara dengan Bambang Bayu Suseno (Ketua DPD PAN Kabupaten Muaro Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

³⁸⁷ Wawancara dengan Saiful Azwar (Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

Ratu Munawaroh Zulkifli maju sebagai Anggota DPR RI pada Pemilu 2009 adalah untuk membantu perolehan suara PAN di Jambi. Terbukti suara PAN terbantu dengan majunya Ratu Munawaroh menjadi calon anggota legislatif. Ratu Munawaroh terbukti mendulang suara untuk PAN.

Untuk membantu, untuk mendulang suara. Ibu Ratu memang didorong oleh pusat (DPP PAN). Ibu Ratu menyetujui karena tujuan awalnya untuk mendulang suara. Murni mendulang suara. Demi kepentingan partai dia (Ratu Munawaroh) lakukan. PAN terdompleng suaranya.³⁸⁸

Pengamat menilai birokrasi tidak netral di Jambi. Banyak PNS memberikan dukungan terbuka kepada politisi. PNS bahkan menjadi tim sukses agar bisa mendapatkan jabatan.

Di jambi ini (PNS) terang-terangan memihak. Sudah berpihak. Jadi istilah mereka (PNS) dapat apa. Lebih bagus bertarung berjudi. Kalau menang dapat (jabatan). Ada PNS terang-terangan didepan rumahnya pasang baliho. Vulgar sekali. Istilah saya itu tim sukses bayangan.³⁸⁹

Kemenangan Ratu Munawaroh banyak dibantu oleh mobilisasi PNS di Provinsi Jambi. Sebagai contoh menjelang hari pemilihan, Ratu Munawaroh pada hari minggu sosialisasi di depan 500 an PNS sebuah dinas beserta istri mereka. Acara yang berlangsung di sebuah balai milik UPT dinas tersebut dibungkus dengan format sosialisasi kesehatan reproduksi. Acara ditutup dengan makan bersama dan bagi-bagi poster dan stiker Ratu Munawaroh. Kepala Dinas ikut mengingatkan agar jangan lupa memilih Ratu Munawaroh.³⁹⁰ Berdasarkan data Bappeda Provinsi Jambi tahun 2009, PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi berjumlah 5.818 orang.³⁹¹

4.6.3 Zumi Zola Calon Gubernur Jambi Tahun 2015

Dalam wawancaranya dengan Noer Faisal, wartawan Harian Umum Pelita, Zulkifli Nurdin mengaku tidak tertarik lagi dengan dunia politik dan memilih kembali ke dunia bisnis. Dia fokus menggeluti bisnis kelapa sawit terutama di Jambi dan Riau. Urusan politik dia serahkan kepada politisi yang lebih muda di

³⁸⁸ Wawancara dengan S (Mantan Kepala Biro Setda Pemprov Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

³⁸⁹ Wawancara dengan NK (Dosen STISIP Nurdin Hamzah Jambi), Jambi, 25 November 2011.

³⁹⁰ Wawancara dengan PM (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 1 Desember 2011.

³⁹¹ Bappeda Provinsi Jambi, *Jambi Dalam Angka 2009*.

Jambi. Apalagi anaknya sudah menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur. Politik yang dinamis tidak menutup kemungkinan Zumi Zola akan maju menjadi Calon Gubernur tahun 2015.³⁹²

Zulkifli Nurdin kehabisan figur dalam Pemilihan Gubernur tahun 2010. Zulkifli Nurdin tidak bisa memajukan sang istri dan dia lebih memilih menahan diri dalam pemilihan Gubernur tahun 2010. Dia lebih memilih menyiapkan anaknya Zumi Zola untuk bertarung di Pemilihan Gubernur 2015 nanti.

Ratu munawaroh mungkin bisa menang (pemilihan Gubernur) tapi kesulitan menjalankan kekuasaan karena wanita. Ibu rumah tangga. Dua keluarga (Zulkifli Nurdin dan Zoerman Manap) ini kehilangan figur dalam pilgub (Pemilihan Gubernur) 2010.. Mungkin nanti zumi zola yang digadang-gadang untuk (Pemilihan Gubernur) 2015. Mereka (Zulkifli Nurdin) mengakui mereka (Zulkifli Nurdin) sedang pembenahan. Mereka (Zulkifli Nurdin) kekurangan figur.³⁹³

Zulkifli Nurdin sangat memahami peta politik Jambi dan mengakui kegunaan survei politik. Zulkifli Nurdin sudah memprediksi adiknya Hazrin Nurdin tidak bisa memenangkan Pemilihan Gubernur Jambi tahun 2010. Sebenarnya popularitas Gubernur Jambi terpilih untuk periode 2010-2015 Hasan Basri Agus bisa dikalahkan oleh sang istri Ratu Munawaroh. Namun dia tidak mengizinkan sang istri untuk maju. Zulkifli Nurdin lebih mempersiapkan sang anak Zumi Zola untuk maju menjadi pemimpin Jambi masa depan.

Survei yang bisa mengalahkan HBA (Hasan Basri Agus) itu ibu ratu (Ratu Munawaroh).. Dua kali demokrat survei yang bisa mengalahkan HBA (Hasan Basri Agus) hanya ibu ratu (Ratu Munawaroh). Dia (Zulkifli Nurdin) paham betul peta politik Jambi. Pak zul (Zulkifli Nurdin) yang memperkenalkan saya dengan pak bupati (Zumi Zola). Saya (S) ada tugas khusus untuk ngawal ini (Zumi Zola)³⁹⁴

Zulkifli Nurdin mendampingi terus Zumi Zola dalam menjalankan kekuasaannya di Tanjung Jabung Timur. Walaupun Zumi Zola cepat belajar, dia masih perlu bantuan Zulkifli Nurdin mengingat pengalaman Zulkifli Nurdin yang banyak terutama menangani PNS yang sangat beragam kepentingannya.

³⁹² Noer Faisal, "H. Zulkifli Nurdin : Tanjung Jabung Timur Miliki Potensi Besar", Harian Umum Pelita, diakses pada <http://bataviase.co.id/node/323624> tanggal 1 November 2011.

³⁹³ Wawancara dengan Paisal Kumar (Pemimpin Redaksi Jambi Independen), Jambi, 6 Februari 2012.

³⁹⁴ Wawancara dengan S (Mantan Kepala Biro Setda Pemprov Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

(Zumi Zola) cepat belajar. Masih *didrill* pada tataran non teknis oleh pak zul (Zulkifli Nurdin). Pak zul (Zulkifli Nurdin) tidak mau ada yang mendikte anaknya. Dikawal terus. Dia (Zulkifli Nurdin) punya pengalaman. Tidak semua orang tulus. Banyak motivasinya orang di pemda.³⁹⁵

Zulkifli Nurdin telah mempersiapkan Zumi Zola sejak lama sebagai penerusnya. Pada pemilihan Gubernur 2005, Zumi Zola sudah terlibat sebagai tim sukses. Kemudian Zumi Zola diminta meneruskan studi pascasarjananya di Inggris untuk memperdalam pengetahuannya.³⁹⁶

Zumi Zola ada kompetitor potensial bagi kekuasaan Hasan Basri Agus di pemilihan Gubernur tahun 2015.³⁹⁷ PAN sudah yakin Zumi Zola akan menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur. Bahkan melawan HBA pun Zumi Zola akan menang.

Kalau zumi zola sudah kita (PAN) prediksi menang. *Haqul yakin* percaya diri. Saya percaya 2015 melawan HBA pun menang Zumi Zola. Anggap saja ada tiga pasang calon pun. Orangnyanya (Zumi zola) sopan, cium tangan, ganteng, cewek-cewek histeris.³⁹⁸

Zumi Zola bisa mengalahkan HBA dalam pemilihan Gubernur apabila dia mau meniru apa yang dilakukan ayahnya. Dan itu bukan sesuatu yang sulit.³⁹⁹ Zumi Zola mempunyai modal yang baik untuk maju menjadi Gubernur tahun 2015 nanti.

Tapi kala lihat realitas di masyarakat kita memang potensi dia (Zumi Zola) untuk jadi Gubernur. Fisiknya gagah, uangnya banyak, pencitraannya bagus. Masih *single* gitu kan.⁴⁰⁰

Pengurus PAN yakin bahwa calon Gubernur Jambi tahun 2015 dari PAN pasti diantara Zumi Zola atau Hazrin Nurdin. Sebagai ujian untuk Zumi Zola, Zumi Zola harus mampu membangun Tanjung Jabung Timur. Apabila gagal maka lebih baik Zumi Zola jangan maju.

³⁹⁵ *ibid.*

³⁹⁶ Wawancara dengan JS (Wartawan Majalah Gatra), Jambi, 21 November 2011.

³⁹⁷ Wawancara dengan SS (Wartawan Tribun Jambi), Jambi, 21 November 2011.

³⁹⁸ Wawancara dengan Bambang Bayu Suseno (Ketua DPD PAN Kabupaten Muaro Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

³⁹⁹ Wawancara dengan IA (Pengurus Paguyuban Masyarakat Sunda Provinsi Jambi), Jambi, 22 November, 2011.

⁴⁰⁰ Wawancara Edi Purwanto (Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi), Jambi, 22 November 2011.

Mungkin yang kita proyeksikan ke depan pak ketua dpw (Hazrin Nurdin) dan pak zumi zola. *Test case* nya tanjab timur. Apakah beliau (Zumi Zola) berhasil membangun daerah. Kalau di tanjabtim berhasil maka ada peluang api kalau gagal agak berat.⁴⁰¹

Menurut kader Partai Demokrat, Gubernur Hasan Basri Agus tidak khawatir akan bersaing dengan Zumi Zola. Gubernur dan Partai Demokrat percaya diri karena didukung oleh tujuh bupati dan walikota.⁴⁰² Zumi Zola diyakini adalah pesaing masa depan bagi Gubernur Hasan Basri Agus. Sehingga Hasan Basri Agus berhati-hati mengeluarkan kebijakan yang justru akan menaikkan popularitas Zumi Zola. Seperti dalam rencana pembangunan pelabuhan internasional di Tanjung Jabung Timur yang dibatalkan oleh Hasan Basri Agus.

(pelabuhan) Ujung Jabung sudah disiapkan menjadi kawasan ekonomi tapi karena Gubernur merasa Bupati (Zumi Zola) saingannya maka rencana tersebut tertunda. (Zumi Zola) bukan (pesaing) potensial lagi sudah diambang mata.⁴⁰³

Zumi Zola dianggap memiliki banyak kemiripan dengan Zulkifli Nurdin. Zumi Zola diduga dipersiapkan untuk maju menjadi Gubernur Jambi 2015. Bahkan sudah mempersiapkan diri sejak dini.

Banyak kesamaan. Ganteng, punya kharisma, punya visi, dermawan. (Keluarga Nurdin) Bisa bangkit lagi. Dia (Zumi Zola) *copy paste* nya betul itu. Saya kira dia (Zumi Zola) *copy paste* bapaknya (Zulkifli Nurdin) betul itu. Kesannya dia (Zumi Zola) sekarang sudah mempersiapkan diri untuk maju dalam pemilihan gubernur yang akan datang (2015). Di baliho-baliho saja sudah mulai nampak. (tahun) 2012 kita akan ada hari pers nasional dia (Zumi Zola) sudah pasang baliho. Visinya sudah sampai kesana (Gubernur Jambi) yang lain kan belum. Saya melihat zumi zola akan maju. Visioner sekali. Dia (Zumi Zola) cepat. Dia (Zumi Zola) menangkap peluang-peluang itu.⁴⁰⁴

⁴⁰¹ Wawancara dengan Saiful Azwar (Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

⁴⁰² Wawancara dengan Cornelis Buston, (Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi), Jambi, 23 November, 2011.

⁴⁰³ Wawancara dengan D (Pejabat Eselon III Pemprov Jambi), Jambi, 2 Desember 2011.

⁴⁰⁴ Wawancara dengan NK (Dosen STISIP Nurdin Hamzah Jambi), Jambi, 25 November 2011.

Pembentukan Komunitas Pengagum Zumi Zola diduga sebagai upaya Zumi Zola mempersiapkan diri dalam pemilihan Gubernur tahun 2015.⁴⁰⁵ Gubernur Jambi Hasan Basri Agus sudah merasakan perang psikologis dengan Zumi Zola. Ketika duduk berdampingan dengan Zumi Zola, Gubernur Hasan Basri Agus tidak tampak saling menyapa.⁴⁰⁶

Zulkifli Nurdin dinilai mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur Jambi dengan baik. Hal ini membuat Zulkifli Nurdin dinilai tetap mempunyai pengaruh yang besar. Masih banyak pengikut yang masih mencintainya di Jambi.

Pak zul (Zulkifli Nurdin) mengakhiri jabatannya dengan *chusnul khotimah*. Tidak sedikit juga yang masih mencintai beliau. Beliau tetap menjadi tokoh jambi yang cukup berpengaruh.⁴⁰⁷

Kekuatan Zulkifli Nurdin mungkin sedikit berkurang ketika dia sudah tidak menjabat Gubernur lagi. Namun kekuatan Zulkifli Nurdin sebagai elit berpengaruh di Jambi sampai sekarang belumlah habis. Pemerintahan Hasan Basri Agus belum memberikan perbedaan yang jelas. Apabila Hasan Basri Agus gagal membangun ekonomi kerakyatan maka kekuatan Zulkifli Nurdin akan bertambah besar terutama melalui Zumi Zola.⁴⁰⁸

Masyarakat hanya bisa melupakan kekuatan dan pengaruh Zulkifli Nurdin jika berbagai kekuatan-kekuatan sosial di Jambi berhasil melahirkan pemimpin-pemimpin yang berpihak kepada rakyat dan betul-betul berjuang untuk kesejahteraan rakyat.

Sampai hari ini belum berhasil memupus Zulkifli Nurdin sebagai orang kuat. Ini (Zulkifli Nurdin) bisa hilang dari memori masyarakat ketika muncul dari semua kelompok masyarakat baik dari kelompok kecil yang nyaring, dari kelompok kampus-kampus kemudian dari pers. Kemudian dari partai politik menyiapkan kader yang kuat yang memang benar-benar *concern* mendampingi masyarakat, saya pikir (Zulkifli Nurdin) akan hilang sendiri. Persoalannya kan itu.⁴⁰⁹

⁴⁰⁵ Metro Jambi, “Zola : Saya Belum Berniat Jadi Gubernur”, diakses pada <http://www.metrojambi.com/headline/11177-zola-saya-belum-berniat-jadi-gubernur.html> tanggal 1 November 2011.

⁴⁰⁶ Kompas, “Bapak Bupati Sebutan Baru untuk Aktor Zumi Zola” diakses pada <http://entertainment.kompas.com/read/2011/04/13/11493574/Bapak.Bupati.Sebutan.Baru.untuk.Aktor.Zumi.Zola> tanggal 1 November 2011.

⁴⁰⁷ Wawancara dengan Sufardi Nurzain (Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi), Jambi, 23 November, 2011.

⁴⁰⁸ Wawancara Edi Purwanto (Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi), Jambi, 22 November 2011.

⁴⁰⁹ *ibid.*

Dibutuhkan pendidikan politik agar rakyat dapat memilih pemimpin secara rasional bukan oleh pencitraan. Rakyat juga harus dididik agar tidak bersikap apatis dan skeptis terhadap akan hadirnya perubahan. Dan itu menjadi tugas semua pihak.⁴¹⁰

⁴¹⁰ *ibid.*

BAB 5 KESIMPULAN

Dalam Bab ini membahas dua pokok bahasan. Pokok bahasan pertama mengenai kesimpulan. Sedangkan pokok bahasan kedua mengenai implikasi teori. Dalam pokok bahasan kesimpulan dijelaskan tentang beberapa kesimpulan yang diperoleh. Dalam pokok bahasan implikasi teoritis dijelaskan tentang implikasi-implikasi teoritis yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk konfirmasi dan revisi.

5.1 Kesimpulan

Berbagai daerah di Indonesia era desentralisasi menjadi arena bagi beroperasi dan bertahannya “orang kuat lokal”. Salah satunya berlangsung di Jambi era desentralisasi. Daya tahan dan kemampuan beroperasinya “orang kuat lokal” ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, “orang kuat lokal” merupakan bagian dari elit lokal yang dibesarkan secara ekonomi dan politik oleh Orde Baru. “Orang kuat lokal” mempunyai akses politik yang besar karena merupakan politisi Golongan Karya dan mempunyai akses terhadap sumber daya ekonomi di tingkat lokal karena merupakan pengusaha lokal yang bergabung dalam Gapensi.

Kedua, “orang kuat lokal” mempunyai mesin politik modern berupa jaringan kekuasaan dengan inti sebuah keluarga politik yang besar dan mempunyai sejarah panjang di tingkat lokal. “Orang kuat lokal” menempatkan keluarganya tersebut dalam jabatan-jabatan yang strategis baik di pemerintahan maupun partai politik. “Orang kuat lokal” juga membangun simbol-simbol kebesaran keluarga politik mereka dan citra diri sebagai keluarga politik yang kaya raya dan dermawan serta tidak punya kepentingan menambah kekayaan. Mesin politik modern yang berintikan sebuah keluarga politik yang besar dan mempunyai sejarah panjang di tingkat lokal juga ditunjang oleh berbagai lingkaran kekuasaan yang dibangunnya. Lingkaran kekuasaan ini terdiri dari politisi lokal, birokrat lokal, aktivis LSM lokal, aktivis ormas, jurnalis lokal dan aktivis mahasiswa dan pemuda.

Ketiga, kekuatan reformasi di tingkat lokal dalam bentuk gerakan sosial yang kuat tidak bisa berkonsolidasi dan bersatu sebagai kekuatan politik alternatif.

Kelompok ini yang sebelumnya aktif mendorong perubahan politik tidak memiliki kesiapan dalam mengisi kekuasaan politik yang ditinggalkan kelompok otoriter di tingkat lokal. Mereka dalam kondisi yang lemah dan terpecah serta memiliki berbagai keterbatasan.

Keempat, “orang kuat lokal” menjadi kelompok yang paling siap beradaptasi dengan perubahan sistem pemilihan kepala daerah di tingkat lokal. Sistem yang mereka maknai sebagai pergeseran aturan main dari penunjukan langsung Orde Baru menjadi penggunaan politik uang dan sedikit intimidasi dalam memobilisasi dukungan. Mereka juga mampu bertransformasi menjadi bagian dari kelompok reformis melalui jabatan sebagai ketua partai politik baru hasil reformasi di tingkat lokal.

Zulkifli Nurdin muncul menjadi “orang kuat lokal” di Jambi era desentralisasi. Zulkifli Nurdin merupakan keturunan langsung dari pengusaha melayu terkaya di Jambi, Nurdin Hamzah. Nurdin Hamzah tidak saja mewarisi kekayaan kepada Zulkifli Nurdin tetapi juga dengan basis politik yang kuat dan solid di Tanjung Jabung Timur. Zulkifli Nurdin berhasil membangun citra diri yang dermawan, merakyat dan reformis.

Melalui kekayaan, citra diri dan basis politik yang kuat, Zulkifli Nurdin meningkatkan kekuasaan politiknya di Jambi. Zulkifli Nurdin berhasil menjadi Ketua DPW PAN Provinsi Jambi dan terpilih menjadi Anggota DPR RI. Puncaknya Zulkifli Nurdin berhasil menjadi Gubernur Provinsi Jambi selama dua periode di era desentralisasi.

Zulkifli Nurdin menggunakan strategi politik uang dalam pemilu dan mendapatkan dukungan politik dari DPRD Provinsi Jambi. Zulkifli Nurdin juga menggunakan birokrasi pemerintah daerah untuk mengatur pejabat yang loyal, penggalangan dana dan penempatan kroni politiknya pada jabatan politik yang strategis. Serta menjadi patron dan broker kekuasaan bagi bupati/walikota dengan memberikan bantuan keuangan dan mendapatkan kompensasi pengaturan proyek-proyek pemerintah di kabupaten/kota.

Zulkifli Nurdin ketika menjabat Gubernur Jambi menerapkan model pembangunan yang pro terhadap modal dan korporasi. Akibatnya Zulkifli Nurdin mendapatkan untung dari izin pengelolaan sumber daya alam yang

dikeluarkannya. Namun model pembangunan tersebut menghasilkan konflik terutama konflik agraria dengan rakyat Jambi. Hal tersebut menambah penderitaan rakyat Jambi yang masih belum meningkat kesejahteraannya selama berlangsung reformasi dan desentralisasi.

Zulkifli Nurdin memiliki pengaruh yang besar dalam memengaruhi politik lokal di Jambi. Pengaruh tersebut diukur dari lima indikator. Pertama, Zulkifli Nurdin berhasil melakukan kontrol atas masyarakat Jambi. Kedua, Zulkifli Nurdin berhasil melemahkan gerakan sosial di Jambi. Ketiga, Zulkifli Nurdin berhasil mendapatkan dukungan dari organisasi kekerasan di Jambi. Keempat, Zulkifli Nurdin berhasil memengaruhi hasil pemilihan Bupati dan Walikota di Jambi. Kelima, Zulkifli Nurdin berhasil mendominasi Partai Amanat Nasional di Jambi.

5.2 Implikasi Teoritis

Menurut Joel Migdal (1988), “orang kuat lokal” tidak jarang menempatkan anggota keluarga mereka pada jabatan-jabatan penting. Penempatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan posisi tawar mereka dalam arena politik lokal. Dalam perkembangannya, “orang kuat lokal” juga menempatkan diri mereka pada jabatan-jabatan penting. Apa yang dilakukan Zulkifli Nurdin selama menduduki jabatan Gubernur Jambi era desentralisasi juga dilakukan oleh “orang kuat lokal” lain di Indonesia seperti Syahrul Yasin Limpo (Sulawesi Selatan), Ratu Atut Chosiyah (Banten) dan Sjachroeddin ZP (Lampung). Joel Migdal (1988) juga menyatakan “orang kuat lokal” melakukan kegiatan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sebagai bentuk pencitraan dan menerapkan simbol-simbol sebagai bentuk kontrol mereka atas masyarakat. Zulkifli Nurdin memberikan bantuan sosial karena ingin mempertahankan citra kedermawanan yang telah lama dibangun keluarga Nurdin Hamzah dan membangun simbol-simbol yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Keluarga Nurdin Hamzah di Jambi. Tidak ada penolakan dari masyarakat karena masyarakat menganggap Zulkifli Nurdin tidak menggunakan uang rakyat.

Teori John Sidel (1999) mengenai “bossisme lokal” memberikan sumbangan penting terhadap fenomena Zulkifli Nurdin sebagai “orang kuat lokal” di Jambi. Sumbangan John Sidel (1999) tersebut mengenai strategi pembelian

suara, bisnis perizinan atas eksploitasi sumber daya alam dan daya tahan multi generasi. Strategi pembelian suara dilakukan Zulkifli Nurdin dalam memenangkan dirinya, keluarganya dan kroninya dalam pemilihan kepala daerah. Zulkifli Nurdin juga mengeluarkan izin eksploitasi sumber daya alam ratusan ribu hektar ke berbagai korporasi besar. Kekuasaan Zulkifli Nurdin berhasil melakukan regenerasi dan bertahan dua generasi di Jambi. Anaknya menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur dan keponakannya menjadi Wakil Walikota Jambi.

Hal yang berbeda dari Teori ‘bossisme lokal’ John Sidel (1999) adalah Zulkifli Nurdin tidak mempunyai patron di tingkat nasional sehingga Zulkifli Nurdin bukanlah broker kekuasaan bagi elit di tingkat nasional. Zulkifli Nurdin juga tidak menjalankan aktivitas ekonomi ilegal seperti perjudian, penyelundupan dan lainnya dalam membangun kekuatan ekonomi dan politiknya. Serta Zulkifli Nurdin tidak melakukan berbagai kekerasan politik yang berwujud pembunuhan politik kepada rival-rival politiknya seperti yang marak terjadi di Filipina.

Teori Vedi Hadiz (2010) mengenai “orang kuat lokal” yang predator memberikan sumbangan penting terhadap fenomena Zulkifli Nurdin sebagai “orang kuat lokal” Zulkifli Nurdin aktif di organisasi bentukan kelompok otoriter seperti Golkar dan Gapensi. Zulkifli Nurdin juga menggunakan aparat politik dan operator politik dari aktivis organisasi seperti HMI dan GP Ansor dalam menjalankan kekuasaannya di Jambi dan merekrut banyak aktivis gerakan reformasi 98 sebagai pendukungnya. Tidak kalah penting Zulkifli Nurdin menggunakan kelompok kekerasan seperti Pemuda Pancasila dan berhasil melemahkan gerakan buruh dan gerakan petani di Jambi.

Sehingga implikasi teroris yang muncul dari fenomena Zulkifli sebagai “orang kuat lokal” adalah Zulkifli Nurdin tidak sepenuhnya menjadi “orang kuat lokal” karena Zulkifli Nurdin juga memenuhi beberapa kriteria “bossisme lokal” dan juga memenuhi beberapa kriteria “orang kuat lokal” yang predator. Fenomena Zulkifli Nurdin lebih tepat dikatakan sebagai “Kuasi-Orang Kuat Lokal”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abinales, Patricio N. 2004. *Making Mindanao : Cotabato and Davao in the Formation of Philippine Nation-State*. Manila : Ateneo De Manila University Press
- Agustino, Leo. 2010. "Dinasti Politik Pasca-Otonomi Orde Baru : Pengalaman Banten". dalam *Jurnal Prisma* Volume 29 Nomor 3 Bulan Juli
- _____ dan Mohammad Agus Yosuff. 2010. "Politik Lokal di Indonesia : Dari Otokratik Ke Reformasi Politik". dalam *Jurnal Ilmu Politik* Edisi 21
- Alamsyah, Andi Rahman. 2009. *Islam, Jawara dan Demokrasi : Geliat Politik Banten Pasca Orde Baru*, Jakarta : PT Dian Rakyat.
- Anderson, Benedict. 1988. "Cacique Democracy in the Philippines : Origins and Dreams". dalam *New Left Review* No. 169 Bulan Mei-Juni
- Aspinall, Edward. 2005. *Opposing Suharto : Compromise, Resistance and Regime Change in Indonesia*. Stanford : Stanford University Press
- _____ dan Greg Fealy (eds). 2003. *Local Power and Politics in Indonesia : Decentralisation and Democratisation*. Singapura : ISEAS.
- _____ dan Greg Fealy. 2010. *Soeharto's New Order and Its Legacy*. Canberra : ANU Press.
- _____ dan Marcus Mietzner (ed). 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia : Elections, Institutions and Society*, Singapura : ISEAS
- _____ dan Gerry van Klinken (eds), 2011. *The State and Illegality in Indonesia*. Leiden : KITLV Press.
- _____ "Elections and Normalization of Politics in Indonesia", dalam *South East Asia Research*, Volume 13 Nomor 2
- Ayoade, John A.A. 2008. "Godfather Politics in Nigeria", dalam IFES Nigeria, *Money and Politics in Nigeria*. Abuja : Petra Press
- BKPMD Provinsi Jambi. *Jambi Province and Regional Profile Investment Opportunities*. Jambi : PT Profajar Printing
- Boudreau, Vince. 2009. "Elections, Repression and Authoritarian Survival In Post-Transition Indonesia and Philippines. dalam *The Pacific Review* Volume 22 Nomor 2 Bulan Mei

- Bourchier, David dan Vedi R. Hadiz (eds), 2003. *Indonesian Politics and Society : A Reader*. London : RoutledgeCurzon
- Buehler, Michael. 2007. "Rise of The Clans : Direct Elections in South Sulawesi Show That a New Breed of Political Godfathers is Coming to Power in Indonesia's Regions". dalam *Inside Indonesia* Nomor 90 Bulan Oktober-Desember
- _____ dan Paige Tan. 2007. "Party-Candidate Relationships in Indonesian Local Politics : a Case Study of the 2005 Regional Elections in Gowa, South Sulawesi Province". dalam *Indonesia* Nomor 84 Bulan Oktober
- _____ "The Rise of Sharia by-Laws in Indonesian Districts : An Indication for Changing Patterns of Power Accumulation and Political Corruption". dalam *Journal South East Asia Research* Volume 16 Nomor 2
- Bunte, Marco dan Andreas Ufen (eds). 2009. *Democratization in Post-Suharto Indonesia*, London : Routledge.
- Case, William. 2002. *Politics in Southeast Asia : Democracy or Less*. Surrey : RoutledgeCurzon.
- Choi, Nankyung. 2004. "Local Elections and Party Politics in Post-Reformasi Indonesia : A View from Yogyakarta". dalam *Contemporary Southeast Asia* Volume 26 Nomor 2
- _____ 2007. "Indonesia's Direct Local Elections : Background and Institutional Framework", *Rajaratnam School of International Studies Singapore Working Paper*.
- _____ 2007. "Local Elections and Democracy in Indonesia : The Riau Archipelago". dalam *Journal of Contemporary Asia* Volume 37 Nomor 3 Agustus
- Creswell, John W. 2003. *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. London : Sage Publications
- Depdikbud. 1982. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jambi*, Jakarta : Depdikbud
- Erb, Maribeth, Priyambudi Sulistiyanto dan Carole Faucer. 2005. *Regionalism in Post-Suharto Indonesia*, London : Routledge
- _____ dan Priyambudhi Sulistiyanto. 2009. *Deepening Democracy in Indonesia ? : Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. Singapura : ISEAS Publishing.

- Fealy, Greg dan Sally White. 2008. *Expressing Islam : Religious Life and Politics in Indonesia*. Singapura : ISEAS
- Giustozzi, Antonio dan Noor Ullah. 2007. "The Inverted Cycle: Kabul and the Strongmen's Competition for Control Over Kandahar 2001-2006". dalam *Central Asian Survey* Volume 26 Nomor 2 Juni
- Grindle, Merilee S. 2007. *Going Local : Decentralization, Democratization and the Promise of Good Governance*. Princeton : Princeton University Press.
- Hedman, Eva-Lotta E. 2000. *Philippine Politics and Society in the 20th Century : Colonial Legacies, Post-Colonial Trajectories*. London : Routledge
- Hadiz, Vedi R. dan Richard Robison. 2005. "Neo-liberal Reforms and Illiberal Consolidations : The Indonesian Paradox". dalam *Journal of Development Studies* Volume 41 Nomor 2 Bulan Februari
- _____. 2005. *Dinamika Kekuasaan : Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. Jakarta : Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia
- _____. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia : A Southeast Asia Perspective*. Stanford : Stanford University Press.
- Harriss, John, Kristian Stokke and Olle Tornquist (eds). 2004. *Politicising Democracy : The New Local Politics of Democratization*. London : PalgraveMacmillan.
- _____. 2005. *Politisasi Demokrasi : Politik Lokal Baru*. Jakarta : Penerbit Demos, 2005
- Hidayat, Herman. 2008. *Politik Lingkungan : Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta : YOI.
- Hidayat, Syarif. 2007. "Bisnis dan Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasca Pilkada". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan (JEP)* Volume XV Nomor 1
- Jha, S.N. dan P.C. Mathur (eds). 1999. *Decentralization and Local Politics*. New Delhi : Sage Publications.
- Kawanaka, Takeshi. 1998. "The Robredo Style : The Philippine Local Politics in Transitions". dalam *Kasarinlan, A Philippine Quarterly of Third World Studies*, Volume 13 Nomor 3
- Lesmana, Tjipta. 2009. *Dari Soekarno Sampai SBY : Intrik dan Lobi Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

- Locher-Scholten, Elsbeth. 2008. *Kesultanan Sumatera dan Negara Kolonial : Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*. Jakarta : YOI
- McCoy, Alfred W. 2009. *An Anarchy of Families : State and Family in the Philippines*. Wisconsin : The University of Wisconsin University Press.
- McGlinchey, Eric. 2011. *Chaos, Violence and Dynasty : Politics and Islam in Central Asia*. Pittsburgh : University of Pittsburgh Press
- Margono, Hartono, Mujilan dan J.R. Chaniago. 1984. *Sejarah Sosial Jambi : Jambi sebagai Kota Dagang*. Jakarta : Depdikbud
- Masaaki, Okamoto dan Abdur Rozaki. 2006. *Kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasi*, Yogyakarta : IRE Press, 2006
- Mee, Cho Youn, Syafri Sairin dan Irwan Abdullah. 2005. "Kekerasan Vigilantism dalam Tatanan Sosial: Sebuah Usulan Kerangka Analisis Kekerasan dari Kasus Amerika Serikat, Afrika Selatan dan Indonesia". *Jurnal Humaniora* Volume 17 Nomor 1 Februari
- Marsh, David dan Gerry Stoker (eds). 1995. *Theory and Methods in Political Science*. London : Macmillan Press Ltd.
- Mietzner, Marcus. "Soldiers, Parties and Bureaucrats : Illicit Fund-Raising in Contemporary Indonesia". dalam *Journal South East Asia Research* Volume 16 Nomor 2
- Migdal, Joel S. 1988. *Strong Societies and Weak States : State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*. Princeton, NJ : Princeton University Press.
- _____ 2004. *State in Society*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Mukhopadhyay, Dipali. 2009. "Warlord as Bureaucrat : The Afghan Experience". dalam *Carnegie Papers Middle East Program* No.101 Bulan Agustus
- Nishizaki, Yoshinori. 2006. "The Domination of a Fussy Strongman in Provincial Thailand : The Case of Banharm Silpaarcha in Suphanburi". dalam *Journal of Southeast Asian Studies* Volume 37 Nomor 2 Juni.
- Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken (ed). 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Nurhasim, Moch (ed). 2005. *Konflik Antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan P2P LIPI

- Pangaribuan, Robinson. 1995. *The Indonesian State Secretariat 1945-1993*. Perth : Asia Research Centre Murdoch University, 1995
- Porter, Donald J. 2002. *Managing Politics and Islam in Indonesia*, London : Routledge-Curzon
- Rachman, Subhan MA. 2007. "Pergulatan Wacana Al-Quran Bergambar Kandidat Gubernur di Provinsi Jambi". dalam *Jurnal Innovatio* Volume 6 Nomor 12 , Edisi Juli-Desember
- Ryter, Loren. 1998. "Pemuda Pancasila : The Last Loyalist Free Men of Suharto's Order". dalam *Jurnal Indonesia* Nomor 66 Bulan Oktober
- Reno, William. 1998. *Warlord Politics and African States*. London : Lynne Rienner
- Robison, Richard dan Vedi R. Hadiz. 2004. *Reorganizing Power in Indonesia : The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London : Routledge, 2004
- Romli, Lili. 2007. "Jawara dan Penguasaan Politik Lokal di Provinsi Banten (2001-2006)". Disertasi Doktor, Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Schwarz, Adam. 2001. *A Nation in Waiting : Indonesia's Search for Stability*. New South Wales : Allen & Uwin, 2001
- Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. 2008. *Relief Kesejarahan dan Perjuangan Rakyat Jambi*. Jambi : Sekretariat DPRD Provinsi Jambi
- Sidel, John T. 1989. "Beyond Patron-Client Relations : Warlordism and Local Politics in The Philippines". dalam *Kasarinlan, A Philippine Quarterly of Third World Studies* 1st Quarter.
- _____ 1997. "Philippine Politics in Town, District and Province : Bossism in Cavite and Cebu". dalam *The Journal of Asian Studies* Volume 56 Nomor 4 Bulan November
- _____ 1999. *Capital, Coercion and Crime : Bossism in the Philippines*. Stanford : Stanford University Press
- Supriatma, Antonius Made Tony. 2009. "Menguatnya Kartel Politik Para Bos", dalam *Jurnal Prisma* Volume 28 Nomor 2 Oktober .
- Timberman, David G.(ed). 1998. *The Philippines New Direction in Domestic Policy and Foreign Relations*. New York : Asia Society.

- Trocki, Carl A. (ed). 2003. *Gangsters, Democracy and The State in Southeast Asia*. New York : Cornell Southeast Asian Program Publications
- Tu, Teresa. 2011. "Strongmen and Their Organizations : An Examination of Junbesh in Balakh and The Taliban in Kandahar". Tesis MA, Universitas Georgetown.
- van Klinken, Geert Arend dan Joshua Barker. 2009. *State of Authority : the State in Society in Indonesia*. Itthaca : Cornell University Press
- Vel, Jacqueline. 2005. *Pilkada in East Sumba : An Old Rivalry in A New Democratic Setting*. dalam *Indonesia* Nomor 80 Oktober.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2010. "Satu Abad Desentralisasi di Indonesia". dalam *Jurnal Prisma* Volume 29 Nomor 3 Bulan Juli
- Zulfita, Eva dkk. 1993. *Dampak Globalisasi Informasi dan Komunikasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Jambi*. Jakarta : Depdikbud

Surat Kabar

- Suara Pembaruan, 2 Maret 2005
- Jawa Pos, 28 September 2007
- Koran Tempo, 16 Oktober 2008
- Koran Tempo, 8 Agustus 2009
- Gatra Nomor 48, Kamis, 8 Oktober 2009

Laman

- www.gatra.com
- www.jambiekspres.co.id
- www.tempo.co.id
- www.inilah.com
- www.infojambi.com
- www.jpnn.com
- www.majalah.tempointeraktif.com
- www.kompas.com
- www.pelita.or.id
- www.metrojambi.com

www.tribunnews.com

www.jambiindependent.co.id

Wawancara

Wawancara dengan SS (Wartawan Tribun Jambi), Jambi, 21 November 2011

Wawancara dengan JS (Wartawan Majalah Gatra), Jambi, 21 November 2011

Wawancara dengan AK (Dosen Universitas Jambi), Jambi 21 November 2011

Wawancara dengan Rivani (Aktivis LSM Cappa Jambi), Jambi, 22 November 2011

Wawancara Edi Purwanto (Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi), Jambi, 22 November 2011

Wawancara dengan IA (Pengurus Paguyuban Masyarakat Sunda Provinsi Jambi), Jambi, 22 November, 2011

Wawancara dengan Sufardi Nurzain (Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi), Jambi, 23 November, 2011

Wawancara dengan Cornelis Buston, (Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi), Jambi, 23 November, 2011

Wawancara dengan Yasir Arafat (Ketua KPU Provinsi Jambi), Jambi, 24 November 2011

Wawancara dengan Heriyandi Roni (Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi), Jambi, 24 November 2011

Wawancara dengan Syahidan, Ketua DPRD Muaro Jambi Periode 2009-2014, Jambi, 24 November 2011

Wawancara dengan NK (Dosen STISIP Nurdin Hamzah Jambi), Jambi, 25 November 2011

Wawancara dengan Nuzul Prakasa, (Wakil Ketua DPD Golkar Kota Jambi), Jambi, 25 November 2011

Wawancara GT (Aktivis Mahasiswa), Jambi 25 November 2011

Wawancara dengan Roida Pane, (Ketua Wilayah SBSI Provinsi Jambi), Jambi, 25 November, 2011

Wawancara dengan Willy (Aktivis Petani), Jambi, 25 November 2011

Wawancara dengan H (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 1 Desember 2011

Wawancara dengan PM (Dosen Universitas Jambi), Jambi, 1 Desember 2011

Wawancara dengan Bambang Bayu Suseno (Ketua DPD PAN Kabupaten Muaro Jambi), Jambi, 2 Desember 2011

Wawancara dengan Saiful Azwar (Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi), Jambi, 2 Desember 2011

Wawancara dengan D (Pejabat Eselon III Pemprov Jambi), Jambi, 2 Desember 2011

Wawancara dengan S (Mantan Kepala Biro Setda Provinsi Jambi), 2 Desember 2011

Wawancara dengan Arifien Manap (Ketua DPD Golkar Kota Jambi), Jambi, 3 Desember 2011

Wawancara dengan MN (Tim Sukses Zulkifli Nurdin pada Pemilu Gubernur Tahun 1999), Jambi, 3 Desember 2011

Wawancara dengan Aidil (Ketua Persatuan Petani Jambi), Jambi, 3 Desember 2011

Wawancara dengan Kasmadi Kasyim (Advokat/Ketua LBH Lingkungan), Jambi, 6 Februari 2012

Wawancara dengan Paisal Kumar (Pemimpin Redaksi Jambi Independen), Jambi, 6 Februari 2012

Wawancara dengan Aldrin Ali (Panwaslu Provinsi Jambi), Jambi, 1 Maret 2012

Dokumen

Bappeda Provinsi Jambi, *Jambi Dalam Angka 2005*

Bappeda Provinsi Jambi, *Jambi Dalam Angka 2006*

Bappeda Provinsi Jambi, *Jambi Dalam Angka 2007*

Bappeda Provinsi Jambi, *Jambi Dalam Angka 2008*

Bappeda Provinsi Jambi, *Jambi Dalam Angka 2009*

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, *Peluang Industri Hilir Sawit*, 2008

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, *Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, 2009

Transkrip Wawancara (1)

Nama Narasumber : Aldrin Ali, S.Pt, M.Si
Pekerjaan : Anggota Panwaslu Provinsi Jambi
Waktu : 1 Maret 2012
Tempat : Jambi

Peneliti : **Apakah pemilihan Gubernur di Jambi marak dengan politik uang dan intimidasi ?**

Narasumber : Pilgub kapanpun dan dimanapun, jika sistemnya masih seperti ini, menurut saya tidak akan terbebas dari politik uang dan intimidasi. Maksud sistem adalah dua hal. *Pertama*, cara pemilihan yang mengeluarkan banyak biaya dan tenaga kandidat. Sosialisasi menjelang pendaftaran calon masih diyakini kandidat sebagai cara yang paling efektif untuk pencitraan agar bisa meraup suara pemilih melalui tampilan-tampilan di media cetak atau elektronik yang semua telah dibuat sedemikian rupa. Demikian juga halnya pada saat tahapan kampanye, pencitraan yang lebih dikedepankan adalah berupa apa dan siapa yang ditampilkan, bagi-bagi kaos, sarung, dan lain lain. Dan mendatangkan artis, pejabat, bukan kepada apa yang akan dijanjikan, visi, misi dan program kelak jika terpilih. *Kedua*, pendidikan pemilih yang belum mewujudkan pemilih yang cerdas dalam memilih. Berkaitan dengan *point* satu, pada akhirnya masyarakat yang juga cerdas dalam tanda kutip juga memanfaatkan momentum sosialisasi atau kampanye tersebut untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka akan selalu hadir di tiap-tiap sosialisasi kandidat manapun, harapan mereka adalah yaitu tadi, kaos, sarung, dan ada juga uang, konon sebagai pengganti uang transport. Padahal ini sudah merupakan politik uang dan karena kandidat telah mengeluarkan investasi yang cukup besar, mereka tidak segan-segan melakukan intimidasi terhadap pemilih-pemilih di pelosok atau perbatasan. Jika dibandingkan dengan pemilu di negara yang sudah modern, para pemilih tradisionalnya tidak akan ikut-ikutan, dan konsisten mengikuti kampanye kandidat mereka. Malahan mereka berkontribusi untuk kesuksesan calonnya. Alhasil dalam sistem ini telah terjadi simbiose mutualisme dari perspektif negatif lho! Kandidat butuh suara, pemilih butuh harta. Jika dikaji dari aspek hukum pemilu, maka sangatlah sulit untuk membuktikan terjadinya simbiose mutualisme ini, karena harus dibuktikan dengan dua orang saksi dan dua alat bukti. Disamping masih lemahnya payung hukum mengenai sanksinya. Nah, dalam situasi yang saling menguntungkan ini siapa sih yang mau diperkarakan? Makanya Panwaslu lebih berorientasi kepada dua hal, yaitu, *pertama* preemptif, menciptakan situasi kondisi agar pelaku

takut untuk berbuat. *Kedua* preventif, melakukan pencegahan dengan membuat pemetaan dan menjaga super ketat daerah yang berpotensi konflik. Artinya, kembali kepada pertanyaan anda, apakah ada politik uang dan intimidasi? Jawabannya adalah sama dengan maaf, kentut. Tercium baunya tapi tidak diketahui siapa pelakunya.

Peneliti : **Bentuk pelanggaran seperti apa yang sering terjadi dalam pemilihan Gubernur Jambi ?**

Narasumber : Bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran administrasi pemilu berupa pemasangan alat peraga kampanye tidak pada tempatnya. Ini sebenarnya merupakan persoalan klasik. Dalam ketentuannya pemasangan ini telah diatur di tempat-tempat khusus yang sesuai dengan peruntukan untuk pemasangan iklan atau *advertising* dan sebagainya mengacu dalam perda masing-masing daerah. Selain tempat tersebut seperti jalan protokol, pohon-pohon pelindung jalan, tiang listrik, lampu merah adalah dilarang. Namun banyak yang tidak menghiraukan. Alasannya supaya rame dan kelihatan ada ajang pemilu. Untuk pelanggaran ini, panwas sesuai ketentuan melaporkan kepada KPUD untuk menindak lanjutinya dengan cara menyampaikan kepada para calon untuk memindahkan sendiri alat peraganya. Disamping itu secara berkala juga dilakukan penertiban yang melibatkan Satpol PP. Untuk keperluan akademis, mohon maaf saya tidak memiliki data valid berupa angka pelanggaran-pelanggaran dimaksud pada pilgub 2005 atau 2010.

Peneliti : **Bagaimana netralitas PNS dalam Pemilihan Gubernur tahun 2005 ?**

Narasumber : Terkait netralitas PNS, sudah menjadi rahasia umum bahwa *event* pilgub merupakan ajang untuk mencari jabatan bagi oknum PNS. Salah satu penyebabnya menurut saya adalah sistem yang sekali lagi tidak mendukung terwujudnya netralitas tersebut. Pasalnya calon *incumbent* tidak diwajibkan untuk mundur hanya cuti. Posisi tersebut membuat PNS terutama pejabat terkooptasi oleh masih kuatnya wewenang *incumbent* tadi. Jika ingin diwujudkan netralitas PNS, maka tiada jalan lain cabut hak suara PNS sebagaimana halnya TNI atau POLRI, karena saat ini sanksi bagi PNS yang tidak netral sesuai PP yang baru hanya ringan, laporkan pada atasan. Demikian semoga bermanfaat

Transkrip Wawancara (2)

- Nama Narasumber : AK**
Pekerjaan : Dosen Universitas Jambi
Waktu : 21 November 2011
Tempat : Jambi
- Peneliti : **Bagaimana penilaian mas terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi di jambi ?**
 Narasumber : Otonomi daerah cenderung menjurus ke rasisme. Jadi sudah bergeser dengan apa yang diperbincangkan secara substansial tentang otonomi daerah. Bukannya hanya nepotisme tapi sudah ke oligarki dan feodalisme yang akut kalau untuk jambi sendiri.
- Peneliti : **Apakah dampak pilkada secara langsung bagi politik lokal di jambi?**
 Narasumber : Sangat berdampak. Politik jambi adalah politik feodal, politik kekeluargaan, politik nepotisme, yang sangat kuat jadi sangat berdampak.
- Peneliti : **Bagaimana kepemimpinan Zulkifli Nurdin secara umum sebagai Gubernur Jambi ?**
 Narasumber : Secara sosiologis kepemimpinan beliau tidak adaandingannya. Karena beliau simbol jambi. Dan faktor-faktor KKN dan feodal tetap melekat. Siapapun musuhnya tetap saja Zulkifli Nurdin tetap melaju
- Peneliti : **Artinya Sosok Zulkifli Nurdin cukup kuat dan berpengaruh di Jambi ?**
 Narasumber : Sangat berpengaruh di Jambi
 Peneliti : **Apa indikatornya ?**
 Narasumber : Kalau kita melihat Zulkifli Nurdin, kita melihat sebuah kasta pemerintahan yang simbolik. Artinya siapapun di Provinsi Jambi ini, tidak satupun yang tidak kenal sosok Zulkifli Nurdin. Dan juga melihat dari silsilahnya, memang keluarga besar Zulkifli Nurdin, sebuah simbol di Provinsi Jambi.
- Peneliti : **Kenapa Zulkifli Nurdin baru bisa muncul saat reformasi ?**
 Narasumber : Harus kita evaluasi bersama. Jadi memang sulit ditebak. Memang ada resistensi dari pemerintah pusat agar aktor-aktor seperti ini tidak muncul atau memang tidak bisa muncul atau sengaja memendam diri.
- Peneliti : **Apa cara yang dilakukan Zulkifli Nurdin dalam menguasai politik lokal di Jambi ?**
 Narasumber : Satu yang paling vital nuansa kebersamaan yang dekat sekali dengan nepotisme. Kedua sosialisasi Zulkifli Nurdin lebih luas dibandingkan calon yang lain. Ketiga sebagai pemegang dana terbesar di Provinsi Jambi ini, Zulkilfi Nurdin bisa berbuat banyak dalam tanda kutip.
- Peneliti : **Apakah kekuasaanya tidak ada tandingan ?**

- Narasumber : Siapapun musuhnya saya pikir tidak dapat menandingi Zulkifli Nurdin di Provinsi Jambi
- Peneliti : **Jambi dinilai berhasil secara ekonomi dibawah Zulkifli Nurdin dengan banyaknya investasi, apakah mas sependapat ?**
- Narasumber : Saya pikir sangat sedikit kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi yang Zulkifli Nurdin bawa. Tetapi kalau bagi para pemodal lebih dekat kepada Zulkifli Nurdin. Dan Zulkifli Nurdin lebih membuka diri terhadap hal-hal tersebut.
- Peneliti : **Apakah Zulkifli Nurdin bersih dalam menjalankan kekuasaannya?**
- Narasumber : Tidaklahlah, sampai kapanpun *money politics* tetap ada. Apalagi dengan Zulkifli Nurdin dengan *income* yang sangat besar, saya pikir itu sangat membantu.
- Peneliti : **Darimana Zulkifli Nurdin mendapatkan dukungan politik terbesar ?**
- Narasumber : Dukungan politik terbesar ya dari partai politiknya sendiri karena tanpa partai politiknya sendiri Zulkifli Nurdin bukan siapa-siapa. Kedua, Zulkifli Nurdin memang sudah populis tanpa partai politik, banyak yang mendukung Zulkifli Nurdin
- Peneliti : **Bagaimana pandangan mas terhadap kemenangan Zumi Zola di Tanjung Jabung Timur ?**
- Narasumber : Inilah sebuah bentuk oligarki lokal yang mau tidak mau harus menurunkan tahtanya. Karena sosok ayahnya lah. Sosok Zulkifli Nurdin lebih *wah* ketimbang Zumi Zola. Zulkifli Nurdin dan Keluarga Nurdin yang lebih berpengaruh ketimbang sisi selebritas. Dia takkan menang tanpa dukungan Zulkifli Nurdin.
- Peneliti : **Ada penentangan terhadap kekuasaan Zulkifli Nurdin yang dilakukan kelompok petani dan buruh, apa maknanya bagi mas ?**
- Narasumber : Pemutusan feodalisme di Jambi ini harus dilakukan mengingat demokrasi yang seharusnya terjadi semakin tersendat ketika kasta Nurdin Hamzah masih berkuasa di Jambi. Sangat signifikan ketika buruh dan petani ketika menuntut haknya.

Transkrip Wawancara (3)

Nama Narasumber : Aidil
Pekerjaan : Ketua Umum Persatuan Petani Jambi
Waktu : 3 Desember 2011
Tempat : Jambi

Peneliti : **Bagaimana pandangan abang tentang gerakan petani di Jambi selama desentralisasi ?**

Narasumber : Kalau kita melihat pergerakan petani, petani sebenarnya bergerak terus. Ada beberapa kendala dan persoalan yang dihadapi petani. Sepuluh tahun otonomi daerah tidak memberikan kemajuan positif bagi petani. Kalau kita melihat petani. Satu adalah kita melihat lahan garapan. Yang kedua arah dari tata produksi. Yang ketiga kita melihat bagaimana profesionalisme petani itu. Kita melihat tidak ada kemajuan sama sekali. Malah petani banyak yang beralih ke arah perkebunan. Terutama kelapa sawit. Padahal kalau kita cerita petani, Jambi ini gudang pangan *lho*. Tetapi kenapa Jambi harus menerima impor pangan. Desentralisasi dan otonomi daerah di Jambi menghasilkan multikonflik agraria. Multi konflik agraria disebabkan oleh konflik lahan antara perusahaan besar kehutanan dan perkebunan, ketidakjelasan arah dari tata produksi pertanian dan tidak ada kemajuan dari profesi sebagai petani. Jambi sebenarnya lumbung pangan tetapi berubah menjadi importir pangan dan perkebunan kelapa sawit besar.

Peneliti : **Bisa lebih dijelaskan konflik tersebut ?**

Narasumber : Yang paling mendasar hari ini terjadi multikonflik agraria. Tidak ada penyelesaian atas konflik yang terjadi. Sebagai contoh konflik PPJ dengan PT Wira Karya Sakti. Panjang sekali perjalanannya. Yang mana pemerintah mengeluarkan izin konsesi kepada sebuah perusahaan. Itu di dalam hutan produksi. Namun sebelum ditetapkan izin konsesi dan hutan produksi sudah ada masyarakat di sana. Ratusan tahun sebelumnya. Perusahaan membabi buta di lapangan karena perusahaan merasa memiliki lahan tersebut. Padahal izin *toh*. Masyarakat asli yang alat produksinya tanah tentu sangat dirugikan. Kita minta pemerintah mediasi. Tapi ini semua saling lempar tanggungjawab. Antara pemerintah provinsi dan pemerintahan pusat. Ini akan semakin besar. PPJ fokus berhadapan dengan PT WKS Hutan Tanaman Industri. Banyak sekali konflik dengan perusahaan, konflik di karang mendapo, konflik dengan PT Asiatic, konflik dengan PT REKI, konflik dengan PT TLS. Kalau konflik terjadi kriminalisasi terhadap petani. Padahal petani bertahan untuk hidup bukan untuk kaya. Tidak ada hutan di dalam desa tetapi hutan itu berada di dalam desa. Maksudnya masyarakat sudah

- tahu tapal-tapal batasnya hutan. Secara turun temurun itu hutan mereka. Pihak keamanan menjadi *bemper* perusahaan. Tidak ada sifat netral dari polri.
- Peneliti : **PPJ dianggap motor utama gerakan petani di Jambi dengan aksi yang melibatkan ribuan massa. Bagaimana memobilisasi sebanyak itu ?**
- Narasumber : Mobilisasi itu sebagai ungkapan kekecewaan kita atas beberapa mediasi yang dilakukan. Tahun 2008 kita ada aksi sampai empat kali itu. Tapi yang terbesarnya 17 Maret. Tahun 2010 kita aksi sekitar 12.000 massa. Tahun 2010 tujuh kali aksi. Tahun 2011 empat kali aksi. Kenapa kita aksi massa petani karena yang punya lahan kan masyarakat *toh*. Kita berulang ulang aksi karena belum ada hasil yang positif. Setiap kesepakatan selalu tidak dilaksanakan. Kita kecewa kita aksi lagi.
- Peneliti : **Bagaimana perkembangannya kemudian ? Zulkifli Nurdin mengklaim telah memberikan izin HTR kepada PPJ ?**
- Narasumber : Tidak mungkin izin konsesi sudah keluar dibuat lagi izin Hutan Tanaman Rakyat. Jadi apa yang dilakukan Zulkifli Nurdin adalah pembohongan publik.. Dicituh dulu izin konsesinya baru diberikan izin HTR. Logika. Itu saya katakan pembohongan publik. 41.000 di dalam HTI WKS dan 41.000 di luar areal HTI WKS dijanjikan. Tapi realisasinya satu jengkal pun tidak ada. Dia menjanjikan Rp.5.000.000.000. Itu hanya isapan jempol. Zulkifli Nurdin tidak komitmen dengan apa yang disampaikannya. Kita tekan kembali 2010, dia berjanji sebelum jabatannya habis, konflik PPJ dengan WKS sudah selesai. Buktinya sampai hari ini pun tidak.
- Peneliti : **Konflik tanah massif ketika Zulkifli Nurdin berkuasa atau turun ?**
- Narasumber : Ketika Zulkifli Nurdin berkuasa banyak izin-izin dikeluarkan. Akumulasinya kita rasakan sekarang. Luar biasa terjadi multi konflik. Kalau kita melihat izin terbesar WKS di jaman Gubernur Zulkifli Nurdin. Kalau yang sekarang *timpa tangga tahlilnya*.
- Peneliti : **Bagaimana PPJ menyikapi pilkada ?**
- Narasumber : Kita terlibat ruang politik itu di lima kabupaten. Alhamdulillah semua bupati yang kita dukung menang. Kita mendukung agar ada percepatan solusi atas masalah kita. Tapi ya bupati belum benar benar penuhlah membantu PPJ. Sebenarnya kita tidak percaya dengan sistem politik itu tapi kita harus masuk. Kita juga mencari cara-cara lain.
- Peneliti : **Dimana basis terkuat PPJ ?**
- Narasumber : Konflik lahan di Jambi selama desentralisasi berbanding lurus dengan izin konsesi yang diberikan kepada perusahaan. Misalnya izin konsesi paling besar di kabupaten Tanjung

Jabung Barat maka perlawanan petani pertama di daerah Tanjung Jabung Barat. Otomatis basis terkuat perlawanan petani juga di Tanjung Jabung Barat. Sehingga represi yang terberat pun didapatkan di daerah ini. Banyak petani yang meninggal ditembak aparat keamanan. Seperti yang terjadi pada konflik menyerang berdarah. Semua basis sama-sama kuat.

Peneliti : **Bagaimana komunikasi dan mediasi diantara PPJ dengan PT WKS ?**

Narasumber : Jangankan dengan kita, di forum resmi pemerintah, WKS selalu mengirim staf tidak pernah direktur utama. Datang pengacaranya. Sehingga mereka selalu berkilah saya tanya direksi dulu. *Ayam diambur tali dipijak*. Mereka melempar bola tapi tidak melepas.

Peneliti : **Sinarmas diduga melakukan politik kartel melakukan monopoli, bagaimana pendapat abang ?**

Narasumber : Sinarmas itu bandit. Lebih dari monopoli. Segala lin mereka kuasai bukan hanya HTI saja. APL bisa dirubah status oleh mereka jadi hutan produksi. Dari HP mereka langsung dapat izin konsesi disana. Seharusnya Hutan Produksi dirubah jadi APL. Masyarakat kan semakin bertambah sementara APL kan semakin menyempit. Lempar amplop atau nomor rekening saya tidak tahu.

Peneliti : **Aksi PPJ banyak yang tidak dipublikasikan koran lokal, bagaimana tanggapan abang ?**

Narasumber : Memang itu ada ya. Kalau pers lokal diredam kami menggunakan kampanye internasional. Perusahaan dengan berbagai cara meredam. Kalau dari petani mereka bisa dapat apa. *Dak* ada kan. Kalau dari perusahaan saya tidak tahu.

Peneliti : **Bagaimana dengan LSM dan gerakan mahasiswa di Jambi, apakah memberikan solidaritas atas perjuangan PPJ ?**

Narasumber : Gerakan mahasiswa di Jambi tidak terlibat dalam perjuangan petani. Mereka malah membawa isu nasional ke daerah. Sedangkan seharusnya mereka membawa isu daerah ke nasional. LSM yang peduli triple s, warsi dan walhi.

Peneliti : **Apakah PPJ mempunyai jaringan nasional ?**

Narasumber : Jaringan nasional kita API, Konsorsium Pembaruan Agraria. Untuk hukum kita ada IHCS. Untuk koperasi petani kita ada jaringan dengan Bina Desa. Untuk gerakan tani kita punya Pergerakan di Bandung

Peneliti : **Bagaimana perkembangan PPJ secara organisasi ?**

Narasumber : Kalau tata organisasi kan kita terus pembenahan. Dimana ada kekurangan kita belajar dari yang sudah. Kita tidak ada pembengkakan struktur karena masih perjuangan. PPJ ini kerja bakti pak. Kita tidak digaji. Tidak juga sanggup membayar staf. Ini perjuangan dari rakyat untuk rakyat. Kalau mau aksi ya iuran patungan. Ketua yang lama dapat

dana dari WKS. Capek sekali saya. Pemindahan areal tanah yang akan dibagi ke petani dari areal WKS dipindah ke daerah lain yang sudah ada penghuninya. Ini permainan ketua lama. Kita perbaiki manajemen. Kita konsolidasi. Baru kita tentukan peta tanah kita. Inilah permainan ketua lama dengan Zulkifli Nurdin. Ketua yang lama kalau ketemu gubernur (Zulkilfi Nurdin) ketemu sendiri. Ke jakarta sendiri. Dia itu sudah dianggap dewa apa yang dilakukan dianggap benar. Ketua yang lama dapat dana dari WKS. Kita selidiki baru ketahuan dia dapat kebun 25 hektar, kolam ikan delapan, sapi delapan. Kita dapat bukti dokumentasi dia dapat bantuan dari WKS bentuk jaring ikan. Artinya kolaborasi. PPJ sempat hampir bubar karena ketidakpercayaan anggota kepada pengurus. PPJ melakukan konsolidasi ulang selama setahun untuk membangun kembali gerakan petani jambi pasca Irmansyah. Tidak semuanya berhasil dikonsolidasikan PPJ, ada 20 % basis petani PPJ yang ikut Irmansyah.

Transkrip Wawancara (4)

Nama Narasumber : Arifien Manap
Pekerjaan : Ketua DPD Golkar Kota Jambi / Mantan Walikota Jambi Periode 1998-2008
Waktu : 3 Desember 2011
Tempat : Jambi

Peneliti : **Kapan bapak tertarik politik dan bagaimana perkembangan karir politik bapak ?**

Narasumber : Saya jadi Pegawai Negeri sudah lama, tahun berapa ya. Saya jadi sekretaris Golkar tahun 1992. Waktu itu Ketuanya Jenderal Chaerun. Saya sudah menentukan calon-calon untuk pemilu. Saya tamat kuliah tahun 1976 terus jadi Pegawai Negeri. Saya mengawali karir sebagai staf di Biro Pembangunan Kantor Gubernur tahun 1980. Kepala Bironya Pak Sitanggang. Dia yang mengajari saya politik. Mendidik saya. Kemudian saya megang organisasi seperti Karate. Sudah itu aktif di organisasi Pemuda Panca Marga. Dari situlah saya diperhatikan. Diminta. Dulu kan main tunjuk. Kalau Gubernur setuju, itulah. Saya diminta menjadi sekretaris Golkar Provinsi tahun 1992-1997. Ketuanya Brigjend Chaerun. Jenderal kan Golkar semua. Posisi birokrat saya Kabag, Kepala Bagian di Kantor Gubernur. Saya ikut KNPI, di KNPI saya Wakil Ketua. Di Pemuda Panca Marga saya juga Wakil Ketua. Dulu anak veteran dapat kemudahan. Dulu kan danrem ikut menentukan. Dari situlah saya mulai meniti karir politik. pemilu 1992 saya ikut mengatur dan menyusun calon. Pemilu 1997 masih sekretaris. Saya calonkan diri jadi DPR RI. Masuk saya. Tahun 1998 pertengahan saya ditelpon-telpon untuk *nyalon* walikota. Waktu itu Golkar sudah punya calon. Pak Chalik Saleh. Dan yang sekarang wakil bupati merangin, HBH. Dia dapat 1 suara. Chalik Saleh dapat 14 suara. Saya dapat 21 suara. Keluarga saya (Keluarga Abdul Manap), keluarga besar di Jambi. Jadi anggota DPRD banyaklah keluarga saya. Suara Golkar banyak lari ke saya padahal diplot Chalik Saleh. ABRI dan PPP ke saya. PDI juga ke saya. Perintah Danrem dukung saya.

Peneliti : **Bagaimana hubungan Bapak dengan Zulkifli Nurdin ?**

Narasumber : Kalau hubungan politik dengan Zulkifli Nurdin baik-baik saja. Saya anggap baik saja. Pokoknya bagaimana dia dulu saya anggap begitu saja. Kalau politik kita berbeda pandangan tidak dapat disatukan. Waktu itu ada gejolak politik antara saya dengan gubernur. Banyaklah permasalahan yang timbul. Termasuklah masalah keluarga. Karena saya dengan dia itu apa, adiknya dia itu istri saya. Adiknya meninggal, mulai itu. Saya kan tiga tahun menduda,

saya kawin lagi. *Nah* disitu rusak sudah hubungan. Dia membuat Pergub tidak boleh membangun diatas dua tingkat. Kota macam apa itu yang cuma dua tingkat. Saya izinkan bangun abadi suite 11 tingkat. Gubernur bikin waterboom 80 miliar. Saya tanya ke hotel abadi yang sudah bikin waterboom berapa biayanya. Mereka bilang 8 miliar. Untuk perbandingan dengan Gubernur punya, saya izinkan pembangunan waterboom hotel abadi. Saya mau tunjukkan ini *lho* 8 miliar.

Peneliti : **Mengapa bapak tidak mencalonkan diri menjadi Gubernur tahun 2010 ?**

Narasumber : Umur saya sudah 64, saya pikir kalau mau keliling Provinsi Jambi saya tidak sanggup. Kasihlah yang muda-muda ini. Kita dukung sajalah. Kebetulan bekas sekda saya yang jadi Gubernur ini. Saya promosikan dia dari sekda jadi wagub tapi nasib belum ada. Nasibnya bukan wagub tapi gub.

Peneliti : **Anda sering berkoalisi tetapi sering juga berseberangan dengan Zulkifli Nurdin ?**

Narasumber : Itulah yang namanya politik. Kadang berteman, kadang berlawanan. Kita cakar-cakaran biasa karena untuk kepentingan partai. Tidak bisa kita harus mengekor sama dia. Dia merasa besar, kita juga merasa besar.

Peneliti : **Mengapa Pak Zoerman bisa bekerjasama dengan baik dengan Gubernur Zulkifli Nurdin waktu itu dengan menghasilkan banyak program walaupun mereka berbeda partai ?**

Narasumber : Ada faktor kepentingan menurut saya. Bagaimana cara merangkul aja. Sama saja. Seperti saya merangkul dewan dulu. Mungkin merangkulnya baru setengah.

Transkrip Wawancara (5)

Nama Narasumber : Bambang Bayu Suseno
Pekerjaan : Ketua DPD PAN Kabupaten Muaro Jambi/Anggota DPRD Provinsi Jambi
Waktu : 2 Desember 2011
Tempat : Jambi

Peneliti : **Bagaimana penilaian bapak terhadap perjalanan PAN sejak reformasi hingga sekarang di Provinsi Jambi ?**

Narasumber : Kalau perjalanan PAN di Provinsi Jambi mengalami perubahan yang luar biasa. Artinya dari produk legislatif. Di Pemilu tahun 1999, tiga orang anggota dprd provinsi dari empat puluh lima orang. Pemilu tahun 2004, kita menjadi delapan orang dari empat puluh lima juga. Dan pemilu tahun 2009, kita tetap delapan orang dari empat puluh lima anggota. Artinya dengan sistem nomor urut dan sistem suara terbanyak *survive* lah. Artinya memang ada beberapa hal yang membuat PAN melejit di Jambi. Pertama kali berdiri kan partai melihat figurnya dulu. Kita dikontrol figur Amien Rais di pusat. Kemudian ada figur lokal. Kebetulan gubernur pertama pasca reformasi itu ketua PAN Zulkifli Nurdin. Sebenarnya ini titik balik kebesaran PAN. Bukan hanya gubernur saja Ketua PAN ini mempunyai *track record* keluarga yang menjadi perhitungan. Memang inilah figur sentral ini. Dengan kepiawaian beliau kita jadi delapan di pemilu 2004. Ketikapun 2009 kita tetap delapan. Itulah perkembangan PAN di Provinsi Jambi.

Peneliti : **Apakah terjadi perbedaan ketika Pak Zul digantikan adiknya Hazrin Nurdin menjadi Ketua DPW PAN Provinsi ?**

Narasumber : Sebenarnya dari sisi sistem sama saja. Dari pak zul ke pak hazrin. Toh perubahan ini dari kakak ke adik. Kemudian *track record* keluarga. *Track record* jaringan. Ditambah kegiatan partai yang memenuhi keberpihakan kepada masyarakat. Kita kombinasikan itu. Figur dengan program.

Peneliti : **Apa manfaat yang diperoleh PAN dengan terpilihnya Zulkifli Nurdin menjadi Gubernur Jambi dua periode ?**

Narasumber : Terpilihnya beliau maka konsolidasi kekuatan-kekuatan partai kita himpun ketika pak zul jadi gubernur. Basis sudah ada. Kerja konsolidasi yang dilakukan Pak Zul ada terasa perubahan organisasi. Ada gairah. Jadi melalui survei pun kita menyadari popularitas Zulkifli Nurdin melebihi popularitas partai. Pak Zulkifli Nurdin mempunyai sesuatu yang kita bisa manfaatkan. Dalam tanda kutip.

Peneliti : **Mengapa pada Pilgub tahun 2005, PAN berkoalisi dengan Golkar ?**

- Narasumber : Berkoalisi dengan Golkar dalam Pilgub itu hitung-hitungan politik. Kita harus mengakui waktu itu Golkar pemenang pemilu. Maju sendiri pun kita siap. Komunikasi kita dengan Golkar pun baik.
- Peneliti : **Banyak prolegda yang lolos ketika itu ?**
- Narasumber : Nuansa di DPRD dinamislah hubungan kita di DPRD. Terkadang pasang surut juga. Namanya politik, kepentingan lah yang menyatukan orang kan. Dulu banyak yang kader yang *dak* mau berpasangan dengan Golkar. dipasang dengan sandal jepit *aja* menang. Cuma Gubernur ingin jangan bertengkar
- Peneliti : **Bagaimana Demokrat bisa merubah peta politik Jambi tahun 2009 ?**
- Narasumber : Demokrat beda tipis dengan PAN. Sama-sama delapan kursi DPRD dan dua kursi DPR RI. Demokrat menang suara di DPRD, kita menang di suara DPR RI. Perbedaan di DPRD sekitar 9.000 suara. Perubahan konstelasi. Keputusan jago a dan jago b dari pusat. Dan ternyata jago kita kalah. Ada perubahan-perubahan besar. Pak zul bukan Ketua PAN lagi walaupun masih orang PAN Kita jadi di luar sistem kan. Gubernurnya Ketua Demokrat. Ketua DPRD nya Sekretaris Demokrat. Jujur kita mengakui menggunakan jalur pemerintahan untuk konsolidasi partai. Ketua PAN yang jadi Gubernur, ketika kunjungan ke kabupaten tentu Bupati nya yang sibuk karena bupati nya orang PAN. Kita juga sudah konsolidasi menyusun kekuatan. Kota ada Wakil Walikota, Ketua PAN. Tanjab Timur ada Zumi Zola, Bupati, Ketua PAN. Sinwan, Wakil Bupati Batang Hari, Ketua PAN. Muaro Jambi saya, saya turun. Sarolangun, Cek Endra tetap orang PAN, tetap dia. Konsisten. Ketua DPRD nya orang PAN. Akhirnya Muaro Jambi terpaksa sembarangan saja. Untuk mengisi kekosongan Muaro Jambi saya turun memimpin Muaro Jambi.
- Peneliti : **Bagaimana Zumi Zola bisa menang dalam pilkada Tanjung Jabung Timur ?**
- Narasumber : Kalau zumi zola sudah kita prediksi menang. *Haqul yakin* percaya diri. Saya percaya 2015 nanti melawan HBA pun menang Zumi Zola. Anggap saja ada tiga pasang calon pun. Masih Zumi Zola. Pilkada melihat figur. Bahasa tubuh orang bisa tahu. Orang nya sopan, cium tangan, ganteng, cewek-cewek histeris. Bahasa inggrisnya bagus. Cuma seandainya Isroni nomor satu, Juber nomor dua, nah itu berat. Juber orang Bugis, Isroni orang Jawa. Suara Bugis pecah.
- Peneliti : **Bagaimana dengan peluang Sum Indra dalam pemilihan Walikota 2013 ?**
- Narasumber : Dari jauh hari sudah mempersiapkan diri untuk sosialisasi karena *dak* ada kerjaan yang dikasih Pak Bambang. Waktu

pertama kali dilantik jadi Wakil, masa *ngurusin* sampah.
Makan hati jadi wakil.

Transkrip Wawancara (6)

Nama Narasumber : **Cornelis Buston**
Pekerjaan : **Wakil Ketua DPD Demokrat Provinsi Jambi**
/Pengusaha Pemilik Serasan Group Jambi
Waktu : **23 November 2011**
Tempat : **Jambi**

Peneliti : **Bagaimana pandangan bapak tentang perkembangan Jambi selama desentralisasi ?**

Narasumber : Otonomi ada plus minus ada kebaikan ada keburukan. Kalau perekonomian cukup membaik cukup signifikan. Semenjak otonomi daerah digulirkan. Kalau segi politik ya terlalu bebas saya lihat. Sehingga kurang terkontrol. Sehingga perlu perubahan sedikit undang-undang pemilu. Kalau provinsi tidak masalah tapi bagi kabupaten banyak *mudharatnya* daripada manfaatnya. Secara umum yang dipilih pun belum tentu lebih baik oleh rakyat. Karena rakyat memandangnya dengan kaca mata yang berbeda. Orang terlalu muda menjadi bupati. Orang kaya menjadi bupati. Belum tentu dia mampu kita lihat begitu ya. Karena pandangan masyarakat belum tentu baik. Beda dengan negara maju.

Peneliti : **Apa beda kepemimpinan Zulkifli Nurdin dengan Abdurahman Sayuti ?**

Narasumber : Banyak sekali perubahannya sangat signifikan. Dari pak sayuti ke pak zul. Kalau pak sayuti masih terfokus belum ada otonom. Masih terfokus semuanya di pusat pemerintahan. Jambi jauh berbeda karena pengaruh otonomi daerah. Pada zaman pak abdurahman sayuti pembangunan semua terpusat dari pusat. Banyak perubahan yang signifikan. Walaupun banyak juga kekurangannya biasalah kan manusia. Pak Abdurahman Sayuti itu kan sangat birokrasi. Gaya kepemimpinannya berbeda. Lebih *low profile*. Dia kan dari swasta. Pengusaha kan. Yang sangat terasa dari saya itu.

Peneliti : **Apa keberhasilan Zulkifli Nurdin menurut anda ?**

Narasumber : Pembangunan Kantor Gubernur. Batang hari 2. Semua pengusaha diajak terutama kita yang di dalam Kadin. Untuk membantu beliau dibidang pembangunan di Provinsi Jambi ini

Peneliti : **Bagaimana pandangan anda terhadap dua keluarga yang dominan di Jambi ?**

Narasumber : Di jaman Pak Zul memang muncul ada dua keluarga politik dominan. Terasa itu. Nah ketika Pak HBA berkuasa itu mulai menurun. Justru sekarang ini ada tiga. Zoerman Manap dengan Golkarnya. Zulkifli Nurdin dengan PAN nya dan kita dengan Demokratnya.

Peneliti : **Apa strategi menghadapi dua keluarga yang dominan tersebut ?**

- Narasumber : Cara kita mengimbangi kedua keluarga politik tersebut dengan mengambil hati rakyat. Dengan program pro rakyat seperti yang dilakukan oleh pemerintah sekarang.
- Peneliti : **Bagaimana pandangan Bapak melihat kemenangan Zumi Zola di Tanjung Jabung Timur ?**
- Narasumber : Kemenangan zumi zola tidak perlu diragukan lagi. Karena bapaknya punya jasa yang besar sekali terhadap tanjung jabung timur. Yang selama ini 3 jam lebih sekarang ke tanjung jabung cuma satu jam. Saya kira itu wajar sekali. Hadiah untuk bapaknya. Anaknya bisa mengabdikan disana. Justru kalau dia kalah itu aneh.
- Peneliti : **Bagaimana Bapak melihat peluang Zumi Zola sebagai kompetitor HBA dalam Pilgub 2015 ?**
- Narasumber : Kita tidak mengantisipasi zumi zola. Terus terang saja. Kita tidak menghalangi seseorang. Silahkan. Kita bersaing. Dia berbuat baik. Kita juga begitu. Kita berkarya. Mencuri hati rakyat.

Transkrip Wawancara (7)

- Nama Narasumber : D**
Pekerjaan : Pejabat Eselon III Pemerintah Provinsi Jambi
Waktu : 2 Desember 2011
Tempat : Jambi
- Peneliti : **Pertumbuhan ekonomi Jambi meningkat selama otonomi daerah dan desentralisasi, bagaimana itu terjadi ?**
 Narasumber : Kita itu ada satu sektor yang *brand new*. Dari nol maka pertumbuhannya akan *bregg* segitu. Medan, Pekanbaru dan Palembang investasi sudah besar. Pertumbuhan satu persen saja coba hitung angka mutlaknyanya. Dia naik satu persen tapi investasi sudah trilyunan dibandingkan kita sepuluh persen dari nol. Sosial kita belum cukup kuat. PR kita menggeser tenaga kerja sektor pertanian menjadi sektor sekunder dan tersier.
- Peneliti : **Kenapa ?**
 Narasumber : Dari tiga juta penduduk jambi, satu koma empat juta petani. Apabila supaya hidup layak dibutuhkan dua hektar maka dibutuhkan dua koma delapan juta hektar. Empat koma sembilan juta hektar, dua koma dua juta hektar hutan lindung. Sisa dua koma tujuh juta hektar. Kurangi danau, sungai, lereng, jalan. Katakanlah tiga ratus ribu hektar. Sisa dua koma empat juta hektar. Kurangi sembilan ratus ribu untuk izin kelapa sawit. Sisa satu koma empat juta hektar. Berbagilah petani disitu. Permintaan lahan masih tinggi. Akibatnya konflik. Rebutan lahan. Sekarang kan sudah keliatan.
- Peneliti : **Dibandingkan periode ketika Abdurahman Sayut berkuasa, bagaimana pertumbuhan ekonomi di Jambi ?**
 Narasumber : Medio 2000-an baru ada investasi di Jambi. Mulai ada investasi. Investasi di sektor perkebunan.
- Peneliti : **Jadi Zulkifli Nurdin berhasil mengembangkan investasi di Jambi ?**
 Narasumber : Kalau mau dilihat dulu Gubernur gelarnya Gubernur *MoU*. Terlalu banyak *MoU* tapi tidak menarik. Susah mengejar investasi baru karena yang lama *udah gak bener*. Coba lihat ini trendnya tinggi terus. Sektor primer yang berhubungan dengan lahan kan masih tinggi pertumbuhannya. Permintaan lahan masih tinggi akibatnya konflik. Konflik sosial. Rebutan lahan. Sekarang kan sudah keliatan. Tujuh puluh persen petani dari dua juta tenaga kerja. Jumlah tujuh puluh persen akan berubah menjadi sekitar tujuh puluh lima persen ditahun mendatang. Petani adalah kekuatan politik.
- Peneliti : **Ada ledakannya nanti ?**
 Narasumber : Iya. Dari jamannya Soeharto, petani adalah kekuatan politik.

- Peneliti : **Bagaimana postur modal di Jambi ? Mayoritas di sektor apa ?**
- Narasumber : Primer. Sektor primer. Investasi terbesar dari sektor primer luar Jambi. Paling besar kelompoknya Bakrie. Sinar Mas penguasa hutan dan perkebunan. Menguasai lahan tiga ratus ribu hektar. Sinar Mas ada dibelakang WKS. WKS membentuk kartel. Sektor primer secara keseluruhan dan secara umum kita dinikmati oleh Singapura. Sektor perkebunan kita tidak dapat mendapat nilai tambah yang banyak. Ujung Jabung sudah disiapkan menjadi kawasan ekonomi tapi karena Gubernur merasa Bupati saingannya maka rencana tersebut tertunda. Bukan potensial lagi sudah diambang mata.
- Peneliti : **Bagaimana Zulkifli Nurdin menjalankan kekuasaannya ?**
- Narasumber : Zulkifli Nurdin betul-betul *individual one man show*. Pintarnya dia, dia gak pernah merecoki SKPD. Dia hanya satu SKPD yang direcoki, Dinas PU. Dalam Dinas PU tidak semuanya, dia hanya tau Nino.
- Narasumber : Siapa sangka eksploitasi batubara besar-besaran terjadi di tahun 2009. Pertumbuhan ekonomi Jambi *booming* karena dari nol. Padat modal itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi melejit. Pertumbuhan kompensasi. Itu tidak berkorelasi dengan penambahan tenaga kerja. Karena tenaga kerja Provinsi Jambi masih mengandalkan sektor pertanian. Sektor pertanian *unskil labour* ketika masuk ke industri kalah mereka. Ya disingkirkanlah. Filter itu sudah terjadi di investasi. Banyak pekerja migran. Kita tidak mampu meredam gejolak sosial nantinya. Makanya Jambi harus masuk fase industrialisasi. Tetapi tidak memindahkan pabrik Blackberry kesini. Kita punya *raw material* yang tinggi seperti karet tapi kita hanya bisa produksi panel-panel karet. Sudah berpuluh tahun kita hanya produksi lateks. Lahan yang luas ini hanya mempekerjakan sedikit orang. 70 % petani yang hanya menghasilkan 20 % PDRB.
- Peneliti : **Apakah Zulkifli Nurdin kuat dalam menjalankan kekuasaannya ?**
- Narasumber : Prolegda lebih mudah lolos. Karena yang dulu tahu dia kuat. Kalau dulu hanya mengeluarkan 500 juta untuk mengesahkan sebuah ranperda. Kalau sekarang 1 milyar lebih. Dulu ada satu dua yang ribut-ribut tapi kalau duit *besak* aku *dak* mau. Soewarno Soerinta bukan main *bacotnya* dikasih sepuluh juta beres kalau sekarang. Dulu ada mekanisme menjatuhkan sekarang sudah tidak ada harusnya lebih kuat sekarang. LKPJ mau diterima atau tidak ada masalah. Kalau sekarang tidak.
- Peneliti : **Apa contoh keberhasilan kepemimpinan sepuluh tahun Zulkifli Nurdin ?**

- Narasumber : Batanghari II dimulai 2003 selesai 2008 atau 2009 itu salah satu keberhasilan Zulkifli Nurdin. Tapi banyak juga penyimpangannya.
- Peneliti : Mayoritas masyarakat Jambi apatis hanya heboh kalau mau pemilukada. Yang kritis banyak orang Batak tapi ujungnya paket juga.

Transkrip Wawancara (8)

Nama Narasumber : **Edi Purwanto**
Pekerjaan : **Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi/Pengusaha**
Waktu : **22 November 2011**
Tempat : **Jambi**

Peneliti : **Bagaimana penilaian PDI P terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Jambi terutama dalam dua periode kepemimpinan Zulkifli Nurdin ?**

Narasumber : Ya saya lihat sih sebenarnya. Otonomi daerah itu bagaimana distribusi kekuasaan terjadi dan daerah itu dapat berkembang dengan baik. Kita melihat memang selama Pak Zul memimpin belum banyak kemajuan yang signifikan. Karena mengelola negara kan juga mengelola rakyat. Bagi PDI Perjuangan bagaimana pemimpin itu bisa konsentrasi kepada ekonomi kerakyatan. Karena ekonomi mikro itu yang harus jadi sektor utama. Proyek patin jambal dan replanting karet masih bias implementasinya. Tidak dipikir panjang sebuah program dirancang. Masyarakat disuruh menebang karetnya terus diganti dengan karet baru, terus rakyat makan apa ?. Itu yang tidak terselesaikan dengan pemerintah jambi ketika itu. Sehingga program itu relatif tidak berjalan dengan maksimal. Jadi program-program yang diciptakan itu banyak yang instan. Sehingga uang rakyat yang didistribusikan itu yang nyata tidak kelihatan. Kedua memang politik yang dibangun oleh Pak Zul ketika itu adalah politik pencitraan. Dia memang kelebihannya dekat dengan masyarakat. Misal menyumbang Masjid, sumbang Gereja. Sumbangan yang bukan fisik. Yang menurut kita bukan melatih masyarakat kemandirian tetapi melatih masyarakat dengan manja. Trend itu diikuti. Sehingga sangat tinggi *cost* kita untuk menjadi bupati dan menjadi seorang gubernur. Tokoh yang punya visi bagus untuk Provinsi Jambi tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak punya uang. *Mind set* masyarakat seperti ini yang harus kita rubah. Mohon maaf dari sepuluh bupati terbaik di Indonesia, tujuh adalah kader murni PDI P. Karena Bung Karno berharap dengan trisaktinya itu. Kemandirian di bidang ekonomi. Hari ini kan belum berjalan. Empat puluh juta rakyat miskin di Indonesia termasuk juga di Jambi sangat tinggi. Tidak ada perubahan signifikan membangun ekonomi kerakyatan.

Peneliti : **Artinya tidak ada perubahan yang berarti ?**

Narasumber : Ya biasa-biasa saja tidak ada terobosan yang signifikan membangkitkan ekonomi kerakyatan.

Peneliti : **Tetapi mengapa Zulkifli Nurdin dapat terpilih kembali, bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi ?**

- Narasumber : Karena memang dia suka bertemu masyarakat. Dipilih kembali karena dia suka bertemu dengan masyarakat dengan modal ekonomi memberikan bantuan ini bantuan itu. Masyarakat melihat fenomena yang berbeda. Dulu-dulu *dak* ada orang seperti ini. Ada orang dermawan. Kedermawanan itulah yang membuat masyarakat memilihnya kembali. Bukan pada tataran program tetapi pada tataran emosional. Ini bagus pemimpin dengan rakyat dekat *cuman* bukan kedekatan tatap muka melainkan melihat kondisi riil masyarakat, yang miskin, yang tidak mampu, menjadi kajian beliau dalam menentukan program sehingga kesejahteraan rakyat meningkat.
- Peneliti : **Mengapa dengan mudah Zulkifli Nurdin menguasai politik lokal di Jambi ?**
- Narasumber : Pendidikan politik masyarakat kita masih rendah. Dengan cara dia lakukan melalui media. Politik pencitraan yang dilakukan. Mengaburkan semua. Masyarakat tidak tahu. Masyarakat juga apatis. Dari dulu juga saya begini. Jalan rusak ya tetap rusak. Masyarakat memilih dia karena dia mudah ditemui masyarakat. Dia sering bertemu masyarakat. hanya sebatas itu. Problem-problem riil kan banyak. Mengapa tidak menyelesaikan konflik lahan masyarakat dengan perusahaan. Sampai hari ini kan tidak jelas mana yang selesai. WKS dengan HGU nya 600.000 hektar. HGU nya seratus tahun tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai petani meninggal pun tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kan masyarakat bertanya-tanya ada permainan apa. Katanya pro masyarakat ketika masyarakat menghadapi problem riil, pemerintah provinsi tidak bisa berbuat apa-apa. *Gak* ada yang tidak bisa diselesaikan. Komitmen mau apa *nggak*.
- Peneliti : **Sehingga PDI P di Jambi menjadi oposisi ?**
- Narasumber : Sebenarnya kami bukan oposisi tetapi kami di luar pemerintahan. Kita hanya penyeimbang. Kita melihat belum ada terobosan seperti yang dicita-citakan pahlawan kita. Pahlawan kita menginginkan apa ? kesejahteraan, kemerdekaan. Kemerdekaan yang hakiki tujuan negara kita. Tujuan negara melindungi. Apakah rakyat sudah terlindungi. Yang terjadi monopoli-monopoli kapitalis.
- Peneliti : **Apa kelebihan Zulkifli Nurdin sehingga bisa mengalahkan elit-elit lain di Jambi ?**
- Narasumber : Dia bisa mengalahkan elit lain karena modal ekonomi yang luar biasa. Politik kita sudah condong kesana. Siapa yang punya uang banyak akan berkuasa. Program nomor sekian. Yang penting dia kaya, dia gagah, dia dekat kita, dia bantu kita. Itu kita pilih. Itu *mind set* masyarakat. paradigma yang lambat laun harus kita rubah. Kalau paradigma ini jalan terus hancurlah bangsa kita.

- Peneliti : **Kenapa hampir tidak ada yang mengkritisi kebijakan Zulkifli Nurdin selama berkuasa ?**
- Narasumber : Karena di pola pendekatannya, dia melakukan pendekatan kepada beberapa elit-elit *NGO*. Mohon maaf bisa mengendalikan LSM. Meninabobokan teman-teman kita di jalanan. Ada kongkow-kongkow bareng. Ngobrol bareng. Mungkin ada tetapi kecenderungan seperti itu. Minta bantuan mudah. Sehingga tidak muncul gebrakan-gebrakan yang besar. Itu yang dilakukan pak Zulkifli Nurdin. Kalau soal pendekatan pak Zulkifli Nurdin tidak ada duanya. Sebagian elit LSM yang melakukan perjuangan advokasi ketemu dengan itu selesai dengan fasilitas. Habis itu terlupakan lagi. Elitnya berkompromi untuk kepentingan pribadi. Perjuangan yang melibatkan sekian ribuan orang sia-sia. Tidak ada perjuangan yang tulus. Riak-riak ada habis itu hilang. Saya takut kalau ini berlanjut *trust* masyarakat tidak ada.
- Peneliti : **Jadi bisa dikatakan Zulkifli Nurdin orang kuat lokal di Jambi ?**
- Narasumber : Saya setuju. Dia bisa kita sebut orang kuat. Anaknyanya kan jadi bupati. Menurut masyarakat dia tokoh yang kuat. Kemudian keponakannya menjadi wakil walikota. Kemudian ketokohnya di daerah-daerah masih sangat dihormati dan disegani. Untuk provinsi jambi, Zulkifli Nurdin merupakan tokoh sentral yang kuat.
- Peneliti : **Apakah kekuasaannya masih kuat ketika tidak menjabat Gubernur ?**
- Narasumber : Setelah tidak menjabat Gubernur, kekuatannya pasti berkurang ya. Tetapi bukan berarti tidak ada. Tergantung gubernur yang baru apakah bisa membuat masyarakat menilai memberikan sesuatu yang lebih ke ekonomi kerakyatan. Mampu *gak* HBA sepperti itu. Ya sama saja kalau tidak mampu. Dia akan tetap kuat.
- Peneliti : **Apakah Gubernur yang baru mampu menghapus Zulkifli Nurdin sebagai orang kuat di Jambi ?**
- Narasumber : Sampai hari ini belum berhasil memupus Zulkifli Nurdin sebagai orang kuat. Sampai hari ini. Ini bisa hilang dari memori masyarakat ketika muncul dari semua kelompok masyarakat baik dari kelompok kecil yang nyaring, dari kelompok kampus-kampus kemudian dari pers. Kemudian dari partai politik menyiapkan kader yang kuat yang memang benar-benar *concern* mendampingi masyarakat, saya pikir akan hilang sendiri. Persoalannya kan itu.
- Peneliti : **Bagaimana PDI P mengantisipasi orang kuat lokal ini ?**
- Narasumber : PDI P lagi *concern* melakukan pengkaderan. Kita akan *talent scouting* mencari pemimpin-pemimpin yang berbakat dari desa yang akan kita kumpulkan. Saya pikir akan terlupakan itu. Yang penting dibutuhkan kerja sistemik sebuah organisasi. Melakukan pengkaderan. *Mind set* masyarakat

- sedikit demi sedikit dirubah. Harapan kita orang kuat si a si b sudah tidak ada. Harapan kita supaya pragmatisme politik, *money politics* lambat laun akan hilang di masyarakat. PDI Perjuangan sadar betul.
- Peneliti : **Ada tulisan yang menyatakan Zulkifli Nurdin melakukan money politics dan intimidasi, bagaimana pandangan PDI P ?**
- Narasumber : Bukan hanya Zulkifli Nurdin yang melakukan itu bupati-bupati juga condong melakukan itu. Ada anekdotnya kalau kamu mau menang, kamu banyak uang. Kamu jadikan preman-preman tim sukses kamu. Untuk melakukan intimidasi. Bagi PDI P politik seperti itu diharamkan. Tidak *fair play*. Merebut kekuasaan dengan cara tidak konstitusional. Politik itu kan siapa mendapat apa dan bagaimana. Yang bagaimana nya itu. Menghalalkan segala cara. Undang-undang itu kan formalitas. Hiasan belaka. Undang-undang kan dibuat untuk dilanggar. Merebut kekuasaan dan intimidasi. PDI P bertekad tidak akan melakukan itu. Kita menangis bersama rakyat, kita tertawa bersama rakyat.
- Peneliti : **Bagaimana PNS dibawah kepemimpinan Zulkifli Nurdin, apakah profesional atau partisan ?**
- Narasumber : PNS mau *gak* mau ketika *incumbent* maju mau *gak* mau dia dapat tekanan untuk mengamankan suaranya. Karena sekarang kepala dinas condong menjadi kepala dinas transaksional. Siapa yang berinvestasi politik itulah yang akan menjadi kepala dinas. Perlu dibuat regulasi yang tegas dan mengikat untuk menjaga netralitas PNS. PNS dinyatakan terlibat kalau ada sk nya sebagai tim. Kan *gak* bisa. Itu kan sangat normatif. PNS yang tertangkap tangan menyebarkan akan dipecat misalnya kan itu kan jelas. Jangan dirusak PNS kan birokrasi. Sementara kan kita ada semangat reformasi birokrasi. Tapi kita juga dengan pilkada mengkaburkan demokrasi. Ada pangkat naga bonar. Jenjang karirnya *gak* jelas lagi gitu. Golongan 4b dipimpin oleh 4a. Bahkan ada golongan 4a dipimpin 3c. Baperjakat bekerja dengan tidak baik. Karena kekuasaan semuanya ditangan Gubernur. *Money politics* pun rendah sekali hukumannya. Kurungan enam bulan, dibawah satu tahun. Sangat sangat ringan sekali. Terus kamu siapa ? saya pribadi pak. Nah kan terputus calonnya. Yang ngasih memang tim sukses, calonnya tidak tersentuh. Harusnya siapapun calonnya tim sukses didis juga. Jadi ketika anda *money politics* anda didis. Selesai. Regulasi itu yang harus dibuat serius. PDI P partai wong cilik yang benar-benar mengandalkan kader. Kita tidak punya uang dan televisi.
- Peneliti : **Bagaimana peluang Sum Indra menjadi Walikota Jambi tahun 2013 ?**

- Narasumber : Kota ini kan agak dinamis. Waktu yang satu tahun delapan bulan ini masih bisa dimanfaatkan untuk konsolidasi. Sum Indra ada peluangnya. Tapi belum tentu dia jadi. Walaupun sekarang animo masyarakat ke dia lebih tinggi. Tapi kan waktu pak bambang priyanto menang kan waktunya juga gak banyak. Cuma 8 bulan. Dan menang. Artinya ada tokoh baru yang menjanjikan masyarakat bisa menang. Kami PDI P lebih condong ke kader sendiri. Karena partai wadah untuk mengkader orang. Siap menjadi pemimpin. Tapi kita kan juga melihat realitas di masyarakat.
- Peneliti : **Bagaimana potensi Zumi Zola menjadi Gubernur Jambi ?**
- Narasumber : Banyak hal yang harus dianalisa. Kita harus melihat bagaimana dia menjalankan program di Tanjung Jabung Timur. Kalau profilnya PDI P lebih kepada kualitas bukan kepada pencitraan. Tapi kalau lihat realitas di masyarakat kita memang melihat potensi dia untuk jadi Gubernur. Fisiknya gagah uangnya banyak pencitraannya bagus, masih *single* gitu kan. Jadi ke depan bisa berubah konstelasi politiknya. Tergantung Pak HBA kalau dia bisa serius membangun ekonomi kerakyatan dia bisa menang kembali. Tapi kalau dia gagal maka bahaya buat dia.
- Peneliti : **Apa kunci kemenangan Zumi Zola menjadi Bupati ?**
- Narasumber : Dorongan orang tua pasti ada. Tapi kalau tidak ada kemauan anak juga tidak mungkin. Ada dua faktor kemenangan Zumi Zola. *Pertama*, figur orangtuanya, Pak Zul, dia (Zulkifli Nurdin) orang sana, banyak berinvestasi disana. *Kedua*, faktor Zumi Zola sendiri. Dia juga artis. Dia juga ganteng. Dia *cool*. Sama orang juga tidak sombong. *Low profile*.
- Peneliti : **Kenapa Safrial-Yamin kalah oleh Usman-Katamso dalam pemilihan Bupati Tanjungjabung Barat ? apakah karena faktor dukungan Zulkifli Nurdin ?**
- Narasumber : Ada sih pengaruh Pak Zul dalam kemenangan Usman-Katamso tapi *dak* signifikan.
- Peneliti : **Bagaimana pandangan PDI P terhadap konflik tanah dan perburuhan yang dialami masyarakat ?**
- Narasumber : Sayang Zulkifli Nurdin tidak konsentrasi ke ekonomi kerakyatan. Saling lempar tanggungjawab. Masyarakat dipingpong. Sebagian elit yang melakukan perjuangan advokasi ketemu dengan itu selesai dengan fasilitas. Habis itu terlupakan lagi. Elitnya berkompromi untuk kepentingan pribadi. Perjuangan yang melibatkan sekian ribuan orang sia-sia. Tidak ada perjuangan yang tulus. Riak-riak ada habis itu hilang. Saya takut kalau ini berlanjut *trust* masyarakat tidak ada. Harus jelas jangan ragu-ragu. Saya ini kalau jadi pemimpin apakah menjadi kapitalisme atau memihak rakyat. Saya pilih rakyat. Pemerintah yang punya kekuasaan. mencabut atau tidak izin. Perusahaan kan akan *ngikut*.

- Peneliti : **Mengapa HBA bisa mengalahkan Madjid Muaz yang didukung Zulkifli Nurdin ?**
- Narasumber : Pak Zulkifli Nurdin tidak terlalu serius mendukung itu. Keluarganya juga tidak terlalu serius membantu Pak Madjid Muaz. Hanya tampilan saja. Sebagai ketua partai harusnya dia ikut kampanye. Itu tidak dilakukan. HBA juga sudah lama mempersiapkan. Tiap hari muncul di iklan *society*. Lama lama orang kenal Pak HBA. Lebih populer. Saya pikir kalau Pak Zul *fight* habis-habisan saya pikir petanya bakal berubah. Kalau madjid muaz anaknya Zulkifli Nurdin lain ceritanya. Atau kalau adik Zulkifli Nurdin lain ceritanya.

Transkrip Wawancara (9)

- Nama Narasumber** : GT
Pekerjaan : Aktivistis Mahasiswa Kelompok Cipayung
Waktu : 25 November 2011
Tempat : Jambi
- Peneliti : **Siapa yang menjadi kekuatan pendukung kekuasaan Zulkifli Nurdin di Jambi ?**
 Narasumber : Sebelum 2005, DPR yang mengamankan. Setelah 2005, Asad Isma. Orang itu ngeri itu memanfaatkan proposal. 100 juta, 200 juta macam *kek*. Sebenarnya punya peran masing-masing. Kalau Asad Isma ke *grassroot* ke LSM. Bisa gaya keras-keras macam preman. Kalau Asad Isma lebih ke lapangan. Jefri ke konsep, tataran konsep. *Ngonsep ngonsep* pidato kan *dio*. Sibuk lari-lari jadwal ini jadwal itu.
- Peneliti : **Apakah pernah mengalami intimidasi oleh kekuatan pendukung kekuasaan Zulkifli Nurdin di Jambi ?**
 Narasumber : Jam 1 malam sampai jam 5. Kok abang nyulik aku. Ikut aku *ado* yang nak *diomongi* penting. Dibawa aku ke IAIN. Aku kira berdua tapi sudah nunggu pasukan. Barang itu pertama kali pucat aku. Disitulah spot jantung aku. Parang. Diculik aku. Yang dicari Boy Nababan *cuman* aku yang di sekre. Bentak-bentak. *Woi* kau *ni* orang luar jangan main di Jambi. Pake ini cuma tiga orang yang aku *nampak*. Ketua PMKRI Agung juga diculik. Kami mengeluarkan statemen bersama PMII, GMKI, PMKRI. Vidia ini cewek *dak* diculiklah dia. Si Kurdi yang diculik. Sudah ketemu disitulah. *Sayo* ini (Kurdi) adik abanglah. Kami *nak* kenal *jugo* gubernur bang. Masak gara-gara itu abang *nak nyikso* kami.
- Peneliti : **Zulkifli Nurdin anti kritik ya ?**
 Narasumber : Menjelang akhir tahun mau LPJ. Kami berharap DPRD Provinsi Jambi menilai Pertanggungjawaban Gubernur sesuai aturan main itu saja. Sensitif ketika masanya. Setelah itu aku antar proposal cair 10 juta. Seminggu kemudian masuk proposal lagi cair 10 juta
- Peneliti : **Selain Jefri Hendrik dan Asad Isma, siapa aktivis yang mendukung Zulkifli Nurdin ?**
 Narasumber : Cecep. Tandemnya Jefri Hendrik. Cuma Jefri tidak ada biaya kelakuan. Kalau Cecep beli motor besar. Mabuklah. Cecep dan beberapa aktivis 98 mendirikan Fordem. Rombongannya ada juga Bahrin, Hasan Bob.
- Peneliti : **Siapa pemodal terkaya di Jambi ?**
 Narasumber : Pemodal lokal siapa ya. Hazrin ini kan usahanya *dak* jelas. *Dak* terdeteksi. *Pakang* proyek. *Pakang* perizinan.

Transkrip Wawancara (10)

Nama Narasumber : H
Pekerjaan : **Pengusaha/Mantan Anggota DPRD Provinsi Jambi**
/Tim Sukses Zulkifli Nurdin
Waktu : **1 Desember 2011**
Tempat : **Jambi**

Peneliti : **Masih ingat om waktu memenangkan Zulkifli Nurdin jadi Gubernur pertama dulu ?**

Narasumber : Periode pertama dalam ruangan yang milih anggota dewan. Golkar sebelas, PDI sepuluh, PAN tiga. Golkar *calonin* Hasip. Zul gabung dengan PDI. PPP resmi nya ke Ramli Jalil. Tapi lari. Ramli Jalil didukung partai gurem. Tapi ada lima suara ke Zul. Dia dapat dua atau tiga suara dari orang golkar yang lari. Zul juga dapat dari Golkar. Waktu itu tidak ada pemilihan wakil. Karena wakil gubernur masih ada. ABRI ke Zul. Yang paling tajir di keluarga, hazrin. Karena dia main proyek dari dulu. Manap walikota dapat proyek dia. Yang *biayain* manap ini dulu jadi walikota juga Hazrin. Paling lima em an lah waktu itu. Nasrun *ngurus* PDI. PPP adiknya Nasrun. TNI yang *ngurus* juga Nasrun. Dapat seratuslah. Nasrun dapat *agak besak*, dapat satu em lah. Hasip banyak aset. Hasip *gak* punya *cash money*. Dia *nebar* uang itu *gak* berani. Duit keciklah. Hazrin berani.

Peneliti : **Kalau periode kedua bagaimana om ?**

Narasumber : Periode kedua habis enam puluh em. Aku tahu karena bendahara melapor ke aku. Mereka waktu mendaftar ke bank mereka *gak* ngerti. Kan tim sukses. Strukturnya ini ini ini. Itu harus disahkan notaris. Baru boleh buka rekening. Dia *gak* bisa mendaftar. Dia bertanya abang *cam mano* ? Mereka *gak* bisa buat rekening. Aku bilang buka rekening terus ditulis keterangan dari tim sukses. Untuk dilaporkan ke KPU. Jadi keterangan bahwa rekening atas nama A dan B adalah tim sukses. Jadi orang itu komunikasi sama aku. Periode kedua habis 60 em. Sebenarnya dia *gak* harus mengeluarkan sebanyak itu. Tapi dia panik. Dia 20 em aja. Normatif aja. Sebab tidak mungkin dibawah 20. Karena saksi aja sudah 5 em. Dia cemas karena Nasrun melapis Hasip. Nasrun kan banyak *move*. Tim sukses kan juga mengharapkan duit mengalir. Hazrin juga gitu orangnya gampang cemas. Dak kampanye *bae dio* menang. Tapi karena ada Nasrun. Gosipnya Nasrun akan bagi-bagi bibit dari jambi sampe bungo. Kan banyak lahan tidur. Ditanamin sawit yang dikelola warga.

Peneliti : **Hazrin Nurdin banyak duitnya ya om ?**

Narasumber : Uang segala-galanya buat dia. Penunjukkan langsung 40 juta aja diambilnya. Dia *gak* punya alat berat. *Cuman* modal

- surat-surat aja. Kayak Nazarudin dapet *fee* aja. Dia komisi aja. Kayak Nazarudin persis. Komisi sepuluh persen bersih. Urusan kepala dinas uruslah sendiri. Hazrin *kalo gak* kepepet macam pemilihan pelit keluar uang. Mau beli alat berat *second* ratusan juta aja dia nawarnya kayak ibu-ibu. Kalo dia harus menang baru dia keluar duit habis-habisan.
- Peneliti : **Hubungan Zul dengan Zoerman ?**
 Narasumber : Bagus. Zoerman kan cari proyek aja.
- Peneliti : **Kenapa Zul pasangan dengan AZA bukan dengan Nasrun ?**
 Narasumber : Dia takut PDI lari. Karena Pak Hasip didatangi terus sama orang PDI. Perjanjiannya *gini*, Zul satu periode. Periode kedua Nasrun. Berjalan dua tahun berubah. Kau wakil *bae*. Tapi Zul tidak bisa berharap dengan PDI karena Golkar menang. Kalo PDI menang Zul-Nasrun. Karena Golkar yang menang. Wakil dari Golkar.
- Peneliti : **Siapa Sudiro Lesmana om ?**
 Narasumber : Sudiro Lesmana itu orang Cina Timor, Cina Flores. Yang bawa bukan Zulkifli Nurdin tapi keponakan AZA. Cewek dia. Sudiro Lesmana main ke siapa saja di Jambi.
- Peneliti : **Dokter Bambang meminjam uang ya ke Hazrin Nurdin ?**
 Narasumber : Waktu *nyalon* walikota, Hazrin minta sertifikat tanah sebagai jaminan pinjaman uangnya. Uang kontan kan *gak* punya dokter bambang. Dokter Bambang pinjam duit ke Hazrin. Kagek dapat proyek kalo menang. Hazrin minta sertiifkat tanah buat jaminan.
- Peneliti : **Berapa aset Keluarga Nurdin ?**
 Narasumber : Bisnis awal gula. Mirip Ahmad Bakrie di Lampung lah. Kalo aset keluarga trilyunan. Punya banyak aset tanah dan bangunan. Rumahnya yang di kemang aja dijual harta Cornelis Buston, Fasha, Efendi Hatta tidak ada apa-apanya.
- Peneliti : **Hazrin penyandang dana kampanye calon bupati ya ?**
 Narasumber : Kawan aku *cerito kalo ado* kawan *dio* stress. Hazrin minta duit buat hari sabtu. Minta enam milyar. Bingunglah dio. Hazrin kan nasabah. *Kemano nyarinyo*. Akhirnya dapat juga. Kumpul-kumpul nasabah *cino*. Ternyata duit untuk dibawa dia ke tungkal. Buat kampanye.
- Peneliti : **Kalau Agneta apa kabar om ?**
 Narasumber : Bapak neta dulu orang dekat Bung Karno. Sukarno gitulah. Nasrun, Neta, Zul sama Zurman sama-sama pengusaha semua sejak dulu. Aktif di PDI dan Golkar. Yang sukses Zul sama Zurman. Nasrun kalah sama neta di PDI. Suami neta jadi Ketua PDI. Neta dan suami lebih di Jakarta.
- Peneliti : **Bagaimana hubungan Zul dengan Arifien ?**
 Narasumber : Zul sama Manap kan iparan. Kadang musuh kadang gak. Ribut pas pemilihan di Sarolangun. HBA kan dikader Manap buat jadi walikota. Tapi HBA berkhianat, dukung Zul buat maju di Sarolangun. Manap dukung Maryadi Syarif.

Puncaknya ribut pas pemilihan Walikota. Zul dukung Sum, Manap dukung Asnawi. Zul sama Hazrin main di daerah buat nyari proyek aja. Minjemin duit kalo menang dapat proyek. Bisa ngatur-ngatur proyek dan pejabat.

Transkrip Wawancara (11)

Nama Narasumber : **Dr. Heriyandi Roni, M.Si**
Pekerjaan : **Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi**
Waktu : **24 November 2011**
Tempat : **Jambi**

Peneliti : **Bagaimana pandangan Bapak mengenai dinamika elit-elit lokal di Jambi era otonomi daerah serta kemunculan "orang kuat lokal" ?**

Narasumber : Kalau di lokal sangat berpengaruh. Kalau famili, famili siapa. Kalau klan, klan siapa ?. Kalau dalam sistem tradisional banyak faktor kemunculan terutama faktor *heredity*. Tapi kalau sekarang sistem politik memungkinkan. Inilah era mereka. Pengaruh politik mereka yang kuat terutama di lembaga-lembaga politik. Kemunculan ini tidak dapat dilepaskan dari faktor modal. Setidaknya saya berpandangan sistem ini memungkinkan kapitalis bertarung. Kekuatan ekonomi membuat mereka katakanlah adidaya dalam struktur politik. Mereka punya pengaruh dimana mana. Tapi arenanya sistem politik ini yang memungkinkan itu, tanpa sistem politik ini, tanpa sistem politik macam ini mereka yang punya kekuatan ekonomi akan terpinggirkan. Mereka akan main betul-betul di *mainstream* ekonomi. Tapi ketika dibuka ini mereka masuk. Masuk ke dalam ikut *rule game* nya ternyata mereka sukses. Sampailah kita kenal di Provinsi Jambi kekuatan itu dalam bentuk keluarga-keluarga politik. Ada dua kutub katakanlah yang satu secara formal kutub mantan Gubernur. Dan kesempatan-kesempatan di dalam jabatan-jabatan formal memungkinkan *power* ini menggurita dan dialokasikan, diwariskan kepada penerus-penerusnya. Dengan catatan memiliki kekuatan ekonomi tadi. Kita liat lagi elit lokal dalam bentuk birokrat tadi pengusaha. Yang satu sumber *resources* dengan label pengusaha. Kemudian muncul juga dari birokrat. Birokrat tadi menggunakan jaringan-jaringan yang sudah mereka miliki. Disamping itu birokrat yang punya kredibilitas kapabilitas integritas juga tidak akan muncul sebagai kekuatan elit yang berpengaruh kalau juga tidak punya kekuatan ekonomi.

Peneliti : **Lantas apa keunikan keluarga-keluarga politik di Jambi ?**

Narasumber : Keluarga Zulkifli Nurdin, Melayu juga, cuma dengan *power* tadi beliau diakui sebagai bagian dari Keluarga Masyarakat Sulawesi Selatan. Mayoritas menjadi prinsip atau kata kunci dalam demokrasi. Etnis mayoritas menjadi faktor penting.

Peneliti : **Apakah selama desentralisasi terjadi pertumbuhan kesejahteraan ?**

- Narasumber : Harapan kita tentunya demokrasi dapat menghantarkan. Desentralisasi memanusiakan manusia. Itukan prinsip demokrasi. Desentralisasi mengkerucut menghasilkan seorang pemimpin untuk mengelola *resources* di tingkat lokal. Ada pertumbuhan kesejahteraan rakyat tumbuh. Saya tidak sependapat sistem politik yang membawa kesejahteraan rakyat. Sekarang ini kan sudah muncul juga elit baru. Jabatan formal memungkinkan munculnya elit baru Kuat pengaruh tapi lemah depan KPK. Elit ada batasan waktu ya seiring sistem politik itulah pengaruh politik. Ada kurun waktunya. Banyak orang kuat di tingkat lokal berantakan ketika berhadapan dengan penegakan hukum. Orang kuat lokal tidak seperti elit tradisional yang *sustainable* sekali kan. Begitu terkena hilang semua simbol-simbol *resources* yang melekat.
- Peneliti : **Tetapi ada keluarga politik yang bertahan hingga tiga generasi empat generasi ?**
- Narasumber : Begitu orang kuat terinstitusi dalam *family* memang dia lebih kuat dan turun temurun. Umumnya elit lokal tidak punya kekebalan terhadap penegakan hukum

Transkrip Wawancara (12)

Nama Narasumber : IA
Pekerjaan : **Budayawan/Sesepuh Paguyuban Masyarakat Sunda di Jambi**
Waktu : **22 November**
Tempat : **Jambi**

Peneliti : **Bagaimana pandangan mas tentang kondisi sosial budaya Jambi dibawah pemerintahan Zulkifli Nurdin ?**

Narasumber : Saya bisa mewakili pribadi atau komunitas, kebetulan saya dipercaya sebagai penghimpun dari komunitas seperti paguyuban. Secara umum bagus. Haji Zulkifli ya. Dia punya mimpi-mimpi dan dia punya selera. Latar belakang dia kan pengusaha kan. Mimpi nya lebih besar ketimbang sebelumnya. Kami pernah dipimpin Bapak Maschun Sofwan, Orang Jawa yang *menjawa* pula. Dua periode oleh Haji Abdurahman Sayuti yang betul-betul *menjambi*. Sesungguhnya Haji Zulkifli juga *menjambi*. Beliau *menjambi* tapi juga kelihatannya lebih membumi. Lebih NKRI. Dia punya pengakuan Jambi milik kita semua. Dibanding sebelumnya dia lebih multikulturalisme. Mudah-mudahan. Saya sih ingin benar adanya.

Peneliti : **Bagaimana mas menilai kekuasaan yang dijalankan Zulkifli Nurdin selama dua periode ?**

Narasumber : Kalau *leadership* mungkin rata-rata. Pengaruh dari pendampingnya atau bawahnya juga kuat. Beliau komunikasi sangat erat dengan paguyuban-paguyuban etnis dan tokoh-tokoh budaya. Beliau punya kekuatan tim yang tidak struktural. Beliau punya itu. Para kyai-kyai, para tua-tua, para tokoh-tokoh. Yang seneng tempoyak dikasih tempoyak. Yang suka sayur asam dikasih sayur asam. Yang suka asam pade dikasih asam pade. Jarang yang melihat ke arah sana bahwa budaya bisa bermanfaat untuk kepentingan politis. Lebih malu ditegur ketua paguyuban ketimbang ditegur lurah atau camat. Ini tidak diyakini oleh kandidat lain.

Peneliti : **Zulkifli Nurdin termasuk orang kaya di Jambi ?**

Narasumber : Saya denger dari dulunya sudah kaya-kaya.

Peneliti : **Mengapa Zulkifli Nurdin mendapatkan dukungan dari paguyuban etnis yang ada di Jambi ?**

Narasumber : Dia punya apa ya, punya kekuatan untuk membumi di sosial budaya. Punya dukungan istri, Ibu Ratu itu lebih *care*. Dalam konteks membangkitkan potensi ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan bukan PNS. Organisasi mereka bukan dibawah naungan lembaga. Maka 2003 etnis-etnis terbangun mendukung Zulkifli Nurdin. Memberikan semacam penganugerahan kepada beliau. Entah ini bagian strategi politis mereka.

- Menyentuh dengan adat istiadat sehingga muncul keberpihakan total.
- Peneliti : **Apa kunci keberhasilan Zulkifli Nurdin bisa mengalahkan elit lain seperti Hasip Kalimudin Syam ?**
- Narasumber : Yang pertama latar belakang. Kepemilikan modal dan kesempatan kunci keberhasilan Zulkifli Nurdin. Dengan modal kita bisa membentuk tim. Tim yang solid yang bisa didoktrinasi. Tanda kutip untuk pencapaian-pencapaian. Hegemoni menyentuh masyarakat. Yang suka sayur asam dikasih sayur asam. Yang suka asam pade dikasih asam pade. Disentuh cita rasanya. Sandaran kebudayaan yang namanya makhluk bernama manusia. Ketika itu tersentuh gimanalah. Ini potensi yang diyakini. Sangat emosional
- Peneliti : **Mengapa anaknya Zumi Zola bisa menang di Tanjung Jabung Timur ?**
- Narasumber : Kemenangan Zumi Zola lebih karena faktor Zulkifli Nurdin dan keluarga. Selebriti kan segmen artis kan remaja. Teknologi di kabupaten kurang. Saya kira begitu. Zulkifli Nurdin mendorong sang anak. Zumi Zola sulit mengalahkan HBA. Suasana sudah berbeda. Dia bisa kalau mau meniru ayahnya. Tidak sulit kok. Yang pasti HBA tidak akan tinggal diam.

Transkrip Wawancara (13)

Nama Narasumber : JS
Pekerjaan : Wartawan Majalah Gatra
Waktu : 21 November 2011
Tempat : Jambi

Peneliti : **Bagaimana penilaian mas terhadap perjalanan otonomi daerah dan desentralisasi di Jambi ? apakah memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan rakyat di Jambi ?**

Narasumber : Berarti kita berbicara mengenai kepemimpinan dua periode Gubernur Zulkifli Nurdin di Jambi. Sebagai masyarakat biasa saya menilai Zulkifli Nurdin hampir tidak berbuat apapun. Program pembangunannya hampir tidak ada yang menyentuh masyarakat. Saat pertama kali menjabat Gubernur, dia pernah berusaha membelah Taman Nasional Kerinci Seblat. Dapat tentangan dari berbagai organisasi masyarakat seperti Walhi. Dia juga sempat berencana membuat sejuta hektar lahan kebun kelapa sawit. Itupun tidak terwujud karena lahan satu juta hektar tidak ada di Jambi. Setahu saya hutan produksi kita satu koma dua juta hektar, enam ratus ribu hektar atau setengahnya sudah punya Sinar Mas Group. Mereka memiliki banyak perusahaan seperti RHM, WKS untuk tampak tidak memonopoli perkebunan. Kemudian ide-ide membuat transportasi se Sumatera juga tidak terwujud. Dia waktu itu menitikberatkan pembangunan di daerah kelahirannya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketika dia membangun pembangunan Pelabuhan Samudera Muara Sabak itu juga tidak tuntas. Kemudian pembangunan jalan dari Jambi menuju Pelabuhan Samudera Muara Sabak. Jembatan Batanghari Dua itu yang mungkin dianggap keberhasilan. Tapi itu menghabiskan dana dua ratus milyar. Dan baru selesai tahun 2009. Kemudian secara politik justru Zulkifli Nurdin menciptakan dinasti-dinasti politik. Tidak berkembang tokoh politik muda.

Peneliti : **Artinya tidak muncul aktor baru ?**

Narasumber : Tidak muncul tokoh muda. Yang ada persaingan tokoh tua dalam perebutan Gubernur. Muncullah Hasan Basri Agus. HBA adalah kadernya Zulkifli Nurdin. Sempat didorong menjadi Wagubnya pada periode 2005-2010 tetapi kalah dalam persaingan di Konvensi Golkar. Istrinya jadi anggota DPR. Anaknya jadi Bupati. Tidak ada produksi pemimpin di PAN di luar kerabatnya.

Peneliti : **Bagaimana dengan program-program pembangunan Zulkifli Nurdin yang lain ?**

Narasumber : Peremajaan karet banyak menimbulkan masalah. Diduga keras bibitnya tidak dapat menghasilkan. Kita lihat saja bibit

- karet tersebut lima, tujuh tahun lagi. Ada keraguan dari kawan-kawan petani. Tetapi karena bibitnya gratis apa salahnya mereka coba.
- Peneliti : **Tapi ada yang bilang Jambi bertambah maju dibawah kepemimpinan Zulkifli Nurdin ?**
- Narasumber : Tolak ukurnya apa. Mereka memberikan penilaian tersebut. Jambi adalah maju. Apa tolak ukurnya. Setahu saya yang masuk kesini investor, investasi perkebunan kepala sawit dan tambang batubara yang tidak berdampak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Malah menimbulkan masalah lingkungan dan rusaknya jalan. Lahan yang diberikan kepada atau dimiliki perkebunan kelapa sawit menimbulkan konflik lahan. Karena lahan tersebut sebagian besar milik masyarakat. Ada empat puluh tujuh lokasi di jambi rawan konflik lahan. Salah satu yang terbesar adalah kasus penyerang, karang mendapo. Ada yang meninggal. Bahkan komnas ham menilai pelanggaran ham di jambi sangat tinggi karena pelakunya adalah aparat penegak hukum langsung. Setahun bisa 4 kali komnas ham datang langsung. Tapi ya komnas ham tidak punya kewenangan lebih. Jambi seolah-olah damai tetapi ketegangan ada di dalamnya. Yang sewaktu waktu meletus.
- Peneliti : **Mengapa Zulkifli Nurdin dapat menguasai politik lokal di Jambi era desentralisasi ?**
- Narasumber : Masyarakat jambi sudah terkooptasi dengan pemikiran bahwa Zulkifli Nurdin adalah anak orang terkaya di Jambi, Nurdin Hamzah. Setiap lebaran bagi-bagi zakat di depan rumahnya di kampung manggis. Masyarakat berdesak-desakan di depan rumah pribadinya untuk mendapatkan paket sembako dan sarung. Masalahnya kandidat yang lain tidak ada yang bisa menandingi *money politics* nya. Kompetitornya tidak ada. Usman ermulan tidak mampu untuk itu. Hasip kalimudin syam juga tidak maksimal. Masyarakat di jambi pemikirannya ada uang baru pilih. Dia menghabiskan uang banyak untuk pemenangannya pada 2005. Dia mengakomodasi seluruh LSM. Dia bagi-bagi uang ke mesjid. Kadang satu mesjid bisa dapat 10 juta. Tim suksesnya begitu gemuk. Itulah yang dilakukannya *money politics*. Hampir semua suku di jambi dia mempunyai gelar. Dia membina pers dan mensuplai dana yang cukup bagus. Kawan-kawan pers menulis hanya untuk mendapatkan imbalan sesuatu dari pemerintah.
- Peneliti : **Jadi bisa dikatakan Zulkifli Nurdin punya posisi yang kuat dalam politik lokal di Jambi ?**
- Narasumber : Cukup kuat. Dia berkampanye bertahun-tahun lamanya. Dia sering berkunjung ke daerah-daerah terpencil. Memanfaatkan anaknya yang artis waktu itu, Zumi Zola. Dengan penampilan dia yang segar dan gagah. Adiknya juga dibelakang layar

- memberikan bantuan. Dan keluarga besarnya sehingga dia terpilih dengan meyakinkan.
- Peneliti : **Mana yang lebih berkuasa, Zulkifli Nurdin atau adiknya Hazrin Nurdin ?**
- Narasumber : Saya pikir Zulkifli Nurdin cukup dominan dia sendiri. Tapi memang yang paling berperan adalah adiknya Hazrin yang dominan. Begitu berkuasa. Hampir bisa mengatur siapa calon kepala daerah di kabupaten-kabupaten. *Kingmakernya* Hazrin Nurdin. Hazrin Nurdin bisa mengatur kepala-kepala dinas. Zulkifli Nurdin bisa mengatur Golkar melalui Hazrin Nurdin. Dan hubungannya dengan Zoerman Manap ketika itu mesra sekali.
- Peneliti : **Artinya kekuasaan Zulkifli Nurdin bisa lintas partai ?**
- Narasumber : Bisa melompati partai-partai. Karena dia bisa membagi uang–uang proyek. Orang jadi nyaman mendukungnya.
- Peneliti : **Bagaimana pandangan mas terhadap keterlibatan Zulkifli Nurdin dalam kasus waterboom ?**
- Narasumber : Kasus waterboom sampai persidangan dan sekda Chalik Saleh dinyatakan bersalah. Memang berkembang isu Zulkifli Nurdin menerima uang. Tapi dengan kelihaiannya, Zulkifli Nurdin tidak tersentuh hukum. Sudiro Lesmana datang ke semua pejabat untuk mencari proyek. Sudiro Lesmana juga menjadi terpidana dalam kasus PLTD di Muaro Jambi yang melibatkan mantan Bupati Asad Syam dan mantan sekda Muchtar Muis.
- Peneliti : **Menurut anda apakah Zulkifli Nurdin adalah otak dibalik proyek Waterboom ?**
- Narasumber : Ya jelas dong. Jelas kok dia kepala daerah. Tahu tidak tahu, dia terlibat dan bertanggungjawab. Namanya disebut oleh Chalik Saleh sayang tidak bisa dibuktikan.
- Peneliti : **Apa kunci utama dari keberhasilan Zulkifli Nurdin dalam setiap pertarungan politik ?**
- Narasumber : Saya pikir dia juga diuntungkan dengan figur Amien Rais. Ketua MPR dan Ketua PAN. Amien Rais sering berkunjung ke Jambi sampai 4 kali. Begitu hebatnya Zulkifli Nurdin menjalin hubungan dengan Amien Rais. Dia menenangkan rakyat Jambi dengan *money politics*. *MoU* ke *MoU*. Itu yang menjadi kunci keberhasilannya. Ditambah dukungan keluarga.
- Peneliti : **Siapa yang menjadi penopang kekuatan Zulkifli Nurdin ?**
- Narasumber : Hazrin Nurdin, Hazrin Nurdin bisa mengatur kapal dagang. Dia bisa mengatur semua proyek. Dia tahu dagang proyek. Hubungan Zulkifli Nurdin dan Hazrin Nurdin selalu mesra. Tidak ada terlihat gontok-gontokan.
- Peneliti : **Modal sosial apa yang dimiliki Zulkifli Nurdin ?**
- Narasumber : Nama besar keluarganya menjadi modal sosial. Nama besar keluarganya dipercaya dan diyakini orang. Hartanya tujuh

- turunan tidak berkurang. Nama besar orang tuanya. Dan memang orangtuanya dulu sering berbuat.
- Peneliti : **Berapa nilai kekayaan Zulkifli Nurdin ?**
- Narasumber : Saya tidak terlalu banyak tahu hartanya. Ada ratusan ruko yang dia miliki di Jambi. Kalau satu ruko satu milyat. Ya kalikan saja.
- Peneliti : **Selain PAN, partai apa yang ikut mendukung kekuasaan Zulkifli Nurdin ?**
- Narasumber : Pada waktu awal yang mendukung Zulkifli Nurdin adalah PDI Perjuangan. Ketika itu ketuanya dijabat Nasrun Arbain. Golkar yang banyak suara bisa kalah. Itu kelihaihan Nasrun Arbain. Mereka ada *MoU* dengan Zulkifli Nurdin. Dengan dukungan PDI dan uang yang banyak sehingga bisa berhasil.
- Peneliti : **Dukungan juga dia terima dari kelompok kultural seperti masyarakat etnis, apakah dukungan tersebut riil ?**
- Narasumber : Zulkifli Nurdin mendapatkan gelar dari suku-suku. Hampir semua suku di Jambi, dia mempunyai gelar. Dari batak, bugis, padang, jawa, dia punya gelar.
- Peneliti : **Apakah ada oposisi terhadap kekuasaan Zulkifli Nurdin ?**
- Narasumber : Tidak ada oposisi yang permanen.
- Peneliti : **Kalangan Pers kenapa seolah-olah bisa dia tundukkan ?**
- Narasumber : Dia membina pers dan mensuplai dana yang cukup bagus.
- Peneliti : **Apakah benar-benar tidak ada penentangan terhadap kekuasaan Zulkifli Nurdin ?**
- Narasumber : Jadi ada beberapa elemen yang kritis menentang. PPJ, SBSI dan Walhi. PPJ sengketa lahan terutama dengan WKS. SBSI berjuang kenaikan upah.
- Peneliti : **Kenapa tidak terlalu kuat penentangan terhadap Zulkifli Nurdin ?**
- Narasumber : Kawan-kawan wartawan hanya menulis untuk mengharapkan imbalan dari pemerintah. Zulkifli Nurdin juga terkenal dengan kuping tipis. Wartawan dan aktivis nyaman. Tenang-tenang saja.
- Peneliti : **Mengapa Zulkifli Nurdin terlibat dalam mendukung calon-calon Bupati ?**
- Narasumber : Mereka berkepentingan untuk mendudukan orang di pilkada. Untuk dapat proyek-proyek besar. Perpanjangan kekuasaanya di tingkat lokal.
- Peneliti : **Apakah dukungan Zulkifli Nurdin berpengaruh terhadap kemenangan calon Bupati ?**
- Narasumber : Sangat berpengaruh. Terbukti hampir tidak ada orang didukungnya yang gagal. Sembilan puluh persen pasti menang.
- Peneliti : **Apakah Zulkifli Nurdin menggunakan PNS ?**
- Narasumber : Orang yang memberikan keuntungan bagi dia pasti mendapatkan jabatan
- Peneliti : **Jadi PNS netral atau tidak ?**

- Narasumber : Pasti tidak
- Peneliti : **Apakah pemerintahan Zulkifli Nurdin bersih dari KKN ?**
- Narasumber : Pasti tidak.
- Peneliti : **Apakah Zulkifli Nurdin termasuk orang kuat di Jambi ?**
- Narasumber : Oh jelas. Dia orang kuat. Sampai sekarang masih kuat. Walaupun sudah tidak menjabat.
- Peneliti : **Apa dia masih punya potensi di masa depan ?**
- Narasumber : Dia masih punya potensi. Nama besarnya luar biasa. Dia masih punya ambisi-ambisi. Seperti Zumi Zola didukungnya menjadi Gubernur, Sum Indra diproyeksikan menjadi Walikota.
- Peneliti : **Apakah Zumi Zola sengaja didorong sang ayah untuk menjadi Bupati ?**
- Narasumber : Dia sengaja didorong karena sebelum maju Bupati, dia sudah disuruh kuliah S2 ke Inggris. Untuk memperdalam pengetahuan. Dinasti Nurdin lebih siap ketimbang Dinasti Manap. Anaknya punya keinginan yang sama. *Klop* dengan keinginan orangtua. Zumi Zola sudah diperkenalkan sejak pilgub 2005. Ikut kampanye. Sudah dilibatkan.
- Peneliti : **Apakah ada pengaruh Zulkifli Nurdin terhadap terpilihnya Ratu Munawaroh ?**
- Narasumber : Zulkifli Nurdin membantu keterpilihan Ratu Munawaroh.
- Peneliti : **Apakah Sum Indra akan maju dalam pemilihan walikota Jambi tahun 2013 ?**
- Narasumber : Sum Indra akan bersaing ketat dengan Walikota *incumbent*. Dia sudah sangat sering turun langsung sosialisasi ke masyarakat. lebih bagus peluangnya karena walikota *incumbent* sering melakukan blunder. Pemilihan pejabat yang sembrono. Dia memecat 23 kepala sekolah. Visi misinya jambi bernas tidak pernah terwujud.
- Peneliti : **Kenapa Zulkifli Nurdin memilih AM Firdaus sebagai Sekda ?**
- Narasumber : AM Firdaus adalah kerabatnya. Tersandung masalah dana pramuka. Mungkin saat itu masih kuat berkuasa jadi tidak terlalu memperhatikan masalah pengeluaran. Dia memanfaatkan proyek pemerintah melalui adiknya Hazrin Nurdin.

Transkrip Wawancara (14)

Nama Narasumber : **Kasmadi Kasyim, SH**
Pekerjaan : **Advokat/ Ketua LBH Lingkungan**
Waktu : **6 Februari 2012**
Tempat : **Jambi**

Peneliti : **Perjalanan desentralisasi justru menghasilkan orang kuat di tingkat lokal di Jambi, bagaimana pandangan Bapak ?**

Narasumber : Secara faktual memang demikian. Hal itu harus ditelusuri sejak reformasi 98. Reformasi yang sesungguhnya terjadi adalah pembajakan yang dilakukan oleh golongan politik lama yang kuat dan mereka menduduki kembali jabatan-jabatan kosong itu. Yang terjadi adalah politik atas nama. Jadi mereka memanfaatkan demokrasi. Menurut saya sempurna mereka memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan sendiri. Yang terjadi adalah *local bos*. Hegemoni feodalisme di setiap daerah semakin kuat.

Peneliti : **Mengapa kekuatan gerakan rakyat kalah cepat mengkonsolidasikan diri ketimbang kekuatan lama-kekuatan lama di Indonesia khususnya di Jambi ?**

Narasumber : Secara matematis jawabannya sederhana karena konsolidasi gerakan rakyat di Jambi tidak terjadi secara ideologis hanya konsolidasi sosial dan emosional. Tidak terjadi pada tingkat akar rumput. Khususnya di Jambi, kalau di Jambi kan sebagian besar gerakannya lahir dari, tidak lahir dari antitesis yang benar. Jadi misalnya kelompok tani dan lain-lain itu mereka terinspirasi oleh gerakan-gerakan yang telah lebih dulu ada di luar Jambi. Atau mereka sebenarnya adalah elit-elit lokal yang sakit hati gagal merebut kekuasaan politik lokal. Seakan-akan mereka kekuatan alternatif.

Peneliti : **Kenapa justru keluarga politik yang muncul dan dominan dalam politik lokal Jambi?**

Narasumber : Demokrasi boleh terjadi di Indonesia tetapi secara khusus tidak terjadi di Jambi. Tidak terjadi demokratisasi. Mereka aktor lama. Mereka orang lama yang diuntungkan dengan sistem demokratisasi. Keluarga Zoerman Manap misalnya yang secara turun temurun menguasai Golkar. Kemudian Zulkifli Nurdin orang kuat secara ekonomi yang memiliki sebagian besar aset dan sebagian besar pasar seperti *Sultan Ground* di Yogya. Tidak ada yang aneh. Ditambah lagi kelas menengahnya lemah. Tidak ada kekuatan politik alternatif. Ada banyak syarat membuat mereka muncul. Gerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat terkooptasi. Gerakan mahasiswa terkooptasi karena sistem yang dibangun feodal. Patron kliennya sangat kuat. Ketika sosok Zulkifli Nurdin menjadi gubernur pertama kali, di era demokratisasi,

- sebagian besar kekuatan reformasi di Jambi menjadi kekuatan pendukung. Itu terjadi.
- Peneliti : **Ketika pilkada langsung dijalankan, Zulkifli Nurdin tetap bisa mempertahankan kekuasaannya ?**
- Narasumber : Substansi mata pilih. Pahami dulu. Kita harus memahami demokrasi kita hari ini adalah demokrasi prosedural bukan demokrasi substansial. Jadi erat kaitannya dengan kapasitas warganegara, erat kaitannya dengan tingkat ekonomi warganegara. Karena faktanya masyarakat Jambi banyak yang menengah ke bawah. Sudah bisa ditebak terjadi *money politics*. Ketika kita memiliki ketergantungan ekonomi dan tidak mandiri secara ekonomi maka kita tidak memiliki pilihan-pilihan yang bebas. Perut lebih dominan. Hampir semua pilkada di Jambi berakhir di Mahkamah Konstitusi. Jadi bahwa putusan seseorang jadi Bupati tidak ditentukan suara rakyat saja tetapi juga pengadilan karena kental dengan *money politics*
- Peneliti : **Bagaimana Bapak menilai kepemimpinan Zulkifli Nurdin selama sepuluh tahun ?**
- Narasumber : Kalau melihat konflik sumber daya alam di Jambi yang terjadi memiliki akar yang lama. Bahkan zaman Zulkifli Nurdin termasuk sebagai pemimpin politik mempunyai sumbangan yang besar akan terjadinya konflik. Misalnya izin prinsip perkebunan dan kehutanan diberikan kepada perusahaan besar dilakukan di jaman Zulkifli Nurdin. Gubernur yang sekarang mewarisi keputusan Gubernur sebelumnya. Gubernurnya terkaya tetapi masyarakat termasuk paling rendah pendapatannya.
- Peneliti : **Bagaimana Zulkifli Nurdin dapat menundukkan gerakan rakyat di Jambi ?**
- Narasumber : Sejauh yang saya tahu Zulkifli Nurdin masih menggunakan cara menundukkan gerakan rakyat dengan cara kekeluargaan dan *money politics*. Dengan uang yang cukup besar. Dia juga membangun oligarki lokal. Dia punya keluarga besar yang pengusaha dan pemain politik. Gayanya flamboyan tidak melakukan intimidasi secara langsung. Sehingga tidak muncul kritis.
- Peneliti : **Apakah Zulkifli Nurdin membentuk barisan pendukung ?**
- Narasumber : Zulkifli Nurdin juga membangun kelompok pendukung. Ini terlihat ketika LPJ Gubernur. Sangat terlihat ada kelompok pendukung LPJ Gubernur. LSM dan Ormas. Kalau di Jambi, biasanya membangun kekuatan LSM dan Ormas. Prinsipnya mematikan gerakan kritis. Di Jambi belum ada tradisi perlawanan yang cukup keras sehingga wajar tidak ada represi yang juga keras.
- Peneliti : **Bagaimana PNS di bawah kepemimpinan Zulkifli Nurdin ?**

- Narasumber : Birokrat menjalankan apa yang dilakukan sebelumnya. Ketika reformasi tidak berubah. Harusnya beralih dari sikap dan peran. Tidak terjadi. Tetap *High Cost*. Sekda di jaman Zulkifli Nurdin masuk penjara. Terpidana kasus korupsi. Ini memperlihatkan tidak terjadi reformasi birokrasi. Di jambi cukup buruk yah perilaku birokrasinya. PNS di jambi tidak efisien, *high cost*, koruptif sangat jauh dari *good governance*. PNS asal bapak senang. Mengangkat pejabat bukan berbasis kinerja.
- Peneliti : **Bagaimana rezim Zulkifli Nurdin dapat mereproduksi kekuasaannya kepada anaknya ?**
- Narasumber : Dari sudut pandang teoritik demokrasi modern ini adalah sebuah kecelakaan. Sesungguhnya kecelakaan. Siapa yang punya materi dia yang menentukan. Begitu juga kenapa kesultanan ini membesar, anaknya menjadi bupati, keponakannya jadi wakil walikota. Orang yang menguasai ekonomi ini dia bermain politik secara langsung. Ketika kita memiliki ketergantungan ekonomi dan tidak mandiri secara ekonomi maka kita tidak memiliki pilihan-pilihan yang bebas.
- Peneliti : **Bagaimana gerakan sosial sendiri di Jambi ?**
- Narasumber : Kalau dibilang mati, hampir tiap hari ada demonstrasi. Dibilang tidak ada LSM, ada ratusan LSM. Tetapi LSM ini kemudian bukanlah kekuatan alternatif. Mereka adalah bagian turut serta memelihara kondisi saat ini. Contohnya sampai sekarang tidak muncul tokoh alternatif.
- Peneliti : **Bagaimana sikap Zulkifli Nurdin terhadap modal dan investasi ?**
- Narasumber : Zulkifli Nurdin kooperatif terhadap masuknya investasi dan modal ke Jambi. Perusahaan besar juga tidak sanggup memberikan tekanan kepada Zulkifli Nurdin karena dia juga punya aset ekonomi yang cukup besar. Yang terjadi kooperatif saat mengeluarkan izin-izin. Seharusnya Zulkifli Nurdin sebagai pimpinan politik melakukan proteksi terhadap kepentingan vital warganegara. Ekspansi Sinar Mas Group terus terjadi dan ekspansi bisnis keluarga Zulkifli Nurdin pun juga terjadi. Dia lebih memilih memfasilitasi kepentingan vital borjuasi nasional ketimbang kepentingan vital rakyat.
- Peneliti : **Bagaimana masa depan Keluarga Politik Nurdin Hamzah ?**
- Narasumber : Keluarga politik ini akan tetap bertahan hingga 10 tahun ke depan karena generasi selanjutnya mengikuti gaya dari Zulkifli Nurdin. Zulkifli Nurdin bukan sesuatu yang dihindarkan tetapi inspiratif. Keluarga politik ini bisa hilang apabila ada reformasi struktural dan radikal misalnya moratorium PNS, pembaruan undang-undang politik, revolusi sosial didorong. Karena secara tradisional dipotong alat

produksinya para elit-elit. Produksi gagasan alternatif tidak terjadi di kampus-kampus di Jambi.

Transkrip Wawancara (15)

- Nama Narasumber** : MN
Pekerjaan : **Pengusaha Lokal/Tim Sukses Zulkifli Nurdin**
Waktu : **3 Desember 2011**
Tempat : **Jambi**
- Peneliti : **Bagaimana pandangan abang tentang Hazrin Nurdin ?**
 Narasumber : Jabatannya dulu Ketua AMPG apalah, kapasitas terlalu kecil. Kalau sekarang dia Ketua PAN Jambi, agak *besak*. Ketua Provinsi. Kalau mau ketemu dia harus hati-hati. Aman *dak*. *Dak tuo dak mudo*. Kamu *ni tuo-tuo dak* tentu *aguk*. Bupati kalau ketemu dia, bupati yang menghampiri. Keluar dari mobil, keluar dari kantor menghampiri. Dia *dak* turun dari mobil. *Dio segalonyo ado*. Orang yang butuh dia. Dia *dak* butuh orang.
- Peneliti : **Agak kaku ya ?**
 Narasumber : Kasar. Kalau mau jadi politisi harus meredam emosi. Amien Rais pun bicaranya kasar. Beda dengan Golkar. Seperti Akbar Tanjung. Halus.
- Peneliti : **Bagaimana peta politik di Jambi sekarang bang pasca Zulkifli Nurdin?**
 Narasumber : Besarnya Demokrat di Jambi karena Golkar dan PAN pecah. Kalau PAN dan Golkar *dak* pecah. *Dak ado apo-aponyo* itu Demokrat.
- Peneliti : **Bagaimana dengan elit-elitnya ?**
 Narasumber : Di Jambi ini orang tahu asalnyo *dio* dari *mano*. Jadi orang *dak* heran. Orang tahu sama tahu. Kalau keluarga Nurdin orang *pecayo lah kayo* dari *lamo*. Jadi orang di Jambi bisa diukur. Termasuk HBA. HBA orang miskin. PNS *aja* pas masuk dari golongan 1. *Abis* kerja *ngojek* perahu di Seberang. Karirnya mulai dari nol. Orang tahu siapa dia. Dari tukang sapu. Honor. Diangkat dari Golongan I. Jadi Lurah jadi Camat jadi Sekda jadi Bupati. Kemudian jadi Gubernur. Kalau Keluarga Nurdin walaupun tidak jadi Pejabat, orang semua sudah tahu siapa Keluarga Nurdin. Bapaknya Zulkifli Nurdin sudah punya pesawat sendiri. Pabrik gula di Surabaya dia punya. Boleh dihitung separuh ruko di jambi punya dia. Kalau *dak* jadi gubernur habis dia. Karena anaknya tidak ada yang meneruskan bisnis di Jambi. saya sempat ke jalan bangka menteng ngobrol-ngobrol dengan pegawai. Pegawainya bilang kalau sempat *dak* jadi gubernur. Bisnis Keluarga NH di jambi habis.
- Peneliti : **Jadi menolong ya jabatannya sebagai Gubernur ?**
 Narasumber : Sangat menolong. Menolong sekali.
- Peneliti : **Kenapa Zumi Zola bisa menang di pilkada Tanjung Jabung Timur ?**

Narasumber : Jadi sekarang ini duit. Liat Zumi Zola sama Sum Indra *dak* ada apa-apanya Cuma karena duit. Juber ditawari jadi wakil. *Dak galak*. Padahal pasti menang. Golkar juga *dak* mau. Pak zoerman *dak* mau. Juber *dak* bayar Golkar, gratis. Cuma buat tim sukses saja. *Cem mano dak menang*. Datang Hazrin ke toko beli rokok kasih seratus ribu. *Ditanyo* di rumah *ado berapo* orang. *Cem mano orang dak* terikat. RT digaji tiap bulan. *Dak biso belari* lah. Karena orang tahu *datuknyo, bapaknyo*, otomatis kenal *dio*. Datang kami ke suatu kecamatan. Kami sudah nikmati infaqnya nurdin hamzah dari kami *kecik*. Selesailah.

Transkrip Wawancara (16)

Nama Narasumber : NK
Pekerjaan : Dosen STISIP Nurdin Hamzah Jambi
Waktu : 25 November 2011
Tempat : Jambi

Peneliti : **Bagaimana penilaian Bapak terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di jambi ? Apakah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat ?**

Narasumber : Untuk menilai otonomi daerah itu kan ada yang harus kita perhatikan. Itu sejauhmana peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang kedua peningkatan pelayanan publik yah. Nah itu yang harus dilihat dulu. Sejauh ini persentase peningkatan kesejahteraan rakyat sangat rendah. Nah itu seperti pelayanan publik itu. Seperti kemarin ada data KPK, kota jambi kan di Propinsi kan, itu pelayanan terburuk lho se Indonesia. Itu kalau bicara tentang otonomi daerah. Satu lagi yah masalah daya saing yah daya saing daerah itu kan sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 salah satu yang dimunculkan daya saing daerah. Apa ? Apa yang bisa dijadikan keunggulan komparatif ? Apa ? Sampai sekarang tidak ada yang menonjol betul.

Peneliti : **Sebagai orang yang lama mengamati dinamika politik di jambi apa yang berbeda dengan jaman katakanlah sebelum reformasi ? Apa yang berubah dari politik lokal Jambi dimata Bapak?**

Narasumber : Kalau saya melihat bedanya dengan sebelum reformasi munculnya katakanlah munculnya elit-elit baru. Jadi baru baru ini mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi jambi se sumatera paling tinggi ya. Fakta 8 persen 8,1 persen, saya ketawa waktu melihat informasi data seperti itu. Pertumbuhan belum tentu sama dengan pendistribusian pemerataan. Itu kan tidak sama artinya apa yang bisa kita petik itu disitu di jambi ini berhasil apa memunculkan elit-elit baru. Itu hasil reformasi menghasilkan konglomerat-konglomerat baru di tingkat lokal, pejabat-pejabat punya anak berhasil mengembangkan usaha dari situ kemudian ya Gubernur membuat dinasti lagi. Kemunculan dinasti-dinasti baru. Kalau pertumbuhan ekonomi kita nomor satu saya ketawa waduh picik betul ini saya bisa tahu walaupun saya bukan orang ekonomi.

Peneliti : **Bagaimana penilaian Bapak terhadap kepemimpinan Pak Zulkifli Nurdin selama dua periode ? Apa yang berbeda dibandingkan dengan Pak Abdurahman Sayuti ?**

Narasumber : Abdurahman Sayuti yang saya kagum itu disiplinnya. Disiplinnya dibanding Pak Zulkifli jauh yah. Kedisiplinan kita merosot betul ini. Saya lihat dari penampilan dia

- misalnya orang disuruh pakai seragam ini didalam undangan dia berbeda sendiri. Itu satu. Lalu mengenai kehadirannya pada acara-acara itu jarang yang *on time* bangsa dua jam tiga jam empat jam terlambat itu biasa.
- Peneliti : **Apakah karena mungkin beda latar belakang ?**
- Narasumber : Itu karena *bisnismen* itu tadi yah. Satu birokrat satu *bisnismen*.
- Peneliti : **Bagaimana manajerial kekuasaannya Bapak menilai ?**
- Narasumber : Manajerial kekuasaannya lebih berhasil. Saya katakan membangun hegemoni politik yah. Itu dibuktikan ketika ia berkuasa dulu, pemilihan secara langsung di kabupaten-kabupaten itu rata-rata didominasi oleh PAN. Hegemoni saat itu berada dikekuasaan PAN yang dipimpin oleh Pak Zul sendiri.
- Peneliti : **Jambi bukan basis PAN, tetapi PAN kok bisa berhasil di Jambi ?**
- Narasumber : Itu pertanyaan besar. Jambi ini kan basis NU. Kok bisa gitu kan. Dikatakan Islam modern di Jambi juga tidak. Semua juga sudah tau kan kalau soal itu. Citra dia sangat dermawan sekali. Ini sudah dibuktikan ketika Zulkifli Nurdin sudah tidak menjadi Gubernur lagi, orang sudah mulai memandang sebelah mata terhadap PAN. Ketika PAN dipimpin oleh adik kandungnya orang memandang sebelah mata. Dan satu lagi Zulkifli Nurdin itu memang dia punya kelebihan kharisma ya. Dari penampilannya betul-betul *perfect* yah. Dia jaga penampilannya. Kemudian ganteng, cara bicaranya hati-hati. Bagus lho pak, tertata, padahal pengusaha. Saya salut disitu. Memang manusia itu punya kelebihan masing-masing.
- Peneliti : **Bapak mungkin banyak mengamati elit-elit di Jambi, kenapa dia yang bisa muncul dan bukan katakanlah Hasip Kalimudian Syam yang birokrat lama atau Zoerman Manap atau Nasrun Arbain. Tapi kenapa Zulkifli Nurdin mampu menundukkan elit-elit yang lebih lama di jambi ?**
- Narasumber : Ketika Pak Zul masuk menjadi Gubernur, itu pemilihan masih dilakukan secara tidak langsung di legislatif ya. Karena pemilihan tidak langsung karena finansialnya lebih kuat.
- Peneliti : **Apakah itu saja ? Kandidat yang lain kan banyak uangnya juga ?**
- Narasumber : Figur baru ini. Masyarakat juga menginginkan perubahan. Momentumnya pas. Dia pas mengambil partai (PAN) itu Partai PAN sebagai basis politik untuk dia.
- Peneliti : **Tapi tidak hanya berhenti sampai disitu, pada pilkada 2005 dilakukan secara langsung, Zulkifli Nurdin bisa menang sampai 80 persen lebih, Menurut Bapak apakah faktor uang semata, tentu di era keterbukaan tidak dapat direduksi secara uang semata ?**

- Narasumber : Kemenangan itu ya saya kira ya, pertama dia memilih pasangan yang pas seorang pengusaha dan tokoh nasional juga. Yang diambil dari Golkar, kan partai besar. Padahal dia dipasangkan dengan partai kecilpun atau kata orang dipasangkan dengan kucingpun dia bisa menang waktu itu. Apalagi dengan partai besar kan. Kemudian yang kedua masyarakat jambi yang tingkat pendidikan tinggi masih relatif sedikit. Demokrasi dapat berjalan dengan baik harus memenuhi dua kriteria. Pendidikan relatif maju kemudian ekonomi *establish*. Ekonomi masyarakat kita di jambi belum majulah. Pendidikan rendah masih banyak. Ini sangat rentan terhadap *money politics*.
- Peneliti : **Kenapa kandidat lain seperti tidak berdaya ?**
- Narasumber : Dia kan *incumbent*, biasanya *incumbent* kukunya lebih mencengkeram. Fasilitas-fasilitas bisa dia manfaatkan. Istilahnya sambil dia kerja dia bisa sambil kampanye terselubung. Sambil tugas daerah sambil kampanye terselubung. Faktor *incumbent* menentukan di Jambi ini. Di kabupaten, sembilan *incumbent* menang. Faktor dia *incumbent* sangat penting.
- Peneliti : **Bagaimana pandangan Bapak tentang Zumi Zola ?**
- Narasumber : Disamping turunan orangtuanya dia punya bakat dan dididik tampaknya oleh orangtuanya untuk terjun ke politik. Saya katakan dididik bukan alami. Begitu ada peluang saya kira pasti ada polesan-olesan dari bapaknya dan kebijakan – kebijakan dia di sana saya tidak percaya kebijakan dia murni pasti ada nasehat-nasehat dari orangtuanya dan belakangan ini dia semakin melakukan hal-hal yang simpatik luar biasa. Dia santun. Kemudian pas waktu sholat semua diajak sholat. Pas sholat berjamaah dia bawa tasbih. Tidak memperlihatkan sosok dia yang masih muda. Dak nampak hedonis. Kedepan beliau punya kans. Kenapa saya katakan punya kans paling tidak yang mendukung dia sudah banyak. Dari keluarganya kuat sekali, Hazrin, termasuk ibunya sendiri, ditambah anak Dewi Nurdin, Sum Indra, keponakan bapaknya. Ditambah lagi populer tadi. Popularitas dia tidak bisa diabaikan nama dia bukan hanya dikancah lokal tapi nasional. Ketika memprediksi siapa yang bakal menang, saya katakan dia pasti menang mengalahkan calon *incumbent*.
- Peneliti : **Apa yang menarik dari fenomena kemenangan Zumi Zola ?**
- Narasumber : Di Tanjung Jabung Timur kursi legislatif dikuasai PAN. Hampir separuh lebih itu dikuasai oleh PAN. Itu yang pertama. Yang kedua saingannya ini suaranya pecah. Suara bugis pecah tiga tidak utuh lagi. Kemudian itu tadi popularitas.
- Peneliti : **Pengaruh sang ayah apakah berpengaruh ?**

- Narasumber : Ya sebutkan juga disitu nama besar sang ayah dan mereka dilahirkan di sana. Tanah kelahiran putra asli daerah makanya sabak itu daerah yang legislatifnya dikuasai dari PAN.
- Peneliti : **Bagaimana PNS di Jambi apakah netral atau partisan ?**
- Narasumber : Di jambi ini terang-terangan memihak. Sudah berpihak. Jadi istilah mereka dapat apa. Lebih bagus bertarung berjudi. Kalau menang dapat. Ada PNS terang-terangan di depan rumahnya pasang baliho. Vulgar sekali. Istilah saya itu tim sukses bayangan. PNS kasihan yang netral dan berprestasi
- Peneliti : **Bagaimana peluang PAN di masa mendatang menurut Bapak ?**
- Narasumber : Kalau untuk pemilihan bupati, saya kira kans PAN sudah mulai memudar ya. Tapi untuk pemilihan Gubernur ini, tadi figur itu tadi.
- Peneliti : **Bagaimana peluang Zumi Zola ?**
- Narasumber : Kesannya dia sekarang sudah mempersiapkan diri untuk maju dalam pemilihan gubernur yang akan datang. Di baliho-baliho saja sudah mulai nampak. 2012 kita akan ada hari pers nasional dia sudah pasang baliho. Visinya sudah sampai kesana yang lain kan belum. Saya melihat Zumi Zola akan maju. Visioner sekali. Dia cepat. Dia cepat menangkap peluang-peluang itu.
- Peneliti : **Bagaimana peluang Sum Indra menjadi Walikota ?**
- Narasumber : Dia wakil walikota. Kedua dia ketua PAN. Ketiga dia bersih. Kebijakan selama ini kan kebijakan yang salah dilakukan oleh Walikota. Waktu dia mau mencalonkan Wakil Walikota, dia pernah bertemu saya waktu itu. Nama dia belum populer saya katakan sebaiknya Bapak jangan dulu menjadi Walikota. Ambil sebagai wakil walikota dulu lima tahun pertama ini. Bapak membuat simpati dulu untuk mengejar seorang walikota jangan sampai rusak. Nama Bapak itu dijaga dulu. Apalagi kalau sudah *incumbent* sudah enak. Baru muncul sebagai Gubernur. Dia pernah pimpin STMIK Nurdin Hamzah. STMIK juga cukup berhasil. Dia juga pernah ketua Aptisi, ketua Perbasi. Mulai membangun jejaring kekuasaannya
- Peneliti : **Bagaimana pendapat bapak tentang Hazrin Nurdin ?**
- Narasumber : Begitu kepemimpinan diserahkan ke Hazrin Nurdin, hegemoni politik PAN bergeser. Kan dia lebih arogan. Kharismanya beda jauh, berbeda kelas.
- Peneliti : **Siapa yang pantas menggantikan Pak Zul memimpin PAN agar bisa bersinar kembali ?**
- Narasumber : Chairul Naim, dia berangkat dari bawah. Pernah di KPU. Saya tau persis kemampuan dia berpolitik. Hati-hati, cermat, pendidikan bagus hukum trisakti. Dia sebenarnya lebih cakap karena dia pernah jadi sekretaris. Hazrin ini kan bukan dari PAN. Dia dari Golkar secara emosional belum. Karena terpaksa aja. Waktu di Golkar, dia juga bukan elit yang

diperhatikan. Disitu rusaknya PAN disitu. Dia tidak punya kemampuan memimpin di dalam partai. Mungkin berhasil di dalam bisnis tapi belum tentu di partai. Wawasan dia tentang politik masih jauh.

- Peneliti : **Bagaimana peluang Zumi Zola memimpin PAN ?**
Narasumber : Banyak kesamaan. Ganteng, punya kharisma, punya visi, dermawan. Bisa bangkit lagi. Dia *copy paste* nya betul itu. Saya kira dia *copy paste* bapaknya (Zulkifli Nurdin) betul itu.

Transkrip Wawancara (17)

- Nama Narasumber** : **Nuzul Prakasa Zoerman Manap**
Pekerjaan : **Ketua KNPI Kota Jambi/Pengusaha/Wakil Ketua DPD Golkar Kota Jambi/Wakil Ketua DPRD Kota Jambi**
- Waktu** : **25 November 2011**
Tempat : **Jambi**
- Peneliti : **Bagaimana pandangan abang terhadap perjalanan desentralisasi dan otonomi daerah di Jambi ? Apakah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat di Jambi?**
- Narasumber : Belum menjawab kebutuhan masyarakat. Masih pusat juga yang berperan ke daerahnya. Otonomi kan cuma kata-kata. Masyarakat lebih kritis saja.
- Peneliti : **Apa yang berbeda dari kepemimpinan Zulkifli Nurdin dibandingkan sebelumnya ?**
- Narasumber : Abdurahman Sayuti karena dia orang birokrasi manajemennya lebih bagus. Zulkifli Nurdin kan dari pengusaha. Rapat-rapat jarang datang. Zulkifli Nurdin lebih mengedepankan pertimbangan politis dalam rekrutmen pejabat. PNS berpolitik. Kalau tidak mendukung disitu situlah jabatannya. Karirnya mau tidak mau akan mentok.
- Peneliti : **Bagaimana hubungan Golkar dan PAN di Jambi ?**
- Narasumber : Golkar tidak pernah di luar pemerintahan. Pak Anthoni jadi wakil, Golkar terlibat didalam pemerintahan. Tapi ya Pak Zul berpasangan dengan siapa saja pasti menang. Pak Zul *diback up* di parlemen. Di Parlemen kan Golkar yang menguasai. Posisinya jadi aman. Waktu ada Pak Anthoni masih ada dampaknya. Setelah Pak Anthoni dapat kasus Golkar tidak dapat apa-apa. PAN dulu banyak menang, sekarang PAN banyak kalah.
- Peneliti : **Bagaimana pandangan Abang terhadap turunnya dominasi pengaruh PAN dalam politik di Jambi ?**
- Narasumber : Demokrat bisa seperti PAN. PAN sudah kalah dimana-mana. Pengaruh Kepala Daerah sangat besar. Ketika Pak Zul berkuasa pengaruhnya besar. Jabatan eksekutif menjadi penentu. Pak Zul menjadi penentu. Contoh PAN sekarang. Hazrin Nurdin bukan kepala daerah. Apalagi yang Pak Zul kurang, bantulah rakyat apalagi yang dia kurang. Dia cuma butuh *glory*, dia seperti raja.
- Peneliti : **Apakah Golkar merasa kehilangan dengan kepindahan Hazrin Nurdin ke PAN ?**
- Narasumber : Hazrin Nurdin kader yang cukup potensial dari segi dana. Kami kehilangan juga. Tapi ya politik elastis. Masih banyak kader yang dimiliki Golkar. Kita ngomong keluar busa, akhir-akhirnya mana uang untuk kami. Mereka tetap seperti

itu. Terakhir-terakhir itu yang sangat berpengaruh besar. Jadi mereka kalau dikasih.

Transkrip Wawancara (18)

- Nama Narasumber** : **Paisal Kumar**
Pekerjaan : **Pemimpin Redaksi Jambi Independen**
Waktu : **6 Februari 2012**
Tempat : **Jambi**
- Peneliti : **Bagaimana pandangan abang selaku jurnalis dalam melihat perjalanan Jambi selama otonomi dan desentralisasi ?**
- Narasumber : Memang ada perkembangan sedikit tapi tidak signifikan. Boleh dibilang kekuasaan politik di era desentralisasi ini lebih dipegang oleh orang-orang yang khususnya di Jambi ada dua kekuatan besar pasca reformasi, yaitu keluarga zulkifli dan keluarga manap. Susah bagi kekuatan lain menyaingi dua kekuatan ini. Keduanya punya semua. Di politik kan ada finansial, jaringan, akses ke pusat. Inilah yang mutlak. Banyak tokoh muda muncul tapi mereka tidak mampu mengimbangi dua kekuatan ini.
- Peneliti : **Bagaimana dampak desentralisasi bagi kesejahteraan rakyat di Jambi ?**
- Narasumber : Meningkatkan sedikit cuma karena orang ini punya kekuatan besar mereka bisa menggunakan media. Zulkifli lebih ke pencitraan. Setiap kegiatannya diekspos. Seolah-olah mereka berhasil. Kalau ada kritik biasanya *sensi*. Zulkifli Nurdin banyak mendekati diri ke media. Jadi apapun kegiatan, sekecil apapun kadang baru rencana, itu diekspos. Zulkifli Nurdin punya uang sehingga bisa mengekspos seolah-olah berhasil. Padahal kalau mau diakui sedikitlah kalau pun ada.
- Peneliti : **Mengapa keluarga-keluarga politik ini muncul ketika reformasi ?**
- Narasumber : Seperti kesempatan, selama ini semua diatur dari pusat. Dengan otonomi ini kesempatan untuk mereka bisa eksis. Selain mereka didukung oleh finansial itu. Mutlak. Finansial faktor nomor satu untuk jambi. Mereka didukung finansial itu. Mutlak itu. Itu yang nomer satu.
- Peneliti : **Mengapa pada pemilihan Gubernur Jambi tahun 2010 dan pemilihan umum 2009, Demokrat bisa mengalahkan Zulkifli Nurdin ?**
- Narasumber : Dua keluarga ini kehilangan figur dalam pilgub 2010. Mungkin nanti zumi zola yang digadang-gadang untuk 2015. Mereka mengakui, mereka sedang membenahan. Mereka kekurangan figur.
- Peneliti : **Apa yang berbeda antara kepemimpinan Zulkifli Nurdin dengan Gubernur sebelumnya Abdurahman Sayuti ?**
- Narasumber : Zulkifli lebih ke politik pencitraan. Setiap kegiatannya diekspos. Kalau ada kritik biasanya *sensi*. Mereka banyak mendekati diri ke media. Jadi apapun kegiatan mereka

- sekecil apapun kadang baru rencana itu diekspos. Untuk pencitraan. Tidak ada keberhasilannya. Kalau hasilnya 10 tahun tidak ada. Batanghari 2 pun bermasalah. Berapa tahun anggaran itu dikerjakan. Ratusan milyar. Dibandingkan biaya dengan manfaat tidak sebanding. Programnya bagus *cuman* implementasinya. Program unggulannya replanting karet. Patin jambal.
- Peneliti : **Bagaimana gerakan sosial selama era desentralisasi dan otonomi daerah di Jambi ?**
- Narasumber : Buruh bergerak *kalo cuman* mau menetapkan UMP. Mayday. Itupun tidak kayak di daerah lain. Gerakan mahasiswa kehabisan ide. Berbeda dengan 98. yang penting bersuara tidak ada solusi.
- Peneliti : **Bagaimana dinamika kekuatan tiga besar politik di Jambi, PAN, Golkar dan Demokrat ?**
- Narasumber : PAN sudah ada figur kayaknya Zumi Zola selain artis, masih muda, ganteng pinter jadi daya tarik. Demokrat *incumbent* tapi agak terganggu dengan apa yang terjadi di pusat. PDI P jadi kuda hitam. Banyak anak muda yang bertipe pekerja partai. Golkar *gak* punya figur yang layak. Tokoh tokoh tua yang kredibilitasnya orang sudah tahu semua.
- Peneliti : **Bagaimana pandangan abang mengenai Pemilihan Walikota Jambi tahun 2013 ?**
- Narasumber : Pilwako PAN sudah jelas punya calon sum indra. Bisa jadi PAN musuh bersama. Karena 10 tahun PAN berkuasa, partai lain masih menganggap PAN musuh bersama.
- Peneliti : **Apa yang menyebabkan PAN dan Zulkifli Nurdin begitu berkuasa dan dominan di Jambi ?**
- Narasumber : Faktor nama keluarga mereka memang harum. Pak zul sering turun ke lapangan sedangkan masyarakat kita belum terbiasa pemimpin yang turun langsung. Dengan pencitraan masyarakat lupa dengan visi misinya tertutupi. Karena lima tahun namanya sangat harum maka terpilih kembali.
- Peneliti : **Bagaimana Zulkifli Nurdin bisa memenangkan pilkada Gubernur secara langsung dengan angka mutlak ?**
- Narasumber : Modal reputasi Nurdin Hamzah sebagai orang pribumi terkaya di Jambi membantu Zulkifli Nurdin memuluskan ambisi-ambisi politiknya. Apalagi Zulkifli Nurdin meniru aksi-aksi kedermawanan sang ayah melalui kunjungan langsung ke masyarakat membawa bantuan. Saat itu masyarakat Jambi yang belum terbiasa melihat pemimpin langsung turun ke masyarakat tersentuh hatinya. Citra pemimpin yang merakyat dan dermawan melekat pada diri Zulkifli Nurdin membuat masyarakat tidak mempedulikan visi misinya dalam pencalonan sebagai Gubernur tahun 1999 dan tahun 2005.
- Peneliti : **Mengapa Pak Zulkifli Nurdin tidak mencalonkan istrinya dalam Pemilihan Gubernur tahun 2010 ?**

Narasumber : Ratu munawaroh mungkin bisa menang tapi kesulitan menjalankan kekuasaan karena wanita. Ibu rumah tangga.

Transkrip Wawancara (19)

- Nama Narasumber : PM**
Pekerjaan : Dosen Universitas Jambi
Waktu : 1 Desember 2011
Tempat : Jambi
- Peneliti : **Apa peran Zulkifli Nurdin bagi kemenangan Ratu Munawaroh dalam pemilihan umum DPR RI tahun 2009 ?**
- Narasumber : Kemenangan Ratu Munawaroh banyak dibantu oleh mobilisasi PNS di Provinsi Jambi. Sebagai contoh menjelang hari pemilihan, Ratu Munawaroh pada hari minggu sosialisasi di depan 500 an PNS sebuah dinas beserta istri mereka. Acara yang berlangsung di sebuah balai milik UPT dinas tersebut dibungkus dengan format sosialisasi kesehatan reproduksi. Acara ditutup dengan makan bersama dan bagi-bagi poster dan stiker Ratu Munawaroh. Kepala Dinas ikut mengingatkan agar jangan lupa memilih Ratu Munawaroh.
- Peneliti : **Apakah Zulkifli Nurdin menggunakan kelompok-kelompok kekerasan ?**
- Narasumber : Zulkifli Nurdin melakukan intervensi terhadap organisasi kekerasan di Jambi. Melalui Hazrin Nurdin yang menjadi Ketua AMPG Provinsi Jambi yang pertama. Hazrin Nurdin juga dekat dengan Pemuda Pancasila. Ketua Pemuda Pancasila Indra Armendaris dikenal sebagai orang dekat Hazrin Nurdin. Hazrin Nurdin juga pernah mendatangkan Habieb Riziq Shihab ke Jambi.
- Peneliti : **Apa peran Zulkifli Nurdin dalam kemenangan pasangan Bambang Priyanto-Sum Indra dalam pemilihan Walikota Jambi tahun 2008 ?**
- Narasumber : Dukungan langsung Zulkifli Nurdin kepada pasangan Bambang Priyanto-Sum Indra dengan mengadakan silaturahmi dengan masyarakat Batak di rumah pribadinya di daerah kampung manggis. Acara yang diselenggarakan Lembaga Budaya Batak yang dipimpin oleh Rahmat Derita Harahap dan Benhard Panjaitan mengambil tema Semalam di Bonapasogit. Bintang tamu pada acara tersebut adalah musisi papan atas etnis Batak seperti Victor Hutabarat, Rita Butar-Butar, Trio Ambisi, Jack Marpaung, Joel Simorangkir, Maya Tanjung dan Herti Sitorus. Hadir dalam acara tersebut pasangan Bambang Priyanto-Sum Indra yang akan maju menjadi Walikota-Wakil Walikota Jambi tahun 2008. Zulkifli Nurdin menyatakan dukungannya dan mengajak masyarakat Batak di Jambi agar mendukung pasangan Bambang. Zulkifli Nurdin melalui anak buahnya membagi-bagikan sarung cap gajah duduk kepada ribuan orang yang hadir. Banyak pejabat yang hadir bahkan turut membantu membagi-bagikan sarung.

Zulkifli Nurdin terlibat dalam kemenangan pasangan Bambang Priyanto-Sum Indra pada pemilihan walikota Jambi tahun 2008. Kepentingan Zulkifli Nurdin adalah agar keluarga Nurdin Hamzah mempunyai pengaruh di Kota Jambi yang selama sepuluh tahun dikuasai keluarga Abdul Manap melalui Arifien Manap yang menjadi walikota Jambi sejak tahun 1998 hingga tahun 2008.

Peneliti : **Apa yang menjadi penopang kekuatan politik Zulkifli Nurdin ?**

Narasumber : Zulkifli Nurdin merekrut aktivis mahasiswa 98 untuk tujuan strategis. Pertama, Zulkifli Nurdin ingin dianggap bagian dari gerakan reformasi. Kedua, Zulkifli Nurdin ingin mengontrol gerakan yang berpotensi mengkritisi kebijakannya. Ketiga, aktivis mahasiswa 98 bisa dimanfaatkan dalam pemilukada. Zulkifli Nurdin berhasil membangun sistem dimana semua aktivis mahasiswa akan berlomba-lomba mendekati kepadanya. Organisasi mahasiswa seperti HMI, PMII, GMKI, PMKRI dan GMNI juga tidak luput dari pengaruh Zulkifli Nurdin. Setiap ketua cabang organisasi tersebut akan berusaha mencari perhatian Zulkifli Nurdin agar bisa direkrut menjadi staf pribadi. Demikian pula sama halnya dengan organisasi pemuda seperti GP Ansor dan KNPI. Zulkifli Nurdin memanfaatkan paguyuban etnis dalam menggalang dukungan masyarakat. Melalui organisasi-organisasi etnis Zulkifli Nurdin hendak menanamkan pengaruh yang kuat melalui strategi kultural. Paguyuban etnis-etnis memberikan banyak anugerah etnis berbentuk gelar adat kepada Zulkifli Nurdin. Zulkifli Nurdin menugaskan kerabatnya dan kroninya untuk menguasai berbagai paguyuban etnis di Jambi. Adik iparnya Ade Mirawati menjadi Ketua Himpunan Masyarakat Jambi Asal Sumatera Selatan, Orang dekatnya di PAN seperti Chairul Naim Anik menjadi Ketua Paguyuban Masyarakat Minang PKDP dan Haji Bakri menjadi Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Jambi. Orang dekatnya di pemerintahan seperti Rahmat Derita Harahap menjadi Ketua Lembaga Budaya Batak Jambi. Masyarakat Melayu Jambi menganugerahinya gelar Sri Paduko Putro Mangku Negoro. Masyarakat Bugis Jambi menganugerahinya gelar Daeng Mamase. Masyarakat Minang Jambi menganugerahinya gerlar Maharajo Dewang Sangguano. Masyarakat Batak Jambi menganugerahinya gelar Jaihatan Mangaraja. Masyarakat Sumatera Selatan Jambi menganugerahinya gelar Arif Mangku Negoro. Masyarakat Jawa Jambi memberikan gelar adat Kanjeng Adipati Haryo Ponoto Nagoro, yang penganugerahannya dihadiri langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Masyarakat Sunda di Jambi menganugerahinya gelar kehormatan adat Rakean Pangraksa Praja

- Peneliti : **Bagaimana pers lokal dibawah kekuasaan Zulkifli Nurdin ?**
- Narasumber : Zulkifli Nurdin mengalokasikan iklan pribadi ataupun sebagai Gubernur pada semua media massa yang bersedia menulis hal-hal yang baik saja tentang dirinya. Setiap kegiatannya selalu dia masukkan dalam koran. Terutama koran-koran besar seperti Jambi Independen dan Jambi Ekspres. Melalui kedekatannya dengan media massa, Zulkifli Nurdin berhasil menanamkan citra yang positif tentang dirinya dan pemerintahannya.
- Peneliti : **Kenapa Zulkifli Nurdin bisa berkuasa dengan dominan di Jambi ?**
- Narasumber : Dengan mitos kedermawanan Zulkifli Nurdin, masyarakat mempersepsikan Zulkifli Nurdin adalah pemimpin yang baik. Zulkifli Nurdin dipandang tidak tamak, tidak memperkaya diri dan menjadi Gubernur hanya untuk pengabdian dan mencari nama harum bagi keluarga besarnya. Zulkifli Nurdin bahkan dinilai berkurang hartanya secara drastis sejak menjabat Gubernur Jambi. Persepsi ini sungguh keliru apabila publik lebih kritis dan mendapatkan informasi yang obyektif.
- Peneliti : **Bagaimana pandangan bapak terhadap aktor-aktor baru yang muncul selama desentralisasi di Jambi ?**
- Narasumber : Pemilu 1999 di Jambi memberikan peluang bagi aktor-aktor politik baru hasil reformasi. Pertama, seorang kontraktor pemda yang menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi, Nasrun Arbain terpilih menjadi Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 1999-2004. Nasrun Arbain menjadi Ketua DPRD Provinsi Jambi pertama yang bukan berasal dari purnawirawan TNI/Polri dan veteran pejuang kemerdekaan. Kedua, seorang pengusaha pribumi terkaya yang menjabat Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, Zulkifli Nurdin terpilih menjadi Anggota DPR RI. Sebelum reformasi Zulkifli Nurdin aktif di Partai Golkar dan menjadi Bendahara Partai Golkar sejak tahun 1996. Ketiga, seorang pengusaha yang menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan, Agneta Singedekane terpilih menjadi Anggota DPR RI. Agneta Singedekane merupakan anak dari Gubernur pertama Jambi, Jusuf Singedekane. Keempat, seorang kontraktor pemda yang menjadi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, Zoerman Manap terpilih menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 1999-2004. Zoerman Manap merupakan anak pertama dari Gubernur kedua Jambi, Haji Abdul Manap. Semua tokoh tersebut juga aktif di Gapensi dan Kadin serta berbagai asosiasi-asosiasi pengusaha atau kontraktor di Jambi. Zulkifli Nurdin pernah menjadi Ketua Gapensi dan Ketua Kadin di Jambi. Sedangkan Zoerman Manap pernah menjadi Ketua Gapensi di Jambi. Keluarga Nurdin Hamzah

dan Keluarga Abdul Manap juga berhasil membangun simbol-simbol kekuasaan mereka di Jambi. RSUD di Kota Jambi diberi nama RSUD Abdul Manap, ayah dari Zoerman Manap. Sedangkan RSUD di Tanjung Jabung Timur diberi nama RSUD Nurdin Hamzah, ayah dari Zulkifli Nurdin. Bahkan Zulkifli Nurdin dan Keluarga Nurdin Hamzah membangun lebih banyak simbol. Mereka mempunyai tiga sekolah tinggi dengan nama Nurdin Hamzah yaitu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nurdin Hamzah, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nurdin Hamzah dan Akademi Bahasa Asing Nurdin Hamzah. Mereka juga mempunyai masjid yang mereka beri nama Masjid Nurdin Hasanah, perumahan elit Nurdin Hamzah, dua supermarket dengan nama Supermarket Enha dan NH Plaza dan mempunyai kompleks pemakaman keluarga. Zulkifli Nurdin, Hazrin Nurdin dan Zoerman Manap menjadi pengusaha lokal di Jambi pada masa Orde Baru. Mereka semua aktif di Gapensi dan Kadin Jambi. Nurdin Hamzah mendirikan PT Nurdin Hamzah perusahaan besar di Jambi yang fokus menjadi pemasok sembako di Provinsi Jambi termasuk Provinsi lain seperti Jakarta dan Surabaya. PT Nurdin Hamzah juga menjadi pemasok semua produk Unilever. Keluarga Nurdin Hamzah mempunyai bisnis inti di bidang perdagangan. PT Nurdin Hamzah menjadi distributor utama sembako untuk Provinsi Jambi sejak awal kekuasaan Orde Baru.

- Peneliti : **Bagaimana netralitas PNS dibawah kekuasaan Zulkifli Nurdin ?**
- Narasumber : Zulkifli Nurdin menggunakan PNS dan Birokrat melalui pengaturan pejabat-pejabat yang setia kepadanya dan pejabat-pejabat yang memberikan dukungan finansial kepadanya pada saat pemilihan Gubernur. PNS dan Birokrat dimanfaatkan hak pilihnya agar memilih sesuai dengan keinginan Zulkifli Nurdin. Misalnya PNS di lingkungan Provinsi Jambi beserta keluarganya dimobilisasi mendukung keponakannya menjadi Wakil Walikota dan Istrinya menjadi Anggota DPR RI. PNS dan Birokrat juga dimanfaatkan untuk penggalangan dana politik bagi Zulkifli Nurdin. Misalnya melalui pengaturan pemenang kontrak tender pemerintah daerah. Zulkifli Nuridin mengangkat AM Firdaus sebagai sekretaris daerah. Sebelumnya AM Firdaus adalah Kepala Dispenda Provinsi Jambi. Zulkifli Nurdin juga mengangkat Junaidi T. Noor sebagai Kepala Bappeda Provinsi Jambi. AM Firdaus masih terhitung saudara kandung dengan Zulkifli Nurdin dan Junaidi T. Noor adalah teman sekolah Zulkifli Nurdin ketika di SMA 2 Jambi. Zulkifli Nurdin memiliki kedekatan yang lebih dengan penyelenggara pemilu ketimbang Zoerman Manap ataupun politisi yang lain. Ini dibuktikan dengan

kedekatan Zulkifli Nurdin dan Prof Rozali Abdullah (Mantan Ketua KPU Provinsi Jambi saat Pemilihan Gubernur tahun 2005) tetap berlanjut dengan pengangkatan Prof. Rozali Abdullah sebagai Ketua STISIP Nurdin Hamzah Jambi setelah tidak menjabat Ketua KPU Provinsi Jambi. Selain dengan Prof. Rozali Abdullah, Zulkifli Nurdin dekat dengan Abdul Rasyid. Ketika Hazrin Nurdin menikahkan anaknya di Jambi, Abdul Rasyid menjadi sekretaris panitianya.

Transkrip Wawancara (20)

Nama Narasumber : Rivani
Pekerjaan : Direktur LSM Cappa Jambi/ Mantan Aktivistis 98
Waktu : 22 November 2011
Tempat : Jambi

Peneliti : **Bagaimana pandangan abang tentang perjalanan desentralisasi dan otonomi daerah di Jambi apakah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat di Jambi ?**

Narasumber : Negara melimpahkan beberapa wewenang yang selama ini tersentralisasi di Jakarta kepada daerah-daerah. Perizinan sumber daya alam. Kalau dulu dikeluarkan oleh Kementerian di Jakarta. Kebun kelapa sawit dibawah 20.000 hektar direkomendasi oleh Gubernur. Kalau diatas 20.000 hektar baru HGU oleh BPN. Demikian juga kehutanan. Izin-izin tersentralisasi di Kementerian Kehutanan dibagi juga ke pemerintah daerah. Tambang juga demikian. Otonomi daerah justru memperluas dan meningkatkan konflik masyarakat terutama berkaitan dengan konflik sumber daya alam. Dulu kita bayangkan reformasi dan otoda militer harus kembali ke barak. Pendekatan represi kepolisian dikurangi. Kenyataannya reformasi sama saja. Polisi masih jagoan menembaki masyarakat ketika berkonflik. Berkolaborasi dengan pengusaha. Bahkan yang lebih parah indikasi menunjukkan banyak kebijakan pemerintah daerah disetir oleh kebijakan pro investasi. Setiap gubernur berkuasa selalu bilang kita butuh investasi. Bukan kita butuh penguatan rakyat untuk menopang kesejahteraan rakyat. Kebijakan pemda di era desentralisasi adalah pro modal. Modal berhasil merampas otonomi daerah. Tidak ada dampak positif otonomi daerah bagi kesejahteraan rakyat miskin. Otonomi daerah justru semakin menjauhkan rakyat dari kontrol terhadap sumber kekayaan alam. Yang paling instan dan mudah bagi pemda untuk mencari dana adalah menjual kekayaan alamnya. Caranya sederhana bisnis ijin saja. Mana ada pemda yang punya *planning* 10-20 tahun kedepan terhadap sektor ekstraktifnya kehutanan perkebunan pertambangan dan energi. Tidak ada *blue print* itu. Kebanyakan mereka bisnis ijin. Pemburu rente. Ada raja-raja, benalu-benalu yang mendapatkan *benefit* dari otonomi daerah. Kekuasaan tersebar musuh rakyat miskin makin banyak.

Peneliti : **Bagaimana dengan gerakan rakyat di Jambi selama desentralisasi ?**

Narasumber : Kooptasi rezim Orde Baru sangat kuat. Apolitisasi tinggi sekali. Sehingga aktivis gerakan sosial tidak punya waktu

yang cukup. Orang gila yang berani bicara seperti aktivis dulu. Artinya orang yang siap kehilangan hidupnya. Kooptasi rezim membuat praktek birokrasi gagap. Rezim yang masuk pada otonomi daerah tidak jauh berbeda. Orang bisa berbeda tetapi pola pikir dan wataknya sama. Pro modal, legalistik formal. Sama saja. Sedangkan masyarakat sipil masih tidak dalam fase yang *practical* ditengah *grassroot*. Masyarakat menjadi pragmatis karena model pembangunan pro modal bergantung investasi dan masyarakat jadi bergantung kepada negara. Buruh kehilangan harapan ketika ingin bergerak diancam PHK. Petani banyak yang apolitis dan tidak terorganisir. Tanah dirampas mereka pragmatis akhirnya dengan menerima pola kemitraan. Padahal menerima pola kemitraan adalah melepas hak mereka atas tanah mereka. Masyarakat adat pun dirumahkan. Mereka juga semakin fragmentatif. Hal tersebut membuat fragmentasi di dalam gerakan sosial di Jambi semakin besar. Euforia terhadap gerakan reformasi mendirikan LSM. Ada 4.000 LSM di Jambi. Tidak heran ada perusahaan punya LSM. LSM menjadi pelaksana kepentingan perusahaan. Ada LSM melawan LSM. Atau gerakan masyarakat sipil A melawan gerakan masyarakat sipil B. Bayangkan. Bisnis ijin dari kesbangpol. Sebenarnya buah reformasi tetapi berhasil dibajak sehingga terfragmentasi. Konsolidasi gerakan sosial di Jambi dikalahkan oleh konsolidasi modal dan kooptasi negara.

- Peneliti : **Bagaimana dengan pemerintahan Zulkifli Nurdin selama sepuluh tahun di Jambi ?**
- Narasumber : Pak zul kan latar belakangnya pengusaha. Misalnya diluncurkan program heboh sawit sejuta hektar. Bangun jembatan muara sabak misalnya. Yang tujuannya untuk modal aman berinvestasi. Infrastruktur untuk rakyat tidak dipikirkan yang dipikirkan infrastruktur untuk modal. Pak zul juga gagal dalam memotret konflik-konflik sosial. Misalnya konflik Sinar Mas Group dengan petani. Terjadi juga penggunaan aparat kekerasan. Tidak ada evaluasi dari pemerintah bahwa ada konflik yang dihasilkan dari kebijakan mereka yang pro investasi. Jambi sering ditutup asap. Paling parah 2007. Kenapa ada asap karena hutan dihancurkan. Warisan pak zul adalah konflik semakin tinggi. Sawit sejuta hektar diatas kertas tidak terjadi. Ternyata sawit 1,1 juta hektar sudah terjadi. Kalau pemerintah masih mempublish lahan sawit masih 400 ribu hektar di lapangan mencapai 800.000 ribu hektar. Kalau di perkebunan kelapa sawit berbagi ya. Ada raja garuda mas punya sukanto tanoto. Kalau kehutanan sinar mas yang paling jago. SMG kan holdingnya. Guritanya sudah hulu ke hilir. Sinar Mas Forestry inilah yang membawahi WKS. Ada APP untuk pulp and paper. WKS

- punya HTI. Mereka melampaui penguasaan angka psikologis setengah juta.
- Peneliti : **Apakah Zulkifli Nurdin tidak mendapatkan keuntungan atas izin-izin tersebut?**
- Narasumber : Klaim Sinar Mas dia sudah berkontribusi besar untuk Provinsi Jambi. Selalu dia katakan dia sudah menyerap tenaga kerja, membangun jalan, membangun ekonomi. Artinya pemerintahan Pak Zul mendapatkan keuntungan dari perusahaan. Basisnya pro modal pasti memberikan privelese kepada perusahaan-perusahaan tersebut daripada kepada masyarakat. Pasti ada keuntungan yang sudah mereka desain.
- Peneliti : **Perusahaan menyumbang dana kampanye ?**
- Narasumber : Pasti. Kalau tidak salah. Sebagai contoh Ada di berita Sinar Mas memberikan sumbangan kepada kandidat presiden. Walaupun memang susah melacak bukti-bukti langsung mengenai kontribusi perusahaan besar. Harus diterobos dengan investigasi. Saya pikir sangat logis perusahaan besar terlibat memberikan sumbangan kepada kandidat. Perusahaan harus mengelola berbagai resiko atau manajemen resiko termasuk resiko politik. Dalam konteks inilah perusahaan besar terlibat dalam pilkada. Indikasinya bisa dilihat dari sebenarnya Zulkifli Nurdin punya kewenangan untuk mengkaji ulang izin-izin konsesi perkebunan dan pertambangan yang telah dia keluarkan kepada perusahaan-perusahaan besar seperti tuntutan masyarakat. Zulkifli Nurdin juga bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang harus dipatuhi perusahaan. Tetapi itu semua tidak dilakukannya.
- Peneliti : **Bagaimana kondisi rakyat Jambi dibawah pemerintahan Zulkifli Nurdin ?**
- Narasumber : Kalau kita mau pergi ke lapangan. Kami bekerja ditengah masyarakat adat Bathin IX sampai sekarang mereka masih hidup di tenda. Bahkan bulan agustus kemarin mereka semua digusur oleh perusahaan terbesar kelapa sawit terbesar di dunia, Wilmar Group. Sampai sekarang teman-teman orang rimba di TNBD masih kesulitan baca dan tulis. Mereka tidak didukung guru. Pak Zul bilang mau memperjuangkan orang rimba. Mereka terancam hidupnya karena program Taman Nasional Bukit Dua Belas. Kebutuhan dasar belum terpenuhi. Suku Anak Dalam banyak yang berhenti sekolah karena gurunya digaji hanya tiga ratus ribu per tiga bulan. Jadi saya ragu MDG's dapat terpenuhi. Secara kualitatif kebutuhan dasar memburuk.
- Peneliti : **Ada tidak kekuatan politik yang lebih berpihak kepada kesejahteraan rakyat di Jambi ?**
- Narasumber : Saya pikir tetap ada karena bagaimanapun kehidupan akan dinamis tidak akan statis. Muncul gerakan petani melawan perusahaan seperti yang diinisiasi kawan-kawan dari PPJ Atau muncul gerakan masyarakat lokal secara sporadis.

Melawan perkebunan kelapa sawit, kehutanan dan pertambangan. Walaupun lokalis sekali dan jejaringnya masih lemah. Menurut saya yang patut jadi catatan. Masyarakat kritis bertambah untuk sekarang ini. Artinya tugas kawan-kawan berhasil menambah wawasan rakyat. Walaupun yang belum tuntas adalah bagaimana sebuah perubahan sosial dapat berhasil dengan tuntas. Kan ada aktivis mahasiswa, aktivis gerakan masuk ke dalam parlemen. Cuma memang sistem kepartaian membuat dia bisa melakukan apa yang dulu ia ingin perjuangkan di jalanan. Ada hambatan tata kelola partai membuat mereka berkompromi.

Peneliti : **Demokratisasi dan desentralisasi bisa menghasilkan orang kuat di tingkat lokal bagaimana pendapat abang ?**

Narasumber : Keluarga Nurdin sudah membangun dinasti politik kasat mata sekali. Istri, menantu, keponakan, anak, dikader untuk menjadi penguasa politik. Politik kita akan menjadi sakit kalo patronase, patron klien seperti ini. Ada perselingkuhan patronase dan kooptasi. Orang diracuni kalo mau buat partai harus duit banyak. Celakanya struktur partai memperbolehkan, istri jadi DPR, adik ketua partai, anak bupati, keponakan wakil walikota. Artinya partai kan bersifat pragmatis. PAN juga mendidik untuk jadi pemimpin partai harus kaya. Mengkooptasi pikiran masyarakat, dinasti politik itu dilarang sekarang boleh. Masyarakat pragmatis, bantuan tidaklah charity tapi sudah politis. Masyarakat mengajukan proposal kepada semua kandidat. Siapa menyumbang paling banyak itu yang akan dipilih.

Peneliti : **Kenapa Zulkifli Nurdin bergitu dominan dalam politik lokal di Jambi ?**

Narasumber : Jadi satu modal itu pasti. Tidak ada keluarga politik yang miskin. Dengan modal anda bisa kontrol banyak hal. Politik anda kontrol. Parlemen bisa anda kontrol. Sistem manfaat ekonomi bisa anda kontrol. Munculnya kelompok-kelompok preman. Secara politik tidak matang tapi mereka punya otot dan massa. Itu bisa masuk ke dalam struktur politik dengan uang anda bisa kontrol itu. Ketiganya ada dalam dinasti Pak Zul. Tidak menjadi rahasia kelompok masyarakat diintimidasi oleh kelompok-kelompok preman. Tidak menjadi rahasia ada demonstrasi masyarakat dihadang oleh preman. Atau rumah mereka diketuk-ketuk oleh preman.

Peneliti : **Apakah Zulkifli Nurdin menggunakan organisasi kekerasan dalam mempertahankan kekuasaannya ?**

Narasumber : Anda tau AMPG siapa dulu ketua AMPG. Ketua AMPG hazrin nurdin. Baru sekarang diambil oleh Fasya. Ini strategi juga oleh keluarga nurdin untuk mengontrol keluarga manap. AMPG kan organisasi semi militer seperti banser. Setelah Hazrin ke PAN, Fasya jadi Ketua AMPG. Kalau di Jambi

polanya tidak mengkristal dalam etnisitas. Bisa individual, bisa terorganisasi dalam LSM tertentu. Anda bisa lihat nama-nama LSM di Jambi unik. Ada Tegas, Libas, Terabas. Cara mereka bisa eksis. Walaupun penelitian mendalam. Mereka bertujuan melindungi kroni politik. Mereka menjadi kroni dinasti-dinasti politik. Polanya sama tapi lebih cair. Bisa cara kooptasi bisa cara intimidasi. Ada IPB, Barisan Pemuda Legok. Ada aksi yang kritis, ada gerakan rakyat, ada LSM yang mendatangi mereka. Bisa kooptasi bisa intimidasi. Prakteknya sama saja dengan daerah lain.

- Peneliti : **Bagaimana postur gerakan rakyat di Jambi ?**
 Narasumber : Ada Roida Pane dan SBSI mereka memadukan gerakan kesejahteraan dengan gerakan jalanan. SPN belum terlalu baik. Walaupun belum populer gerakan buruh. Sektor petani PPJ masih cukup baik untuk gerakan melawan korporasi. Setara membangun kelompok tani mandiri pangan. Gerakan tani lokal hidup. AGRA aktivisnya masih terlalu muda masih banyak belajar. STN punya basis di batanghari. Ada gerakan lingkungan berbasis HAM seperti walhi dan cappa. Belajar beraliansi juga bukan pekerjaan mudah bagi masyarakat sipil. Membangun jejaring kelompok masyarakat sipil lebih potensial mendorong perubahan ketimbang mempercayakan kepada kelompok aktivis tertentu.
- Peneliti : **Bagaimana dengan KKN di Jambi ?**
 Narasumber : Acuannya sederhana dari temuan BPK. Dari berita koran cukup tinggi. Hal seperti ini tidak diikuti dengan aksi yang baik pemberantasan korupsi. Korupsi pasti melibatkan kekuasaan cukup besar. Pelayanan publik di jambi rendah itu bukan rendahnya kinerja menurut saya itu korup.
- Peneliti : **Sekda masuk penjara karena korupsi tetapi Zulkifli Nurdin tidak masuk, apakah karena dia memang bersih ?**
 Narasumber : Banyak juga kasus-kasus yang menyangkut Pak Zul ya. Banyak kasus yang melibatkan pak zul. Mes di jakarta, waterboom misalnya. Saya yakin beliau tahu persis. Pak zul punya jaringan yang kuat. Perseteruan politik pak zul sangat rendah sekali. Sehingga dia aman. Saya yakin beliau tahu persis. Cuma kekuatan keluarga Nurdin cukup kuat. Menjadi nilai plus.
- Peneliti : **Bagaimana konflik tanah di Jambi ?**
 Narasumber : Konflik lahan di Jambi 2001 ada 45 sekarang menjadi 75. Kualitas pelanggaran HAM juga makin tinggi. Ifdhal, Edang, Joni Simanjuntak sering kemari.
- Peneliti : **Bagaimana masa depan keluarga Zulkifli Nurdin dengan potensi dalam diri Zumi Zola yang dipersiapkan menjadi Gubernur masa depan ?**
 Narasumber : HBA secara pribadi sangat respek kepada Pak Zul. Tapi kereta HBA sangat panjang. Banyak yang tidak suka. Bis a juga gerbong HBA putus. Tahapannya kan pilwako baru

pilkada gubernur. Kalau melihat potensi pertaruhannya pada kekuatan modal. Tidak bisa lepas dari modal. Kalau usaha mereka masih kuat, paling tidak untuk walikota Jambi masih dapat. Kemudian jejaring kroninya sudah terfragmentasi. Tinggal yang loyalis mereka. Lari-lari juga berpindah juga. Jadi PR lah bagi Keluarga Nurdin.

Transkrip Wawancara (21)

Nama Narasumber : **Roide Pane**
Pekerjaan : **Ketua Wilayah SBSI Provinsi Jambi**
Waktu : **25 November 2011**
Tempat : **Jambi**

Peneliti : **Bagaimana kondisi gerakan buruh di Jambi pada masa desentralisasi ?**

Narasumber : Kalau praktek di lapangan saya lihat tidak ada yang berubah. Di tataran kebijakan banyak yang berubah. Namun dalam implementasi tetap sama-sama saja. Misalnya tentang upah sampai sekarang menentukan upah tetap upah minimum dan masih hitungan seorang lajang bukan keluarga. Masih tetap seperti yang lamalah. Selain upah masalah yang dihadapi buruh di Jambi adalah sistem kerja kontrak. Kalau ada kasus militan *nian* matipun mau. Gerakan buruh di Jambi masih sangat-sangat kecil. Buruh yang tak terorganisir sangat banyak. Tidak sampai seratus ribu buruh yang masuk serikat dari lima ratus ribu. Jadi hanya dua puluh persen. Buruh belum-belum betul sadar haknya. Buruh di Jambi lebih agama ketimbang kelasnya.

Peneliti : **Bagaimana pandangan Buruh terhadap kepemimpinan Zulkifli Nurdin sebagai Gubernur Jambi selama dua periode ?**

Narasumber : Kenaikan upah buruh karena desakan buruh melalui demo bukan kebaikan hati gubernur. Gubernur hanya tergantung dengan dewan pengupahan yang ada. Gubernur punya kewenangan untuk menambahkan UMP tapi tidak dilakukan. Pemimpin di Jambi tidak pernah melakukan perubahan kenaikan upah dari usulan dewan pengupahan. Gubernur harusnya bisa berpikir sendiri melihat status sosial buruh. Dia tidak mungkin di PTUN kan sama pengusaha atau dewan pengupahan kalau menaikkan UMP dari usulan dewan pengupahan. Gubernur tidak pernah bertemu dengan serikat buruh. Gubernur tidak paham tentang perburuhan dan tidak mau belajar. Seharusnya setahun sekali dia memanggil serikat buruh, asosiasi pengusaha, disnaker untuk membicarakan masalah buruh. Ada lembaga LKS tripartit ketuanya gubernur seharusnya di sinilah semua masalah buruh di Jambi dibicarakan. Ini dapurnya. Gubernur sekalipun tidak pernah ikut dalam pertemuan LKS tripartit. Mereka tidak peduli dengan keadaan buruh di Jambi.

Peneliti : **Berapa postur kekuatan gerakan buruh di Jambi ?**

Narasumber : Gerakan buruh di Jambi masih sangat-sangat kecil. Karena Buruh yang tak terorganisir sangat banyak. Persentase kalau dari verifikasi Disnaker tahun ini tidak sampai seratus ribu. Angkatan kerja lima ratusan ribu. Sehingga teman-teman

- yang belum masuk serikat susah mengetahui perkembangan. Kurang paham.
- Peneliti : **Kenapa SBSI sering melakukan demonstrasi dibandingkan serikat buruh yang lain ?**
- Narasumber : Kalau KSPSI hubungan antara pengurus dengan anggota kurang. Ada anggota tidak tahu dengan siapa pengurusnya. Siapa Ketua DPD nya, siapa Ketua Konfederasinya. Kadang pengurus PUK tidak kenal. Apalagi pengurus DPC. Jadi memang kurang komunikasi ya saya lihat. Kemudian selain itu yang bergabung di Dewan Pengupahan, Kahutindo. Setahu saya Kahutindo hanya punya basis di PSUT setelah banyak perusahaan kayu ditutup. Tidak punya beban mereka. Kalau di kita komunikasi tetap ada dan mekanisme tetap jalan. Setiap pengusulan UMP kita undang semua pengurus dari tingkat perusahaan. Ada masukan-masukan. Jadi ada target minimal.
- Peneliti : **Sektor mana yang terkuat dari gerakan buruh di Jambi ?**
- Narasumber : Saat ini buruh kuat di sektor perkebunan saat ini. Kalau dulu di perkebunan. Kondisi buruh perkebunan sangat memprihatinkan. Banyak persoalan. Resikonya sangat tinggi statusnya tidak tetap. Sektor perkebunan banyak permasalahan karena tidak dianggap karyawan. Kerjanya berat resikonya tinggi.
- Peneliti : **Ada tidak partai politik yang membantu perjuangan buruh SBSI ?**
- Narasumber : Sampai hari ini tidak ada. Paling tanggapan normatif di koran. Tidak ada komunikasi yang dibangun. Tidak ada partai yang membantu perjuangan buruh mendapatkan upah yang layak. Tidak ada tindakan dan komunikasi yang dibangun dengan kita. Buruh dianggap tidak seksi isunya oleh partai politik di Jambi. Tidak ada duitnya disitu.
- Peneliti : **Bisa tidak buruh di Jambi melakukan pemogokan seperti di Batam ?**
- Narasumber : Buruh di Jambi tidak terkonsentrasi di sebuah kawasan. Apalagi di kota Jambi cuma ada pabrik *crumb rubber* (karet) dengan buruh sekitar 1000-an. Salah satu yang buat gerakan buruh di Jambi kecil ya itu. Kalau ada dulu buruh di perkebunan enak. Ada *shift-shift* an. Kalau sekarang di perkebunan tidak *shift-shift* an.
- Peneliti : **Ada tidak anggota legislatif yang dari buruh di Jambi ?**
- Narasumber : Tidak ada satupun anggota legislatif dari kalangan buruh
- Peneliti : **Bagaimana hubungan SBSI dengan gerakan sosial lain di Jambi ?**
- Narasumber : Hubungan komunikasi ada dengan Persatuan Petani Jambi tetapi karena kepentingan berbeda jarang turun ke jalan bersama. Mereka tidak mengerti persoalan buruh dan kami tidak mengerti persoalan petani. Tapi kalau di tataran diskusi

- kita sering bertemu. Selain itu ada CAPP. Serikat Petani Indonesia ada beberapa kali kita diskusi.
- Peneliti : **Apa perbedaan gerakan buruh di Jambi ketika era orde baru dengan desentralisasi ?**
- Narasumber : Kayaknya lebih apa dulu lebih maju dulu gerakan buruh di Jambi sebelum reformasi dengan selama reformasi. Mungkin karena tidak ada musuh bersama. Kalau dulu kan tantangannya banyak jadi kita aktivis lebih. Kalau sekarang *adem-adem aja* tantangannya.
- Peneliti : **Apakah otonomi daerah dan desentralisasi membantu menambah kesejahteraan buruh ?**
- Narasumber : Banyak di daerah kabupaten, dinas tenaga kerja yang bertugas menjadi mediator tidak punya *background* yang baik. Tidak paham dengan masalah buruh. Khususnya di Kabupaten. Tidak paham. Sangat-sangat susah. Kalau dulu enak. Sekarang koordinasi tidak jelas.
- Peneliti : **Selain upah, apa problem yang dihadapi buruh di Jambi ?**
- Narasumber : Selain upah masalah yang dihadapi buruh di jambi adalah *outsourcing*, sistem kerja kontrak. Semua kerja penambangan ada pihak ketiga. Makanya banyak persoalan. Itu membuat kesulitan. Masa depan buruh lebih suram. Tidak bisa berunding upah. Tidak ada Perjanjian Kerja Bersama.
- Peneliti : **Bagaimana dengan pilkada langsung, apakah memberikan dampak positif bagi buruh ?**
- Narasumber : Sama saja. Tidak ada perubahan. Capeknya saja kita. Sadar betul buruh belum tahu haknya. Pola pikirnya masih jauh. Belum tinggi.
- Peneliti : **Bagaimana SBSI menyikapi pilkada di Jambi ?**
- Narasumber : Pilkada ini kan masih diukur dengan uang. Kalau tidak punya uang, seideal apa pun tidak akan dipilih orang. Walaupun tidak idealis tapi menghamburkan uang kita dipilih orang.
- Peneliti : **Kalau ditawarkan kontrak politik apa yang ingin SBSI perjuangkan ?**
- Narasumber : Tidak ada dewan pengupahan di kabupaten kota. Semua terfokus ke provinsi. Alasan klasik apindo tidak punya dpc di tiap kabupaten. Apindo tidak mau buat dewan pengupahan di kabupaten karena UMK harus 5 % lebih tinggi dari UMP. Masa kerjanya sekian tahun pengusaha hanya membayar sesuai UMP.

Transkrip Wawancara (22)

Nama Narasumber : Saiful Azwar
Pekerjaan : Sekretaris DPW Provinsi Jambi
Waktu : 2 Desember 2011
Tempat : Jambi

Peneliti : **Bagaimana pandangan abang tentang perkembangan PAN di Jambi ?**

Narasumber : Dari 1999 ke 2004, dari 2004 ke 2009. Tiap pemilu ada peningkatan. Trend PAN agak menanjak. Tiga kursi di pemilu 99, delapan kursi di pemilu 2004, delapan kursi di pemilu 2009. PAN bisa menambah kursi berkaitan dengan bertambahnya jumlah penduduk diatas 3 juta. Jadi kursi DPRD sampai 55 kursi. Apalagi nanti diberlakukannya misalnya PT 2,5 %, 3 % atau 4 % secara nasional. Kita yakin bertahan. Kita optimis.

Peneliti : **Apakah ada kontribusi Zulkifli Nurdin untuk membesarkan PAN ?**

Narasumber : Dua kali pemilu kebetulan menjabat Gubernur. Kontribusi beliau sangat besar melihat hasil pemilu 2004 dan 2009. Beliau merupakan ikon PAN di Provinsi Jambi. Apabila beliau ngomong a otomatis dibawah akan menurut. Apalagi di tanjung jabung timur sangat signifikan mendongkrak suara PAN disana. Pasca beliau ini belum kita lihat. Apakah kita bisa bertahan. Masa perubahan bagi PAN ini harus kita sikapi.

Peneliti : **Mengapa PAN besar di daerah yang bukan basis Muhammadiyah ?**

Narasumber : Pertama tadi figur Pak Zulkifli Nurdin. PAN bisa besar karena figur Pak Zulkifli Nurdin sebagai Gubernur. Kalau di Jambi, massa NU dan Muhammadiyah tidak begitu kental seperti di Jawa. Di Jambi tidak tertutup massa NU memilih PAN. Walaupun Muhammadiyah jumlahnya kecil tapi sebagian besar memilih PAN. Dimasa Pak Zul juga kita agak terlena karena terlalu mengandalkan figur beliau. Waktu beliau jadi kepala daerah dan Ketua PAN, ada delapan atau sembilan bupati yang merapat ke PAN.

Peneliti : **Apa perbedaan yang dirasakan antara PAN dipimpin Zulkifli Nurdin dan Hazrin Nurdin ?**

Narasumber : Karena besar pengaruh beliau di provinsi jambi banyak calon-calon bupati menggunakan kendaraan PAN. Karena beliau figur sentral maka proses di dalam tidak terlalu berat. Apabila beliau ngomong a otomatis dibawah akan menurut. Biaya sangat rendah. Bahkan di suatu daerah apabila tidak mampu pendanaan beliau membantu pendanaan. Pembiayaan-pembiayaan itu biaya perahu tidak ada. Malah dibantu pembiayaan. Malah di suatu daerah dibantu

- pendanaan. Jadi disini saya lihat kontribusinya sangat besar. Kemudian ada perubahan mengikuti pergantian kepemimpinan daerah.
- Peneliti : **Ada berapa kepala daerah yang masih setia ke PAN walaupun Pak Zulkifli sudah tidak menjadi Gubernur lagi ?**
- Narasumber : Bupati Tanjab Timur Zumi Zola, Wakil Walikota Sum Indra, Wakil Bupati Batanghari Sinwan, Bupati Sarolangun Cek Endra dan Wakil Bupati Tanjab Barat Katamso. Usman Ermulan kita dukung. PAN sendirian waktu itu. Beliau bukan incumbent. Beliau tidak punya uang. Tapi kita yakin masih punya pengaruh. Didampingi mantan ajudan Pak Zul. Secara emosional dekat dengan Pak Zul. Ke depan pilkada tiga daerah kalau tidak bupati wakil bupati harus dari PAN. Kader murni. Kita mengutamakan kader. Walaupun kalah tidak masalah. Artinya kita melakukan pembelajaran politik. Ada *lost* pengkaderan ketika Pak Zul menjadi Gubernur. Saya bingung ada tps yang kosong artinya ada pengurus yang tidak milih kita. Itu jadi evaluasi kita. Perhitungan saya untuk jadi anggota dprd kabupaten melalui money politik dan jaringan keluarga mendapatkan 700 suara abis 70 juta an
- Peneliti : **Kenapa Pak Zul dulu bisa menang pilkada lebih dari 80 % suara ?**
- Narasumber : Pertama artinya beliau sebagai pengusaha orientasinya bukan mencari *fee*. Beliau tidak memikirkan *fee*, beliau menggunakan semua APBD untuk bantuan ke masyarakat. Beliau tidak memikirkan *fee*. Beliau menggunakan semua APBD untuk bantuan ke masyarakat. Waktu itu anggaran masih longgar beliau manfaatkan untuk bantuan sosial. Tidak untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan masyarakat dan pembesaran partai. Di 2005 beliau menggunakan investasi politik.
- Peneliti : **Tanpa dengan Golkar pun, Pak Zul pasti menang ?**
- Narasumber : Perhitungan kita ditambah Golkar jadi menang mutlak.
- Peneliti : **Kenapa PAN-Golkar harmonis di 2004-2009 ?**
- Narasumber : Golkar-PAN bisa harmonis karena lebih untuk stabilitas di parlemen itu sendiri. Program lancar tidak dihambat di legislatif. Waktu itu Golkar dan PAN besar di parlemen. Keuntungan waktu itu
- Peneliti : **Mengapa Zumi Zola bisa menang di Tanjung Jabung Timur ?**
- Narasumber : Kalau etnis kita kalah, Bugis-Jawa sudah 60 %. Juber-Ironi kan Bugis-Jawa sangat kuat sekali. Strategi politik kita. Kita lihat potensi. Zumi Zola sudah dikenal masyarakat. Zumi Zola garap pemilih pemula. Paguyuban kami dari partai yang garap. Ibu ratu pak zul juga turun kesana. Ada masyarakat yang ingin balas jasa ke pak zulkifli nurdin karena pembangunan Tanjab Timur. Kalau ketua partai lain mana

mau turun ke bawah. Pak hazrin nurdin mau turun kebawah. Selama 3 bulan penuh kami berangkat jam 8 pagi pulang jam 3 pagi terus berangkat lagi jam 8 pagi. Kita sosialisasi mengingatkan bahwa ini anak pak zul. Kita pendekatan untuk mengingatkan ini putra pak zulkifli nurdin dan beliau sudah banyak membantu tanjab timur. Apalagi di tanjung jabung timur sangat signifikan mendongkrak suara disana.

Peneliti : **Bagaimana peluang Sum Indra menang dalam Pemilihan Walikota tahun 2013 ?**

Narasumber : Di walikota kita juga optimis kita sudah bergerak dari awal kita anggap beliau juga incumbent. Kita juga menggerakkan mesin partai politik. Anggota dewan kita betul-betul disiplin. Pak sum ingin berbuat tapi kesempatan tidak ada. Dari PAN tidak ada anggota legislatif yang main proyek. *Clean*. Kalau kota sudah jelas pak sum yang maju. Pak Hazrin akan all out tapi Pak Zul tidak bisa all out lagi. Beliau masih bersedia membantu kampanye-kampanye PAN. Beliau sekarang Ketua Majelis Pertimbangan Partai.

Peneliti : **Apa perbedaan Pak Zul dengan Pak Hazrin sebagai Ketua DPW PAN ?**

Narasumber : Pasti berkurang sekali ketika pak zul masih menjabat ketua dpw dan gubernur. Kalau dulu lebih kepada figur beliau. Kalau pak hazrin lebih kepada kerjasama tim dan soliditas. Kalau sekarang ketua turun langsung. Kalau dulu ketua cuma terima laporan. Kalau sekarang rapat-rapat pasti hadir. Kalau dulu tidak selalu hadir. Saya pikir sama-sama keduanya royal kepada partai. Sisi finansial tidak ada kegoncangan.

Peneliti : **Siapa yang dipersiapkan menjadi pemimpin PAN di masa depan ? Menjadi Calon Gubernur tahun 2015 ?**

Narasumber : Mungkin yang kita proyeksikan ke depan pak ketua dpw dan pak zumi zola. *Test case* nya tanjab timur. Apakah beliau berhasil membangun daerah. Kalau di tanjabtim berhasil maka ada peluang tapi kalau gagal agak berat.

Peneliti : **Apa keberhasilan Pak Zul waktu menjabat sebagai Gubernur ?**

Narasumber : Beliau dikenal sebagai gubernur MoU karena membangun jambi sehingga banyak investor yang masuk.

Transkrip Wawancara (23)

- Nama Narasumber** : SS
Pekerjaan : Wartawan Tribun Jambi
Waktu : 21 November 2011
Tempat : Jambi
- Peneliti : **Bagaimana penilaian mas terhadap jalannya otonomi daerah dan desentralisasi di Jambi ? apakah berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat ?**
- Narasumber : Di Jambi aktor politik pasca orba masih aktor-aktor lama. Kekuasaan masih ditangan beberapa orang saja dan masih aktor yang dulu berkuasa di jaman orde baru. Semua masih aktor lama. Mulai dari gubernur sampai bupati. Mereka lebih punya segalanya ketimbang aktor baru.
- Peneliti : **Bagaimana mas menilai kekuasaan Zulkifli Nurdin ?**
- Narasumber : Zulkifli Nurdin memimpin dua periode tidak ada perkembangan yang berarti. Hancurnya infrastruktur terutama jalan. Kalau bicara ekonomi penting untuk melihat infrastruktur. Tidak mungkin ekonomi maju kalau infrastruktur hancur. Delapan puluh persen jalan di propinsi rusak, baik rusak ringan, rusak sedang hingga rusak berat.
- Peneliti : **Apa strategi yang dilakukan Zulkifli Nurdin sehingga bisa menguasai politik lokal di Jambi ?**
- Narasumber : Kelebihan utama Zulkifli Nurdin terutama adalah pencitraan. Melalui baliho dan media cetak, dia mencitrakan diri sebagai pemimpin yang bagus. Itu yang membuat dia terlihat bagus di mata masyarakat. Memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat menggunakan dana pemerintah. Citra yang nampak dia mengeluarkan uang yang banyak selama menjadi Gubernur. Dia menjaga bisnis-bisnisnya agar tidak hancur. Dia lebih mengkonsolidasikan kekuatannya apakah dengan uang atau dengan lainnya. Di lapangan terjadi money politics dan intimidasi. Modal politiknya PAN. Di DPRD juga dengan mudah merangkul dan mengkonsolidasikan dengan uang atau lain sebagainya.
- Peneliti : **Apakah Zulkifli Nurdin melakukan politik uang ?**
- Narasumber : Di lapangan terjadi, timnya melakukan politik uang.
- Peneliti : **Apa penyokong kekuatan politik Zulkifli Nurdin ?**
- Narasumber : PAN tapi tidak satu-satunya ? Zoerman Manap pimpinan legislatif. Zulkifli Nurdin pimpinan eksekutif. Saya katakan mereka telah bagi kue. Pembagiannya jelas. Sehingga hampir semua kebijakan Zulkifli Nurdin gol.
- Peneliti : **Dalam kasus waterboom dan mes pemda, ada tidak keterlibatan Zulkifli Nurdin mengingat Sekda menjadi tersangka ?**
- Narasumber : Sebagai kepala daerah harusnya dia tahu dan bertanggungjawab akan ada peristiwa seperti itu. Langsung

atau tidak langsung dia terlibat dalam kasus itu. Apalagi dengan proyek sebesar itu tidak mungkin tidak konsultasi dengan gubernur. Ratusan milyaran untuk sebuah obyek wisata itu tidak logis. Lebih baik menggaet pihak ketiga daripada menggunakan dana pemerintah.

- Peneliti : **Siapa yang menjadi oposisi kekuasaan Zulkifli Nurdin ?**
 Narasumber : Di grassroot ada penentangannya kelompok pecinta alam walhi dan petani terutama ketika programnya satu juta sawit. Oposisi elit Zulkifli Nurdin tidak ada. Menentang sesaat terus berteman lagi. Menentang sesaat terus berteman lagi. Artinya meminta bagian dirinya atas kekuasaan.
- Peneliti : **Apakah di Jambi banyak terjadi konflik tanah ?**
 Narasumber : Lima tahun belakang konflik lahan sangat banyak di Jambi. Melibatkan perselisihan masyarakat dan perusahaan. Seperti Asiatic dan WKS. Sampai periodenya selesai konflik itu masih ada. Semakin lama berdemokrasi semakin pintar masyarakat. artinya ada proses pencerdasan.
- Peneliti : **Kenapa calon yang didukung Zulkifli Nurdin kalah dalam pemilihan Gubernur tahun 2010 ?**
 Narasumber : Kegagalan-kegagalan Zulkifli Nurdin sudah semakin terakumulasi. Power Zulkifli Nurdin pun semakin berkurang. Sehingga Pilgub 2010 calon nya kalah.
- Peneliti : **Mengapa Zumi Zola bisa menang dalam pemilihan Bupati di Tanjung Jabung Timur ?**
 Narasumber : Kontribusi sang ayah besar terhadap kemenangan sang anak. Apalagi di kampungnya sendiri. Zulkifli Nurdin mendorong Zumi Zola agar bisa tetap meraja di Jambi. Saya yakin 2015 Zulkifli Nurdin akan mencoba membangun kerajaan lagi.
- Peneliti : **Apakah Zulkifli Nurdin tergolong orang kuat di Jambi ?**
 Narasumber : Zulkifli Nurdin, dia sangat kuat sehingga saking kuatnya tidak mudah mengalahkan figur-figur yang dia dukung. Ketika dia membuat pernyataan dukungan masih banyak yang akan mendengarkan walaupun sudah tidak menjabat lagi.
- Peneliti : **Apakah Zulkifli Nurdin masih punya ambisi politik di Jambi ?**
 Narasumber : Dia masih punya ambisi memperbesar kerajaannya di Jambi. Prediksi saya tahun 2015, dia menggadang-gadang anaknya yang bupati untuk menjadi gubernur. Ini terlihat ketika Zumi Zola membuat publikasi yang besar ketika menjabat bupati. Zulkifli Nurdin bukan orang baru di jambi, dia orang lama. Dia mewarisi dari orangtuanya. Nama besar orangtuanya sangat berperan. Banyak yang dibantu Zulkifli Nurdin ketika berkuasa sepuluh tahun tidak akan melupakan jasa-jasanya
- Peneliti : **Apakah Zulkifli Nurdin menggunakan kelompok kekerasan untuk kepentingannya ?**
 Narasumber : Jelas ada sebuah OKP yang dulu ditunggangnya untuk melakukan intimidasi terhadap sejumlah orang yang kuat

- menentang dia. OKP nasional besar. Pemuda Pancasila. Tidak terlalu kuat. Tapi anggotanya kuat mengintimidasi. Ketika mereka bergerak tidak dapat disepelekan. Saya pernah melihat langsung mereka mengintimidasi aktivis mahasiswa yang kerap demo menentang kebijakan Zulkifli Nurdin. Zulkifli Nurdin juga menggunakan jasa seperti itu.
- Peneliti : **Apakah media kritis atau tidak terhadap kekuasaan Zulkifli Nurdin ?**
- Narasumber : Media dikontrol tidak berani melawan kekuasaan. Koran lokal banyak mendapatkan income dari APBD. Sudah menjadi rahasia umum dikalangan pers. Kalau berani melawan tidak akan diberi iklan lagi. Tidak ada gunanya bagi wartawan mengkritisi Zulkifli Nurdin toh beritanya tidak akan naik.
- Peneliti : **Bagaimana pandangan mas tentang pembangunan jembatan megaproyek Batanghari 2 ?**
- Narasumber : Batanghari 2 jangka waktu pengerjaan nya sudah molor beberapa kali. Anggaran berubah semakin besar. Dari perencanaan saja sudah tidak matang. Dia lebih bagaimana jembatan ini harus ada.
- Peneliti : **Bagaimana netralitas PNS di Jambi ?**
- Narasumber : PNS tidak netral dibawah kekuasaan Zulkifli Nurdin. Loyalitasnya pejabat yang terpenting bagi Zulkifli Nurdin.
- Peneliti : **Bagaimana peluang Zumi Zola menjadi Gubernur Jambi tahun 2015 ?**
- Narasumber : HBA tidak mengantisipasi peningkatan popularitas sang anak. HBA akan tersaingi. Masyarakat selalu menantikan kehadiran Zumi Zola. Artinya ada ketertarikan masyarakat. Zumi Zola adalah kompetitor potensial yang muncul secara dini bagi HBA. Membawa nama Zulkifli Nurdin dalam pemilihan sangat menjual. Popularitas jaringan dan uang.

Transkrip Wawancara (24)

- Nama Narasumber** : S
Pekerjaan : Mantan Kepala Biro di Setda Provinsi Jambi
Waktu : 2 Desember 2011
Tempat : Jambi
- Peneliti : **Kenapa Ratu Munawaroh berhasil menjadi anggota DPR RI ?**
 Narasumber : Ratu Munawaroh jadi Caleg PAN, jadi anggota DPR RI untuk membantu. Begitu maju langsung diganti. Untuk mendulang suara. Ibu Ratu memang didorong oleh pusat. Ibu Ratu menyetujui karena tujuan awalnya untuk mendulang suara. Murni mendulang suara. Demi kepentingan partai dia lakukan. Makanya tidak pernah masuk. PAN terdompleng suaranya.
- Peneliti : **Bahkan Ratu Munawaroh bisa mengalahkan HBA ?**
 Narasumber : Survei yang bisa mengalahkan HBA, Ibu Ratu. Ada konflik itu Hazrin dengan kakaknya. Yang serius maju Hazrin Nurdin tapi ditentang oleh kakaknya Jangan maju zrin jangan maju kamu kalah. Malu saya dan keluarga. Dia sudah ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok, bikin acara domino hadiahnya motor, spanduk segala macam. Semua habis terkuras untuk berebut siapa kandidat, Abdullah Hich, Madjid Muaz. Dua kali demokrat survei yang bisa mengalahkan HBA hanya Ibu Ratu. Yang lain tidak ada.
- Peneliti : **Bagaimana PNS di Jambi ?**
 Narasumber : Saya paham betul. Sebagus-bagusnya program yang penting yang menjalankan. Mentalnya paham betul. Murni orientasinya proyek.
- Peneliti : **Waktu Pilgub 2010, Pak Zul tidak *all out* ya dukung MM-Hich (Madjid Muaz-Abdullah Hich) ?**
 Narasumber : Sulit sebetulnya itu untuk *all out*. Ya kampanye, kampanye. Karena dia sendiri tahu persis petanya. Tahu hasil akhirnya. Yang bisa *nyaingi* HBA, istrinya. Dia betul-betul mau istirahat. *Ngurusi* bisnis di Jakarta. Saya sendiri saja sulit ketemu. Kegiatan sosial tidak masalah. Masih mantau. Masih *update* politik lokal Jambi. Dia paham betul peta politik Jambi. Momen tertentu datang ke Jambi. Kemarin waktu mau ulang tahun Tanjabtim mau datang. Tiba-tiba batal. Waktu pemilihan PAN, Zumi menang, dia hadir. Momen tertentu saja. Dia pernah datang ke sini untuk memperkenalkan saya dengan Bupati dan Wakil Bupati. Pak Zul yang memperkenalkan saya dengan pak Bupati. Saya ada tugas khusus untuk *ngawal* ini.
- Peneliti : **Banyak Masalah di Tanjung Jabung Timur ?**
 Narasumber : Konflik-konflik pertanahan banyak. Luar biasa. Hampir tiap hari

- Peneliti : **Bagaimana Zumi Zola menjabat Bupati Tanjung Jabung Timur ?**
- Narasumber : Cepat belajar. Masih *didrill* pada tataran non teknis oleh pak zul. Pak zul tidak mau ada yang mendikte anaknya. Masih dikawal terus. Dia punya pengalaman. Tidak semua orang tulus. Banyak motivasinya orang di pemda.

Transkrip Wawancara (25)

Nama Narasumber : **Sufardi Nurzain, M.Si**
Pekerjaan : **Pengusaha/Sekretaris DPD Golkar Provinsi Jambi/Mantan Aktivistis Mahasiswa PMII**
Waktu : **23 November 2011**
Tempat : **Jambi**

Peneliti : **Bagaimana pandangan abang tentang perjalanan desentralisasi di Jambi, apakah memberikan dampak positif bagi masyarakat di Jambi ?**

Narasumber : Tingkat kesejahteraan masyarakat jambi lebih banyak ditentukan oleh pergerakan ekonomi di tingkat internasional. Jambi kan provinsi agro yang tergantung dengan sawit, karet dan pertanian. Kalau harga sawit naik maka kesejahteraan rakyat akan naik. Begitu juga dengan harga karet. Di jaman pak Zulkifli Nurdin dulu kan inflasi juga tinggi. Diatas 10 %. Itulah yang mejadi persoalan waktu itu. Untungnya waktu itu kita tertolong harga sawit dan harga karet. Zaman pak zul jalan-jalan lumayan parah kan ketka jaman pak hba perhatian lebih ke infrastruktur jadi lebih terasalah.

Peneliti : **Ada ketidakefektifan Zulkifli Nurdin dalam pembangunan infrastruktur ?**

Narasumber : Ini mungkin skala prioritas ya. Mungkin dana yang tidak cukup. Pasca reformasi kita gagap oleh otonomi daerah. Kekuasaan sepenuhnya oleh pemerintah lokal. Sehingga kontrol pusat belum. KPK kan baru-baru saja pengawasan yang ketat.

Peneliti : **Bagaimana kepemimpinan Zulkifli Nurdin dua periode di Jambi ?**

Narasumber : Pemerintahan Zulkifli Nurdin biasa-biasa saja tidak ada yang istimewa. Secara substansial tidak ada warisan yang ditinggalkan. Paling tidak dia menjadi jembatan dari orde baru ke reformasi. Dia mengantarkan jambi lebih stabil aja. Saudara bisa cek sendiri apa sih monumennya.

Peneliti : **Mengapa Zulkifli Nurdin begitu kuat waktu itu ?**

Narasumber : Sepuluh tahun yang lalu dia kuat. Dia politisi yang didukung keluarga yang di masyarakat jambi kuat ya. punya *resources* sosial yang bagus, *resources* ekonomi yang bagus. Pada zaman itu psikologi masyarakat masih reformasi, masyarakat masih punya penilaian emosional pada reformasi. Pak Hasip dilabel orang lama dengan label birokrasinya. Zulkifli Nurdin dianggap orang baru yang masih *fresh*. Berasal dari keluarga yang bukan sembarang kan kalo di jambi kan. Dari orang melayu mereka terkaya. Pak Zulkifli Nurdin seorang komunikator politik yang baik. Dengan pesona pencitraan dan birokrasinya dia mampu mencitrakan dirinya ditengah masyarakat.

- Peneliti : **Apakah PNS netral dibawah kepemimpinan Zulkifli Nurdin ?**
- Narasumber : Kelemahan dari sistem pilkada saya kasihan juga. Hampir semua PNS terlibat. Siapa atasannya bawahannya banyak yang terlibat. Secara naluriah PNS berpolitik entah karena jabatan atau takut.
- Peneliti : **Bagaimana sikap Golkar terhadap kepemimpinan Zulkifli Nurdin ?**
- Narasumber : Zulkifli Nurdin kan kita dukung bersama-sama. Kita sama-sama berkoalisi. Kita komitmen, Kita dukung 2005 sampai 2010. Ketika 2010 kan dinamikanya berbeda. Kita lihat elektabilitas, popularitas, kapasitas, emosional kita pilih Pak HBA.
- Peneliti : **Mengapa Zumi Zola bisa menang dalam pilkada Tanjung Jabung Timur ?**
- Narasumber : Pilkada kan ada beberapa faktor yang menentukan. Pertama kekuatan finansial sangat menentukan. Logistik kedua taktik dan strategi. Yang ketiga kekuatan tim yang mendukung kandidat tersebut. Keempat parpol. Kelima kekuatan personal dari kandidat tersebut. Zumi menang karena dia anak Zulkifli Nurdin. Zulkifli Nurdin tokoh yang disegani disana. Zumi Zola juga artis. Pilkada selalu berbicara tentang kekuatan finansial logistik. Juber waktu itu lemah di faktor finansial. Orangnya lurus sederhana. Katakanlah tidak punya uang.
- Peneliti : **Bagaimana kondisi Golkar setelah Hazrin Nurdin pindah ke PAN ?**
- Narasumber : Tidak ada masalah bagi Golkar, Hazrin Nurdin pindah ke PAN. Golkar penuh dengan kader-kader potensial. Partai Golkar, partai lama, punya SDM yang baik. Tidak ada signifikansi keluarnya Hazrin.
- Peneliti : **Apakah Zulkifli Nurdin tetap berpengaruh meski sudah tidak menjadi Gubernur lagi ?**
- Narasumber : Pak zul mengakhiri jabatannya dengan *chusnul khotimah*. Tidak sedikit juga yang masih mencintai beliau. Beliau tetap menjadi tokoh jambi yang cukup berpengaruh.

Transkrip Wawancara (26)

Nama Narasumber : Syahidan Al Fajri
Pekerjaan : Pengusaha/Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Muaro Jambi/Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi
Waktu : 24 November 2011
Tempat : Jambi

Peneliti : **Apakah desentralisasi dan pilkada langsung memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat ?**

Narasumber : Cost politik yang besar dalam pilkada memungkinkan *money politics*. Walaupun dengan cara pemilihan DPRD juga terjadi *money politics*. Dijamin melalui pilkada dana yang dikeluarkan lebih besar. Hampir dapat dipastikan tidak dilaporkan secara transparan dan akuntabel kepada penyelenggara pemilukada. Begini tentunya dengan pilkada *cost* politik atau tendensi untuk *money politics* cukup besar. Sangat memungkinkan bahwa setiap kepala daerah yang mengeluarkan dana besar mengembalikan dana besar tersebut. Ya tentunya mengarah kepada hal-hal yang kiranya menggunakan jabatannya untuk kepentingan sendiri, banyak korupsi. Tapi Dampak pemilukada ada kooptasi diantara masyarakat. *Antaro* sanak famili *idak beteguran* gara-gara pemilukada.

Peneliti : **Bagaimana anda menilai kepemimpinan Zulkifli Nurdin ?**

Narasumber : Mungkin karena latar belakang pengusaha itu kan. Birokrasinya kurang baik. Karena dia ini kan anak raja gitu kan. Egosentrisnya cukup tinggi, dominan. Siapa yang menyenangkan beliau akan mendapatkan posisi. Pembangunan lebih menitikberatkan kepada sabak. Hegemoni PAN ini tidak langsung tergerus. Wakil ketua dprd provinsi dari PAN. Fenomena tersebut tidak terlepas dari demokrat sendiri. PAN besar tidak dapat kita pungkiri karena Zulkifli Nurdinnya. PAN tidak dapat terlepas dari popularitas Pak Zul sendiri. Semakin ke ujung performanya semakin memudar. Sebenarnya sangat mudah melihat pengaruh Zulkifli Nurdin bagi perkembangan PAN di Jambi. Ketika Zulkifli Nuridn membesar popularitasnya maka PAN akan ikut membesar popularitasnya. Ketika Zulkifli Nurdin mulai mengecil popularitasnya maka PAN akan ikut mengecil popularitasnya.

Peneliti : **Bagaimana anda memanfaatkan nama besar ayah anda ?**

Narasumber : Tanpa disadari kekuatan paternalistik itu berpengaruh. Modal awal, itu kekuatan. Ada kemudahan dari nama besar keluarga. Ada investasi sosial yang dilakukan orang tua yang kita tidak tahu.

- Peneliti : **Apa harapan anda sebagai Ketua DPRD, apa yang akan anda lakukan ?**
- Narasumber : Ada pemerataan, ada rekonsiliasi diantara sanak famili yang dak beteguran gara-gara pilkada. Masyarakat Muaro Jambi dapat ada penyatuan. Ada pemerataan pembangunan.
- Peneliti : **Bagaimana hubungan anda dengan bupati ?**
- Narasumber : Tidak pernah erat. Secara kedinasan biarpun ada kesan masa lalu. Saya tidak pernah anggap begitu. Tidak ada *political enemy*.
- Peneliti : **Bagaimana perkembangan LSM di Jambi ?**
- Narasumber : Tapi sekarang LSM sudah banyak beralih ke kontraktor semua itu. Masyarakat lebih mudah terkooptasi melalui desentralisasi.

Transkrip Wawancara (27)

Nama Narasumber : Willy Azzan
Pekerjaan : Aktivist Petani/Mantan Aktivist 98
Waktu : 25 November 2011
Tempat : Jambi

Peneliti : **Bagaimana dengan kondisi petani di Jambi selama desentralisasi ?**

Narasumber : Kalau sekarang petani sudah mulai intensiflah. Petani jambi semakin intensif melakukan gerakan karena semakin kesini makin tinggi. Banyak tekanan-tekanannya. Masyarakat ini kan kalau disakiti baru melawan. Pengorganisasian tanpa ada konflik kurang begitu berguna. Ketika konflik terjadi mereka akan konsolidasi. Nah ketika konsolidasi ini mereka membutuhkan orang-orang untuk pencerahan. Pola penyadaran dalam konteks pengorganisasian. Jadi tidak mengena kalau tidak ada konflik. Di Jambi paling masif konflik agraria adalah HTI dan perkebunan.

Peneliti : **Aktor yang dominan siapa bang ?**

Narasumber : Masyarakat langsung, kalau sudah terkonsolidasi baru muncul organisasi petani. Organisasi tani yang aktif di Jambi ada Persatuan Petani Jambi, Serikat Petani Indonesia, Aliansi Gerakan Reforma Agraria dan Serikat Tani Nasional. Ditambah organisasi tani lokal. Itu yang nampak. Seperti PPJ punya kelompok tani dibawah. PPJ kan memang terakhir itu berhadapan dengan korporasi besar. PPJ berhadapan dengan Sinar Mas Group khususnya Hutan Tanaman Industri yang sudah ekspansi di lima kabupaten. PPJ memang menjadi ikon ketika terjadi konflik perusahaan HTI dengan masyarakat jambi. Basisnya mengikuti konflik HTI di tanjab barat, tanjab timur, muaro jambi, batanghari dan tebo. Konflik pertama dan terbesar di tanjab barat sehingga basis PPJ terbesar pun dari sana. 17 Maret 2008 aksi terbesar itu merupakan aksi akumulatif. Tuntutan masyarakat agar perusahaan mengabulkan tuntutan mereka. Kalau ada tanah yang tergusur mereka kembalikan. Dan tidak mengulangi penggusuran-penggusuran. Pemprov berjanji akan mengembalikan lahan petani di 5 kabupaten. Dinyatakan langsung oleh Gubernur. 41.000 hektar di dalam konsesi WKS dan 41.000 hektar di luar konsesi WKS. Menjadi semrawut karena lahan yang warga menuntut adalah lahan yang mereka kelola. Lahan yang mereka garap. Tapi yang ditawarkan pemerintah adalah relokasi lahan pengganti. Akhirnya gantung juga sampai hari ini. Sebenarnya mengada-ada karena hampir tidak ada areal seluas 41.000 hektar di Provinsi Jambi ini. Karena ada 16.000 massa yang mengepung, jadi itu merupakan peredam yang baik. Memang Irmansyah yang militan membangun gerakan

petani dari awal. Dia pendiri PPJ dan dia juga tokoh di Konsorsium Pembaruan Agraria. Ketika solusinya HTR kan jadi serba susah. Mereka ketemu dalam konteks HTR. HTR jadi jalan tengah. Setelah terjadi relokasi itu terjadi kasak kusuk internal lah. Kebetulan masa jabatan Irmansyah ini kan tamat. Ditingkat internal bermasalah mengenai HTR ini. Ketimbang perang tak berujung kompromi HTR jalan terbaik. Nah ketika PPJ mengira lokasi lahan itu A rupanya pemerintah memberikan lahan itu di Z. Saya orang sarolangun saya harus siap ke Tebo. Dan ternyata lahan yang diberikan banyak rawa. Masyarakat sudah kecewa dengan Irmansyah. Sehingga mencari pengganti yang baru. Aidil ini baru masuk pasca 2008. Dia tidak ikut proses awal membangun PPJ. Aidil ini punya LSM dan bekerja sebagai perangkat desa. Aku rasa susah untuk optimal. Orang seperti Aidil ini jarang di basis. Lebih ke politik. Di basis dipegang ketua kelompok tani. Di Senyerang perlawanan semakin radikal justru pasca tewasnya seorang anggota PPJ. Selain walhi dan warsi. Bahkan green peace ikut hadir di senyerang. Dulu jalan sendiri-sendiri lingkungan hidup dan petani. Mereka terus berimprovisasi karena melawan SMG tidak bisa dilakukan dibawah saja. Pemprov cenderung membela korporasi.

- Peneliti : **Sinar Mas Group kuat ya di Jambi ?**
 Narasumber : Lobbyis SMG adalah dinas kehutanan. Kajian yang mengkritik SMG baru dilakukan pahrin dan rivani. Pahrin jadi antek SMG sekarang. Melalui LBH Keadilan. SMG menguasai Jambi dari HTI perkebunan hingga pertambangan. Hampir tidak ada yang bisa menandingi mereka.
- Peneliti : **Gerakan buruh lemah di Jambi ?**
 Narasumber : Buruh tidak berkembang karena Jambi industrinya belum menyerap banyak tenaga kerja. Sebagian besar buruh jambi di perusahaan kayu. Banyak yang ditutup sehingga berubah. Otoda hanya menghasilkan raja-raja kecil di daerah. Bagiku memang tujuan awal baik tetap elit yang menguasai.

Transkrip Wawancara (28)

Nama Narasumber : Yasir Arafat, SE
Pekerjaan : Ketua KPU Provinsi Jambi
Waktu : 24 November 2011
Tempat : Jambi

Peneliti : **Bagaimana pandangan abang tentang desentralisasi dan pilkada langsung apakah memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat di Jambi ?**

Narasumber : Dalam pandangan saya, ketika dipilih anggota DPRD tentu pelibatan masyarakat tidak terjadi atau berlangsung. Hanya melibatkan empat puluh lima orang kalau untuk Provinsi Jambi. Kalau dibandingkan saat pemilihan langsung tentu pelibatan masyarakat sudah sangat luas. Secara massif. Masyarakat terlibat. Kalau kita lihat suasana dipenuhi dengan kampanye maka kampanye ini biasanya banyak memproduksi atribut. Atribut baju, spanduk. Ini memberi dampak bagi pengusaha sablon, percetakan, dan lain sebagainya. Kemudian juga masyarakat yang paling bawah yang tidak dikelompokkan pengusaha biasanya dalam kampanye ada pengerahan massa dan sebagainya. Dan diberi uang biasanya untuk transport. Ini semacam ada pendapatan musimanlah. Apalagi kalau dikaitkan dengan isu-isu politik uang dan lain sebagainya. Walaupun kita tidak bisa membuktikan secara kasat mata tetapi hal hal seperti itu sering dibicarakan.

Peneliti : **Bagaimana dengan sirkulasi elitnya ?**

Narasumber : Kalau kita lihat dalam konteks pemilihan langsung sekarang. Sirkulasi elit ini lebih nyata. Nampak. Pertukaran-pertukaran ini lebih nampak. Kemunculan seorang pemimpin sulit untuk direkayasa. Bahkan yang tidak diduga muncul bisa muncul. Tidak banyak yang bisa menjadi kekuatan yang absolut. Artinya tidak bisa kekuatan politik itu-itu saja terus. Ataupun tokohnya itu saja. Ini bisa berganti cepat.

Peneliti : **Apa yang berubah dari konfigurasi politik di Jambi selama desentralisasi ?**

Narasumber : Satu hal yang nyata itu terjadi perubahan politik dari hasil pemilu. Dari pemilu 2009 ke 2004 ke belakang lagi 1999. Pada saat 2009 ke 1999 terjadi kekuatan parlemen. Pada saat 1999, PDI P cukup dominan. Pada 2004 PDI P yang menurun, PAN yang dominan. Pemilu 2009 bukan PAN lagi tapi Demokrat.

Peneliti : **Apa maknanya bagi abang ?**

Narasumber : Memberi ruang bagi yang punya kompetensi untuk muncul menjadi tokoh formal yang duduk di jabatan seperti wakil rakyat di DPRD. Ruang itu terbuka. Tidak lagi melihat batasan usia tua muda. Kalau dulu kan dinamikanya ada

- senior yunior. Jarang tampil pemimpin-pemimpin muda. Karena sudah ada yang mengatur sirkulasi sedemikian rupa. Yang tua maju dulu, yang muda tahan dulu. Itu yang terjadi. Siapa yang punya potensi mampu memanfaatkan potensi. Sepanjang dia punya kemampuan.
- Peneliti : **Apakah pemilukada diwarnai dengan intimidasi dan politik uang ?**
- Narasumber : Fakta di lapangan sering kita dengar cerita tentang money politics tapi ketika ingin membuktikan dengan menegakkan aturan segala macam, penyelenggara pemilu sulit mengangkatnya sebagai suatu fakta. Terutama dari kalangan pengawas pemilu. Pengakuan langsung dari masyarakat kalau dijadikan saksi. Tidak kita temukan. Tapi di cerita mereka ada. Ketika kita bicara hukum ketika tidak ada fakta. Itu kendalanya
- Peneliti : **Bagaimana abang menilai kepemimpinan Zulkifli Nurdin di Jambi selama dua periode ?**
- Narasumber : Memang dia ini orang yang cukup dekat dengan masyarakat. Saking dekatnya kalau masyarakat melihat dia (Zulkifli Nurdin) datang masyarakat cukup antusias. Sebagai gubernur dia cukup dikenal dan dekat dengan masyarakat. Cukup dermawan. Begitu kedermawan ini yang cukup dikenal. Kemana dia turun ke daerah-daerah, ada orang yang patut dia sumbangkan dananya, dia sumbangkan. Dalam bentuk apapun apakah uang barang dan sebagainya. Inilah yang dikenal dan sulit dilupakan masyarakat. Beliau ini ikon Jambi. Ingat beliau ingat Jambi.
- Peneliti : **Mengapa Zulkifli Nurdin menjadi sosok yang sangat kuat di Jambi ?**
- Narasumber : Zulkifli Nurdin ini kalau kita lihat secara utuh. Dikenal dekat masyarakat. Kedermawanan yang diingat. Dia ini terlahir dari seorang ayah yang sudah sangat terkenal di jambi ini sebagai pengusaha sukses dan tentu juga dermawan. Itu juga diingat oleh seluruh masyarakat jambi, khususnya di kota jambi. Setiap tahun ada yang menerima paket setiap tahun ketika lebaran. Ketokohnya dia juga berasal dari ayahnya dan keluarganya. Kekuatan dia lengkap. Dari keluarga, dari dia sendiri dan bahkan dari anaknya yang jadi Bupati. Keponakan juga jadi pemimpin. Membuat orang susah lupa. Pengaruh masih kuat walau sudah tidak berkuasa.
- Peneliti : **Bagaimana dengan Zoerman Manap ?**
- Narasumber : Zoerman Manap ini juga tidak bisa dilepaskan dari kebesaran nama orangtuanya. Orangtuanya kan mantan Gubernur Jambi Pak Abdul Manap. Ketika dia muncul di wilayah politik kebesaran nama orangtuanya juga cukup menopang. Menopang keberhasilan dia untuk berpolitik. Dia punya *branded* lah. Jadi semacam dia bermerek lah dibandingkan orang-orang partai yang berasal dari keluarga biasa-biasa

- saja. Jadi dia disegani, dihormati. Zoerman Manap usianya sudah diatas rata-rata tapi bisa *survive* jadi Ketua DPD Golkar.
- Peneliti : **Bagaimana perbandingan kekuatan Zulkifli Nurdin dibandingkan dengan Zoerman Manap ?**
- Narasumber : Berhitung dengan angka-angka dan ruang. Di Jambi ini masih berlaku ikatan-ikatan emosional. Primordialisme kedaerahan. Biasanya itu yang kental. Biasanya siapa orangtuanya. Siapa dia, dari latar belakang apa dia. Politik lokal itu biasanya. Seandainya Pak Zul dari *ilir* kalau kata orang. Pak Zoerman dari *mudik* kata orang. Kalau kita hitung basis. Masing-masing punya pendukung loyal dan pendukung fanatik. Pak Zoerman punya keluarga besar di mudik sana di Sarolangun. Keluarga Nurdin Hamzah mempunyai basis yang kuat dengan pendukung-pendukung fanatik di Tanjung Jabung Timur. Abdullah Hich yang menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur dua periode masih merupakan kerabat Keluarga Nurdin Hamzah.
- Peneliti : **Artinya dua keluarga ini tetap potensial di 2015 ?**
- Narasumber : Ya, tidak akan keluar dari pertarungan ini tadi komunitas dinasti juga. Tidak bisa dilepaskan pengaruh politik tokoh-tokoh ini.
- Peneliti : **Bagaimana peluang muncul tokoh muda di Jambi di luar dinasti ?**
- Narasumber : Tokoh muda ini punya keterbatasan terutama dalam penguasaan aset finansial. Ya penguasaan kapital, modal lah. Karena modal sangat signifikan. Karena kalau tidak punya uang akan sulit memobilisasi, *manage* partai. Operasional. Apalagi dikaitkan dengan pencalonan pemilukada. Mungkin tapi tidak realistis. Kalau menggarap partai, partainya harus dibiayai. Semua butuh uang. Kelompok muda keterbatasan itu. Di luar dinasti-dinasti itu punya keterbatasan aset finansial ya. Penguasaan kapital lah. Kapital sangat-sangat berpengaruh. Kita bicara riil. Ketika memimpin partai kalau kita tidak punya uang agak sulit memobilisasi. Apalagi kalau dikaitkan dengan pemilukada, tidak realistis kalau tidak punya uang. Mungkin tapi tidak realistis.
- Peneliti : **Bagaimana peluang Zumi Zola menjadi pemimpin Jambi ke depan ?**
- Narasumber : Zumi dilahirkan dalam lingkup keluarga yang besar. Dari segi materi dia sudah kaya. Dari sisi jaringan dia sudah sangat luas didukung jaringan ayahnya kakeknya. Jadi dia beda. Bukan karena mudanya. Potensinya dia populer, dia aktor, dia bintang film.
- Peneliti : **Bagaimana netralitas PNS dalam pemilukada ?**
- Narasumber : Kalau secara terang-terangan tidak berani berpihak. Dengan baju pegawai negeri. Ada PNS diam terlibat mendukung

mensukseskan. Apalagi kalau kandidat *incumbent*. Rata-rata pejabat terlibat.